

Johannes Latuharhary, SH.

Hasil Karya dan Pengabdianya

Oleh :

I.O. NANULAITTA



torat
aan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL

1982/1983

MILIK DEP. P DAN K
TIDAK DIPERDAGANGKAN

MR. JOHANES LATUHARHARY

Hasil Karya Dan Pengabdianya

Oleh :

I.O. NANULAITTA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
1982/1983

Penyunting :

1. Sutrisno Kutoyo
2. Drs. M. Soenyata Kartadarmadja

Gambar kulit oleh ;
Idham Palada

SAMBUTAN

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerja sama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam Proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang mendatang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk senantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Juni 1982

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Haryati Soebadio
NIP. 130119123.

KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional merupakan salah satu proyek dalam lingkungan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang antara lain mengerjakan penulisan biografi Tokoh yang telah berjasa dalam masyarakat.

Adapun pengertian Tokoh dalam naskah ini ialah seseorang yang telah berjasa atau berprestasi di dalam meningkatkan dan mengembangkan pendidikan, pengabdian, ilmu pengetahuan, keolahragaan dan seni budaya nasional di Indonesia.

Dasar pemikiran penulisan biografi Tokoh ini ialah, bahwa arah pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan nasional tidak hanya mengejar kemajuan lahir, melainkan juga mengejar kepuasan batin, dengan membina keselarasan dan keseimbangan antara keduanya.

Tujuan penulisan ini khususnya juga untuk merangsang dan membina pembangunan nasional budaya yang bertujuan menimbulkan perubahan yang membina serta meningkatkan mutu kehidupan yang bernilai tinggi berdasarkan Pancasila, dan membina serta memperkuat rasa harga diri, kebanggaan nasional dan kepribadian bangsa.

Jakarta, Juni 1982

**PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
SEJARAH NASIONAL**

DAFTAR ISI

Halaman

KATA SAMBUTAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

PRA KATA

BAB I	JOHANNES PUTERA LEASE	1
	a. Guru Jan Latuharhary	2
	b. Masa Sekolah	3
BAB II	DARI BATAVIA KE LEIDEN	9
	a. Murid KW III	9
	b. Peranan Ambonsch Studiefonds	12
	c. Masa Studi di Negeri Belanda	18
BAB III	ORANG-ORANG AMBON BERPOLITIK	23
	a. Berbagai Organisasi	23
	b. Sarekat Ambon Unsur Pegerakan Nasional	29
BAB IV	MR. J. LATUHARHARY DALAM PERGERAKAN NASIONAL	47
	a. Penerus Perjuangan SA Menuju Kemerdekaan Bangsa	47
	b. Suatu Pilihan yang Menentukan	67
	c. Advokat Muda Pembela Rakyat Jawa-Timur.	78

BAB V	PERJUANGANNYA SEMASA PENDUDUKAN JEPANG	89
	a. Tiga Kali dalam Penjara	89
	b. Kegiatan Latuharhary dalam Menyelamatkan Orang-orang Maluku	99
	c. Latuharhary dan Janji Kemerdekaan.	105
BAB VI	LATUHARHARY DAN PROKLAMASI KEMERDEKAAN	117
	a. Wakil Maluku dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan	117
	b. Mendampingi Sukarno - Hatta memproklamasikan kemerdekaan	125
	c. Peranan pada Permulaan Pemerintahan RI	130
BAB VII	MR. J. LATUHARHARY PEMIMPIN MASYARAKAT MALUKU DALAM REVOLUSI FISIK	133
	a. Pemerintahan Propinsi Maluku dalam Perjuangan	133
	b. Dari API-AMBON ke Pemuda Indonesia Maluku (PIM)	141
	c. Lasykar-lasykar Maluku	161
	d. Latuharhary dalam Pergolakan Politik.	168
BAB VIII	GUBERNUR MALUKU YANG PERTAMA	179

Halaman

a. Pergolakan di Maluku sampai Tahun 1950	179
b. Menyusun Pemerintahan	188
c. Membangun Masyarakat Maluku	195
d. Membina Bidang Politik	205
e. Meninggalkan Maluku	212

BAB IX	JOHANNES LATUHARHARY SE-	
	BAGAI SUAMI DAN AYAH	215
	a. Antara Cinta dan Tanggung-jawab	215
	b. Selamat Tinggal Anak-isteriku dan Bangsa.	220

P R A K A T A

Penulisan biografi tokoh nasional Mr. Johannes Latuharhary tidak bisa lain daripada menempatkan tokoh ini di dalam iklim perjuangan Bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945, kemudian mengisi kemerdekaan itu dalam wadah persatuan dan kesatuan nasional.

Bahwa perkembangan sejarah perjuangan tokoh ini mempunyai kaitan erat dengan emansipasi politik bangsa Indonesia, khususnya dengan emansipasi politik suku bangsa Maluku, adalah sesuatu yang timbul sebagai jawaban atas politik etis yang dijalankan oleh Belanda di kawasan Nusantara pada permulaan abad ke-20 dan atas desakan situasi politik di Asia pada waktu itu.

Oleh karena itu dengan sendirinya dalam tulisan ini ditonjolkan pula organisasi-organisasi orang-orang Maluku yang timbul akibat kesempatan pendidikan yang diperoleh mereka dalam masa politik etis tersebut. Mereka ini menghendaki adanya perubahan soal-soal kemasyarakatan agar supaya rakyat daerah asalnya bisa berkembang ke arah pencapaian suatu kehidupan politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan yang lebih baik daripada apa yang generasi lampau dan generasi mereka alami.

Bahwa ada dua aliran utama yang meliputi gerakan mereka, dicerminkan dalam organisasi Sarekat Ambon (SA), yang menghendaki kemerdekaan bagi rakyat Maluku dalam kontes perjuangan nasional untuk mencapai kemerdekaan seluruh bangsa Indonesia dan dalam *Moluksch Politiek Verbond* cq. lain-lain organisasi kecil yang menghendaki rakyat Maluku hidup dalam ikatan dengan Negeri Belanda.

Sejarah perjuangan SA mendapat porsi pembahasan yang cukup luas oleh karena Mr. J. Latuharhary sebagai

penerus cita-cita perjuangan Alexander Jacob Patty, pendiri SA, memainkan peranan yang menentukan bagi kemerdekaan rakyat dan daerah Maluku, lepas dari ikatan dengan Negeri Belanda melalui SA ini. SA-lah yang mengembus nafas politik ke dalam masyarakat Maluku dan Latuharhary-lah memegang kemudi bahtera menghantar rakyat Maluku ke pintu gerbang kemerdekaan.

Penempatan perjuangan SA dalam penulisan sejarah Indonesia dengan porsi yang sangat minim, mengakibatkan rakyat Indonesia pada umumnya tidak kenal akan perjuangan orang-orang Maluku untuk mencapai kemerdekaan. Porsi pembahasan yang minim itu tenggelam dalam penulisan sejarah Indonesia baik oleh penulis-penulis Indonesia maupun oleh penulis-penulis Belanda. Oleh karena itu timbul kesan dan pendapat seolah-olah rakyat Maluku absen dalam perjuangan dan setia pada Belanda, karena justru yang ditonjolkan oleh para penulis Belanda penggunaan orang-orang Maluku dalam angkatan bersenjata Hindia Belanda. Dan memang mereka ini menunjukkan kesetiaan yang karakteristik.

Dengan menempatkan Mr. J. Latuharhary dalam iklim pergerakan nasional, iklim perjuangan menuju kemerdekaan, iklim perjuangan dalam masa revolusi fisik dan iklim mengisi kemerdekaan, maka diharapkan generasi muda Indonesia bisa memperoleh gambaran betapa orang-orang Maluku pada abad ke duapuluh, berdampingan dengan suku-suku bangsa lain, berjuang untuk melepaskan diri dari rantai penjajahan, sebagaimana datuk-datuk mereka berjuang dalam masa lampau dengan mempergunakan perang sebagai alat utama. Mereka ini meneruskan perjuangan kapitan Hitu Kakiali dan Tulukabessy, Sultan Hairun dan Baab Ullah, kapitan Pattimura dan kawan-kawan, kapitan Ulupaha dan Srikandi Martha Kristina Tiahahu, dengan mempergunakan politik sebagai alat utama.

Sejarah perjuangan tokoh nasional Mr. J. Latuharhary menggugah hati sanubari kita semua, khususnya generasi muda, angkatan penerus jiwa Proklamasi 45, untuk tetap bersatu padu dalam satu saja wadah persatuan dan kesatuan RI yang memancarkan Kebhinneka Tunggal Ikaan, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Lebih-lebih lagi Mr. J. Latuharhary adalah salah satu contoh dari begitu banyak perintis dan pejuang kemerdekaan, yang memiliki sifat-sifat pengorbanan, ketabahan, ketekunan dan kesederhanaan hidup disertai patriotisme dan kesadaran nasional yang tinggi.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dirjen. Kebudayaan Dep. P dan K cq. Pemimpin Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional yang memberi kesempatan kepada penulis untuk mengetengahkan sejarah perjuangan tokoh nasional Mr. J. Latuharhary.

Kepada Ny. Yet Latuharhary penulis menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya atas pengertian dan kesediaan membantu penulis memperoleh keterangan-keterangan dan dokumentasi yang diperlukan untuk menyusun biografi tokoh nasional kita ini.

Banyak bantuan dan petunjuk diterima dari J. de Fretes, Dr. F. Pattiasina, Wim Tutupoly, Ely Lesilolo dan Moh. Padang dalam menyusun ceritera biografi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya. Kepada kawan-kawan seperjuangan lainnya yang bersedia diwawancarai dan kepada semua pihak yang membantu untuk menyelesaikan penulisan ini, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak.

Semoga biografi ini bermanfaat bagi bimbingan dan pembentukan watak generasi muda, yang akan melanjutkan perjuangan para pahlawan dan tokoh-tokoh nasional kita.

Bandung, 15 Mei 1982.

Penulis,

I.O. Nanulaitta.

BAB I

JOHANNES PUTERA LEASE

Bagaikan terapung-apung di Laut Banda, diempas riak gelombang, diembus angin sepoi-sepoi basah di waktu musim kemarau, dilanda angin timur dan selatan yang ganas di musim hujan disertai hantaman ombak dan gelombang yang menderuderu di situlah letak Ambon dan Lease, dilindungi oleh bagian barat Nusa Ina (Pulau Ibu) atau Seram. Ibarat anak-anak yang terpisah dari induknya, hidup berkelompok dalam satu rumpun, satu adat istiadat, satu pandangan hidup, demikianlah tersebar rakyat yang berasal dari pulau Seram itu ke pulau Ambon dan Uliasa atau Lease, yaitu tiga buah pulau Saparua, Haruku dan Nusa laut. Rakyat ketiga buah pulau itu dan rakyat Ambon mempunyai sejarah pergaulan antar bangsa Nusantara, Asia dan Eropa yang cukup lama. Pergaulan dalam perniagaan rempah-rempah cengkih dan pala, bercampur baur dengan perjuangan menentang kekuasaan asing untuk mempertahankan hidup bebas, telah banyak menentukan nasib rakyatnya. Ambon dan Lease sepanjang empat abad telah melahirkan dan telah banyak mengorbankan putera-puterinya untuk mempertahankan hak hidupnya menentang kolonialisme asing, yaitu Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda.

Dalam abad ke-20 Ambon dan Lease telah melahirkan pula putera-putera besar yang meneruskan perjuangan datuk-datuknya untuk melepaskan rakyat dan daerah Maluku dari cengkeraman penjajahan. Pejuang-pejuang nasional seperti Alexander Jacob Patty, dr. Kajadu, dr. Tamaela, DR. J.B. Sitanala, Mr. J. Latuharhary, Mr. Abdul Syukur, Dr. J. Leimena, Ir. Putuhena, Dr. G. Siwabessy, Abdul Mutalib Sangaji, DR. Latumeten dan masih banyak lagi, adalah putera-putera Maluku yang besar.

Ceritera yang berikut adalah ceritera mengenai salah seorang di antara mereka, yakni Johannes Latuharhary.

a. Guru Jan Latuharhary

Menjelang akhir abad ke-19. Seorang pemuda, Jan Latuharhary namanya, berasal dari negeri Haruku di pulau yang bernama, baru saja menamatkan pelajarannya di sekolah guru di Ambon. Ia telah siap untuk membaktikan diri dalam bidang pendidikan. Guru pada waktu itu adalah pembawa obor untuk menerangi jiwa-jiwa yang masih hidup dalam kegelapan dan yang tersebar di begitu banyak pulau di Maluku. Dan guru-guru semacam Jan inilah adalah pahlawan-pahlawan tanpa nama, yang berhasil memajukan rakyat Maluku setapak demi setapak.

Persekolahan dan pengajaran sudah lama berkembang di Maluku. Pada pertengahan abad ke-19 di wilayah Ambon saja terdapat 67 buah sekolah rendah; 33 di pulau Ambon, 21 di pulau Saparua, 12 di pulau Haruku dan satu di pulau Buru. Sekolah-sekolah ini sebagian besar dimiliki gereja Protestan dan yang lain milik Pemerintah. Menjelang abad ke-20 sekolah-sekolah rakyat tersebar di banyak pulau di Maluku. Untuk mendapatkan guru bagi sekolah-sekolah itu telah tersedia di kota Ambon sebuah sekolah Guru. Dalam tahun 1834 gereja Protestan membuka sebuah sekolah guru yang terkenal dengan nama Sekolah Roskott. B.N.J. Roskott, seorang penyebar Injil adalah pendiri dari sekolah itu. Ia sendiri menjadi direktornya. Inilah sekolah guru yang pertama di Indonesia yang mengikuti sistem persekolahan secara Belanda.

Murid-muridnya berasal dari keluarga raja-raja (kepala negeri), keluarga guru, atau keluarga borgor (*vrije burgers* = bekas prajurit atau pegawai VOC yang berstatus merdeka, bebas dari bermacam pajak dan kerja rodi.¹) Karena perse-

kolahan dan pengajaran berkembang serta jumlah sekolah di pulau-pulau makin bertambah, maka pemerintah menganggap perlu untuk membuka sebuah sekolah "*Kweekschool*" (sekolah guru) dalam tahun 1874. 2)

Sekolah Guru inilah yang dimasuki oleh pemuda Jan Latuharhary. Setamat dari sekolah itu Jan ditempatkan di pulau Kisar, jauh di Maluku Tenggara. Di wilayah itu juga sudah terdapat sekolah-sekolah rakyat. Jauh, terpisah dari sanak-saudara Jan bertahan beberapa tahun. Kemudian dia dipindahkan ke negeri Ouw di pulau Saparua. Berbatasan dengan negeri ini letak negeri Ulat. Di negeri ini bekerja seorang guru tua, bapak guru Hiariej namanya. Perkenalan dan pergaulatan antar guru-guru negeri Ouw dan Ulat, membawa Jan sering berkunjung ke bapak Hiariej. Dan di situlah Jan berkenalan dengan seorang gadis manis, puteri bapak Hiariej, Josefin namanya. Perkenalan menimbulkan percintaan yang berkahir dengan perkawinan kedua anak muda ini.

Dari perkawinan Jan Latuharhary dengan Josefin Hiariej, lahir seorang putera sulung, Johannes Latuharhary pada tanggal 6 Juli 1900. Kemudian menyusul adik-adiknya Willemientje, Regina dan Eduard. 3)

b. Masa sekolah

Sementara itu guru Latuharhary telah berpindah tempat kerja, yaitu ke negeri Haria, sebuah negeri yang terletak 5 km dari kota Sarua. Ia diangkat menjadi Kepala Sekolah. Di sini Johannes berkembang menjadi seorang anak yang sehat. Dan ketika sudah waktunya untuk bersekolah ia dimasukkan ayahnya ke *Saparuasche School*, sebuah sekolah kelas satu (*eerste klasse school*), yang sudah mengajarkan bahasa Belanda kepada para murid. Setiap hari Johannes harus berjalan kaki pergi pulang, Haria-Saparua. Kadangkala ia digendong oleh remaja-remaja Haria, para murid ayahnya.

Tetapi tidak lama ia bersekolah di situ. Ayahnya melihat jauh ke depan. Sebagai seorang guru ia sadar, bahwa jika puteranya hendak maju ia harus bersekolah di Ambon. Dan jalan untuk melanjutkan dan meningkatkan studinya sejauh mungkin adalah memasuki sekolah Belanda, yaitu *Europesche Lagere School* di Ambon. Sebagai seorang anak guru Johannes diberi kesempatan untuk memasuki sekolah itu. Ini suatu kesempatan yang bagus, karena sekolah itu sebenarnya disediakan hanya untuk anak-anak Belanda.

Pada umurnya yang ke sembilan, Johannes berpindah dari Saparua ke Ambon dan memasuki *Eerste Europesche Lagere School*. Di sini ia belajar sampai berumur 17 tahun (1909 – 1917).

Sesudah tahun 1850 timbul masalah bahasa Belanda di sekolah-sekolah di Indonesia. Di kota ambon ada sebuah *Europesche school* yang hanya terbuka bagi anak-anak Belanda. Dalam tahun 1853–1854 Ds. S.A. Buddingh, anggota sebuah komisi pendidikan, mengadakan perjalanan ke Maluku. Dalam laporannya ia mengusulkan supaya di kota Ambon dibuka lagi sebuah *Europesche school*. Dalam tahun 1858 sekolah yang diusulkannya itu didirikan. Dengan surat keputusan pemerintah tanggal 6 Januari 1869 sekolah ini diberi nama *Ambonsche Burgerschool* dengan tujuan memberikan kesempatan kepada anak-anak golongan borgor, kemudian diperluas dengan anak-anak golongan lain, untuk menguasai bahasa Belanda. Tetapi sekolah ini adalah sebuah sekolah khusus, karena dikepalai oleh seorang Belanda dibantu oleh guru-guru orang Ambon dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar; sedangkan murid-muridnya mendapat pendidikan gratis. Sekolah semacam ini merupakan sekolah peralihan antara *Europesche scholen* dan sekolah-sekolah bumiputera di lain-lain daerah di Jawa, misalnya di Depok dan Magelang. 4)

Eerste Europesche School dan *Ambonsche Burgerschool* yang berlangsung sampai 1942, telah memberi kesempatan kepada banyak anak Ambon untuk mendapat pengajaran secara Barat. Banyak di antara mereka melanjutkan pengajaran ke Jawa. Mereka ini merupakan kaum cendekiawan Ambon sekitar tahun 1900–1920.

Johannes tinggal (*in de kost*) pada keluarga guru Leihitu-Tisera. Pada waktu itu ada kebiasaan anak-anak semacam itu dianggap anggota keluarga. Dipergunakan istilah *anak piara* (anak yang dipelihara orang lain). Biasanya sesuatu keluarga guru, pegawai negeri atau pemuka masyarakat mempunyai beberapa anak-piara. Anak-anak ini dididik sampai mereka menamati sesuatu sekolah atau melanjutkan studinya atau bekerja. Keluarga pengampunya akan sangat bangga kalau anak-piarnya telah berhasil dan menjadi orang. Kadangkala ada anak yang diangkat atau diadopsi dengan memakai nama keluarga pengampunya.

Sebagai anak-piara mereka dididik melakukan berjenis pekerjaan rumah-tangga seperti mengangkut air, mencari dan memotong kayu api, membantu memasak, berbelanja ke pasar, mengantar saudara piaranya (anak-pengampunya) ke sekolah dan menjemputnya, membersihkan rumah dan halaman, mencuci dan menyetrika pakaian dan lain-lain.

Johannes harus pula turut bekerja. Ada kalanya pergi ke pasar, memotong kayu bakar di hutan, mekasak dan lain-lain. 5) Ada segi positif dari didikan anak-piara itu. Anak-anak itu sejak dari kecil sudah belajar bekerja. Cekatan dan trampil dalam melakukan pekerjaan kasar. Pengalaman mereka ini sangat berguna bagi masa yang akan datang. Mereka tidak canggung lagi untuk berdiri sendiri, mencuci pakaian sendiri, memasak sendiri dan lain-lain. Apalagi jika mereka dilepaskan untuk melanjutkan pelajaran ke Jawa. Di sini pengalaman mereka sebagai anak-piara sangat membantu mereka.

Johannes terhitung seorang anak pandai. 6) Ia bertekad tidak mau kalah dari murid-murid Belanda. Sekalipun bahasa Belanda merupakan hambatan yang besar, tetapi tekad Johannes tidak urung padam. Dalam tahun 1917 ia berhasil menamatkan sekolahnya dengan hasil yang memuaskan. Dunia pendidikan lanjutan sekarang terbuka baginya sekalipun biaya yang harus dipikul ayah bundanya makin berat. Apalagi adiknya sudah menjadi besar dan ada yang sudah melangkah masuk sekolah.

Sementara itu ayahnya sudah berpindah ke kota Saparua dan diangkat menjadi guru di *Saparuasche School*, yang telah berubah menjadi *Hollandsch Inlandsche School* (HIS). Adik-adiknya sudah mulai memasuki sekolah itu. HIS adalah penjelmaan Sekolah Kelas Satu, diperuntukan bagi anak-anak Indonesia, yang orang tuanya pegawai negeri, guru, kepala pemerintahan negeri (raja) dan pemuka masyarakat. Dalam perkembangannya di sekolah kelas satu itu diberikan bahasa Belanda sebagai mata pelajaran. Dalam tahun 1914 sekolah-sekolah itu ditetapkan menjadi HIS. (*Indisch Staatsblad* no. 358) dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar.7)

Bagi anak-anak desa disediakan Sekolah Kelas Dua (*tweede klassescholen*) yang lamanya 3 tahun. Dalam tahun 1907 sekolah-sekolah itu dijadikan sekolah rakyat (*volkscholen*) yang secara bertahap ditingkatkan dari 3 tahun menjadi 4 dan 5 tahun. 8)

Pada umumnya anak-anak pada waktu itu gemar berenang dan bermain bola. Pulau Ambon yang dikelilingi oleh laut menarik anak-anak, remaja dan orang dewasa turun ke laut untuk berenang, memancing atau berkayuh perahu. Bermain bola adalah suatu kegemaran di mana-mana. Bagi anak-anak, kalau tidak ada bola, sebuah jeruk atau kain gombal yang digulung bulat, jadilah! Pekarangan-pekarangan selalu menjadi

ramai oleh pemain-pemain cilik ini. Johannes pun turun ke laut berenang-renang dan bercengkerama dengan kawan-kawannya. Senang pula ia bermain bola. Kegemarannya itu dibawa-bawa sampai menjadi remaja dan dewasa.

Tahun demi tahun telah berlalu. Johannes menjadi remaja. Liburan adalah hari-hari yang berbahagia. Johannes berkesempatan pulang ke Saparua. Berada di tengah-tengah orangtua dan adik-adiknya adalah kesempatan yang menyenangkan keluarga Latuharhary. Bapak Jan dan ibu Josefin bisa menyaksikan pertumbuhan jasmaniah dan rokhaniah puteranya.

Waktu berlalu, tibalah masa perpisahan. Johannes akan melanjutkan persekolahannya di Jawa. Bagi ibu Josefin dan adik-adiknya sedih juga perpisahan dengan johannes. Tetapi ayahnya menghendaki puteranya berangkat untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi. Dengan kesadaran itu dan disertai berbagai nasehat dan petuah, Johannes dilepaskan.

Bertolaklah Johannes, dengan kelengkapan dasar pendidikan Kristen yang diperolehnya dari ayah bundanya dan dari ibu dan bapak Leihitu serta pendidikan dan pengajaran di sekolah, meninggalkan Ambon, keluar melalui pintu gerbang teluk Ambon, yaitu Tanjung Alang dan Nusaniwe menuju Batavia.

BAB II

DARI BATAVIA KE LEIDEN

a. Murid KW III

Jauh di ufuk barat, sang surya mulai menghilang di balik pegunungan Alang. Langit kemerah-merahan memberi tanda bahwa tidak lama lagi bumi akan diliputi kegelapan. Para nelayan mulai berkayuh pulang ke gubuk masing-masing. Sebagian lagi bersiap-siap dengan obor akan mencari ikan pada malam hari. Kawanan burung talang (sejenis camar) beterbangan pulang ke sarangnya. Hari makin menjadi gelap.

Kapal yang ditumpangi Johannes dan keluarga guru Leihitu, *bapak piaranya* mulai bergerak perlahan-lahan menuju ke Tanjung Alang dan Nusaniwe. Orang tua dan kaum kerabat serta para pengantar mencucurkan air mata. Berat juga perpisahan dengan anak yang meninggalkan mereka.

Amaaattttooooo!!!!!! Amaaattttooooo!!!!!! Selamat tinggal!!!!
Selamat berpisah !!!!!.

Bilamana bumi telah diliputi gelap-gulita, maka kapal menyusur keluar teluk Ambon, bertolak ke barat menuju ke Jawa. Berhari-hari terombang-ambing dihempas ombak dan gelombang akhirnya kapal itu tiba di Semarang. Keluarga Leihitu akan menetap di kota itu. 1)

Sesudah beberapa waktu berdiam di Semarang, Johannes berangkat ke Batavia. Karena kota itulah tujuan akhirnya untuk bersekolah. Di Batavia keluarga Rugebrecht membuka pintu baginya. Di sini ia berdiam selama ia bersekolah. Cita-citanya untuk melanjutkan studi di sekolah *Koning Willem III* ditunjang oleh Piet Rugebrecht, *amanuensis* (pembantu tata-usaha urusan pendidikan) KW III. Tetapi Johannes tidak bisa memasuki sekolah itu begitu saja. Ia harus mengikuti dulu pelajaran persiapan di sekolah yang disebut *School met de*

Bijbel. 2) Baru sesudah itu ia menempuh ujian memasuki sekolah KW III. Johannes lulus dan diterima.

Letak sekolah KW III ini di Salemba dan didirikan dalam tahun 1860. Mulanya sekolah ini sebuah *Gumnasium* dalam mana mata pelajaran klasik Barat seperti kesastraan Latin dan Junani merupakan ciri khas sekolah itu. Tetapi oleh karena animo dari tahun ke tahun makin menjadi sedikit, maka dalam tahun 1867 terjadi reorganisasi dan KW III diubah menjadi sekolah menengah umum yaitu HBS (*Hogere Burger School*) 5 tahun, suatu tipe sekolah umum seperti di negeri Belanda yang baru saja dikembangkan. Bagian A (klasik) dihapus dan dibuka bagian B, yaitu bagian yang akan mendidik calon-calon pegawai negeri. Bagian ini berlangsung sampai tahun 1913. Nama KW III tetap dipertahankan sampai pecah Perang Dunia II. Sekolah ini semula hanya terbuka bagi anak-anak orang Belanda dan Indo. 3) Tetapi di kemudian hari diizinkan pula anak-anak Indonesia yang orang tuanya pegawai negeri, raja, bangsawan atau orang terkemuka, memasuki sekolah itu. Sebelum Johannes sudah ada pelajar-pelajar Indonesia yang bersekolah di situ. Mereka ini di kemudian hari akan terkenal dalam pergerakan nasional seperti Haji Agus Salim, Soebardjo, Andries Alex Maramis, Nazir Datuk Pamuntjak. 4)

Suatu periode baru dijalani Johannes. Lima tahun lamanya ia bergumul dengan berbagai matapelajaran dan berbagai buku ilmu pengetahuan, yang membentuk pribadinya, menjadikannya lebih dewasa dan mempersiapkannya menjadi seorang ilmuwan. Kerajinan, ketekunan, kepandaian dan kecerdasannya menyebabkan ia berhasil baik dalam studinya dan berpindah kelas setiap tahun. Penguasaan bahasa Belanda, Inggris, Jerman dan Perancis dengan baik merupakan kunci bagi kelanjutan studinya di kemudian hari.

Pergaulan dengan murid-murid Belanda dan Indo bukan lagi barang asing baginya. Ia telah mengenal tingkah-laku,

tutur-kata serta watak anak-anak Belanda dan Indo ketika ia bersekolah di Ambon. Tinggal lagi sekarang menyesuaikan diri dengan para remaja dan guru-guru Belanda di sebuah sekolah lanjutan. Kesadaran akan harga diri dan watak pemberani seorang anak Ambon menempatkan Johannes setaraf dengan anak-anak kulit putih. Tidaklah canggung ia dalam pergaulan. Dengan kesadaran akan harga dirinya itu ia giat dalam kegiatan kurikuler maupun ekstra-kurikuler. Ia pun tidak ketinggalan dalam lapangan olah raga.

Ia turut dalam klub sepak-bola sekolahnya, mempertahankan panji-panji KW III. Dalam bidang musik ia mengembangkan bakatnya sebagai seorang pemain biola. Dia pun turut dalam suatu band musik. Kepada anak-isterinya di kemudian hari dia sempat membanggakan diri sebagai pemain hawaian-guitar yang pertama di antara pemuda-pemuda Ambon di Batavia. 5) Hobinya yang lain dikembangkannya, yaitu membaca buku.

Pengenalan dan persentuhan Johannes dengan anak-anak dan guru-guru Belanda dengan kebudayaan mereka merupakan pengalaman yang berguna baginya di kemudian hari.

Hubungan dengan orang tuanya melalui surat-menyurat. Ayahnya secara teratur mengirim biaya persekolahan Johannes. Kebanggaan orang tuanya bahwa putera sulung mereka bersekolah di sebuah HBS, mengatasi kesulitan-kesulitan finansial yang timbul dalam rumah tangga keluarga guru ini di Saparua.

Pada waktu liburan panjang, yaitu pada akhir tahun pelajaran, Johannes sempat pulang ke Ambon dan Saparua. Biasanya waktu libur panjang anak-anak Ambon yang bersekolah di berbagai kota besar di Jawa ramai-ramai pulang bersamasama menumpang kapal yang sama pula. Dalam kesempatan semacam ini, mereka saling berkenalan, saling bertukar pengalaman, saling bertukar pikiran dan diskusi, saling berkelakar,

saling bercanda dan mengikat janji sambil beramai-ramai berendang dan menyanyi sepanjang perjalanan. Suasana liburan semacam itu memupuk persaudaraan dan ikatan persahabatan yang akan berfaedah dalam kehidupan mereka semasih bersekolah atau di kelak kemudian hari jika mereka sudah terjun ke dalam masyarakat.

Dalam masa liburan ini keluarga Latuharhary merasa bahagia karena anak-anaknya bisa berkumpul dengan kakaknya yang tertua. Banyak ceritera tentang Batavia dan sekolahnya, ada yang lucu, ada pula yang sedih, tetapi banyak pula yang menyenangkan. Johannes berkesempatan bertemu lagi dengan kawan-kawan lamanya, dengan kawan-kawan sekolahnya di Saparua dan Ambon. Teringat lagi masa kanak-kanak mereka dengan suka dukanya.

Sesudah lima tahun bergumul dengan berbagai matapelajaran dan buku-buku, maka pada tanggal 25 Mei 1923 Johannes menempuh ujian akhir HBS dan lulus dengan hasil baik. Sekarang apa selanjutnya?

b. Peranan Ambonsch - Studiefonds. 6)

Sejak permulaan abad ke-20 terjadi pembaharuan politik pemerintah kolonial. Trilogi van Deventer menjadi dasar bagi suatu politik baru, yaitu politik etika. Berbagai kepentingan pemerintah dan kaum pengusaha Belanda, terutama para pengusaha perkebunan (*ondernemers*) yang memerlukan tenaga-tenaga bangsa Indonesia yang bisa berbahasa Belanda untuk berbagai macam pekerjaan, menyebabkan bermacam-macam sekolah dibuka, terutama di Jawa. Sekolah-sekolah ini mulai menyerap para pemuda pelajar yang telah menamatkan sekolah dasar antara lain dari Ambon dan Lease. Akan tetapi kemampuan kebanyakan orang tua terbatas untuk mengongkosi persekolahan anak-anaknya. Sedangkan hasrat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya sejauh mungkin cukup besar.

Sekolah kedokteran STOVIA sejak tahun 1886 sampai dengan 1922 telah menghasilkan 20 orang dokter asal Maluku. 7) Mereka ini merupakan elite cendekiawan masyarakat Ambon pada waktu itu. Di antara mereka ada seorang dokter muda, yaitu Dr. Willem Karel Tehupeiory yang lulus pada tahun 1902. Sesudah selesai dari STOVIA ia melanjutkan studinya ke negeri Belanda. Dalam tahun 1909 dia kembali ke Batavia dengan predikat *Europese Arts*. Ia tiba dengan membawa ide-ide baru.

"Dia membawa dari Eropa ide-ide yang selaras dengan tuntutan zaman kemajuan, dalam mana berbagai suku bangsa di Hindia Belanda, masing-masing di dalam lingkungannya, menggemakan suara untuk sentralisasi dan kerjasama yang lebih erat agar diperhatikan secara intensif kepentingan-kepentingan nasional mereka" 8)

Segera sesudah ia tiba di Batavia ia menyebarkan ide-idenya di kalangan para pemuka Ambon. Pada tanggal 24 September 1909, malam hari, ia mengumpulkan mereka di rumah L.P.G. Risekotta di Kwitang dan membentangkan cita-citanya untuk membentuk suatu persekutuan dengan tujuan membantu para remaja asal Ambon dalam persekolahan dan studi mereka.

Sesudah diadakan pertukaran pikiran dan diskusi, maka pada malam itu juga lahirlah *Ambonsch Studiefonds*. Susunan Pengurus Pusat yang pertama seperti berikut:

Ketua : J.A. Sospelissa, komis kl. I pada *Department van Gouvernementsbedrijven* (Dep. P.U.)

Wakil Ketua : P. Kuhuwaal, pegawai pada Firma Eedmann en Sielken.

Sekretaris/ Bendahara : H. Pesulima, komis kl. III pada *Algemene Rekenkamer* (Dewan Hisab)

Anggota : dr. D. Siahaya
W. Sospelissa, komis kl. III pada *Geneeskundige*

Dienst (Dinas Kesehatan)

J.M.M. Hetaria, komis kl. III pada *Algemene Rekenkamer*.

Pengurus ini berkedudukan di Batavia. Dr. Tehupeiry sendiri tidak mengambil bahagian dalam pengurus ini karena ia ditempatkan di Angka dan tidak lama kemudian meninggalkan Batavia. Pengurus mulai bekerja menyebarkan cita-citanya, mencari anggota dan mengumpulkan dana untuk beasiswa. Usaha itu disebar ke Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Maluku. Mula-mulanya berjalan seret, tetapi sesudah kaum militer diizinkan menjadi anggota mulai terlibat perkembangan, misalnya dengan didirikan cabang di *Meester Cornelis* (Jatinegara).

Dengan keputusan Pemerintah tanggal 14 Januari 1911 no. 32 anggaran Dasar *Ambonsch Studiefonds* (AS) diakui. Dengan demikian AS memperoleh *rechtspersoon* (menjadi badan hukum). Putusan ini membangkitkan kegairahan di kalangan masyarakat Ambon. Berduyun-duyun dan di mana-mana orang-orang Ambon sipil maupun militer masuk menjadi anggota, sehingga dapat didirikan cabang-cabang di berbagai tempat, antara lain di Magelang, Yogya, Surabaya, Cimahi dan beberapa kota besar lain di Jawa, Makasar, Palembang, Kotaraja (Banda Aceh) dan Ambon. Media komunikasi AS bernama *Persekoetoean* diterbitkan pada tanggal 15 Juli 1911, dan merupakan alat komunikasi dengan cabang-cabang dan para anggota.

Usaha AS dalam membantu para pelajar/mahasiswa dapat diperluas. Juga usaha mengembangkan sayapnya mendapat sambutan hangat di mana-mana dibuktikan dengan dibukanya di Ambon sebuah sekolah dasar dengan bahasa Belanda sebagai matapelajaran pada tanggal 13 Nopember 1911.

Di Nusalaut dibuka satu cabang di bawah pimpinan J. Manusama, raja Abubu. Tanggal 30 Maret 1912 didirikan sebuah

SD yang mengajar matapelajaran bahasa Belanda. 9) Atas desakan AS Pemerintah memperluas sekolah-sekolah khusus (*speciale scholen*) untuk anak-anak orang Ambon, Timor dan Manado di Kotaraja, Cimahi, Yogya dan Meester Cornelis. 10) Pengurus mempengaruhi juga orang-orang Belanda yang progresif untuk turut serta dalam usahanya. Mr. C. Th. Van Deventer, pencetus trilogi, anggota *Tweede Kamer Staten Generaal* (Parlemen Belanda) bersedia menjadi pelindung mulai tahun 1913. Sesudah ia meninggal dunia dalam tahun 1915, bekas Gubernur Jenderal Idenburg, berkedudukan di Den Haag, bersedia menjadi pelindung. 11)

Dalam rapat AS di Makasar tanggal 18 September 1912, van Deventer mengemukakan pendapatnya tentang persekolahan di residenan Ambon yang masih banyak kekurangannya. Hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah. Dalam tahun 1916 di Palembang dibuka sebuah sekolah siang untuk menampung anak-anak Ambon yang tidak diterima di *Europese Lagere School*.

Juga di negeri Belanda didirikan satu cabang pada tanggal 16 Nopember 1912 oleh enam orang Ambon yang bermukim di Amsterdam. Permulaan tahun 1914 cabang AS ini menggabungkan diri dengan *Vereeniging Oost-West*. Organisasi ini bertujuan mengawasi para pelajar/mahasiswa Indonesia, membimbing dan membantu mereka agar mereka berhasil dengan baik dalam studi.

Selama tahun 1909–1917 telah diberikan beasiswa untuk 32 orang murid *KW III*, *KWS* (*Koningin Wilhelmina School*) dan *Prins Hendrik School* di Batavia dan *Cultuurschool* (Sekolah Pertanian) di Sukabumi. Di samping itu diberi beasiswa untuk 56 orang anak militer yang bersekolah di TK dan SD partikulir. Dalam tahun 1917 telah ada 84 cabang dengan 3500 anggota yang tersebar dari Sumatera sampai Irian Barat. Kekayaan

AS berupa modal yang disimpan dalam bentuk giro di bank NHM (*Nederlands Handels Maatschappij*) sebesar f 40.000 dengan bunga 4% setahun. AS memiliki juga 10 saham perkebunan sebesar f 500 nominal.

Iuran tiap anggota sebesar f 0,50 sebulan dan f 0,25 untuk berlangganan majalah "Persekoetoean". Bagi para militer minimal f 0,30. Donatur f 5.— sebulan atau membayar sekaligus minimal f 100.— 12)

Dalam tahun 1917 itu ada organisasi-organisasi di keresidenan Ambon yang secara *en blok* menggabungkan diri pada AS seperti *Ambonsch Studiefonds Afdeling Onderwijzer Bond Ambon* (ASAIBA—peraturan guru cabang Ambon), *Ambonsch-Studiefonds Afdeling Inlands Leeraars Ambon* (ASAILA—persatuan guru agama cabang Ambon), *Ambonsch-Studiefonds Afdeling Onderwijzers Bond Saparua* (ASAOBS), *Bond van Inlandsche Godsdienst Leeraars Saparua* BIGLS —persatuan guru agama di Saparua) dan *Bond van Gegageerde Ambonsche Militairen Saparua* (persatuan kaum militer Saparua).

Perkembangan di dalam *Ambonsch-Studiefonds* menunjukkan suatu kebangkitan nasional di kalangan orang-orang Ambon sejalan dengan perkembangan pada waktu itu, di mana kita lihat berbagai suku bangsa bangkit untuk mempertinggi taraf hidup material dan mental spiritualnya. *Budi Utomo* menggerakkan suku bangsa Jawa, *Ambonsch-Studiefonds* menggerakkan suku bangsa Ambon. Juga suku-suku bangsa lain bangkit pada waktu itu. Suatu *nationale opleving* (kebangkitan nasional), sekalipun masih terbatas pada suku dan daerah. *Ambonsch-Studiefonds* ini berkembang sampai tahun 1941 dan telah menghasilkan banyak cendekiawan Ambon, di antaranya banyak yang mengambil bahagian dalam pergerakan nasional. Mereka mulai dengan *nasionalisme suku/daerah* dan berakhir pada nasionalisme Indonesia.

Sebagai penghargaan bagi jasa putera Maluku, pendiri AS, yaitu dr. Tehupeiory, maka seorang penyair dan penggubah lagu mengabadikannya dalam sebuah lagu rakyat yang digemari tua dan muda di Ambon sambil bermain *Hura-hura Cincin* 13)

Hura-hura cincin, hura-hura lempar
Kasih jalan cincin, janganlah ditahan
Sirisori sepanjang jalan
Ia hampir malam membakar dupa
Tehupeiory punyalah ajaran, nona
Bikin Ambon jadi kamuka eee
Oleh-ole rasa sayang, rasa sayang, tuan eee
Ia rasa sayang, rasa sayang, gandong eeee
Buang badan ke rumah tangga, nona
Ingat bujang terlalu manis eee

Ada dua hal yang turut menentukan jalannya hidup Johannas dalam periode persekolahan di Batavia. Pertama *Ambonsch Studiefonds* sedang dalam perkembangan yang menggembirakan karena perhatian yang besar dari masyarakat Ambon terhadap badan itu. Kedua, Johannes berdiam di rumah seorang pemuka AS, P. Rugebrecht, Amanuensis KW III. Induk semang Johannes ini pernah menjadi pejabat bendaharawan 1914–1915 dan Wakil Ketua AS dalam tahun 1916. Jadi selama Johannes bersekolah di Batavia ia berkenalan dengan pemuka-pemuka AS melalui Rugebrecht atau dalam rapat-rapat yang diadakan di rumah induk semangnya dan melalui majalah persatuan tersebut di atas. Keadaan ini menguntungkan. Sebab dengan demikian cita-citanya untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi bisa mendapat bantuan.

Kepada orang tuanya ia beritakan tentang cita-citanya untuk melanjutkan studi dalam bidang ilmu hukum. Pengurus AS menyokong cita-citanya itu, terutama atas pengaruh Rugebrecht. Melihat hasil studi Johannes memuaskan, maka

mereka membuka kesempatan baginya untuk melanjutkan studi ke negeri Belanda. Jadi ketika Johannes tammat KW III dengan hasil baik, Pengurus AS mengambil keputusan untuk membiayai studinya di negeri Belanda. Johannes akan memasuki Fakultas Hukum Universitas Leiden.

c. Masa Studi di Negeri Belanda

Cita-cita Johannes untuk belajar di luar negeri membawa kesulitan finansial bagi keluarganya. Pendapatan guru Lathary tidak mencukupi untuk membelanjai anaknya. Benar bahwa ada beasiswa dari *Ambonsch-Studifonds*, akan tetapi tidak cukup untuk menutupi segala biaya yang diperlukan. Tetapi Jan Lathary telah bertekad untuk berkorban demi tercapai cita-cita putera sulungnya. Rumahnya di Saparua dijualnya untuk membiayai ongkos perjalanan Johannes ke negeri Belanda. Sedangkan bibi Johannes, Jet Hieriej, seorang juru rawat, bersedia membantu membiayai ongkos studinya.

Tetapi rupanya berat bagi ibu Josefin untuk melepaskan puteranya pergi begitu jauh. Karena tidak lama sesudah Johannes berangkat, ibunya jatuh sakit dan meninggal dunia (1923) di Saparua. Ayahnya meminta *vervroegd pensioen* (minta pensiun sebelum waktunya) lalu berpindah dengan anak-anaknya ke Makasar. 14)

Tetapi sebelumnya itu Johannes telah bertolak ke negeri Belanda. Lebih dari sebulan terombang ambing di laut, tibalah kapalnya di pelabuhan Rotterdam. Johannes sekarang memasuki suatu periode baru, yaitu hidup di negeri asing. Berita kematian ibunya begitu menggoncangkan batinnya. Tidak diduga, bahwa pamitan dengan orang tuanya di Saparua beberapa waktu yang lalu merupakan pamitan terakhir dengan ibu yang dicintainya. Suatu cobaan yang berat baginya.

Langkah memasuki Fakultas Hukum memerlukan beberapa persiapan. Untuk memasuki fakultas itu seorang lulusan

sekolah umum seperti HBS harus menempuh ujian tambahan bahasa-bahasa klasik Yunani dan Latin agar bisa mempelajari hukum-hukum Romawi. Sedangkan lulusan *Gymnasium* diperkenankan langsung masuk fakultas tersebut. Johannes berhasil dalam ujian tambahan itu dan mulailah mengikuti kuliah-kuliah.

Pada waktu itu di Universitas Leiden telah ada putera-putera Indonesia yang sedang mempelajari ilmu hukum, seperti Subardjo, A.A. Maramis dan Nasir Datuk Pamuntjak. Ada juga mahasiswa-mahasiswa Indonesia lain di Universitas itu, yang menuntut ilmu dalam disiplin lain. Sesudah Perang Dunia I (1914–1918), makin banyak putera Indonesia belajar di negeri Belanda, seperti Dr. Sutomo, Dr. J.B. Sitanala, Dr. Sukiman, Moh. Hatta, Iwa Kusuma Sumantri dan lain-lain. Mereka belajar di berbagai perguruan tinggi. Sedangkan para dokter yang telah lulus dari STOVIA datang untuk memperdalam ilmu kedokteran agar mereka bisa memperoleh predikat *Europese Arts*.

Para mahasiswa dan tokoh-tokoh pergerakan, yang mengalami, bahwa kebebasan politik di negeri Belanda jauh berbeda dengan di tanah air, menyatukan diri dan mengembangkan kesadaran nasional dalam *Indische Vereeniging* yang didirikan dalam tahun 1908. Namanya diganti menjadi *Indonesische Vereeniging*, kemudian diganti lagi dengan kata Indonesia *Perhimpunan Indonesia* (PI) dalam tahun 1922. Perhimpunan itu merupakan wadah pembentukan kader-kader pimpinan yang kelak akan memainkan peranan penting dalam pergerakan nasional di Indonesia. Merah-putih dengan di tengah-tengahnya kepala banteng menjadi lambang PI dan media komunikasinya disebut *Merdeka* 15)

Johannes Latuharhary pada tahun-tahun permulaan di negeri dingin itu tidak banyak bergaul dengan orang-orang PI.

"Ia hidup menyendiri. Pada hari Lebaran biasanya orang-orang Indonesia berkumpul. Tetapi saya tidak pernah melihat Latuharhary di antara kita. Pada waktu itu dia tidak menjadi anggota P"" 16)

Kemungkinan Johannes belum lagi pulih dari kesedihan kematian ibunya, sehingga ia lebih menyendiri. Mungkin juga ia lebih mementingkan studinya dan belum tertarik pada pergerakan nasional Indonesia.

Pada waktu itu orang-orang Indonesia dan para mahasiswa di negeri Belanda dapat dibagi dalam tiga golongan, yaitu yang pro Belanda, yang pro pergerakan nasional Indonesia dan yang moderat. 17) Mr. Pringgodigdo (hal. 82) mencatat "seperti Zain dari Serikat Sumatera, Mr. Latuharhary sewaktu menjadi studen adalah seorang pelajar yang amat tenang di antara pelajar-pelajar di negeri Belanda itu, tetapi ia adalah juga penganut cita-cita Indonesia-Raya".

Konstataasi Mr. Sunario mengenai Johannes Latuharhary hanya berlaku sampai tahun 1926, karena tahun itu sarjana tersebut telah kembali ke tanah air. Makin jauh Johannes belajar, makin dalam ia mempelajari ilmu hukum, ilmu politik, ilmu ekonomi, sosiologi dan sejarah makin tajam ia melihat perbedaan-perbedaan yang mendasar antara perkembangan politik di Eropa cq. di Nederland dengan politik imperialisme dan kolonialisme yang dijalankan pemerintah Hindia Belanda. Lebih-lebih lagi ketika ia memilih spesialisasi *Hukum Adat* dan memperdalam sejarah Maluku, maka dia melihat betapa sengsara rakyat Maluku hidup di bawah penindasan kaum penjajah.

Pergaulannya kemudian dengan kawan-kawan sefakultasnya yaitu orang-orang PI seperti dengan Ali Sastroamidjojo, Subardjo, Abdul Sjukur, Budiardjo, Iwa Kusumasumantri dan dengan lain-lain mahasiswa seperti Hatta, sedikit banyaknya memperkuat pandangan politiknya.

Pendapat umum di kalangan orang-orang Maluku, bahwa Johannes Latuharhary adalah anggota PI sedikit banyaknya dipengaruhi oleh kenyataan, bahwa dia mempunyai banyak kawan di antara pemimpin-pemimpin PI, sekalipun ia bukan anggota PI.

"Kami segera menjadi kawan dan saya sudah kenal Mr. Latuharhary di negeri Belanda. Meskipun pada waktu itu ia bukan anggota Perhimpunan Indonesia, saya mengenalnya sebagai seorang yang dapat dipercaya dan mempunyai pendapat lurus serta tabiat yang terus terang yang sangat saya hargai," demikian tulis Mr. Subardjo dalam otobiografinya. 18)

Studi Johannes di Leiden setiap tahun berhasil dengan baik. Spesialisasinya dalam *Hukum Adat*, di bawah pimpinan Prof. Dr. van Vollenhoven, seorang guru besar yang kenamaan dalam bidang tersebut, akan bermanfaat bagi Johannes kelak bila ia kembali ke Indonesia. Ketekunan dan ketabahannya disertai penguasaan dengan baik empat bahasa Eropa Barat dan dua bahasa klasik, sangat membantunya menyelesaikan studi pada waktunya. Bulan Juni 1927 Johannes berhasil meraih gelar *Meester in de Rechten* atau Mr. (=SH).

Johannes adalah putera Maluku yang pertama yang meraih gelar Mr. di Universitas Leiden. Sesudah dia menyusul putera Maluku yang ke dua, yaitu Mr. Abdul Syukur.

Tentang ujiannya Ibu Latuharhary berceritera:

"Nani (begitulah panggilannya) sedang menunggu gilirannya. Yang sedang diuji Ali Sastroamidjojo.

Dengan agak puyeng Ali keluar dari kamar ujian.

Ali tidak lulus! Nani segera berdiri dan meminjam jas Ali. Dengan jas yang "sial" itu bagi Ali, Nani masuk dan lulus!

Biasanya jas disewa. Nani tidak mempunyai uang untuk menyewa jas. Jadi pinjam saja dari Ali."

Selesailah sudah studinya. Mr. Johannes Latuharhary segera berpamitan dari kawan-kawannya lalu kembali ke Indonesia dengan kapal barang Jerman *Derfflinger*. Ia tidak mempunyai uang untuk naik kapal penumpang yang lebih menyenangkan. 19)

Periode studinya telah berakhir dan sekarang Mr. Latuharhary telah tiba kembali di tanah air (1927) untuk meneruskan suatu perjuangan.

BAB III

ORANG—ORANG AMBON BERPOLITIK

a. Berbagai Organisasi

Pada permulaan abad ke-20 sudah terdapat di Jawa banyak orang Ambon. Mereka ini adalah pelajar-pelajar sekolah lanjutan, yang telah menamati sekolah dasar di Maluku. Di samping itu ada pegawai negeri. Selain itu di banyak kota, pusat kemiliteran, kaum militer asal Maluku berdiam di tangsi-tangsi seperti di Meester Cornelis, Cimahi, Yogya, Magelang, Ambarawa, Surakarta, Banyubiru, Jatingaleh, Semarang dan Surabaya. Mereka ini termasuk kesatuan KNIL yang didirikan pada tahun 1830 dengan surat keputusan Gubernur Jenderal van den Bosch pada tanggal 4 Desember 1830 no. 1. Dengan *Koninklijke Besluit* tanggal 10 Maret 1832 no. 93 dan 94 surat keputusan Gubernur Jenderal tersebut disahkan. 1)

Di tangsi-tangsi itu berdiam kaum militer asal Ambon, Manado dan Timor yang termasuk Kompi Ambon dengan anak-isterinya. Di samping itu ada tentara Jawa dengan sanak keluarganya juga. Pada umumnya mereka hidup terpisah dari masyarakat sekelilingnya. Malahan untuk anak-anak mereka dibuka sekolah khusus yang disebut *Ambonsche School* 2)

Tangsi-tangsi ini bukanlah tempat ideal bagi perkembangan anak-anak. Seringkali terjadi kericuhan dan perkelahian dan permusuhan antar orang dewasa. Untuk menciptakan suatu kehidupan yang lebih baik dan lebih rukun, maka para pemuka militer di Magelang mendirikan pada tanggal 1 September 1908 sebuah perkumpulan dengan nama *Wilhelmina*. Tujuannya ialah menyatukan suku-suku bangsa yang termasuk kompi Ambon, untuk melenyapkan saling cemburu, iri hati dan permusuhan; mempererat hubungan antar suku-buku bangsa itu dengan pemerintah Belanda yang sudah berlangsung bebe-

rapa abad lamanya; mengembangkan pengajaran dengan jalan mendirikan dana beasiswa. Perkumpulan ini, yang Anggaran Dasar nya disahkan pemerintah pada tanggal 18 Januari 1912, dengan cepat berkembang di tangsi-tangsi Kompi Ambon yang ada di lain-lain kota. 3)

Pengaruh berdirinya BUDI-UTOMO menyebabkan pula didirikan *Ambonsch-Studiefonds* seperti diuraikan dalam BAB II.

Pada waktu yang hampir bersamaan didirikan oleh kaum cendekiawan di Ambon *Ambonsch Bond*, suatu perkumpulan para pegawai gubernemen (1911), yang bertujuan mendirikan dana pendidikan; mengusahakan peningkatan taraf hidup rakyat; memberi bantuan kepada para anggota dan turunan-nya. Dengan surat keputusan pemerintah (GB = *Gouvernements Besluit*) tanggal 11 September 1911 perkumpulan ini disahkan menjadi badan hukum. 4)

Terdorong dan distimulasi oleh perkumpulan ini, maka timbul perkumpulan dan persatuan se profesi di Ambon dan Lease seperti diuraikan dalam BAB II.

Kegiatan berbagai golongan masyarakat Maluku ini adalah tanda kesadaran akan harga diri yang memerlukan persatuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

Di Semarang berdiam seorang wartawan muda, Alexander Jacob Patty, bekas murid sekolah kedokteran STOVIA Surabaya. 5) Baru pada tingkat pertama Patty sudah dikeuarkan dari sekolah itu karena sifat dan tingkah lakunya yang ekstrim. Seorang pemuda yang penuh dinamika, selalu resah dan tidak puas terhadap pemerintah Hindia Belanda, khususnya perlakuan pemerintah terhadap kaum militer Ambon dalam KNIL. Dalam tahun 1913 dengan beberapa orang kawan ia mendirikan perkumpulan "*Mena Muria*", 6) dengan tujuan meningkatkan kehidupan material dan spiritual di segala bidang dari rakyat Seram dan pulau-pulau di sekitarnya yang terhisap da-

lam kepulauan Maluku; membangkitkan kekuatan-kekuatan terpendam yang ada pada rakyat untuk bersatu dan dikembangkan agar mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Untuk mencapai tujuan ini akan dikembangkan pertanian, perdagangan dan kerajinan seraya menghapuskan segala macam kepincangan sosial. 7) Karena tujuannya baik maka pemerintah mengesahkan AD nya dengan surat keputusan tanggal 9 Pebruari 1915. Usaha "*Mena Muria*" berguna sekali untuk memperbaiki kehidupan sosial keluarga-keluarga militer Ambon di tangsi-tangsi. Berbagai cabang didirikan di Jawa.

Dilihat dari sejarah perkembangannya "*Mena Muria*" sesungguhnya berusaha menenyapkan organisasi "*Wilhelmina*", karena keterikatan organisasi ini pada kerajaan Belanda. Ini jelas dari namanya dan salah satu tujuan tersebut di atas. Sedikit banyaknya hal ini berhasil karena lambat laun organisasi "*Wilhelmina*" tidak terdengar lagi.

A.J. Patty sebenarnya berniat menyatukan "*Mena Muria*" dengan "*Ambonsch-Studiefonds*", agar supaya dengan dana dari AS dapat dikembangkan program MM. cabang Magelang telah berhasil bergabung dengan AS. Tetapi pengurus AS tidak menyetujui penggabungan secara menyeluruh, sehingga ke dua organisasi itu berjalan sendiri-sendiri. AS bergerak di kalangan para cendekiawan dan pelajar, sedangkan MM di kalangan rakyat biasa. Pada akhirnya Patty menempuh jalan lain. 8)

Menjelang tahun 1920 timbul berbagai organisasi pemuda sebagai respons atas perkembangan pergerakan nasional pada waktu itu. Para pemuda dan pelajar ingin pula berpartisipasi dalam pergerakan itu. Dalam tahun 1915 lahir *Jong Java*, disusul oleh *Jong Sumatranen Bond* (1917), *Jong Minahassa* (1918), *Jong Ambon* (1918), *Jong Celebes* dan *Jong Batak*. Kebanyakan organisasi pemuda ini didirikan oleh para mahasiswa/alumni STOVIA.

Mahasiswa STOVIA, L. Tamaela, dengan kawan-kawan antara lain: J. Kajadu, bercita-cita menyatukan para pemuda dan pelajar asal Maluku yang ada di Jawa dalam satu organisasi pemuda. Inisiatif mereka disambut baik lalu lahirlah *Jong Ambon*. Perkumpulan ini lebih merupakan perkumpulan olahraga dengan titik berat pada sepak bola. Johannes Latuharhary, pelajar KW III, turut pula memperkuat kesebelasan *Jong Ambon* di samping mempertahankan panji-panji klub sekolahnya.

Rupa-rupanya *Jong Ambon* mengalami kemunduran pada tahun-tahun terakhir, sehingga pada tanggal 1 Juni 1923 harus dihidupkan kembali dengan nama "*Sport en Muziek Vereeniging Jong Ambon*", disingkat SVJA, tetapi terkenal hanya dengan nama *Jong Ambon*. Ketuanya ialah F. Loppies, wakil ketua L.J. Wattimena, sekretaris F. Pesulima dan bendahara F. Hahiary. Dua orang wanita duduk sebagai pembantu, yaitu nona C. Mustamu dan nona A. Siahaya. 9)

Inti dan penggerak organisasi ini ialah para mahasiswa dan alumni STOVIA seperti dr. L. Tamaela, dr. J. Lisapaly, dr. J. Tupamahu, dr. J. Kajadu, G. Rehatta, C.J. Kapitan, J. Malaihollo, D. Tahitu, W. Putiray, J. Leimena.

Setahun kemudian timbul dua aliran dalam perkumpulan ini. Sebagian pemuda pelajar tidak puas dengan peranan *Jong Ambon* yang hanya bergerak dalam lapangan olahraga. Di tengah-tengah gelombang pergerakan nasional mereka berpendapat, bahwa pendidikan adalah lebih utama. Oleh karena itu mereka mendirikan *Vereeniging Ambonsche Studenten* (VAS). Karena itu dalam tubuh *Jong Ambon* terdapat dua kelompok, yaitu *VAS/Jong Ambon* yang dipimpin oleh Toule Salahuwey, seorang mahasiswa RHS (*Rechts Hoge School*) dan J. Leimena, mahasiswa STOVIA/*Geneeskundige Hoge School*.

VAS/Jong Ambon menyatukan diri dengan pergerakan pemuda Indonesia. Dalam Kongres Pemuda Indonesia ke I tahun 1926 *Jong Ambon* diwakili oleh Toule Salahuwey. Tu-

rut aktif pula dalam kongres itu dr. Kajadu dan isterinya. Sedangkan dalam Kongres yang ke II tahun 1928, yang mence-
tuskan *Sumpah Pemuda*, J. Leimena turut bermain pe-
ranan. 10)

Klub sepakbola dimotori oleh G. Rehatta. Kelompok ini mengembangkan sayapnya ke kota-kota besar di Jawa. Asas cinta pada tanah air menimbulkan kesadaran nasional dalam tubuh *Jong Ambon*. Warna klub ini adalah merah-putih. Di lapangan hijau, sampai pada zaman Jepang, satu-satunya kesebelasan yang terkenal dengan *kostum merah-putih* adalah kesebelasan *Jong Ambon*.

Nasionalisme di dalam tubuhnya ini merupakan pula duri bagi pemerintah Hindia Belanda untuk mengakuinya sebagai badan hukum. Sementara tokoh-tokoh *Sarekat Ambon*, yang juga memegang pimpinan di berbagai cabang *Jong Ambon*, merupakan pula halangan bagi pengakuannya. Permohonan *Jong Ambon* untuk memperoleh *rechtspersoon* barulah dipenuhi pemerintah sesudah tujuh tahun, yaitu pada tanggal 1 Nopember 1930.

Bagi *Jong Ambon* di Batavia pengakuan ini adalah suatu syarat untuk memasuki *Voetbalbond Batavia en Omstreken* (VBO), yaitu Persatuan Sepakbola Batavia dan Sekitarnya. Dalam tahun 1930 itu barulah *Jong Ambon* menjadi anggota VBO dan dalam kompetisi harus mulai bertanding dari divisi III, sekalipun prestasinya pada waktu itu sudah top. Pemain-pemain top yang merajai lapangan hijau dalam periode 1926 – 1930 seperti dr. G. Rehatta, dr. J. Malaihollo, dr. Kapitan, Ch. Luhukay, J. Anakotta, D. Kapitan, G.A. Apituley mempunyai nama yang harum. Kualitas mereka ini memungkinkan *Jong Ambon* menaklukkan lawan-lawannya dan dinaikkan ke divisi II (1931), kemudian naik ke divisi I (1932).

Dengan semangat juang yang besar, kesadaran nasional yang tinggi karena harus berhadapan dengan klub-klub Belanda

seperti Hercules, Oliveo, Vios dan lain-lain dan dukungan masyarakat penggemar sepakbola yang luas dan entosias, maka *Jong Ambon* berhasil menundukkan lawan-lawannya dan muncul sebagai *runner-up* (1934), juara 1935–1936 dan 1936–1937. Berhasilnya *Jong Ambon* junior menjuarai divisi II, III dan IV, menyebabkan *Jong Ambon* menjadi juara umum BVO. Suatu prestasi puncak yang gemilang. Tahun 1937–1938 turun menjadi *runner-up*. Pemain-pemain top seperti Wim Tarumasely, Teterisa, One Huwae, J. Anakotta, Tjak Pattiwael, A. Tetelepta, Hans Taihutu, Bram Titaley, Umar Saos dan lain-lain dengan kostum merah-putihnya mempertahankan panji-panji nasional di lapangan hijau. Di zaman Jepang terpaksa klub ini menukar namanya menjadi *Bintang Timur*. Tahun 1946 aktif kembali dengan nama *Jong Ambon*. Dalam alam kemerdekaan *Jong Ambon* dilanjutkan dengan nama *Persatuan Olahraga Maluku* (POM) mulai tanggal 13 Januari 1951 dan bernaung di bawah PERSIJA.

Dalam jangka waktu yang digambarkan di atas di kota-kota lain berkembang cabang-cabang seperti di Semarang, Bandung, Surabaya (didirikan 1-3-1934 dipimpin oleh P. Joris), Malang (didirikan 12-1-1936 dipimpin oleh Mr. J. Latuharhary), Magelang (didirikan 18-8-1939) dan Makasar. Di samping itu ada perkumpulan sepakbola Maluku lain seperti "Mena Muria" Surabaya, "*Jong Molukken*" Jombang (18-1-1934) yang dipimpin oleh W.A.F. Latuheru.

Dalam kerja sama dengan *Ambonsch Studiefonds* berbagai pertandingan amal dilakukan untuk mencari dana bagi AS. Demikianlah perkumpulan-perkumpulan tersebut di atas memainkan peranannya masing-masing di dalam kancah perjuangan untuk meningkatkan taraf hidup suku bangsanya dan mempertahankan harkat hidupnya di tanah airnya sendiri. Akan tetapi bagi masyarakat Maluku *Sarekat Ambon*lah yang mendobrak pintu kolonialisme menuju alam kemerdekaan.

Sedangkan *Ambonsch-Studiefonds* dan *Jong Ambon* merupakan pelopor-pelopor bagi organisasi kerakyatan SA. 11)

b. Sarekat Ambon Unsur Pergerakan Nasional

motto : "*Oud en Jong Vereend*

Bezied door Moed, Hoop en Trouw"

"Zoet is het, te leven voor het Vaderland." 12)

arti : "Tua dan Muda bersatu

Dijiwai oleh Keberanian, Harapan dan Kesetiaan"

"Alangkah manisnya hidup untuk tanah air."

Itulah semboyan *Sarekat Ambon*, yang didirikan oleh A.J. Patty di Semarang pada tanggal 9 Mei 1920. A.J. Patty tidak puas lagi dengan "Mena Muria". Lagi pula sifatnya yang keras mendapat angin dari pergerakan nasional yang keras pula. Pergerakan nasional menjadi keras sesudah Perang Dunia I, karena ternyata pemerintah kolonial ingkar dari "Janji Nopember".

Orang-orang Ambon mesti terjun ke lapangan politik, demikian pendapat Patty. "Mena Muria" dibubarkan lalu Patty dan kawan-kawannya mendirikan *Sarekat Ambon*. Nama "Mena Muria" tetap mereka pakai untuk media SA. Tujuan daripada SA ialah menggunakan segala cara yang sah untuk meningkatkan kebutuhan material dan spiritual rakyat di residensi Ambon dan meningkatkan kemakmuran seraya berusaha melenyapkan segala macam kepincangan dan peraturan yang menghalangi pengembangan tujuan ini. 13)

Jalan untuk mencapai tujuan ini menggambarkan sifat politik, sosial-ekonomis dari SA yang demokratis, yaitu:

1. Menanamkan ide persatuan di kalangan rakyat yang mendiami residensi Ambon.
2. Memperbaiki keadaan ekonomi rakyat.
3. Memperjuangkan suatu bentuk pemerintahan parlementer sehingga hak pilih dapat diperluas.

4. Mengunifikasikan, memperluas dan memperdalam pengajaran.
5. Memperjuangkan hak yang sama dalam hukum.
6. Memperjuangkan suatu sistem pajak berdasarkan azas: pajak-menurut-kemampuan.
7. Memberantas keangkuhan agama dan keangkuhan ras serta rasdiskriminasi di segala bidang.
8. Turut serta mempertahankan tanah air berdasarkan wajib-militer.
9.
 - a. memperoleh pelayanan hukum yang baik, cepat dan murah; membatasi dengan tegas tahanan preventif; memberi ganti rugi kepada terhukum atau tahanan yang tidak bersalah.
 - b. kemerdekaan mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan.
 - c. perbaikan bidang sosial, finansial dan kesehatan dan sehubungan dengan itu dilaksanakan asas desentralisasi.
10. Kerja-sama dalam soal-soal umum dengan organisasi-organisasi lain yang mempunyai program yang dasarnya sama dengan SA. 14) Dengan jelas SA meniupkan ke dalam masyarakat Maluku yang ada di luar maupun di Maluku asas demokrasi dalam segala bidang kehidupan, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan.

Sambutan terhadap organisasi politik ini segera meluas. Aktivitas para pengurus, terutama pengaruh Patty, masuk ke tangsi-tangsi lalu mulai menggoncangkan sendi-sendi organisasi KNIL. Apalagi sudah lama terdapat ketidakpuasan karena diskriminasi dalam pangkat, gaji dan pendidikan. Pembangkangan di kalangan militer Ambon di Jatingaleh, Semarang adalah salah satu contoh, sehingga pengurus SA harus berurusan dengan pimpinan militer dan polisi. Patty dilarang memasuki

tangsi-tangsi. Kaum militer dilarang menjadi anggota SA. Pers sana (Belanda) mulai menyerang SA dan menuduh Patty komunis.

Dilihat dari strategi perjuangan nasional Semarang sudah tidak cocok sebagai pusat SA. Mungkin juga Semarang sudah menjadi terlalu panas bagi Patty. Oleh karena itu pusat organisasi dipindahkan ke Batavia. Lagipula di situ berdiam kebanyakan kaum intelektual asal Maluku. Pengurus Pusat berkedudukan di Batavia, dengan alamat Gang Horning 2. Susunan Pengurus SA berganti dan disusun yang baru seperti berikut: Ketua A.J. Patty; Sekretaris W.F. Maspaitella; Bendahara D.Z. Uytenbroek; anggota-anggota dr. J. Kajadu, dr. D.J. Siahaya; dr. J. Westplat, J. Camerling, W.B. Leleuly dan S. Thijsen. Dr. Kajadu, dr. Siahaya dan dr. Westplat bertindak pula sebagai penasehat.

Redaksi *Mena Moeria* terdiri dari A.J. Patty penanggungjawab; dr. Kajadu, dr. Siahaya, dr. Westplat dan D.Z. Uytenbroek. Jelas di sini betapa besar peranan yang dimainkan oleh para alumni STOVIA.

Tetapi SA tidak berhasil begitu saja meyakinkan orang-orang Ambon akan tujuannya. Pengurus harus bekerja keras dan berusaha melebarkan sayapnya. Sebagai contoh pada tanggal 19 Nopember 1922 Cabang Batavia, yang dipimpin oleh J.H. Tehupeory, mengadakan rapat di *Cinema Palace*. Sebelumnya *Java Bode* surat kabar fihak sana telah menyebarkan propaganda anti SA dengan maksud menggagalkan rapat tersebut.

Dalam rapat itu H. Wattimena menerangkan tujuan SA dalam bahasa Melayu sedangkan S. Thijsen dalam bahasa Belanda. Ia mengakhiri keterangannya dengan seruan; UTT-HANA SUTTA ! berarti Bangkitlah! Tingkatkanlah pribadimu! Pembicara yang lain Dr. Westplat mengatakan bahwa dia sudah

30 tahun bekerja sebagai dokter. Dia tahu kesulitan dan kebutuhan rakyat Ambon. Dia berpendapat, bahwa sudah tiba waktunya bagi rakyatnya untuk bergerak dalam bidang politik. Oleh karena itu dia ajak hadirin untuk masuk SA.

Pembicara tentu berpendapat seharusnya SA didirikan di Ambon. Sedangkan nona Kapitan menyerang SA dan melemparkan kritik yang pedas. Patipelohi menuduh Patty terlalu bercita-cita muluk, yang dalam praktek tidak bisa dilaksanakan. Sediono dari PPPB 15) mengemukakan bahwa Ambon selalu absen dalam politik. Jadi ia gembira bahwa orang-orang Ambon sekarang terjun ke dalam politik. Ia serukan untuk kerjasama dengan partai-partai politik yang lain.

Dalam jawabannya kepada para kritikus Patty mengatakan bahwa adalah hal yang lumrah kalau kaum intelektual yang lebih dulu berkumpul sebagai contoh bagi massa. Kaum intelektual berada di luar Maluku. Lumrah kalau mereka saling mendekati, baru nanti melangkah ke Ambon. Di dalam organisasi pengetahuan teoretis adalah syarat mutlak untuk pelaksanaan praktis.

Wartawan *Bataviaasch Nieuwsblad* yang hadir memberikan laporan yang obyektif. Tetapi *ANETA* memuat laporan yang bertentangan dengan fakta. Pers sana terus menerus membuka serangan terhadap Patty dan menuduhnya komunis. Tuduhan-tuduhan itu membahayakan organisasi. Oleh karena itu pada tanggal 10 Desember 1922 di rumah dr. Tehupeory kaum cendekiawan Ambon diundang untuk mendengar keterangan Patty, yaitu dr. W.K. Tehupeory, dr. J.M. Leimena (bukan oom Jo), J.A. Soselissa, R. de Quelju, J.M.M. Hetharia, P. Rugebrecht, A. Latumahina, A.TH. Manusama, A. Patti-peilohy, B. Risakotta, A. Tupamahu, O.E. Kajadu, S. Hetharion, O.C. Latuheru, E. Telehala, dan Dr. Kajadu. Patty membentangkan prinsip-prinsip perjuangannya dan perjuangan SA. Ia membantah tuduhan fihak - sana. SA bukan koministis te-

tapi berasaskan *nasional demokratis*. Perdebatan cukup hangat terjadi. dr. Kajadu membela Patty. Antara lain ia mengemukakan pertanyaan:

"Di mana posisi kita (orang-orang Ambon) di dalam masyarakat kolonial? Di mana kita harus berdiri?"

Pertanyaan itu dijawabnya sendiri seperti berikut:

"Tempat kita adalah tempat menurut kodrat alam. Di dalam ketentaraan dibedakan anak bumiputra dan bukan bumiputra. Bagi orang-orang Ambon ini jelas suatu petunjuk bahwa tempatnya ada di samping orang Jawa, orang Timor, orang Manado, orang Aceh, jadi di antara sesama bangsanya. Inilah tempat baginya menurut kodrat alam. Dengan sesama bangsa kita, yang mempunyai kepentingan bersama, nasib yang sama, maka kita berhadapan dengan kaum yang berkuasa. Sasar akan hal ini janganlah kita ditipu oleh kata-kata yang manis, janganlah kita tidur dan tertipu oleh keuntungan-keuntungan sementara. Orang-orang Ambon harus bersatu untuk mengangkat derajat rakyatnya politis maupun ekonomis agar kita siap sedia, bilamana waktunya tiba, bersama-sama dengan suku-suku lain, menuntut dari Nederland persamaan hak di segala bidang dan kewargaan penuh dalam satu negara di khatulistiwa ini." 16)

Suara dr. Kajadu ini adalah suara seorang nasionalis. Suaranya ini akan terus bergema. Inilah *missi* yang harus dilaksanakan oleh SA. Pada akhir pertemuan itu dr.W.K. Tehupeiori, Andi Tupamahu, O.E.Kajadu, S. Hetharion dan E. Telehala masuk menjadi anggota SA.

Menjadi suatu masalah bagi SA ialah pengakuan pemerintah yaitu memperoleh *rechtspersoon* untuk mengamankan perjuangan. Tanggal 28 Juli 1920 SA telah mengirim permohonan kepada pemerintah, tetapi sudah dua tahun lebih tidak ada pe-

nyelesaian. Tanggal 22 Nopember 1922 pengurus SA minta audiensi pada Gubernur Jenderal. Tepat sebulan kemudian Patty, dr. Kajadu, Uytenbroek dan Maspaitella diterima Gubernur Jenderal. Ternyata AD SA masih dipelajari oleh *Legercommandant* (Panglima AD). Kajadu minta perantaraan Gubernur Jenderal supaya proses pengesahan SA dipercepat oleh karena waktu terdesak untuk menyatukan rakyat Ambon dalam satu organisasi nasional yang demokratis. Makin lama menunggu berarti akan menyerahkan rakyat ke dalam tangan kaum ekstremis kiri maupun kanan. Dari segi etnografis dan juga historis Ambon mempunyai hak atas suatu persatuan yang bisa membela kepentingan rakyat, demikianlah dikemukakan dr. Kajadu. Gubernur Jenderal menyatakan ada berapa banyak anggota SA dan apakah rakyat Ambon berdiri di belakang SA. Lagipula apakah SA suatu organisasi militer. dr. Kajadu menjawab bahwa SA adalah suatu organisasi rakyat. Lalu Gubernur Jenderal menjanjikan untuk minta *Legercommandant* segera mengirim kembali AD disertai pendapatnya.

Juga kepada *Volksraad* SA mengirim surat tanggal 22 Nopember 1922 dengan permintaan supaya pimpinan Dewan itu mengingatkan pemerintah akan surat permohonan tersebut Malahan SA minta juga bantuan Dahler (salah seorang anggota *Volksraad*) untuk mempersoalkan hal ini dalam *Volksraad*.

Sementara itu SA melebarkan sayapnya. Di Mr. Cornelis (Jatinegara) didirikan cabang dengan pimpinan E. Telehala, W. Manuhua, pattiasina, M. Hahyary dan H. Wattimena. Dalam bulan Januari 1923 atas inisiatif seorang pemuda yang penuh dinamika, Junus D. Syaranamual, didirikan cabang Surabaya. Dibantu oleh Jo Lilipaly, Job Pattipeiluhu, Natan Sipasulta dan Cris Sahetappy. Anggota yang semula 75 orang berkembang kemudian. SA terbuka bagi semua golongan orang Maluku, Kristen maupun Islam. Abdul Motalib Sangaji, seorang

Islam yang berasal dari Pulau (pulau Haruku) turut memperkuat barisan SA. 17) Juga Urip Kasansengari seorang Islam dari Jawa, bekas pegawai kantor Keresidenan Ambon, masuk menjadi anggota. Pengurus Cabang Surabaya ini terdiri dari: Ketua J.F. Tuwanakotta, Wakil-ketua A.M. Sangaji, Sekretaris I J.D. Syaranamual, Sekretaris II J.J. Sipasulta, Bendahara Z. Marcus, Pembantu-pembantu C.A. van Wieringen, J.R. Lilipaly dan K.CH. Pais, Penasehat R.S. Nikiyuluw. 18) Juga di Makassar didirikan cabang di bawah pimpinan J.C. Kajadu.

SA juga mendirikan bagian wanita yang disebut *Ina Tuni* (*Ina*=Ibu; *Tuni*=mulia). Cabang didirikan di Batavia pada tanggal 8 April 1922 diketuai oleh Ibu Kajadu, Sekretaris Ibu Tapiheru, Bendahara ibu Hetharia, Pembantu nona Kajadu dan nona B.B. Taihitu. Di Jawa Ina Tuni bergerak terutama di antara isteri-isteri militer dan menyadarkan mereka akan keadaan sosial-ekonomi mereka yang buruk. Isteri-isteri itu kemudian mempengaruhi suami-suami mereka, sehingga timbul pembangkangan di tangsi-tangsi karena kaum militer menjadi resah dan tidak puas terhadap diskriminasi yang mereka alami.

Berkembangnya SA dengan pesat tidak menyenangkan orang-orang Belanda. Pers pihak sana makin ganas menyerang Patty dan SA. Pihak polisi dan militer pun bertindak keras dan mempersulit rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan di berbagai kota. Pengurus kemudian memutuskan menghadap *Legercommandant* untuk membicarakan pengesahan Ad yang tak kunjung datang. Tetapi sia-sia! Tanggal 25 Maret 1924 baru tiba jawaban: permohonan pengesahan AD ditolak pemerintah. Dalam bulan Oktober tahun itu juga permohonan *rechtspersoon* bagi Ina Tuni ditolak (GB 24 Oktober 1924).

Dibanding dengan organisasi-organisasi lain pada waktu itu SA kecil saja dilihat dari segi jumlah anggota maupun cabang-cabang. Tetapi apa sebabnya SA dianggap pemerintah paling berbahaya? *Sebabnya organisasi ini langsung mengan-*

cam sendi-sendi kekuasaan kolonial yaitu menggoncangkan salah satu tiang yang menopang kekuasaan Hindia Belanda, ialah KNIL. Kaum militer asal Ambon merupakan tulang punggung ketentaraan. Dan ini hendak dipatahkan oleh SA dan Ina Tunj. Bukan saja aksi=aksi Patty di Jawa menggoncangkan kekuasaan kolonial, tetapi aktivitasnya di Maluku pun membawa keresahan di negeri-negeri di Keresidenan Ambon (wilayah Ambon dan Lease) dari mana KNIL mendapat serdadu-serdadu yang terbaik. Rekrutmen serdadu-serdadu baru terancam oleh aksi politik SA.

Inilah sebenarnya latar belakang penolakan itu dan akan disusul dengan tindakan-tindakan keras terhadap Patty dan kawan-kawannya dan terhadap Sarekat Ambon. Penolakan ini membangkitkan amarah yang luas, tetapi pula tekad bulat untuk berjuang terus. SA bukan sembarangan organisasi. Dikemudian oleh para dokter terkemuka pada waktu itu dan kaum intelektual Maluku serta beranggotakan kebanyakan kaum cendekiawan, maka SA menempatkan diri dalam jajaran depan pergerakan nasional.

Sudah sejak tahun 1922 timbul masalah: kontak langsung dengan masyarakat di Maluku. Ide memindahkan pusat perjuangan ke Ambon menjadi bahan perbincangan di kalangan pengurus Pusat. Akhirnya diputuskan Patty harus berangkat ke Ambon. Maret 1923 Pengurus Pusat disusun kembali dengan ketua J.M. Hetharia, Wakil-ketua A.C. Tupamahu, Sekretaris sdr. W.F. Maspaitella, Bendahara D.Z. Uytenbroek, Pembantu J.A. Risakotta, B.W. Leleuly, S. Thijssen, Dr. J.M. Leimena. Para penasehat terdiri dari dr. W.K. Tehupeory, dr. J. Kajadu, dr. Samalo, R.B. Soumokil dan J.G.F. Kneefel (asal Ternate).

Bulan April 1923 A.J. Patty berangkat ke Ambon. Kawan-kawan sefaham telah menunggu-nunggu kedatangannya, karena namanya sudah lama terdengar oleh masyarakat Ma-

luku. Ada yang menjulukinya "*laki-laki kabarisi*" (=pembe-rani) karena sudah terdengar sikapnya menentang pemerintah Hindia Belanda. Orang ingin sekali bertatap muka dengan tokoh SA ini.

Setiba di Ambon dia mendirikan suatu panitia yang disebut *Komite Sarekat Ambon*, karena belum bisa mendirikan suatu cabang. Patty memerlukan waktu untuk observasi keadaan politik, sosial, ekonomi, kebudayaan masyarakat Maluku, sebab sudah lama dia meninggalkan tanah-tumpah-darahnya.

Pada waktu itu sudah terdapat di Ambon sejumlah organisasi dan persekutuan (*Bonden*) yang sebagian telah disebut di muka. Ada suatu federasi *Sou Maloeka*, yang diketuai oleh M.M. Tuanakotta dan telah disahkan dengan GB 5 Desember 1924. Tujuannya ialah meningkatkan keadaan sosial-ekonomi rakyat di Ambon dan Lease. Anggota-anggota federasi ini ialah *Regentenbond* (organisasi raja-raja, patih, orang-kaya yaitu kepala-kepala negeri), *Inlands Leeraarsbond*, *Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB)*, *Pandji Nederland*, *Ambonsch Studiefonds Cabang Ambon*, *Chistelij Ambonsch Volksbond (CAV)* dan *Nusa Ina*. 19) Pengaruh *Regentenbond* besar, karena mereka langsung menguasai rakyat di negeri-negeri (desa) dan raja-raja-patih merupakan perpanjangan dari pemerintah. Mereka ini mewakili opini umum. Sedangkan CAV berpengaruh dalam kalangan negeri-negeri Kristen melalui koperasi-koperasi yang didirikannya.

Yang menentukan jalannya politik di Ambon dan Lease adalah *Ambonraad*, suatu dewan otonomi yang didirikan dalam tahun 1921 (*Staatsblad* 1921 no. 158). Menurut artikel 3 *Staatsblad* tersebut 16 anggota dipilih lima yang sida diangkat di antaranya dua dari anggota Dewan Kota Ambon (*Gemeenteraad* Ambon) dan satu orang pegawai negeri. Masa keanggotaan tiga tahun. Tanggal 11 Januari 1926 Gubernur Maluku

mengusulkan perubahan peraturan pemilihan yaitu dipilih 16 orang Indonesia, empat orang Belanda, dua orang Asing Asia (*Vreemde Oosterlingen*) dan lima orang Indonesia diangkat oleh Gubernur, dengan masa keanggotaan empat tahun.²⁰) Cukup representatif dan demokratis. Hanya cara pemilihan adalah bertingkat (*vertrapte verkiezing*). Rakyat memilih orang-orang untuk menjadi pemilih (*kiesmannen*) untuk daerahnya, kemudian mereka ini akan memilih wakil-wakil untuk duduk di dalam *Ambonraad*.

Di antara dewan-dewan di daerah hanya *Ambonraad* dan *Minahassaraad* mempunyai nilai ketatanegaraan. Di kedua daerah itu terdapat kesatuan kebudayaan. Lagipula penduduk relatif telah maju dalam bidang pendidikan dan pengajaran, sehingga mudah diadakan pemilihan, yang bisa menjamin suksesnya Dewan itu. Anggota-anggota di lain-lain dewan diangkat oleh Gubernur Jenderal. Di Minahassa semua anggota berkebangsaan Indonesia dipilih, sedangkan di Ambon sebagian saja. Jadi kedua dewan itu adalah benar-benar *Dewan Perwakilan Rakyat*.²¹) Pendapat ini kemudian dibantah oleh Mr. Lathary.

Patty dan Komite SA harus bekerja keras dan cepat, karena tahun 1924 akan diadakan pemilihan anggota baru *Ambonraad*. Patty berpendapat bahwa dewan itu dapat dipergunakan untuk melaksanakan cita-cita SA, yaitu perbaikan nasib rakyat.

Patty mulai berkampanye. Diadakan rapat-rapat di kota maupun di negeri-negeri di mana ia membentangkan cita-cita SA. Patty seorang yang pintar bicara dan mahir membaca isi hati rakyat; ia menganjurkan persatuan dalam organisasi untuk memperbaiki nasib sendiri. Di mana Patty muncul di sana berduyun-duyun rakyat datang untuk mendengarnya. Dalam waktu singkat didirikan *kring* (unit kecil) di negeri Paso, Suli,

Tulehu (negeri Islam), Negeri Lima (Islam) dan Hurut. 22) Dari Ambon tersebar ke Pulau (negeri Islam di pulau Haruku), Saparua dan Itawaka. 23) *Kring-kring* ini kemudian akan dikembangkan menjadi cabang.

Rakyat yang entosias di mana-mana merupakan barometer bagi pengaruh SA, sebaliknya menggoncangkan pengaruh para raja-patih. Datanglah reaksi dari sana. *Regentenbond* tidak senang pada perkembangan ini. Para raja-patih membawa keberatan kepada Kontrolur dan Asisten-Residen. Menurut mereka rapat-rapat umum yang diadakan di negeri-negeri bertentangan dengan peraturan berdasarkan adat, karena menurut adat siapa saja yang akan mengadakan rapat atau rapat umum, harus seizin *saniri-raja-patih* (badan pemerintahan negeri) atau *saniri negeri* (rapat umum orang dewasa negeri). Mulai timbul ketegangan-ketegangan karena peraturan seperti itu tidak pernah ada. Patty dan kawan-kawan menghadap Residen dan mengajukan protes. Tetapi Residen menyokong pendirian *saniri-raja-patih*, dan mengatakan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa, itu adalah hak *saniri-negeri*. Dengan demikian dilahirkan suatu "undang-undang adat, undang-undang buatan, yang tidak pernah ada" untuk mencegah aktivitas Patty dan SA. 24)

Tetapi watak orang Ambon memang keras kepala. Makin keras dilarang, makin keras ia berbuat dengan segala risikonya. Demikian terjadi dengan dua orang aktivitas SA, yaitu Yutenbroek dari *kring* Paso dan Moh Nur Lestalu dari *kring* Tulehu. Hampir seluruh penduduk kedua negeri itu masuk menjadi anggota SA. Maka lenyaplah pengaruh raja atas rakyatnya. Kedua orang itu tetap mengadakan rapat-rapat. Akibatnya mereka kena ranjau yang telah dipasang oleh para raja-patih. Mereka ditangkap oleh polisi, dipenjarakan kemudian diasingkan keluar Maluku. Tetapi sia-sia karena tidak ada lembaga lain yang bisa mencegah hal ini. Menurut fasal 37 dari IS (*Indisch Staatsrecht*) hak mengasingkan orang di tangan

Gubernur Jenderal, sesudah mendengar pertimbangan *Raad van Indie*. Orang yang bersalah pun diberi kesempatan untuk membela diri. Akan tetapi di Maluku hak dan wewenang Gubernur Jenderal telah diambil alih oleh raja sebuah kampung sedangkan hak *Raad van Indie* diambil-alih oleh sanirinegeri. 25) Inilah permainan politik Residen dengan *Regentenbond*.

A.J. Patty mengalami sendiri pukulan yang berikut. Dalam perjalanan bulan Juni 1923 ke pulau Haruku ia mengadakan rapat di negeri Pelau. Hadir sekitar 200 orang. Izin rapat telah diperoleh dari Asisten-Residen dan Kontrolur wilayah itu. Juga raja Pelau telah memberi izin. Patty sedang mempersoalkan pajak dan kerjapaksa (*heerendienst*) yang dari abad ke abad selalu memberatkan rakyat. Rakyat yang sedang memperhatikan uraian itu dengan sungguh-sungguh dikejutkan oleh kedatangan Asisten-Residen Jansen dan Kontrolur yang dibawa oleh sebuah motor dari Ambon. Tanpa memberi alasan mereka membubarkan rapat itu. Juga raja Pelau tidak mau memberi jawaban. Sekembali dari Ambon Patty mengajukan protes, tetapi Residen bungkam. 26)

Peristiwa Pelau ini dibawa oleh wakil-wakil *Regentenbond* ke *Ambon raad*. Mereka dengan pedas mengkritik Patty. Ia dianggap berbahaya, oleh karena itu harus dikeluarkan dari Maluku. Dipakai pula peraturan "menurut adat"; dia tidak berhak tinggal di Ambon. Tanggal 28 Nopember 1923 mereka keluaran suatu resolusi yang mendesak pemerintah agar Gubernur Jenderal melarang Patty berdiam di Ambon; agar SA dilarang di Ambon dan Lease; agar gubernemen mengawasi J.D. Putiray, aktivis SA di Saparua. 27)

Tetapi Residen tidak dapat melaksanakan resolusi itu, karena tidak diketemukan undang-undang/peraturan untuk mendukung dilakukannya tindakan sesuai resolusi itu.

Makin dekat pemiluhan makin aktif Patty dan para pembantunya. Tanggal 28 Juni 1924 SA mengadakan rapat besar di Ambon. Diikuti oleh semua pengurus *kring* SA dan Ina Tuni, kira-kira 3.200 orang anggota yang hadir. Rapat besar itu memprotes dengan keras putusan *Ambonraad* bulan Nopember 1923 tersebut di atas. Rapat itu menggegerkan pemerintah, *Ambonraad* dan *Regentenbond* serta masyarakat.

Rapat itu menentukan pula calon-calon untuk pemilihan. Lalu pengurus mengeluarkan suatu daftar nama calon-calon SA untuk *Ambonraad* ialah A.J. Patty, (Ambon), E. Tala (Suli), Abraham Barnela (Ambon), A. Thenu (Lateri), L. Pattiruhu (Paso), J.I. Mattulatuwa (Ambon) B. van Capelle (Galala) dan R.M. Singgih (Ambon). Calon dari pulau Saparua adalah Johan Tupamahu, J.D. Putiray dan C. Syahaletuwa (Ouw). 28)

Kampanye yang dilancarkan Patty dan kawan-kawan membuka mata rakyat akan cita-cita SA. Lagi pula menimbulkan kepercayaan pada diri sendiri. Apa yang dikehendaki SA ialah *zelfbestuur* (otonomi) bagi rakyat di Maluku, agar supaya penduduk dapat mengatur hidupnya sendiri yang lebih baik. *Ambonraad* belum bisa memenuhi cita-cita yang diidam-idamkan SA. Tetapi toh Patty dan kawan-kawan menganggap *Ambonraad* ini penting untuk memperjuangkan kehidupan politik, sosial, ekonomi dan pendidikan/pengajaran yang lebih baik bagi rakyat. Rakyat tergugah untuk memberi suara kepada SA.

Pada pengumuman hasil pemilihan tanggal 18 Agustus 1924 tiga orang calon SA yang terpilih, yaitu A.J. Patty, J. Tupamahu dan J.D. Putiray.

Meskipun hanya tiga orang SA yang terpilih tetapi hal ini merisaukan lawan-lawan SA apalagi di antaranya dua orang yang sudah kena resolusi *Ambon Raad*. Maka *Regenten-bond* bersama pemerintah mencari jalan untuk menghancurkan Patty. Waktu pembukaan *Ambonraad* baru masih beberapa

bulan lagi. Jadi harus cepat memotong Patty, lalu mereka lancarkan pukulan. Pemerintah menuduh Patty dan SA itu "merah" (komunis) tuduhan itu diperkuat oleh pers Belanda di Jawa. Apalagi menjelang pemilihan keluar keputusan pemerintah menolak pengesahan SA. Sekarang Patty dan SA dituduh melanggar hukum, yaitu mengadakan rapat-rapat dan menghasut rakyat agar tidak mengindahkan larangan polisi.

Siang hari tanggal 15 Oktober 1924 Residen bersama polisi datang ke kantor SA, lalu A.J. Patty ditangkap. Kemudian dibawa ke Makasar untuk diperiksa oleh *Raad van Justitie* (Pengadilan Tinggi). 29) Timbul kegoncangan di kalangan SA, tetapi para pemimpin berusaha mengamankan organisasi. Pengurus Pusat di Batavia memprotes, tetapi harus menunggu apa putusan pengadilan.

A.J. Patty diajukan ke pengadilan tetapi *Raad van Justitie* tidak bisa menemukan fatsal-fatsal dalam hukum untuk mengadilinya. Nah, apa selanjutnya? Apakah Patty akan dilepaskan? Seharusnya demikian. Tetapi pemerintah masih melihat pintu belakang, yaitu berpaling ke Gubernur Jenderal, yang mempunyai *hak-hak exorbitant* untuk mengasingkan seseorang. Maka pintu inilah yang dipakai. Tanggal 9 Januari 1925 Gubernur Jenderal mengeluarkan putusan pengasingan Patty ke Bengkulu. Lenyaplah seorang politikus yang militan dari arena politik di Ambon dan dari arena pergerakan nasional. Suatu pukulan yang sangat berat bagi Patty. Tetapi juga SA dan rakyat Maluku, kehilangan seorang pemimpin yang dinamis, berani, cerdas tetapi pula berhaluan keras dan teguh dalam pendirian. *A.J. Patty lah yang pertama-tama menggetarkan jiwa rakyat di negeri-negeri dan menanam kesadaran politik dalam masyarakat Maluku.* Tetapi tragisnya Patty mendapat tantangan daripada para raja-patih. Sedangkan juga untuk mereka dia berjuang agar taraf hidup mereka

dan masyarakat yang mereka pimpin ditingkatkan. Agar mereka dan saniri-negeri bisa turut serta dalam suatu pemerintahan yang otonom dan bukan terus menerus menjadi perpanjangan dari pemerintahan kolonial. Mereka tidak memiliki lagi jiwa merdeka yang dimiliki oleh para raja-raja-patih seratus tahun yang lalu ketika mereka itu berjuang melawan kolonialisme di bawah pimpinan Pattimura (1817).

A.J. Patty seorang yang cerdas. Segera ia minta diasingkan saja ke Nederland agar supaya ia dapat melanjutkan studi. Permintaan itu dikabulkan pemerintah. Harapannya untuk mendapatkan bantuan dari *Ambonsch Studiefonds* ternyata tidak terkabul, karena orang-orang dari AS kurang suka padanya, disebabkan sikapnya yang keras. Dr. Kajadu mengambil inisiatif menggerakkan orang-orang SA untuk membantu pemimpin mereka itu. Cabang Surabaya dan Makassar bergerak mengumpulkan uang. Akan tetapi rupanya tidak berhasil. 30).

Patty tetap tinggal di Bengkulu. Dua tahun lamanya ia berdiam diri, mungkin untuk introspeksi dan belajar dari pengalaman yang pahit. Mungkin juga karena Bengkulu pada waktu itu terisolasi sehingga pengaruh-pengaruh pergerakan nasional tidak sampai masuk ke situ. Disebabkan ia berdiam diri itu, maka Patty mendapat keringanan. Ia dipindahkan ke Palembang, tanggal 12 Desember 1927, dan dipekerjakan di Kantor Residen *dengan perjanjian tidak boleh turut dalam politik*. Adalah sesuatu kemustahilan bagi seorang yang militan, keras dan cerdas seperti Patty ini untuk tunduk pada larangan itu, sedangkan pada waktu itu pergerakan nasional, terutama PNI, sedang mengembangkan sayapnya sampai ke Palembang. Patty mulai terjun lagi ke gelanggang politik. Ia kembali menantang pemerintah kolonial. Akibatnya keluar surat keputusan pengasingan kembali pada tanggal 19 Juli 1930. Dan kali ini ke Ruteng, Flores. Militansinya tidak pa-

dam. Di sini ia mempengaruhi cabang *Timors Verbond*. Pemerintah kolonial yang bersikap sangat keras pada waktu itu dan sedang bertindak keras terhadap kaum pergerakan nasional, memutuskan untuk mengisolasi Patty sama sekali dari dunia politik Indonesia.

Bulan Nopember 1932 putusan dikeluarkan; laki-laki "kabarisi" ini dibuang ke Digul. Dalam bulan Januari 1935 Patty dan kawan-kawan mendapat dua orang tokoh baru, yaitu Hatta dan Syahrir. Ketika Jepang menyerbu ke Irian, maka Patty dan kawan-kawan dipindahkan ke Australia. Di sana A.J. Patty hidup kembali dan memainkan peranan penting dalam menggerakkan kaum buruh membantu Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Permulaan tahun 1946 A.J. Patty menginjakkan kakinya lagi di tanah airnya yang sudah merdeka dan akan memainkan lagi peranan politik dalam Republik Indonesia.

Penangkapan Patty merupakan pukulan bagi SA dan Ina Tuni khususnya di Ambon, karena hingga peristiwa itu terjadi belum lagi terbentuk cabang Ambon. Hanya *Komite Sarekat Ambon* yang mengemudikan organisasi. Empat hari kemudian, Komite mengadakan rapat untuk membentuk suatu badan pengurus dan meninjau kedudukan SA secara keseluruhan. Ancaman penangkapan bisa saja terjadi terhadap setiap aktivis SA. Sekalipun demikian perjuangan harus diteruskan oleh kader-kader yang telah disiapkan Patty. Ini suatu tanggungjawab terhadap begitu banyak aktivis dan pengikut-pengikut SA dan Ina Tuni, yang tersebar di banyak pelosok dan para pemilih yang memberi suaranya kepada SA. Dalam rapat itu disusun suatu *Gedelegeerd Bestuur* (badan pengurus sementara) yang diketuai oleh J.I. Mattulatuwa, Wakil ketua A.A. Parera, Bendahara de Quelju, para pembantu C.F. Rhebok, R.M. Mochtar dan A. Barnella. 31)

Barisan mereka diperkuat dengan kedatangan Dominggus Ayawaila, seorang anggota SA cabang Makassar. Dia adalah pembantu SA dalam penerbitan *Soeara Ambon* yang dipimpin oleh A.J. Patty dan diterbitkan di Makassar. Media ini sangat membantu SA dalam kampanye pemilihan.

Segera pimpinan SA mengkonsolidasi *kring-kring* dan berusaha membawa ketenangan di antara para anggota dan pengikut. Mereka memutuskan menunjuk Abraham Barnella sebagai pengganti Patty untuk *Ambonraad*. Dalam bulan Desember 1924, J.D. Putiray, anggota terpilih daerah Saparua, meninggal dunia. Pengurus menunjuk E. Tala untuk menggantinya. Anggota ini baru saja dilepaskan dari penjara; dia dihukum dua bulan atas tuduhan sama seperti yang dituduhkan pada Patty, yaitu tidak taat pada peraturan polisi dan menghasut rakyat. Kedua orang ini mewakili SA ketika *Ambonraad* yang dibuka pada permulaan tahun 1925. 32)

Sementara itu Pengurus Pusat yang dipimpin oleh Hetharia yang moderat, tidak bisa banyak berbuat. Di dalam maupun di luar pengurus ada yang tidak setuju dengan sikap yang keras dan radikal dari A.J. Patty, yang dijalankan di Ambon. Akibatnya kemunduran dari aktivitas Pengurus Pusat, yang tidak begitu menyenangkan cabang-cabang di Surabaya, Makassar dan Ambon. Malahan ketua cabang Surabaya, J.F. Tuanakotta mengusulkan supaya pusat SA dipindahkan saja ke Surabaya.

Kekendoran ini disebabkan pula oleh tindakan keras pemerintah terhadap kaum pergerakan. Apalagi sesudah pemberontakan PKI dalam tahun 1926, yang menyebabkan ancaman dan tindakan yang lebih keras lagi yang dilancarkan oleh pemerintah. Sedangkan di dalam pengurus pusat SA

terdapat sejumlah pegawai negeri, antara lain beberapa orang dokter, yang bisa kena ancaman pemecatan sewaktu-waktu.

Baru kemudian dengan kedatangan seorang juris muda, Mr. J. Latuharhary, SA akan hidup kembali.

BAB IV

MR. J. LATUCHARHARY DALAM PERGERAKAN NASIONAL

motto Johannes Latuharhary :

"Karena pohon sagu itu telah memberikan darah penghidupan bagiku, maka darah penghidupan itu akan menyuburkan pohon sagu itu." 1)

a. Penerus Perjuangan SA Menuju Kemerdekaan Bangsa

Ketika Mr. J. Latuharhary tiba kembali di Indonesia, dunia pergerakan nasional berada dalam situasi politik yang tidak menguntungkan karena pemberontakan *Partai Komunis Indonesia* (Nopember 1926). Banyak pengikut partai itu ditangkap dan dibuang ke Digoel. Tindakan pemerintah yang keras itu turut mengendorkan aksi partai-partai. *Sarekat Islam* yang bersikap keras diancam oleh pemerintah. Malahan di berbagai tempat di Jawa beberapa pimpinan ditangkap, sehingga memaksa pimpinan SI bersikap lunak. *Budi Utomo*, yang dalam kongres di Solo (April 1926) memutuskan untuk menjalankan politik non-koperasi, dalam bulan Desember 1926 mencabut kembali putusan itu dan kembali ke koperasi. Tanggal 14 Juli 1927 berdiri di Bandung sebuah organisasi baru, yaitu *Perserikatan Nasional Indonesia* (PNI), didirikan oleh Ir. Sukarno. Partai ini memainkan peranan penting dalam pergerakan nasional karena mengemukakan dengan tegas dan memperjuangkan cita-cita persatuan bangsa Indonesia dan kemerdekaan. Organisasi-organisasi pemuda baru saja mengadakan kongres mereka yang pertama dan sedang mengadakan konsolidasi dan menyusun kesatuan gerak untuk menuju ke kongres yang ke II (tahun 1928).

Organisasi-organisasi kedaerahan seperti *Pasundan*, *Sarekat Sumatera*, *Sarekat Ambon*, *Perserikatan Minahasa*, *Timors Verbond*, *Kaum Betawi* dan lain-lain sedang dalam perkembangan mencari bentuk yang lebih serasi untuk menuju ke kesatuan gerak. Sifat organisasi-organisasi kedaerahan ini bukan suatu cetusan *chauvenisme* atau *patriotisme lokal*. Sekalipun para anggota memang kebanyakan berasal dari daerah yang bersangkutan, tetapi organisasi-organisasi ini mempunyai cita-cita untuk mengangkat derajat bangsa Indonesia secara keseluruhan dengan jalan bekerja sama dalam pergerakan nasional.

Ambil sebagai contoh Sarekat Ambon. Organisasi ini sejak semula turut pula aktif dalam *Radicale Concentrasi*, yaitu suatu badan kerjasama beberapa partai yang bersikap keras terhadap pemerintah antara lain menuntut pemerintahan parlementer untuk Indonesia berdasarkan pemilihan umum. Dalam rapatnya yang pertama tanggal 3 Desember 1922 pengurus harian SA hadir bersama-sama *Centrale Sarekat Islam*, Budi Utomo, dan *Nationaal Indosche Partij*. Selanjutnya SA turut aktif dalam RC ini. 2)

Dalam tajuk "Mena Moeria", Desember 1922, dikemukakan cita-cita yang terkandung dalam hatisanubari para pendiri dan pimpinan SA :

"Tekad bulat, bahwa Indie (Indonesia) tidak lama lagi harus memperoleh hak menentukan pemerintahan sendiri, agar supaya rakyat negeri ini, menurut kodratnya masing-masing berkembang menjadi suatu bangsa yang besar, sehingga dengan demikian dapat menduduki tempat yang sama dan terhormat di tengah-tengah bangsa-bangsa di dunia ini."

Lima tahun kemudian tekad ini akan dilanjutkan oleh Mr. J. Latuharhary, yang kembali dari negeri Belanda dengan membawa cita-cita dan pengaruh PI.

Sebelum Johannes Latuharhary berangkat ke Nederland dia sudah kenal akan para pemimpin *Ambonsch Studiefonds*. Dia pula turut aktif dalam *Jong Ambon*, di bawah pimpinan dr. Tamaela. Sempat pula ia mengikuti aktivitas A.J. Patty dan SA dan para pemimpinnya. Pasti ia telah mengetahui tentang apa yang terjadi dalam masyarakat Maluku di Jawa. Dari surat-menyurat dengan kawan-kawannya, mungkin juga melalui media "Mena Moeria", dia dapat mengikuti apa yang terjadi dengan SA, sekalipun dia berada di Nederland.

Pengurus *Ambonsch Studiefonds* menyambutnya dengan gembira. Lalu dibicarakan apa yang ia hendak sumbangkan kepada rakyat Maluku. Sesudah mempelajari situasi di tanah air, maka Mr. Latuharhary memutuskan untuk terjun ke medan politik melalui SA. Dalam berbincang-bincang dengan pimpinan SA dan menilai kembali aktivitas A.J. Patty serta memperhitungkan situasi politik di Indonesia, maka mereka memutuskan untuk meninggalkan garis keras dan radikal dari A.J. Patty.

Mr. J. Latuharhary tiba dari negeri Belanda dengan surat rekomendasi dari guru besarnya Prof. Dr. van Vollenhoven. Seorang sarjana hukum-adat yang terkenal dan mempunyai pengaruh besar dalam pemerintahan Hindia-Belanda. Dengan surat rekomendasi ini jurai muda tersebut segera dapat pekerjaan. Ia diangkat sebagai *Ambtenaar Ter Beschikking* (pegawai yang diperbantukan) pada *President van de Raad van Justitie* (Ketua Pengadilan Tinggi) di Surabaya, pada tanggal 22 Desember 1927. Di situ dia akan bekerja sampai 1 Maret 1929. 3)

Berita tentang kedatangan Mr. J. Latuharhary di Surabaya tersebar luas di kalangan masyarakat Maluku. Bukan saja SA menjadi bangga tetapi seluruh masyarakat Maluku di kota itu turut bangga pula. Dia adalah putera Maluku yang pertama yang meraih gelar *Meester in de Rechten* (Mr), dan di Leiden

pula. Dan sekarang diangkat menjadi pegawai *Raad van Justitie*. Pengurus SA segeramengumpulkan pemuka-pemuka masyarakat Maluku lalu membentuk sebuah panitia penyambutan. Pada hari setiba di Surabaya Mr. Latuharhary disambut meriah oleh masyarakat Maluku bertempat di gedung pertemuan di Kebun Binatang. Bak pesta perkawinan saja. 4) Maklumlah betapa entosias dan bergembira orang-orang Maluku pada peristiwa ini. Tanda permulaan yang baik. Kata pepatah Belanda "*Een goed begin, is het halve werk*".

Penyambutan ini disusul segera dengan turut aktifnya Mr. Latuharhary dalam SA dan pergerakan nasional. Ide-ide baru dan perspektif baru yang dibawanya dari Eropa dimasukkan ke dalam tubuh SA. Ide persatuan dan kemerdekaan bangsa Indonesia menjadi topik pembicaraan dan diskusi-diskusi.

Mr. J. Latuharhary menghadapi dua persoalan penting, *pertama* reorganisasi SA dan *kedua* penempatan SA dalam pergerakan nasional. Masalah kedua ini perlu segera mendapat pemecahan. Surabaya pada waktu itu merupakan salah satu pusat pergerakan nasional yang penting. Di sana berkedudukan pusat *Budi Utomo* dan *Indonesische Studieclub*, yang dipimpin oleh Dr. Sutomo. Kecuali itu terdapat cabang-cabang berbagai partai politik, organisasi pemuda dan wanita, organisasi buruh dan organisasi-organisasi kedaerahan. *Sadar akan persatuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia*, maka berbagai *Studieclub*, partai dan organisasi kedaerahan membentuk suatu persatuan. Bulan Agustus 1926 dibentuk di Bandung *Indonesische Eenheidscomittee* (Komite Persatuan Indonesia) dan di Surabaya Komite Persatuan Kebangsaan. Sebulan kemudian semua *Studieclub* bersama-sama dengan SI, Muhammadiyah, *Jong Islamieten Bond*, Pasundan, Sarekat Ambon, Sarekat Minahasa dan Sarekat Madura mendirikan *Komite Persatuan Indonesia*. Cabang-cabang didirikan di Batavia,

Yogya dan Bandung. Tetapi komite ini tidak berhasil menyusun satu badan persatuan atau federasi. Selama setahun usaha terus-menerus dikerjakan. Ir. Sukarno (Partai Nasional Indonesia) dan dr. Sukiman (Partai Sarikat Islam) berhasil menyusun AD bagi suatu federasi. Dalam rapat besar partai-partai dan organisasi-organisasi pada tanggal 7 Desember 1927 AD ini diterima dan didirikan *Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia* (PPPKI). Federasi ini mempunyai tujuan mempersatukan segenap aksi dari partai dan organisasi yang tergabung di dalamnya dan mencari jalan mencapai gerakan rakyat yang terorganisasi dengan baik. Yang menjadi anggota ialah PNI, *Algemene Studieclub*, Partai Sarikat Islam, Budi Utomo, Pasundan, Sarekat Sumatera, Kaum Betawi, dan *Indonesische Studieclub*. 5)

Beberapa hari setelah pembentukan federasi ini Mr. J. Latuharhary tiba di Surabaya. Sarekat Ambon yang berperan dalam persiapan pembentukan suatu badan persatuan tidak masuk menjadi anggota. Rupa-rupanya tidak terdapat kebulatan pendapat di antara Pengurus Besar SA dan Pengurus Cabang Surabaya. Di Cabang Surabaya sendiri terdapat dua pendapat. Mr. Latuharhary mempunyai pengaruh besar dalam hal ini. Dia tidak setuju SA bergabung dalam suatu federasi yang di dalamnya duduk partai-partai yang berasaskan agama seperti Partai Sarikat Islam. Dia menghendaki pemisahan antara politik dengan agama. J.F. Tuwanakotta, Ketua Cabang Surabaya, berpendapat lain. Sejak semula ia telah turut serta dalam barisan dr. Sutomo, yaitu dalam "*Indonesische Studieclub*". Ia pula telah turut membentuk Komite Persatuan Kebangsaan. Disokong oleh D. Likumahua, ia menganjurkan supaya SA masuk menjadi anggota PPPKI. Tetapi Mr. Latuharhary tidak setuju. Ia tetap pertahankan prinsipnya.

Reorganisasi SA dimulai dengan pembicaraan antara Mr. J. Latuharhary, Cabang Surabaya dan Pengurus Besar,

yang dipimpin oleh dr. Kayadu. Persetujuan dicapai. Pertama-tama pusat SA dipindahkan ke Surabaya dalam tahun 1928. 6) Dengan dibantu oleh tokoh-tokoh SA di Surabaya, Mr. Latuharhary membentuk Pengurus Besar, yang terdiri dari Ketua Mr. J. Latuharhary, Wakil Ketua J.F. Tuwanakotta, Sekretaris T. Sahertian, Bendahara P.J. van der Klaas, Pembantu J.A.J. Pattirajawane dan J.C. Tentua, Penasehat dr. L. Tamaela. Pengurus Cabang Surabaya terdiri dari Z.A. Leuwol, Wakil Ketua/Sekretaris D. Likumahuwa, Bendara O. Nanlohy, Pembantu A. Gasperz dan J. Pattipeiluhu. 7)

Masalah turut serta SA dalam PPPKI menjadi topik yang hangat bagi Pengurus Besar dan cabang-cabangnya, terutama yang ada di Jawa. Pengurus Besar mengumumkan pendiriannya, bahwa SA mengambil sikap netral terhadap agama; menaruh simpati terhadap *Indonesische Studieclub*; tidak menyetujui SI yang membawa-bawa agama dalam pergerakan kebangsaan. 8) Sikap ini ditegaskan lagi pada perayaan sembilan tahun berdirinya SA pada tanggal 18 Mei 1929. Pada perayaan itu diputuskan untuk menerbitkan media SA "*Haloean*" sebagai alat komunikasi ke dalam dan keluar, dengan Latuharhary sebagai pemimpin umum dibantu oleh J.D. Sijarahamual, dr. L. Tamaela dan dr. J. Leimena (bukan oom Jo). Dalam media ini Pengurus Besar mengumumkan sikapnya terhadap PPPKI sebagai berikut: bahwa SA tidak akan masuk PPPKI selama federasi ini tidak bersikap netral terhadap agama dan tidak mempertahankan sikap ini secara tegas dengan jalan menutup pintu bagi organisasi-organisasi yang mempropagandakan agama di dalam pergerakan nasional seperti Sarekat Islam.

Pengumuman ini menimbulkan kejutan di kalangan pergerakan nasional, terutama di kalangan SI. Partai ini berpendirian, bahwa emansipasi tanpa agama Islam sebagai dasar

tidak dapat diterima. 9) Akibat daripada sikap SA ini maka salah seorang pendiri SA Cabang Surabaya, A.M. Sangaji, yang juga adalah anggota pimpinan SI, keluar dari SA.

Sebagaimana terjadi dalam banyak partai dalam pergerakan nasional, SA juga mengalami perpecahan yang diakibatkan oleh pemimpin-pemimpin SA sendiri. Pada tanggal 15 Juli 1929 dr. W.K. Tehupeiory dan dr. H.D.J. Apituley (anggota *Volksraad*) mendirikan suatu organisasi baru, yaitu *Moluksch Politiek Verbond* (MPV). Tujuannya ialah memajukan emansipasi daerah Maluku dalam arti yang luas berdasarkan kerjasama yang loyal dengan pemerintah; menanam rasa tanggungjawab dan persatuan antara suku-suku Maluku, tanpa memandang ras dan agama, untuk mencapai pemerintahan sendiri bagi Maluku dengan tetap mempertahankan ikatan dengan Nederland; membantu setiap usaha yang loyal dari lain-lain suku yang hendak menuju ke pemerintahan sendiri, agar pada akhirnya dapat terbentuk suatu ikatan federatif dari bagian-bagian otonom dalam Hindia Belanda; dan memajukan ootktivitas rakyat Maluku.

Tujuan ini akan dicapai dengan jalan rapat-rapat umum; menerbitkan media; berusaha supaya *Ambonraad* diperluas secara merata; supaya dibentuk dewan-dewan lokal dan *Provinciale Raad* (Dewan Perwakilan Propinsi) di Maluku; supaya pengajaran di Maluku ditingkatkan dan diperluas; supaya dibentuk milisi (wajib militer) Maluku; supaya secara bertahap kerja rodi di Maluku dihapuskan.

MPV menghimbau kepada pemerintah supaya daerah-daerah tertentu di Maluku dieksplorasi; supaya pemerintah menarik minat kaum pengusaha swasta untuk membuka perusahaan di Maluku.

Pengakuan pemerintah tidak perlu ditunggu lama-lama seperti terjadi dengan SA. Permohonan MPV untuk mendapat

rechtspersoon diperolehnya pada tanggal 10 Desember 1929. 10)

Perkembangan baru dalam masyarakat Maluku ini menarik sebagian kaum intelektual Maluku ke fihak MPV. Organisasi ini sekarang menjadi saingan bagi SA. Terutama di Maluku disambut dengan gembira oleh organisasi-organisasi lawan politik SA.

Pengaruh Patty dan SA di Ambon masih terasa mengancam stabilitas politik di Maluku, sehingga para pembesar Belanda menjalankan siasat untuk melumpuhkan SA, baik di Ambon maupun di Jawa. Apalagi sekarang terlihat SA sedang bangkit kembali di bawah pimpinan seorang juris yang cakap, yang secara mendalam telah mempelajari politik kolonial Belanda dengan segala siasatnya. Lagipula ia mempunyai kedudukan penting dalam pengadilan di Jawa Timur. Inilah salah satu faktor terbentuknya MPV sesudah ada pendekatan-pendekatan dari pemerintahan keresidenan Ambon antara lain oleh Residen van Sandick yang mengadakan pembicaraan dengan dr. Tehupeiory dan dr. Apituley di Batavia menjelang terbentuknya MPV.

Munculnya politik non-koperatif di dalam pergerakan nasional yang dipelopori oleh orang-orang PI yang kembali dari Nederland dan Ir. Sukarno dengan PNI nya, ditambah pula dengan cetusan *Sumpah Pemuda* 28 Oktober 1928 oleh Kongres Pemuda ke II, merupakan juga faktor-faktor yang mendorong dr. Tehupeiory dan dr. Apituley untuk mendirikan organisasi baru itu dan menonjolkan dalam tujuannya keterikatan Maluku pada Nederland.

Mr. Latuharhary sekarang menghadapi persoalan: eksistensi SA dan hakekat perjuangannya. Ke dalam diperlukan suatu perubahan yang mendasar. Ke luar, dalam pergerakan nasional, SA yang berada di luar PPPKI, perlu merapatkan barisan dengan organisasi lain seperti Budi Utomo dan *Indo-*

nesische Studieclub. SA menghadapi pula pemerintahan kolonial yang makin keras tindakannya dan tidak mau mengakui SA.

Yang menjadi tujuan perjuangan SA, yaitu kesejahteraan Maluku dan rakyatnya. Rakyat hidup dalam suatu keadaan ekonomi yang buruk akibat dari monopoli dan hongi selama puluhan tahun. Pertanian yang seharusnya menjadi dasar hidup bagi rakyat banyak, tidak dikembangkan. Industri-kecil atau industri-rumah juga tidak dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Modal swasta ada di dalam tangan orang Belanda, Cina dan Arab, yang hanya bergerak dalam perkebunan pala, cengkih atau kopra dan menguasai perniagaan. Anak bumi-putera tidak berperan dalam hal ini.

Pendidikan masih terbatas pada sekolah rendah dan itu pula hanya untuk penduduk Kristen. Akibatnya setiap tahun berpuluh pelajar yang hendak melanjutkan studinya, harus meninggalkan Maluku untuk bersekolah di Jawa. Eksodus daripada pelajar remaja ini, mengakibatkan kemudian penumbuhan kaum cendekiawan Maluku di Jawa, karena setamat sekolah lanjutan, para tenaga muda itu tidak bisa kembali ke Maluku, disebabkan tidak ada kesempatan kerja, yang sesuai dengan pendidikan mereka. Sedangkan pemerintah kolonial tidak menciptakan kondisi-kondisi ekonomis yang memungkinkan para cendekiawan muda itu kembali ke Maluku untuk terjun ke dalam masyarakat. Dengan demikian dijauhilah rakyat Maluku daripada putera-puteri cendekiawannya.

Pemuda-pemuda di negeri-negeri (desa) Kristen dialirkan keluar Maluku, terutama dari Seram, Ambon, Lease dan Maluku Tenggara untuk menjadi serdadu, polisi atau marinir. "*Draainage*" (penghisapan) tenaga-tenaga muda dan sehat keluar dari negeri-negeri, menyebabkan masyarakat negeri kehilangan tenaga-tenaga pembangunan yang sangat dibutuhkan

oleh rakyat bagi mengembangkan pertanian, perikanan dan pelayaran.

Politik *draainage* tenaga manusia ini *werkt verderfelijk* (membinasakan) sebagaimana sudah dikonstatir oleh Mr. Holleman dalam tahun 1923 dalam bukunya "*Het adat — grondenrecht van Ambon en meer bepaaldelijk de Oelassers*".

Latuharhary harus menjawab tantangan ini dengan cepat dan tegas. Segera ia menghubungi teman seperjuangannya, dr. Kayadu, Ketua SA Cabang Batavia untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai MPV. Kemudian ia berangkat ke Batavia dan mengadakan pembicaraan dengan kedua tokoh MPV tersebut di atas. Sekembalinya Latuharhary dan anggota-anggota pimpinan teras SA mempercepat proses reorganisasi dan konsolidasi SA. Mereka mengadakan penjajagan dan persiapan untuk suatu rapat besar di Surabaya.

Tanggal 16 Maret 1930 Wakil-wakil SA dari Makasar dan Ambon telah tiba beberapa waktu sebelumnya. Kemudian menyusul wakil-wakil dari Jawa. Suasana gembira meliputi para delegasi. Kawan-kawan lama saling berpelukan. Yang belum pernah tatap muka dengan Ketua Umum, Mr. J. Latuharhary, sekarang berhadapan dengan pemimpin baru mereka. Suasana gembira diliputi pula oleh suasana prihatin karena pecahnya SA.

Sikap harus ditentukan dalam rapat ini. Pembukaan rapat cukup meriah. Ketua Umum memberi pengarahan yang ditujukan untuk perubahan Anggaran Dasar SA dan menyusun program perjuangan. Sidang-sidang berdiskusi, lalu rapat pleno memutuskan rumusan AD dan ART baru, yang merupakan perubahan yang mendasar dibandingkan dengan AD yang lama.

Tujuan yang diputuskan sidang pleno berbunyi seperti berikut: "Dengan menggunakan semua daya upaya yang sah, SA bertujuan meningkatkan kebutuhan material dan spiritual rakyat Maluku seraya mengembangkan daerah itu untuk men-

capai kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya, serta berikhtiar melenyapkan semua keadaan yang buruk dan kepincangan dalam hukum, yang menghambat tercapainya tujuan tersebut." 11)

Untuk mencapai tujuan itu SA menempuh jalan menyadarkan orang-orang Maluku akan persatuan bangsa; memperbaiki keadaan ekonomi dan sosial rakyat; memperluas dan meningkatkan pengajaran; membantu pemuda-pemuda Maluku yang berbakat untuk maju; memberantas keangkuhan rasial dan hak-hak istimewa berdasarkan ras dalam segala lapangan; turut serta dalam pertahanan berdasarkan wajib-dinas militer; menggunakan cara-cara yang sah untuk mencapai tujuan; kerjasama dengan semua organisasi yang programnya berlandaskan asas yang sama dengan SA. 12)

Tanggal 30 Maret 1930 SA mengirim AD kepada pemerintah untuk memperoleh pengesahan. Dalam tahun itu juga SA disahkan dan menjadi badan-hukum (*rechtspersoon*). Suatu proses yang memakan waktu sepuluh tahun lamanya. Agaknya kedudukan Mr. Latuharhary dalam pengadilan di Surabaya turut menentukan pengakuan pemerintah begitu cepat. Jiwa dan semangat dari AD tersebut sesuai pula dengan politik etis yang dijalankan pemerintah.

AD baru ini meniupkan angin baru dan segar ke dalam tubuh SA. Sekembali dari sidang tersebut di atas cabang-cabang mulai membenahi diri sesuai dengan AD baru itu. Cabang Batavia tetap dipimpin oleh dr. Kajadu, W. Poetiray dan C. Riupassa memimpin cabang Makassar. Di tempat-tempat yang belum didirikan cabang atau ranting dipakai sistem *korespondensi* seperti di Semarang dr. J. Nikiyuluw, di Pasuruan L. Nanlohy, di Malang dr. J.M. Leimena dan di Kediri dr. Th. Pattirajawane. 13)

Keadaan di Maluku sejak semula mendapat perhatian penuh dari Mr. J. Latuharhary, karena Maluku dan rakyatnya

yang menjadi obyek pertarungan politik SA. Sejak didirikan *Gedelegeerd Bestuur*, pada tanggal 19 Oktober 1924, SA di Ambon mengatur siasat lebih hati-hati lagi, oleh karena semua anggota, khususnya anggota pengurus, sewaktu-waktu dapat ditangkap. "Soeara Ambon" memberi arah perjuangan bagi para anggota dan ibu-ibu dalam *Ina Tuni*. Berita-berita tentang pengadilan terhadap Patty dan nasibnya kemudian dapat diikuti rakyat sampai tahun 1926, ketika media itu berhenti diterbitkan.

Pers memainkan pula peranan dalam pergolakan di Ambon. Dengan matinya "Soeara Ambon" peranannya diambil alih oleh "Sinar Maloekoe" dan "Ambon Baroe". Media yang akhir ini dipimpin oleh John Tupamahu salah seorang kader Patty. Media ini adalah organ *Christelijk Ambonsch Volksbond* yang telah disebut di Bab II. Sekalipun CAV tidak berpolitik tetapi "Ambon Baroe" selalu memuat artikel-artikel yang menganjurkan persatuan dan berorientasi pada perjuangan nasional.

Salah seorang penulis yang sangat tajam penanya adalah pendeta Abraham Tahia. Dia adalah pula pengagum Patty dan SA-nya. Tamatan "*School tot Opleiding Voor Inlandsch Leeraar*" (STOVIL) di Ambon ini tidak senang dan tidak puas melihat perkembangan keadaan sosial politik dan ekonomi di dalam masyarakat Maluku. Di dalam khotbah-khotbahnya ia mengemukakan pandangan politiknya, yang berbeda dengan pemerintahan kolonial dan gereja. Artikel-artikelnya di dalam "Ambon Baroe" mempropagandakan kemerdekaan Indonesia. Pandangan politiknya itu menyebabkan Indonesia. Pandangan politiknya itu menyebabkan dia dicap "merah" oleh geraja, yang pada waktu itu sangat dipengaruhi oleh pemerintah. Lalu ia diberhentikan. 14)

Gedelegeerd Bestuur SA menghadapi masalah yang cukup berat. Tekanan pemerintah dan rongrongan *Regentenbond*

terus terasa sehingga beberapa anggota penting meninggalkan barisan SA. Tetapi di dalam *Ambonraad* wakil-wakil SA, A. Barnella dan E. Talla, tetap menyuarakan dan memperjuangkan cita-cita SA.

Dalam tahun 1927 *Ambonraad* meng-*recall* wakil Maluku di dalam *Volksraad*, yaitu R.P. de Queljoe karena bertentangan pendapat dengan *Ambonraad*. Dalam pemilihan anggota penggantian SA mencalonkan J.M.M. Hetharia, bekas ketua PB SA dan E.A. Kajadu. Calon *Regentenbond* lagi-lagi de Queljoe. Tetapi di luar dugaan para anggota Dewan itu pemerintah mengangkat dr. J. Apituley. 15) Tokoh ini dua tahun kemudian mendirikan MPV.

Tahun 1928 adalah tahun pemilihan anggota-anggota baru *Ambonraad*. Menarik pelajaran dari zaman Patty, SA tidak turut serta, apalagi karena SA tidak diakui oleh pemerintah. Siasat diatur dan Dominggus Ajawaila mengambil inisiatif membentuk *Ambonsch Kiesvereeniging* (AKV, Perkumpulan Pemilihan Ambon). AKV menggerakkan para anggota SA dan Ina Tunj di Ambon dan Saparua, sehingga hanya ada dua kontestan yang bersaing, yaitu AKV dan *Regentenbond*.

Rakyat belum melupakan A.J. Patty dan SA-nya. Ternyata dari hasil pemilihan itu, anggota-anggota SA jualah yang terpilih, seperti D. Ajawaila (AKV) dan J.M.M. Hetharia (AKV) mewakili daerah Ambon; daerah Saparua diwakili oleh C. Sijahalatuwa (AKV), Limaheluw (AKV). Sisanya dimenangkan *Regentenbond*, Ambon diwakili oleh L.L. Rehatta, D.J. Gaspers, I. Th. Tita dan J. Setianapessy. Saparua diwakili oleh A. Sangaji, Ch. Kaihattu dan N.J. Amahorouw. 16)

Dengan mendapat angin baru dan segar dari Surabaya melalui surat-menyurat dengan Mr. Latuharhary, maka Ajawaila mengambil inisiatif membentuk pengurus cabang SA di Ambon dalam bulan Maret 1929, yang diketuainya sendiri. Ia dibantu oleh J. Hitijahubessy, H. Hetharia, J.I. Matulattuwa,

D. Tapilatu, A. Thenu, E. Manuhua dan I. Baharuddin. 17)

Ketika beberapa bulan kemudian MPV didirikan, maka melalui "Sinar Maloekoe", dr. Apituley diserang sebagai pemecah-belah SA. Pendirian politik wakil Maluku ini di *Volksraad*, menentang pergerakan nasional. Ia mendapat kecaman pedas di Ambon yang dilancarkan oleh SA dan orang-orang SA dalam *Ambonraad*. Karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Rakyat dan didukung oleh pemerintahan residensi Ambon serta *Regentenbond*, maka dr. Apituley leluasa mempropagandakan cita-cita MPV. Ia berhasil mempengaruhi dan memikat sebagian organisasi yang ada di Ambon. Suaranya makin lantang menentang pergerakan nasional dengan mempergunakan situasi politik yang tidak menguntungkan kaum nasionalis di Jawa, yaitu tindakan keras terhadap PNI dan pemimpin-pemimpinnya antara lain penangkapan dan proses pengadilan terhadap Ir. Sukarno dan kawan-kawan. Perlawanan SA terhadap MPV cukup sengit di Ambon.

Sekalipun banyak musuhnya, tetapi melalui wakil-wakil AKV, Ajawaila dan kawan-kawan tetap memperdengarkan suaranya sebagai orang-orang SA dalam *Ambonraad*. Sekembali mereka dari rapat SA di Surabaya, dengan berpegang pada AD yang baru, D. Ajawaila dan kawan-kawan melebarkan sayap dan mengorganisasi SA, mendirikan beberapa cabang.

Karena dalam rapat SA di Surabaya yang baru lalu itu diputuskan untuk mengadakan kongres SA dalam tahun 1930 itu juga, maka perlu dipercepat pembentukan cabang-cabang di seluruh daerah.

Sejalan dengan itu diadakan persiapan untuk pemilihan anggota *Ambonraad* dalam tahun 1930. Didukung oleh PB terutama oleh Mr. Latuharhary, maka Ajawaila dan kawan-kawan mengambil keputusan untuk turut serta dalam pemilihan di bawah panji-panji SA. Hasilnya Ajawaila terpilih dari daerah

pemilihan Ambon sedangkan J. Sijahaletuwa dari daerah Saparua.

Sekalipun demikian kedudukan SA dalam *Ambonraad* lemah, karena jumlah wakil *Regentenbond* lebih besar. Keadaan ini tidak menguntungkan dalam menentukan wakil Maluku dalam *Volksraad*. Sejak berdirinya Dewan itu, wakil Maluku ditentukan di Ambon. Dengan pembentukan *Ambonraad*, wakil itu ditentukan oleh dewan ini. Hal ini tidak dapat dielakkan karena *pertama* Maluku belum mempunyai *Provinciale Raad* dan *kedua* kaum intelektual hampir semua berasal dari Ambon dan Lease, sehingga Maluku biasanya diwakili oleh seorang putera Ambon.

Menghadapi pemilihan anggota baru *Volksraad* tahun 1930, SA Cabang Ambon mengajukan tiga orang nasionalis dari kalangan SA yaitu Mr. J. Latuharhary, dr. Kajadu dan dr. L. Tamaela. Tetapi karena kalah suara menghadapi *Regentenbond*, maka *Ambonraad* memilih A.E. Kajadu menggantikan dr. Apituley. Ia sefaham dengan pendirian politik dokter tersebut. 18) Dengan demikian di dalam badan perwakilan yang tertinggi pada waktu itu SA tidak bisa mengeluarkan aspirasi politik nasional yang hidup di kalangan masyarakat Maluku, baik di daerah Maluku, maupun di luar daerah Maluku.

Menghadapi masalah-masalah politik seperti diuraikan di atas, Mr. Latuharhary dan kawan-kawan harus bekerja keras. Rapat bulan Maret mengharuskan segera diadakan suatu kongres. PB SA sangat sibuk dengan reorganisasi, konsolidasi serta perluasan organisasi. Daerah-daerah dan kota-kota di mana terdapat banyak orang Maluku dikunjungi dan di mana mungkin didirikan cabang-cabang sesuai dengan AD yang baru.

... Tanggal 25 September 1930 ... Malam pembukaan kongres SA. Suasana dalam gedung pertemuan sangat meriah. Para *jujaro* (pemudi) dan *mungare* (pemuda) dari Surabaya, berpakaian daerah Maluku yang beraneka warna, menyambut

kedatangan para utusan dan tamu undangan. Ibu-ibu Ina Tuni dan bapak-bapak sibuk mengatur para juvaro dan mungare menyambut dan mengantarkan para undangan, Ibu-ibu sibuk kian-kemari mengatur konsumsi. Sementara itu band musik menyambut para utusan dan tamu dengan alunan lagu-lagu Maluku. Di depan pintu masuk para utusan saling berpelukan dan saling berjaba tangan dengan para undangan lainnya, atau dengan kawan atau kaum kerabat, yang sudah lama tidak saling bertemu. Gelak-tawa memecahkan suasana. "*Typisch Ambonsch*" berbisik seorang undangan.

Di tengah-tengah kesibukan itu tiba Mr. J. Latuharhary didampingi oleh anggota-anggota pengurus lainnya dan kawan-kawan terdekat, disambut oleh panitia konggres dan para utusan.

Sewaktu ketua panitia membuka malam resepsi pembukaan itu terlihat di deretan utusan wakil-wakil dari cabang Ambon, Haruku, Saparua, Nusalaut, Seram, Merauke, Makasar, Batavia, Semarang, Solo, Wonokromo dan dari lingkungan "korespondensi" Pasuruan, Malang, dan Kediri.

Tampak pula suatu perwujudan kerukunan nasional dan kesetiakawanan nasional dengan hadirnya di antara para undangan utusan dari Sarekat Madoera, Poetri Boedi Sedjati, *Indonesische Studieclub*, *Vereeniging van Vrouwenwenthuis*, Muhammadiyah, Persatuan Minahasa, dan *Timors Verbond*. 19)

Pers nasional dan daerah ("Ambon Baroe" dan "Sinar Maloekoe") dan pers fihak sana mengirim wartawan-wartawannya untuk meliput malam pembukaan ini.

Pusat perhatian pada malam pembukaan itu ditujukan pada uraian ketua umum, Mr. Latuharhary memulai uraiannya dengan mengenangkan Alexander Jacob Patty, pendiri SA. Sebulan yang lalu kedua tokoh ini sempat bertemu muka di kapal, sewaktu Patty dalam perjalanan ke Flores, tempat pembuangannya yang baru. 20) Latuharhary mengingatkan hadirin

pada jasa-jasa Patty. Tetapi dikemukakan pula bahwa tindakan politik Patty yang keras telah banyak merugikan SA. Oleh karena itu SA sekarang menempuh jalan lain. SA juga menuju ke *kemerdekaan Indonesia*, demikian Latuharhary selanjutnya. Tetapi dia dan PB berpendapat bahwa karena pertimbangan-pertimbangan praktis dewasa ini, SA akan menempuh jalan koperasi. Selanjutnya ia kemukakan bahwa dalam lapangan politik, sosial dan ekonomi SA akan bekerja sama dengan lain-lain organisasi untuk menentang politik pecah-belah yang membahayakan persatuan. SA akan mengorganisasi Ina Tunj agar supaya ibu-ibu dapat mendirikan sebuah sekolah tenun di Ambon. 21)

Uraian ketua umum ini mendapat sambutan hangat dari hadirin dan memberi arah bagi para utusan untuk berdiskusi dalam sidang-sidang selanjutnya. Dalam sidang-sidang keesokan harinya terjadi perdebatan yang cukup ramai, kadang-kadang tegang, terutama mengenai haluan politik yang ditentukan PB, masalah pemilihan anggota *Ambonraad* dan sikap yang harus diambil terhadap MPV. Dalam rapat pleno pada malam harinya disetujui rumusan politik PB dan diambil lima mosi:

- (1) agar sistem pemilihan anggota *Ambonraad* diubah dengan jalan pemilihan secara langsung dan tertulis (rahasia).
- (2) agar jumlah anggota bumiputera dalam *Ambonraad* diperbanyak.
- (3) agar dicegah larangan berserikat dan berapat yang didasarkan pada hukum adat.
- (4) agar di Ambon dibuka sebuah sekolah tenun.
- (5) agar di Ambon diangkat seorang putera daerah ahli penyakit lepra (leproloog). 22)

Pada malam itu "Ina Tunj" atas nama kaum ibu menyampaikan kepada PB sebuah panji tri-warna, *merah-hijau-biru* yang melambangkan: merah = kain perang — keberanian;

hijau = daun sagu — makanan pokok rakyat, dan biru = laut yang memberi hidup bagi rakyat. 23)

Malam konggres itu ditutup dengan kesenian daerah Maluku lalu dilanjutkan ramai-ramai berdendang dan menari semalam suntuk, suatu kebiasaan orang-orang Maluku.

Yang menarik perhatian adalah pernyataan politik yang dikemukakan oleh ketua umum pada malam pembukaan. Pernyataan mengenai *kemerdekaan Indonesia* sudah menjadi prinsip perjuangan SA di bawah pimpinan Latuharhary, yang dibawanya dari negeri Belanda sesuai cita-cita PI. 24) Di zaman Patty SA memperjuangkan *zelfbestuur* bagi Maluku. Kaum pergerakan nasional pada waktu itu, yaitu kaum non-koperasi, sedang mendapat pukulan berat yaitu pengadilan di Bandung menjatuhkan vonis terhadap Ir. Sukarno dan kawan-kawan yang kemudian dikukuhkan oleh *Raad van Justitie* pada tanggal 17 April 1931. Karena tekanan-tekanan berat terhadap PNI dan penangkapan pemimpin-pemimpinnya, maka Mr. Sartono pengganti Sukarno, membubarkan PNI. Suatu pernyataan politik non koperasi pada waktu itu akan menyebabkan malapetaka bagi SA. Sehingga taktik dan strategi yang dikemukakan oleh Mr. Latuharhary, yaitu menjalankan politik koperasi, tak dapat tiada akan menyelamatkan SA daripada tindakan penghancuran oleh pemerintah. Lenyapnya SA akan berarti anggota-anggota yang militan akan kepepet dan sebagian akan lari menggabungkan diri pada MPV. Hancurnya SA akan berarti pula lenyapnya wadah nasional bagi putera-putera Maluku untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang meliputi pula Maluku dan rakyatnya. Inilah kiranya pertimbangan politik yang dikemukakan dalam pembukaan.

Konggres berikutnya diadakan setahun kemudian (1931). Perhatian terhadap SA di kalangan pergerakan nasional makin meluas, terbukti dari hadirnya berbagai organisasi pada malam

resepsi pembukaan. Terlihat wakil-wakil dari Sarekat Sumatera, Kaum Betawi, Pasundan, Puteri Indonesia, Budi Utomo, Sarekat Selebes, Partai Selebes, Partai Bangsa Indonesia, Perhimpunan Pemuda Kristen, *Madoerezenbond*, *Timorsch Verbond*, PPPKI, PPKD dan PP.

Kongres memutuskan untuk tetap memupuk *cita-cita kemerdekaan Indonesia di kalangan orang-orang Ambon*, hal mana disambut dengan gembira oleh kalangan pergerakan nasional. 25)

Permulaan tahun 1932 wakil-wakil dari cabang-cabang dari seluruh Nusantara berkumpul lagi di Gedung Nasional Indonesia, milik PBI di Surabaya, untuk berkonggres. Lagi-lagi pertanyaan politik menegaskan bahwa *persatuan nasional dan kemerdekaan Indonesia* adalah cita-cita SA. 26) Putusan kongres yang penting ialah SA akan memasuki PPPKI. Dunia pergerakan menyambut dengan gembira putusan kongres ini.

Di dalam tubuh PPPKI timbul konflik tajam antara PNI dan *Studieclub* di satu fihak kontra PSII di lain fihak. Akibatnya pada tanggal 28 Desember 1930 PSII keluar dari federasi itu. Barulah kongres tersebut di atas memutuskan SA masuk menjadi anggota PPPKI.

Apa yang telah dilaksanakan oleh SA ? Di Surabaya telah didirikan sebuah sekolah tenun dan asrama wanita (*Vrouwentehuis*). Dalam pelaksanaan keputusan-keputusan kongres untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat di Maluku, maka Mr. Latuharhary membentuk sebuah panitia untuk mencari dana guna mendirikan sebuah sekolah tenun. Pendirian sekolah itu berhasil diwujudkan dalam tahun 1932 untuk menampung gadis-gadis Ina Tuni mengambil peranan utama dalam pendirian sekolah itu.

Mr. Latuharhary kemudian membentuk dan memimpin sebuah *Yayasan Peroesahaan Keradjinan Maloekoe* untuk mengkordinasikan semua usaha sosial ekonomi. Di Ambon

cabang yayasan ini dipimpin oleh anggota-anggota SA, yaitu A.B. Yacoeb dan G.F. Manuputty. Cabang ini bergerak di lapangan koperasi. 27) Gerakan koperasi pada waktu itu dilancarkan juga oleh berbagai organisasi yang ada di Maluku, berhubungan dengan bebas rakyat makin berat, karena keadaan *malaise* sedang menimpa seluruh dunia. Juga rakyat kepulauan Nusantara menderita karena krisis ekonomi itu.

Beberapa bulan sesudah kongres SA tahun 1932, dunia pendidikan kebangsaan digoncangkan oleh tindakan pemerintah dengan dikeluarkannya *Wilde Scholen Ordonnantie* (Ordonansi Sekolah-sekolah Liar = swasta) pada tanggal 1 Oktober 1932.

Pendidikan dan pengajaran dijadikan basis perjuangan bagi peningkatan taraf hidup rakyat Indonesia. Tetapi pemerintah Hindia Belanda mencurigai tiap-tiap sekolah swasta. Tindakan diambil terhadap sekolah-sekolah yang disangka menyalahgunakan pendidikan untuk propaganda politik menentang pemerintah. Sejak tahun 1923 *Wilde Scholen* (sekolah-sekolah partikular) diawasi secara ketat. Sekolah-sekolah partikular dianggap sekolah-sekolah liar oleh pemerintah. Tindakan represif diambil berdasarkan ordonansi 1923. Dengan makin hebatnya perjuangan nasional, makin meningkat pula kekawatiran pemerintah. Lalu dikeluarkan ordonansi tahun 1932 itu. Berbeda dengan ordonansi tahun 1923, ordonansi tahun 1932 ini menindak secara preventif, yaitu izin pembukaan sekolah swasta dapat ditolak berdasarkan prasangka bahwa pengajaran yang akan diberikan bisa menimbulkan bahaya. Ordonansi ini menghembuskan api pertentangan antara kaum pergerakan nasional dengan pemerintah kolonial, sehingga pertentangan menjadi makin besar. Taman Siswa, Budi Utomo, Muhammadiyah, Pasundan dan semua organisasi yang mengurus sekolah mengajukan protes keras. Golongan Cina dan Arab pun menuntut pencabutan WSO itu. Partai-Partai politik

menunjang dengan kuat penghapusan WSO itu. Macam-macam ancaman dikeluarkan oleh semua pihak. Akhirnya bulan Pebruari 1933 pemerintah mencabut untuk sementara waktu WSO itu. Delapan bulan kemudian ordonansi baru yang bersifat represif dijalankan. 28)

SA yang baru memasuki PPPKI pada permulaan tahun 1932 terlibat dalam aksi protes yang dilancarkan oleh PPPKI. Ordonansi ini menimbulkan pula kegoncangan dalam dunia pendidikan dan pengajaran di Maluku. Di situ terdapat sejumlah sekolah swasta yang diasuh oleh berbagai organisasi antara lain oleh SA, Gereja Protestan, Gereja Katolik, golongan Islam, CAV, Arab, Cina dan lain-lain. Tindakan pemerintah itu sangat merugikan sekolah-sekolah partikular. SA dipimpin oleh D. Ajawaila menggerakkan rakyat memprotes tindakan pemerintah tersebut. Dengan jalan ini SA berhasil meningkatkan perhatian rakyat terhadap soal-soal pergerakan nasional. Tanggal 11 Desember 1932 rapat besar diadakan di kota Ambon, dipelopori oleh SA dan dihadiri oleh kira-kira 3000 orang. Pidato-pidato protes yang keras dilemparkan terhadap pemerintah. Rapat itu mencetuskan sebuah mosi menentang ordonansi itu dan menuntut dicabutnya WSO. Karena ordonansi itu meniadakan hak rakyat untuk mengatur pendidikan dan pengajaran bagi anak-anaknya, mematikan inisiatif dan otonomitas masyarakat. Hal itu berarti menghalangi kemajuan bangsa. Selanjutnya rapat itu menyatakan menunjang perjuangan Ki Hajar Dewantara untuk menghapus WSO. Mosi rakyat itu disampaikan kepada pemerintah, PB SA dan PPPKI. 29) Hasil protes dari berbagai penjuru Nusantara menyebabkan WSO itu dicabut seperti diuraikan di atas.

b. Suatu Pilihan yang Menentukan

Di muka telah diuraikan tentang pengangkatan Mr. J. Latuharhary sebagai pegawai pada Raad van Justitie di Sura-

baya. Prestasi kerja yang ditunjukkannya makin meningkatkan kariernya dan membawanya kearah tanggungjawab yang lebih besar. Ia diangkat menjadi "*landrechter*" (hakim) di Surabaya. Kemudian untuk beberapa waktu menjadi *grivier* pada *Raad van Justitie*. Kepercayaan pemerintah kepadanya dibuktikan dengan pengangkatannya sebagai *Voorzitter van de Landraad* (Ketua Pengadilan Negeri) di Kraksaan (Jawa Timur). Tanggal 1 Maret 1929 ia memulai tugas barunya. Para anggota dan pengurus SA bergembira dengan pengangkatan ini. Juga kawan-kawannya dalam pergerakan nasional turut bangga dan bergembira. Dari mana-mana ia menerima ucapan selamat.

Tidak ketinggalan datang pernyataan kegembiraan dari ayah dan adik-adiknya yang ada di Makasar. Sewaktu di Surabaya ayah dan adiknya Edu pernah didatangkan. Suatu pertemuan yang menggembarakan sesudah bertahun-tahun berpisah. Edu ditahan untuk bersekolah di Surabaya atas tanggungan kakaknya. Selanjutnya abangnya ini membelanjai Edu sampai tamat AMS. 30)

Disebabkan aktivitas dalam SA dan media "*Haloean*", kerap kali Mr. Latuharhary datang ke Malang menemui dr. L. Tamaela, dan dr. J.M. Leimena untuk berunding, berdiskusi dan berbincang-bincang mengenai perkembangan politik, ekonomi dan sosial, terutama yang dihadapi rakyat Maluku yang ada di Maluku dan di luar Maluku. Dr. Tamaela pada waktu itu adalah anggota *Gemeenteraad* (Dewan Kota) Malang, Fraksi Nasional. 31) Kunjungan-kunjungan untuk kepentingan organisasi diliputi juga iklim romantika.

Dr. Tamaela 32) memperisterikan seorang puteri dari negeri Kariu, pulau Haruku, Mien Pattirajawane namanya. Di rumah dokter itu berdiam dua orang adik isterinya, Neka dan Yet. Ketiga puteri itu adalah puteri raja Kariu, yaitu Jacob

Pattirajawane yang mempersunting Louise Henriete Rea-soa. 33)

Perkenalan dengan kedua orang gadis itu dan kunjungan berkali-kali berkembang menjadi keasyikan romantika bagi pemuda Johannes yang baru memasuki usia 29–30 tahun. Gadis-gadis Pattirajawane ini merupakan pula besi berani dengan daya penarik yang kuat pula. Diam-diam bersemi di dalam hati Neka, Yet dan Johannes sentuhan-sentuhan cinta yang makin berkembang menjadi bentuk-bentuk yang lebih serius.

Kelihatan Johannes lebih tertarik pada gadis Yet yang cantik dan lebih lincah, tetapi masih terlalu muda, karena baru berumur sekitar enambelas tahun. Keluarga Tamaela kurang begitu entosias melihat hubungan antara Yet dengan Johannes. Untuk menjauhi kedua orang itu Yet dibawa ke Yogya untuk berdiam dengan keluarga Oom Bram Tahia. Ny. Tahia (Tante Putih) adalah kakak Yet. Tetapi cinta yang telah bersemi dan berkembang itu tidak dapat dibendung oleh gunung dan lembah. Sewaktu-waktu ada kesempatan juris muda itu meluncur dengan Fiatnya dari Kraksaan ke Yogya untuk bertemu dengan buah hatinya. 34)

Sebelumnya pilihan itu jatuh Johannes perlu mengambil keputusan yang menentukan jalan hidupnya. Sewaktu studi di Negeri Belanda ia berkenalan dengan seorang gadis Perancis Utara, berasal dari kota kecil Valenciennes. 35) Perkenalan itu bertumbuh menjadi percintaan dan saling mengikat janji. Tetapi sewaktu Johannes hendak bertolak kembali ke tanah air, timbul masalah. Membawa serta gadis Perancis ini tidak mungkin, Karena uang tidak ada. Johannes belum mempunyai gambaran tentang pekerjaannya nanti, apalagi *malaise* sedang mengancam dunia. Sehingga pemerintah memberhentikan banyak pegawai dan membatasi penerimaan pegawai baru. Demikian pula perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.

Memperoleh pekerjaan, sekalipun ia seorang sarjana, sulit bagi seorang Indonesia pada waktu itu.

Perpisahan kedua insan ini menyedihkan juga. Setiba di tanah air surat-menyurat masih tetap mengikat kedua orang muda ini. 36)

"Sesudah Nani mendapat pekerjaan dengan gaji yang cukup besar, terbuka kemungkinan untuk kawin dengan nona ini. Oudeheer (ayah kami) sudah setuju," demikian tutur Edu.

Di keluarga Tamaela berdiam (*in de kost*) juga seorang pemuda, Johannes de Fretes, murid AMS Malang. Sebagai seorang pemuda minatnya terhadap perjuangan nasional dibangkitkan oleh pembicaraan dan diskusi-diskusi antara Mr. Latuharhary, dr. Tamaela, dr. Leimena dan lain-lain pemuka SA. Sebab setiap kali mereka berkumpul dan berdebat, pemuda de Fretes turut mendengar. Lambat-laun Latuharhary tertarik pada pemuda ini. Sekali-sekali pemuda ini diajak bicara. Pada waktu libur de Fretes diundang datang ke Kraksaan dan menginap di rumah Latuharhary. Pada kesempatan semacam ini pembicaraan mereka berkisar pada keadaan rakyat Maluku dan perkembangan politik di Indonesia. Di antara kedua Johannes ini (kedua Nani) lambat laun timbul persahabatan, kerjasama dan saling mengisi, yang terutama akan terwujud dalam zaman Jepang sampai pada masa revolusi kemerdekaan.

Mengenai masalah perkawinan Mr. Latuharhary, de Fretes menurut:

"Dalam pertemuan-pertemuan saya dengan Mr. Latuharhary, pada suatu kesempatan dia ajukan suatu pertanyaan kepada saya; Nani, sekarang saya mau kawin. Saya sudah berjanji untuk kawin dengan seorang gadis Perancis. Dia masih menunggu kabar. Tetapi di dalam perkembangan pergerakan nasional dewasa ini saya dinasehati oleh

ayah saya untuk melepaskan wanita asing itu. Nah, apa sebaiknya?

Saya yang masih anak muda ini menjawab: kalau ini menjadi tujuan perjuangan meester dengan hasil akhir kemerdekaan Indonesia di mana meester hendak menghantar rakyat Maluku ke arah itu, maka sebaiknya meester kawin dengan wanita Indonesia. Dan saya berjanji akan membantu. Dan memang saya turut membantu Latuharhary kawin dengan wanita Maluku."

Bagi kepentingan pribadinya Johannes Latuharhary memutuskan untuk memperisterikan Henriete (Yet) Patty-rajawane. Pada pekan terakhir bulan September tahun 1931 bertempat di rumah keluarga Tahija di Lempuyangan Yogyakarta, diadakan persiapan untuk menyambut perkawinan kedua insan tersebut di atas. Dari Ambon telah datang ibu dari pengantin perempuan. Ayah Yet telah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Sedangkan ayah pengantin lelaki telah tiba dari Makasar.

Upacara pernikahan diadakan pada tanggal 26 September di catatan sipil. Kemudian dikukuhkan oleh pendeta A. Loupatty di gereja Protestan (di samping gedung negara). 37) Pesta perkawinan diadakan di rumah keluarga Tahija secara sederhana saja. Tampak hadir sanak saudara, beberapa pemuka masyarakat Ambon di Yogja, anggota SA dari Surabaya antara lain Tuanakotta, keluarga Leihitu dan Sitanala dari Semarang. Dari kawan-kawan pergerakan nasional hadir antara lain Ki Hajar Dewantara dan Dr. Sukiman.

Atas undangan Dr. Sitanala kedua pengantin ini berbulan madu di Semarang. Beberapa hari mereka berdiam di keluarga dokter Sitanala, kemudian beralih ke keluarga Leihitu untuk beberapa hari pula. 38)

Sekembali di Kraksaan tugas-tugas rutin telah menunggu Mr. Latuharhary. Kecuali itu perhatiannya dipusatkan pada

pergerakan nasional dan perkembangan SA. Mr. Latuharhary senantiasa membawa SA dan anggota-anggotanya turut aktif dalam pergerakan nasional. Kerjasamanya dengan Dr. Sutomo membawa SA untuk kerjasama pula dengan BUDI UTOMO dan *Studieclub*.

Sesudah PSII keluar dari PPPKI, maka terbuka kesempatan bagi SA untuk memasuki federasi itu. Dalam konperensi PPPKI akhir Mei 1931 organisasi-organisasi bukan anggota federasi itu, antara lain SA, diundang untuk menjajagi dan mempersiapkan suatu Konggres Indonesia Raya. Di dalam konperensi itu diputuskan (1) nama *Permufakatan* diganti dengan *Persatuan* dan (2) prinsip *mufakat* dalam mengambil keputusan diganti dengan prinsip *suara terbanyak*.

Menjelang akhir tahun 1931 Mr. Latuharhary sangat sibuk menghadapi Konggres Indonesia Raya. Bersama-sama Alex Matahemual, Nunu Sijaranamual, Tuanakotta, Atus Kailola dan Librekan Nanlohy, ia mempersiapkan prasarannya yang akan dikemukakan dalam konggres itu. 39) Di samping itu mereka harus mempersiapkan konggres SA yang akan diadakan pada permulaan tahun 1932 itu juga. Kesibukan-kesibukan ini menyebabkan tugas-tugasnya sebagai Ketua Pengadilan Negeri menjadi terbengkalai. 40)

Menjelang tahun baru 1932, kota Surabaya diliputi suasana nasional, suasana persatuan dan kesatuan. Di mana-mana terpampang poster-poster dan spanduk-spanduk bergantungan menyambut Konggres Indonesia Raya. Utusan-utusan dari berbagai pelosok tanah air membanjiri kota Surabaya. Utusan-utusan SA dari bagian Timur tanah air sudah berada juga di Surabaya, karena sehabis konggres nasional itu, SA juga akan berkonggres.

Tanggal 1 sampai dengan 3 Januari 1932 *Konggres Indonesia Raya* dibuka dengan meriah, dihadiri bukan saja oleh wakil-wakil organisasi yang tergabung dalam PPPKI, tetapi

juga utusan-utusan dari perkumpulan nasional seperti Sarekat Ambon, Partai Selebes, *Timors Verbond*, Partindo, Vaksentral Persatuan Vakbonden Pegawai Negeri, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Persatuan Kaum Kristen, dan Perkumpulan Politik Katolik Jawa. 41)

Di hadapan tokoh-tokoh politik seperti Ir. Sukarno, Dr. Sutomo, Mr. Iskak, Mr. Sartono, Oto Iskandar Dinata, Thamrin dan lain-lain, Mr. Latuharhary mengucapkan pre-advisesnya (prasaran) yang berjudul "AZAB SENGSA KEPOELAUAN MALOEKOE". Di dalam prasarannya itu Latuharhary memulai dengan uraian bagaimana Kepulauan Maluku ditaklukkan oleh bangsa Eropa dan dijalankan monopoli dan hongi oleh VOC. Kemudian ia menggambarkan betapa kejam VOC merusakkan kehidupan ekonomi dan sosial rakyat sehingga menyebabkan rakyat Maluku hidup dalam kesengsaraan sampai saat ini.

Rakyat Maluku tidak menerima begitu saja penindasan itu. Berbagai peperangan dan perlawanan rakyat timbul antara lain perang Pattimura. Permulaan abad ke 20 berbagai usaha dikerjakan oleh orang-orang Ambon untuk memperbaiki kesengsaraan rakyat dengan jalan mendirikan berbagai organisasi dan perkumpulan sosial, ekonomi, kebudayaan dan politik. Selanjutnya ia menguraikan perjuangan partai politik *Sarekat Ambon*, antara lain dikatakan: 42)

"Dengan mendirikan Sarekat Ambon ini, golongan Maluku telah memperlihatkan, bahwa ia memperhatikan realitas yang sebenarnya, yaitu keharusan bahwa semua golongan bangsa di Indonesia harus saling bekerja sama. Pun ia mengerti bahwa dipandang dari segi sejarah, ketatanegaraan dan ekonomi golongan-golongan itu merupakan satu persatuan.

Pada waktu itu Sarekat Ambon telah menyatakan dalam asasnya bahwa kepulauan Maluku itu harus dipan-

dang sebagai sebahagian kepulauan yang tidak boleh diceraikan dari tanah Indonesia.

Sarekat Ambon merasa wajib mempunyai hubungan dengan lain-lain saudara-saudaranya di Indonesia ini, yang sedang berikhtiar dengan segenap tenaga untuk mempertinggi derajat bangsa Indonesia pada umumnya. Pada waktu itu Sarekat Ambon mempunyai maksud mencapai "Pemerintahan Sendiri" (*Zelfbestuur*).

Zaman baharu membawa pula semangat baharu. Demikianlah maka Sarekat Ambon telah melepaskan cita-cita untuk "*Zelfbestuur*" dan ia sekarang menuju ke arah INDONESIA MERDEKA. Dengan pendirian kodrat alam tentang kerinduan akan kemerdekaan, yakni suatu cita-cita yang suci daripada tiap-tiap mahluk di dunia ini. Jadi menurut pendapat Sarekat Ambon, maka kesudahan kemajuan Indonesia itulah suatu pemerintahan yang bebas, apakah itu suatu *eenheidsstaat* (=negara kesatuan) ataupun suatu *federatievestaat* (=negara federasi).

Cita-cita untuk kemerdekaan tanah air dan bangsa ini, tak seorang pun berhak melawannya, pun bangsa Belanda tidak

.....
Dan pada masa ini Sarekat Ambon, bukan saja berorientasi dan berkecimpung dalam barisan politik umum di Indonesia, melainkan pertama-tama ia bekerja untuk keperluan penduduk Maluku dan selalu memperhatikan keadaan ekonomi dan kepulauan Maluku".

Selanjutnya ia membentangkan posisi dan perjuangan SA di Maluku, yang dirintangi oleh pemerintah dan aparatnya ialah para raja-patih, yang menciptakan "adat buatan" untuk menghalang-halangi SA melebarkan sayapnya di negeri-negeri. Hal ini bertentangan dengan jiwa politik etis, yang membuahkan undang-undang dan peraturan *decentralisasi*.

Hal ini terlihat jelas dalam rintangan-rintangan bagi keikutsertaan dan kampanye pemilihan SA untuk memperoleh kursi dalam *Ambonraad*.

Ia kemukakan juga dalam prasarannya itu surat-menyurat antara SA di Ambon dengan para raja-patih sebagai bukti rintangan terhadap perjuangan SA. Maka prasarannya itu ditutup dengan:

SERUAN KEPADA RAJA—RAJA KITA

"Selaku penutup, suatu seruan kepada raja-patih kita! Perhatikanlah betapa buruk nasib tanah dan bangsa tuan-tuan. Rakyat Maluku minta pertolongan untuk kehidupannya. Tuan-tuanlah yang dipandang sebagai bapak dari rakyat, tuan-tuanlah yang pertama-tama harus memberi pertolongan kepadanya. Oleh sebab itu bekerjalah dengan sukacita dan giat menuntun rakyat untuk mempertinggikan martabatnya.

Insyaflah tuan-tuan, bahwa pangkat raja itu, bukan suatu daya-upaya untuk mendapat sesuap nasi, melainkan suatu pangkat yang mulia yang semata-mata diberikan oleh rakyat yang tuan-tuan pimpin.

Serahkan dirimu kepada rakyat untuk mempertinggi dan menyempurnakan kedudukannya serta tanah airnya. Dan olehnya itu rakyat Maluku, demikian pun rakyat Indonesia yang berpuluh juta banyaknya itu, akan menghormati dan mencintai tuan-tuan."

Uraian Mr. Latuharhary ini mendapat sambutan meriah. Seturun dari mimbar ia menerima ucapan selamat dari tokoh-tokoh penting antara lain Sukarno, Sutomo, Mr. Iskak dan lain-lain. Ketua Dr. Sutomo mengucapkan selamat seraya berkata, "Latuharhary lebih berani dan bebas berbicara daripada saya sebagai ketua. Dan itu pula dalam kedudukannya sebagai seorang *"voorzitter van de landraad."* 43)

Sambutan pers bermacam-macam. Pers nasional memuji pendirian Latuharhary dan SA-nya. Pers sana menyambut dengan memperingatkan pemerintah akan kedudukan Latuharhary sebagai seorang pegawai negeri yang tidak loyal. Para uusan SA, yang beberapa hari lagi akan berkonggres, merasa mendapat perhatian dan bantuan moril besar dari kalangan nasional. Ini ternyata dalam pembukuan konggres SA, yang dikunjungi oleh banyak organisasi dan kawan-kawan seperjuangan. Cabang Makasar mintakan izin dari Latuharhary untuk menerbitkan prasaran itu. Bulan Mei 1932 beredar dengan luas dalam bentuk buku: "AZAB SENGSA KEPOELAUAN MALOEKOE". Bagi banyak kaum muda intelektual asal Maluku, buku ini memberi arah berpikir secara politis nasional untuk menuju kemerdekaan Indonesia. Tetapi buku ini kemudian dilarang peredarannya oleh pemerintah kolonial.

Sebagaimana telah diuraikan di muka konggres SA dalam bulan Januari itu memutuskan untuk menjadi anggota PPPKI. Dengan jalan ini terbuka kesempatan bagi Mr. Latuharhary untuk secara langsung turut mengendalikan PPPKI. Ia diangkat menjadi Sekretaris Majelis Pertimbangan (Pengurus Harian), yang diketuai oleh Dr. Sutomo.

Tetapi bagi pemerintah Hindia Belanda kedudukan Latuharhary sebagai Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat disatukan dengan kedudukan politiknya sebagai Ketua SA dan Sekretaris PPPKI. Tekanan-tekanan berat dilakukan terhadap Latuharhary. Ultimatum diberikan kepadanya: *Pilih Ketua Pengadilan Negeri dengan prospek karier yang menjanjikan atau pilih partai politik dan keluar dari dinas pemerintahan.*

Mr. Latuharhary meminta pendapat dari kawan-kawan seperjuangannya di SA, berkonsultasi dengan pengurus PPPKI, meminta pertimbangan isterinya yang masih muda belia, yang baru saja dinikahinya.

Akhirnya Latuharhary *memutuskan berhenti sebagai Ketua Pengadilan dan keluar dari dinas pemerintahan kolonial*. Kepada pemerintah pusat di Batavia ia mengirim telegram minta berhenti. Permintaannya itu diluluskan.

Ini suatu putusan dan pilihan yang mempunyai konsekuensi luas. Sekarang ia bebas, tidak lagi terikat pada pemerintahan kolonial. Ia bebas untuk menghantar rakyat Maluku melalui SA ke pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Lumrah kalau ada pihak yang setuju dan ada pula yang tidak setuju. Pada umumnya para pejuang dan kawan-kawannya dalam pergerakan nasional memuji tindakannya. Tetapi lawan-lawannya dalam MPV menuduhnya terlalu gegabah. J. de Fretes mengemukakan:

"Mereka samasekali tidak menyetujui tindakan meester memasukkan SA ke dalam PPPKI. Mereka berpendapat bahwa identitas Maluku akan lenyap. Kalau mau masuk harus dengan syarat. Pendapat pemimpin-pemimpin MPV ini baru saya ketahui dalam tahun 1942, ketika saya menghadiri pertemuan mereka.

Saya sebagai pemuda pada waktu itu mempunyai kesan, SA ini diwarnai oleh Latuharhary sendiri. Warnanya ialah bahwa SA harus turut serta dalam pergerakan nasional, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh dari pulau Jawa. Karena hanya dengan persatuan inilah kemerdekaan akan tercapai.

Patty juga sudah mengemukakan ide persatuan itu, tetapi memang dititik-beratkan pada rakyat Ambon. Dengan Latuharhary *eksklusivisme* Maluku dihilangkan. Latuharhary bertekad untuk turut bersama-sama, biarpun dalam keadaan *subordinate*, untuk mencapai kemerdekaan Indonesia."

Pilihan ini bagi keluarganya memang berat. Ny. Latuharhary menurut:

"Putusan yang diambil ini sangat berat bagi keadaan keuangan kami. Nani mulai bekerja dengan gaji f 500,— (lima ratus gulden). Sebagai Ketua Pengadilan gajinya f 750,— (tujuh ratus lima puluh gulden). Suatu jumlah yang besar pada waktu itu. Lebih besar dari gaji kebanyakan orang Belanda. Tetapi sebagian besar habis untuk keperluan organisasi SA dengan "Haloean"-nya dan donasi *Ambonsch Studiefonds*. Jadi ketika Nani minta berhenti kami tidak mempunyai sesen. Dan anak kami yang pertama, Mansje, baru saja lahir. Lalu Nani memutuskan untuk menjadi advokat."

c. Advokat muda pembela rakyat Jawa Timur

Keluarga Latuharhary tetap berdiam di Kraksaan sampai tahun 1934. Permulaan kariernya sebagai advokat tidak mudah bagi Mr. Latuharhary. Jarang ada perkara yang ia tangani. Di samping itu ada halangan dari fihak pengadilan yang belum mengizinkannya untuk langsung muncul sebagai pembela dalam suatu sidang. Oleh karena itu ia terpaksa memakai orang lain untuk membela perkara yang ia tangani. Dua orang pembantunya yang ia didik, yaitu Librekan Nanlohy dan Atus Kailola. Mereka bertiga ini makin lama makin dikenal.

Sebagai Sekretaris PPPKI dan bekas Ketua Pengadilan, ia mengetahui bahwa para petani, pemilik tanah di daerah Kraksaan, Probolinggi, Situbondo dan Jember dirugikan oleh pabrik-pabrik gula. Pabrik-pabrik ini memakai tanah rakyat bertahun-tahun lamanya tanpa bayaran. Rakyat yang dirugikan itu sekarang mendapatkan seorang pengacara. Mereka mulai menuntut hak-hak mereka, lalu melimpahkan perkara itu kepada advokat Latuharhary. Kesempatan untuk membela nasib rakyat kecil ini tidak disia-siakan oleh Latuharhary.

Dengan kerja keras bersama-sama kawan-kawannya ia memulai suatu perkara melawan kapitalisme asing. Proses

perkara ini berjalan beberapa tahun dengan banyak halangan.

"Mereka mencoba menyuap meester dengan uang sebanyak dua kaleng minyak tanah. "*Mijn man is niet om te kopen*" (Suamiku tidak bisa disuap). Nani, menolak mentah-mentah suapan itu," demikian dituturkan oleh Ny. Yet Latuharhary.

Dengan perjuangan yang gigih, akhirnya Latuharhary dan petani-petani Jawa Timur menang perkara itu. Pabrik-pabrik gula harus membayar ongkos-ongkos tanah yang sudah dipakai bertahun-tahun itu. Kemenangan ini menjadikan advokat dan *procureur* Latuharhary makin terkenal di kalangan rakyat Jawa Timur. Maka rakyat di daerah Banyuwangi dan Madura pun datang minta Latuharhary memperjuangkan hak mereka atas tanah yang diambil oleh pabrik-pabrik.

Tidak mengherankan jika Mr. Latuharhary yang makin terkenal itu dipilih menjadi anggota *Regentschapsraad* (Dewan Perwakilan Kabupaten) Kraksaan. Keanggotaan itu berlangsung sampai ia pindah ke Malang.

Dalam tahun 1934 keluarga Latuharhary berpindah dan menetap di Malang. Dalam pemilihan untuk *Provinciale Raad* (Dewan Perwakilan Propinsi) Jawa Timur di Surabaya, Mr. Latuharhary terpilih dan memasuki fraksi nasional. Keanggotaan itu dipertahankannya sampai tahun 1942. Di samping itu ia terpilih juga sebagai anggota *Regentschapsraad* Malang dan mengetuai fraksi nasional sampai Jepang masuk. 44)

Kedudukannya dalam PPPKI mengalami perubahan. Dalam bulan April 1932 federasi itu mengadakan konperensi di Surabaya. Berhubung kebanyakan Pengurus Besar partai/ organisasi, anggota PPPKI, berkedudukan di Batavia, maka konperensi memutuskan memindahkan Majelis Pertimbangan ke Batavia. Dengan demikian Dr. Sutomo dan Mr. Latuharhary

diganti oleh Muhammad Husni Thamrin sebagai ketua dan Otto Iskandar Dinata sebagai Sekretaris.

Ir. Sukarno, yang menerima tugas dari konperensi untuk mengadakan reorganisasi dalam tubuh PPPKI, selesai menyusun rancangan AD dalam bulan Nopember 1932. Pada tanggal 22 Nopember konperensi menerima rancangan AD baru itu dan dalam bulan Mei 1933 AD itu disahkan. Nama perkumpulan itu berganti menjadi *Persatuan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kemerdekaan Indonesia*. Dengan perubahan *kebangsaan* menjadi *kemerdekaan*, maka jelaslah tujuan dan arah perjuangan PPPKI.

Pada akhir tahun 1933 telah tergabung dalam federasi itu Budi Utomo, Pasundan, Sarekat Sumatra, Sarekat Ambon, *Timors Verbond*, Partai Sarekat Selebes, Partindo, dan Persatuan Bangsa Indonesia. PNI-Baru pimpinan Hatta dan Syahrir tidak mau memasuki federasi itu. Hatta malahan mencemoohkan, "itu bukan *persatuan* tetapi *persatean*".

Karena tindakan penangkapan dan pengasingan Sukarno, Hatta, Syahrir, dan lain-lain dan kegiatan-kegiatan non-koperatif dari Partindo dan PNI-Baru, maka PPPKI mengalami hambatan-hambatan serius. Beberapa kali federasi itu berusaha untuk mengadakan kongres akan tetapi selalu dihalangi oleh pemerintah sebab Partindo masih menjadi anggota. Sekalipun Partindo keluar dalam bulan Pebruari 1935, tetapi hal itu tidak bisa lagi menyelamatkan federasi itu. Organisasi-organisasi mulai menarik diri. Akhir tahun 1935 Budi Utomo berfusi dengan PBI menjadi PARINDRA. Tinggal lagi tiga organisasi kedaerahan, yaitu Sarekat Ambon, Pasundan dan *Timors Verbond*. Lonceng kematian telah berbunyi. PPPKI secara diam-diam lenyap dari arena politik. 45)

Apa pun kritik dan keberatan terhadap PPPKI, federasi ini telah berjasa dalam *menumbuhkan dan mempererat rasa persatuan*, mengarahkan perjuangan ke *Indonesia Merdeka*,

dan mengakui *Indonesia Raya* sebagai lagu kebangsaan, *Merah Putih* sebagai panji-panji kebangsaan dan *Bahasa Indonesia* sebagai bahasa persatuan. 46)

Manfaat apa yang diperoleh suku Maluku dari keanggotaannya dalam PPPKI? Jelas bahwa SA secara politis telah menempatkan diri sejajar dengan organisasi-organisasi lain menuju Indonesia Merdeka. Perjuangan SA membuktikan, bahwa golongan Maluku, yang dipimpin oleh orang-orang Ambon, tidak pernah absen dalam perjuangan merintis kemerdekaan Indonesia. Hal ini perlu ditekankan karena pada waktu itu umumnya rakyat di Jawa, dan banyak organisasi dan *mass-media* hanya melihat orang Ambon sebagai "Belanda Ambon", "pengikut-pengikut Belanda". Tetapi mereka tidak kenal akan perjuangan tokoh-tokoh SA dan tidak kenal akan cita-cita dan aspirasi rakyat Maluku sebenarnya. Perjuangan Mr. Latuharhary dan kawan-kawannya pada waktu itu mempunyai arti yang sangat besar di kemudian hari pada waktu perjuangan kemerdekaan.

Karena PPPKI tidak bisa berfungsi lagi, maka Mr. Latuharhary dan semua pemimpin SA di Jawa Timur memasuki PARINDRA untuk melanjutkan perjuangan dalam satu kesatuan nasional.

Rakyat Maluku di Jawa Timur selalu ingin mempertahankan identitasnya dengan jalan mengembangkan kebudayaan Maluku. Kesenian mendapat tempat utama. Seni tari, seni musik dan seni suara — paduan suara maupun *vocal group* — telah menjadi darah daging karena ini adalah warisan dari datuk-datuk Nunusaku (Seram Barat). Untuk memajukan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kebudayaan, maka atas inisiatif mahasiswa NIAS, Gerrit Siwabessy, dalam tahun 1938 didirikan organisasi *Memajoekan Cultuur Maloekoe* (MCM) di Surabaya. Dipimpin oleh seorang guru wanita, yaitu Sientje

Maspaitella sebagai ketua, dibantu oleh sekretaris Wim Hukom, Johan Risakotta, Saartje Sopacua, Reny Putiray, maka MCM berhasil menggerakkan pemuda-pemudi Maluku untuk aktif mengembangkan kebudayaan Maluku. MCM mendapat sokongan penuh dari PB SA dan pengurus Cabang Surabaya.47)

MCM berhasil mementaskan *Pela Nona*, diangkat dari karya Dolf Pattipeilohy, yang mendapat sambutan hangat di berbagai tempat. Pertama kali dipentaskan di stadion Surabaya pada tanggal 2 Juni 1940. Atas permintaan banyak fihak dipentaskan lagi di bioskop Corona pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 1940. Sehabis pertunjukan Dr. Latumeten dan Maspaitella memukul gong mengajak hadirin menari dan berdendang semalam suntuk. Kemudian dipentaskan lagi di Pasuruan dan Malang dalam bulan Agustus. Panitia pertunjukan di Malang diketuai oleh Mr. Latuharhary dan dibantu oleh J. Wattimena dan Atus Kailola. Sehabis pertunjukan di *Militaire Societeit*, orang-orang Maluku berkumpul di rumah keluarga Latuharhary lalu menari dan berdendang sampai pagi.

Di lapangan hijau Latuharhary tidak ketinggalan. Di Surabaya dan di Malang ia sering turun ke lapangan hijau dengan kostum merah-putih mempertahankan panji-panji *Jong Ambon*.

Dalam tahun 1936, tanggal 12 Januari, *Jong Ambon* Malang didirikan dengan ketua Mr. J. Latuharhary wakil ketua A. Nanlohy, sekretaris I F.F. Pattirajawane Sekretaris II Nona A. Maspaitella, bendahara F. Siegers, komisaris J. Latukolan dan J. Wattimena.

Baik *Jong Ambon* Surabaya maupun Malang terhitung klub kelas satu yang mempunyai prestasi dan mutu yang cukup tinggi. 48)

Dalam bidang musik Latuharhary mempunyai *hobby* bermain biola. Tetapi pada suatu hari, di lapangan hijau, ke-

lingking tangan kirinya patah kena tendangan bola yang keras, sehingga tidak dapat lagi ia menggesek biola. 49)

Dalam pergaulan Latuharhary cukup luwes dan mempunyai banyak kawan. Di luar masyarakat Ambon ia banyak bergaul dengan para intelektual dan tokoh-tokoh pergerakan nasional dari lain suku. Mr. Soebardjo yang sudah dikenalnya di negeri Belanda, adalah seorang kawan seperjuangan di dalam bidang pengacaraan di kota Malang dan juga dalam bidang politik. Di kalangan Belanda pun ia mempunyai banyak kawan, sekalipun kerap kali bertentangan pendapat politik.

Pada permulaan tahun 1939 Mr. J. Latuharhary dan Endek Tuanakotta mengunjungi Ambon. Keberangkatannya dibuntuti oleh orang-orang PID (*Politieke Inlichtings Dienst* = intelijen). Sudah menjadi suatu hal rutin pada waktu itu bahwa agen-agen intelijen ini mengawasi dan membuntuti tokoh-tokoh pergerakan nasional. Mereka diberi wewenang luas untuk menghentikan setiap pidato atau uraian dalam rapat-rapat yang menentang pemerintah. Beberapa kali SA mengalami pembubaran rapatnya oleh PID.

Dalam perjalanan ke Ambon Mr. Latuharhary mengunjungi Makasar, untuk bertemu dengan anggota-anggota SA dan para pemuka masyarakat. Rapat-rapat diadakan untuk menerima informasi terakhir, terutama mengenai pergolakan politik.

Kedatangan Latuharhary di Ambon atas permintaan SA di Maluku, karena pada waktu itu sedang dilancarkan kampanye pemilihan anggota *Volksraad* yang baru. Pada akhir Desember 1938 SA kehilangan seorang pejuang yang gigih, yaitu meninggalnya Dominggus Ajawaila. Tempatnya segera digantikan oleh E.U. Pupella, seorang bekas murid Taman Siswa, yang sedang menyebar cita-cita Ki Hajar Dewantara melalui sekolah yang ia dirikan di Ambon yaitu sekolah *Balai Pendidikan*. 50)

Mr. Latuharhary mengangkat Pupella sebagai komisaris SA (*Gedelegeerd Hoofd Bestuur*) untuk Maluku. Sedangkan Cabang Ambon dipimpin oleh L.J. Hatharia. 51)

Kedatangan Latuharhary itu disambut dengan gembira oleh masyarakat Ambon, terutama oleh anggota-anggota SA dan Ina Tuni. Pertemuan-pertemuan diadakan dalam mana Mr. Latuharhary membentangkan perjuangan SA, menuju kemerdekaan Indonesia.

Pupella yang berhasil menjadi anggota *Ambonraad* dalam tahun 1938 sedang berkampanye untuk pemilihan anggota *Volksraad*. SA mencalonkan Mr. Latuharhary, sedangkan *Regentenbond* mencalonkan lagi L.L. Rehatta. Ada seorang lain lagi yaitu Mr. Dr. Ch. Soumokil. Tetapi Pupella mengunggulkan Latuharhary sebagai seorang pejuang nasional yang sudah terkenal luas di kalangan pergerakan nasional.

Henk A. Risakotta, seorang guru di Ambon memimpin para guru dan kaum intelektual berkampanye untuk Latuharhary, Rapat-rapat dan pertemuan diadakan, diseling dengan *makam patita* (piknik) dan kunjungan ke negeri-negeri untuk memperkenalkan Latuharhary kepada rakyat.

Tetapi kali ini pun SA tidak berhasil mengalahkan *Regentenbond*, sekalipun Latuharhary muncul di tengah-tengah rakyatnya sendiri. Rehatta dipilih kembali.

Dengan masuknya Mr. Latuharhary dan pimpinan SA ke dalam PARINDRA, terbuka pintu pula untuk masuknya partai politik ini ke Ambon melalui SA. Setahun sesudah kunjungan Latuharhary, pada bulan Pebruari 1940 PARINDRA Cabang Ambon didirikan dengan pengurus sebagai berikut: Ketua A. Pattinasarany, Wakil Ketua R. Sudijono, penulis I G.F. Manuputty, penulis II Ot Pattimau, bendahara E. Mauwa, anggota La Ode Radja Intan dan I. Badarudin, komisi pers G.F. Manuputty, Surya Wirawan (pemuda) R. Sudijono, Armenzorg (Fakir miskin) E.U. Pupella dan propaganda J.A. Hendriks.52)

Permulaan Mei disusun organisasi Surya Wirawan yang diketuai J.D. Sirjaranamual (pindahan dari Surabaya), penulis/bendahara R. Sudijono, anggota W. Hutubessy, Simin, Karwa dan Carolis Huly. 53)

Jadi pada waktu itu partai politik yang aktif adalah SA dan PARINDRA. Banyak anggota SA yang turut masuk PARINDRA sedangkan pengurus seluruhnya adalah anggota-anggota SA. Justru karena anggota-anggota SA turut memimpin organisasi baru itu, maka timbul perpecahan di dalam pimpinan SA. L.J. Hetharia dan beberapa kawannya tidak setuju dengan adanya PARINDRA. Menurut mereka hanya SA lah yang cocok untuk masyarakat Ambon. Sekalipun demikian karena SA dan PARINDRA bersatu dalam pemilihan maka L.J. Hetharia terpilih menjadi anggota *Gemeenteraad* (Dewan Kota). 54)

Hari Ahad, tanggal 28 April 1940, SA mengadakan rapat untuk memilih pengurus baru yang terdiri dari ketua Ot Patti-mapau, penulis E. Mauwa, bendahara A.J. Hendriks, anggota-anggota P. Telelusa, J. Rikumahu, Ina Talahatu-Ruson-Mahulette, Ina Wattimena-Latumahina. (*Ina Bala*).

Karena tidak terpilih lagi, maka Hetharia dan beberapa kawan keluar dari SA. Mereka kirim kawat protes kepada Latharhary di Malang. J.D. Sijaranamual dan E.U. Pupella yang akan berangkat ke kongres PARINDRA di Banjarmasin, mendapat tugas untuk menyelesaikan persoalan ini dengan pengurus besar. 55)

Ada suatu keluhan yang selalu dikemukakan oleh pers di Ambon kepada partai, organisasi dan kaum intelektual Maluku, yang ada di luar daerah Maluku. Misalnya "Ambon Baroe" (3 Pebruari 1940) menghimbau kepada *Ambonsch Studiefonds*:

"Ibu Maluku selalu berseru-seru siang dan malam memanggil pulang anak-anaknya kemari, tetapi sayang, seruan dan teriakan Ibu Maluku itu tidak mau didengar,

tidak mau diperdulikan dan tagal itu tidak mau disehuti dan digenapi oleh anak-anak tanah air sendiri. Oleh karena itu diusulkan kepada Ambonsch Studiefonds untuk membentuk barisan kaum terpelajar yang dengan rela hati pulang ke tanah airnya Maluku yang tercinta ini."

Keluhan ini adalah refleksi daripada apa yang hidup dalam masyarakat. Memang ada hubungan dengan *draainage* tenaga-tenaga pemuda pelajar keluar daerah Maluku yang telah diuraikan di muka. Maluku sangat kekurangan kaum terpelajar. Mereka bertumpuk di Jawa dan Makasar, tidak pulang-pulang untuk membangun daerah dan rakyatnya.

Keluhan ini pula merupakan kritik terhadap pimpinan SA, para dokter dan lain-lain kaum cendekiawan Maluku. Bertolak dari segi ini "Ambon Baroe" tanggal 17 Mei 1941 menurunkan induk karangan yang berjudul:

APA SEBABNYA DI AMBON TIADA BARANG PERHIMPUNAN POLITIK YANG HIDUP SUBUR?

"Partai-partai politik yang masuk ke Ambon berturut-turut *Insulinde*, menjadi *Sarekat Hindia* (Indische Partij), *Sarekat Ambon*, *Moluksch politiek Verbond* dan PARINDRA.

Mula-mulanya minat terhadap partai-partai itu cukup besar. Tetapi semuanya itu datang dari luar Perkumpulan-perkumpulan itu dalam banyak hal tiada berpatutan dengan adat-istiadat dan cuaca politik disini. Pemuka-pemuka tinggal di luar, tidak hendak tinggal di Ambon. Mereka datang sementara, berpropaganda, lalu pulang kembali ke tanah asing, sedang pimpinan atas perkumpulan itu terserah saja kepada wakil-wakil yang kurang paham.

Kebanyakan orang kurang perhatian akan masuk perhimpunan politik. Ada yang sangka politik itu tiada lain daripada menentang tujuan pemerintah. Pengikut-pengikutnya hanya dari pihak oposisi. Pengikut-pengikut yang demikian mudah sekali melampaui batas dan kalau pemimpin kurang paham atau kurang kuat pendiriannya, maka mudah ia terseret bersama-sama dalam kekeliruan.

Itulah sebabnya kebanyakan perkumpulan-perkumpulan itu kurang mendapat kepercayaan pemerintah.

Kelemahan ekonomi terdapat di kalangan Ambon. Politik seharusnya melindungi ekonomi. Kalau ekonomi belum lahir, orang menganggap daya-upaya tidak perlu.

Organisasi perlukan uang. Kalau financial lemah, segala sesuatu turut lemah pula.

Hemat kita, ekonomi harus disokong sekuat-kuatnya. Politik tentu daripada sendirinya, tiada akan ketinggalan. Politik yang sesuai dengan keadaan ekonomi kita, yang cocok dengan culture kita, itulah yang akan tahan hidup."

Demikianlah surat kabar itu menyampaikan pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat, yang menunggu-nunggu kedatangan putera-puteranya, kaum terpelajar, untuk membangun bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan di Maluku.

Sementara itu politik dunia telah berubah menjadi kancah peperangan yang dahsyat. Negeri Belanda digilas oleh Nazi Jerman. Sedangkan Hindia Belanda menghadapi ancaman dari sisi katek dari Utara, Jepang.

Kaum nasional telah mengajukan via *Volksraad* "Petisi Soetardjo", yang terkenal itu. Tetapi ditolak oleh pemerintah Belanda. Juga tuntutan "Indonesia berparlemen" ditolak, sekalipun partai-partai bersikap loyal terhadap pemerintah berhubungan dengan keadaan perang. Tetapi Gubernur Jenderal di

depan *Volksraad* menolak semua tuntutan perubahan ketatanegaraan dan ditunda sampai perang berakhir.

Inilah air dingin yang mematikan loyalitas partai-partai. Timbul ketegangan yang fatal bagi pemerintah kolonial. Karena ketika Jepang menyerang Hindia Belanda, partai-partai, organisasi-organisasi dan rakyat di mana-mana bersikap pasif. Perang melawan Jepang adalah urusan pemerintah kolonial dan bukan urusan bangsa Indonesia.

Tahun 1942 Jepang menyerang dan menduduki Hindia Belanda, mengakhiri pemerintahan kolonial yang sudah berlangsung tiga ratus tahun lamanya. Rakyat Indonesia sekarang memasuki suatu periode penindasan yang baru.

BAB V

PERJUANGAN SEMASA JEPANG

a. Tiga Kali dalam Penjara 1)

Desember 1941. Perang Pasifik pecah. Serangan kilat Jepang ke Asia Tenggara pada permulaan tahun 1942, mengakhiri kekuasaan Sekutu di daerah ini. Satu demi satu benteng pertahanan Sekutu runtuh, di laut maupun di darat. Di udara pun lumpuh. Dalam tiga bulan saja pemerintah Hindia Belanda bertekuk lutut di Kalijati (8 Maret 1942).

Rakyat di Jawa menyambut dengan gembira kedatangan balatentara Jepang. Merah-putih berkibar di mana-mana sebagai suatu sambutan atas propaganda Jepang yang dilancarkan setiap malam melalui radio Tokyo, ditujukan kepada rakyat dan pemimpin-pemimpin pergerakan nasional.

Dalam kekacauan yang timbul, rakyat di banyak kota dan daerah, melancarkan serangan terhadap hak milik dan rumah-rumah Belanda. Terjadi perampokan dan perampasan terhadap toko-toko, pabrik-pabrik, gudang-gudang dan tangsi-tangsi yang ditinggalkan kosong oleh tentara Belanda. Juga banyak rumah orang berada, orang asing maupun bumiputra, menjadi mangsa perampokan. Keadaan kekosongan kekuasaan menyebabkan rakyat bertindak leluasa menurut nalurinya.

Penulis, yang pada waktu itu, berada di asrama pelajar sekolah guru (Chr. HIK) Sala, bersama dengan kawan-kawan seasrama, siang dan malam harus berjaga-jaga untuk mengamankan asrama dan penghuninya. Selama tiga hari seluruh kota Sala diobrak-abrik oleh beribu-ribu rakyat, merampok dan merampas. Kampung Cina maupun kampung Arab dan daerah pemukiman orang Belanda habis menjadi puing. Seolah-olah kota itu baru saja dilanda granat dan mortir, padahal pertempuran antara tentara Belanda dan Jepang berlangsung

semalam saja di pinggiran kota. Di dalam kota sama sekali tidak terjadi pertempuran.

Tetapi sesudah tentara Jepang mulai mengadakan pener-tiban, berubahlah keadaan itu sekecap mata. Kegembiraan rakyat berubah sekonyong-konyong menjadi ketakutan. Perampok-perampok mulai ditembak mati. Ada kalanya rakyat yang tidak bersalah menjadi korban juga. Jepang mulai melabrak orang-orang yang tidak membungkuk memberi hormat kepada mereka. Merah-putih dilarang untuk dikibar-kan. Hanya bendera putih dengan bulatan merah di tengah-tengahnya (*Hinomaru*) berkibar di gedung-gedung yang didu-duki Jepang. Kemudian rakyat diharuskan pula mengibarkan bendera asing itu.

Penangkapan-penangkapan terhadap orang-orang Belanda, Indo, Ambon, Manado dan Timor mulai terjadi. Kamp-kamp tahanan di kota-kota besar didirikan dan dipisahkan dari dunia luar dengan pagar kawat berduri. Juga banyak pemimpin per-gerakan nasional ditangkap. Hal ini sangat bertentangan de-ngan propaganda setiap malam dari radio Tokyo yang mem-buka dan menutup siaran Indonesianya dengan "Indonesia Raya".

Partai-partai dan organisasi apa pun dilarang dan diperin-tahkan supaya dibubarkan. Di Malang pemimpin-pemimpin PARINDRA seperti Mr. J. Latuharhary, Mr. Soenarko dan Poeger, Juga Walikota Malang, Sardjono, menjadi korban pe-nangkapan.

Di Malang, Surabaya, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogya dan lain-lain kota banyak orang Ambon ditangkap. Kamp-kamp tawanan perang penuh dengan tentara KNIL dan para pensiunan KNIL. Hanya tentara orang Jawa yang dilepaskan dan disuruh pulang ke kampung.

Balatentara Jepang mulai mengatur pemerintahan. Di se-luruh Jawa dan Madura pemerintahan ada di bawah kekuasaan

tentara Jepang ke-16. Markas besarnya berkedudukan di Jakarta. Sedangkan Sumatra dikuasai oleh tentara ke-7 yang bermarkas di Singapura. Kalimantan, Sunda-Kecil, Sulawesi dan Maluku diletakkan di bawah kekuasaan angkatan laut (*Kaigun*) yang bermarkas di Makasar. Batavia diubah menjadi Jakarta, bahasa Belanda diganti dengan bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Sekolah-sekolah berbahasa Belanda dihapus. Hanya ada sekolah yang berbahasa Indonesia dengan bahasa Jepang sebagai bahasa wajib. Istilah "Jepang" dilarang dipakai; harus diganti dengan *Nippon*.

Komunikasi dengan luar negeri diputuskan samasekali, karena radio-radio disegel. Celakalah seseorang atau suatu keluarga, kalau kedapatan zegel itu dirusakkan atau memiliki radio gelap. Dia dan keluarganya diancam dibunuh. Setiap saat serdadu-serdadu Jepang berpatroli dengan alat pencari radio gelap. *Mass media* dilarang diterbitkan. Hanya yang diterbitkan oleh tentara Jepang atau di bawah pengawasan Jepang, boleh dibaca rakyat.

Kekejaman-kekejaman dan penganiayaan-penganiayaan terhadap rakyat mulai dilakukan oleh Jepang. Berbagai kasus tersiar dalam masyarakat. Bermacam cerita dari saksi-saksi mata, pengalaman-pengalaman orang-orang yang mengalaminya sendiri, perlakuan yang kasar terhadap rakyat, kesemuanya itu menghembus arus ketakutan dan kebencian ke dalam masyarakat.

Di rumah keluarga Latuharhary di Jalan Kudus, Malang, Ibu Yet hidup dalam keresahan memikirkan nasib suaminya di penjara Kayutangan. Dengan ketiga puterinya yang masih kecil, yaitu Mansje, Wiesje dan Audi, Ibu Yet tidak habis-habis menaikkan doa ke hadapan Tuhan kiranya suaminya terlepas dari penganiayaan dan bahaya maut. Tidak habis-habis ia menanyakan ke sana-ke sini sebab-sebab suaminya dan kawan-kawannya ditahan. Bukankah sebelum itu radio

Tokyo setiap malam menyerukan kepada para pemimpin partai/organisasi supaya turut membantu Jepang dan tidak usah takut? Bukankah nama-nama para pemimpin antara lain nama Mr. Latuharhary disebut-sebut juga? Dari beberapa kawan Ibu Yet memperoleh keterangan, bahwa Maluku ada di bawah pemerintahan angkatan laut Jepang, sehingga orang-orang Ambon di Jawa mendapat perhatian khusus dari *Kaigun*.

Selang beberapa bulan tidak ada barang ketentuan, maka Ny. Latuharhary bersama Ny. Poeger berangkat ke Jakarta untuk minta bantuan dari kawan-kawan seperjuangan yang bekerja sama dengan Jepang. Mr. Samsedin, salah seorang anggota Pengurus Besar PARINDRA, ditunjuk oleh Jepang untuk memimpin *Pergerakan Tiga A*. Mungkin dia bisa membantu. Setibanya di Jakarta mereka menghubungi Tiga A, Mr. Sudjono, 2) dan lain-lain kawan seperjuangan. Tetapi hasilnya nihil.

Kedua ibu itu pulang kembali ke Malang dengan kereta api melalui Bandung. Di Cianjur kereta api berhenti. Kedua ibu itu tetap berada di gerbong. Ada seorang di peron yang menunjuk ke Ny. Latuharhary, lalu ia naik ke gerbong.

"Saya tidak kenal orang itu. Ia menanyakan kami mau ke mana? Lalu saya ceriterakan penahanan suami-suami kami. Ternyata lelaki itu bekerja di bawah tanah untuk Jepang. Saya menanyakan mengapa orang pergerakan nasional ditahan?" begitulah ditutur oleh Ny. Latuharhary."

Orang itu kemudian mengatakan supaya Ny. Latuharhary bicara saja dengan *Schout-Bij-Nacht* (Laksanaman *Kaigun*). Dia sekarang ada di Bandung dan akan menumpang kereta api ke Surabaya. Setiba di Bandung, lelaki itu turun dan menemui Laksamana itu.

"Kemudian dia naik dan mengundang saya bertemu dengan Laksamana itu. Saya kemukakan bahwa suami saya

dari Maluku. Dan bukan dia saja yang ditahan, tetapi ada 15 orang. Dan saya minta supaya mereka semua dibebaskan, karena kita semua berjuang untuk Asia Timur Raya. Kok mengapa harus ditahan?" begitulah tuturan Ibu Latuharhary.

Laksamana itu berjanji setiba di Surabaya dia akan menulis surat minta mereka semua dibebaskan.

"Dan benar, seminggu kemudian kami dipanggil dan diberitahukan untuk membawa pakaian suami-suami kami. Dan ternyata itulah kunjungan terakhir. Mereka dibebaskan sesudah 4 bulan meringkuk. Betapa gembira hati kami dan berterima kasih pada Laksamana itu. Tetapi siapa namanya? Sampai sekarang saya tidak tau, karena pada pertemuan kami saya tidak menanyakan namanya," demikianlah Ibu Yet mengakhiri ceritanya.

Dua bulan kemudian, yaitu dalam bulan September 1942, keluarga Latuharhary berpindah ke Jakarta dan berdiam di rumah Ny. Tamaela di Kramat. Beberapa bulan kemudian keluarga Latuharhary pindah ke Jalan Serang (sekarang Jalan Syamsurizal). Dr. Tamaela kira-kira dua tahun yang lalu meninggal dunia, karena kecelakaan mobil di daerah Mojokerto.

Di Jakarta Mr. Latuharhary bekerja dalam lapangan sosial, mengurus ibu-ibu dan anak-anak orang Maluku dan Timor, yang ditinggalkan oleh suami-suami mereka karena ditawan atau menyingkir ke Australia. Kemudian ia ditugaskan oleh Jepang untuk mengepalai Kantor Urusan Penduduk Maluku seluruh Jawa. Ia bertanggungjawab atas tindak-tanduk orang-orang Maluku. Jadi kalau ada terjadi apa-apa dengan orang-orang Ambon, Latuharharylah yang harus memberi pertanggungjawaban.

Pada umumnya orang-orang Ambon benci pada Jepang karena tindakan-tindakan yang bengis dan kejam. Sebaliknya Jepang menuduh orang-orang Ambon mata-mata Sekutu. De-

ngan kemenangan-kemenangan Sekutu di Pasifik dan pemboman-pemboman di Surabaya, maka kecurigaan Jepang makin meningkat.

Tahun 1944 adalah tahun yang naas bagi pemuka-pemuka dan pemuda-pemuda Maluku di Jakarta. Pada suatu hari Jepang menangkap kira-kira 30 orang Ambon. Antara lain Mr. Latuharhary, dr. J. Kajadu, Wim Latumeten, Piet de Quelju, Andi Tupamahu, Nunu Syaranamual, Nadab Pieter dan Robert Akyuwen. Apa alasannya, tidak ada yang tahu. Mereka dipenjarakan di Bogor.

Hari yang pertama mereka sudah mulai dianiaya. Menurut Jepang para pemuka itu terlibat dalam jaringan mata-mata untuk kepentingan Sekutu. Untuk memperoleh bukti-bukti, dr. Kajadu, seorang nasionalis, Ketua SA Jakarta, teman seperjuangan M. Husni Thamrin, mulai dianiaya. Ia dipaksa untuk mengaku bahwa kawan-kawannya itu memang mata-mata. Tetapi karena memang ini tidak benar, maka tidak ada alasan untuk mengaku. Maka dr. Kajadu dipukul sampai mati. Isterinya tidak diperbolehkan melihat mayatnya. Ia dikuburkan di pemakaman Bogor. Ny. Kajadu tahu dengan pasti bahwa suaminya dipukul sampai mati, karena ia mendengarnya sendiri dari orang-orang Jepang, yang biasa datang berobat pada suaminya. Ny. Latuharhary menurut selanjutnya:

"Seminggu sesudah itu, pada suatu sore jam 6.00 Ibu Kajadu datang ke rumah saya. Ia ceriterakan bahwa suaminya telah meninggal, dipukul dan dianiaya oleh Jepang. Saya kaget sekali. Jika dokter sudah dibunuh maka lain-lain tawanan akan mengalami nasib yang sama. Sesudah Ibu Kajadu pulang, kira-kira jam 7.00, saya pergi ke tuan Sato, kepala intelijen angkatan laut. Saya tidak kenal dia. Kami biasa bergaul dengan orang-orang bawahannya dari angkatan laut. Jadi saya pergi menemui dia. Ketika saya laporkan bahwa dr. Kajadu sudah dibu-

nuh, dia kaget sekali. Dia menanyakan apakah itu benar. Saya jawab, bahwa saya baru saja dengar dari isterinya sendiri.”

Dalam dialog yang terjadi selanjutnya, dengan sangat emosional disertai tangisan, Ibu Yet mencerca dan memaki-maki orang-orang Jepang.

”Saya tidak tahu dari mana saya dapat kata-kata itu. Saya bilang, apakah tuan dan orang-orang Jepang dan serdadu-serdadu Jepang datang kemari untuk membunuh kami orang-orang perjuangan. Kalau dokter sudah dibunuh, apalagi suami-suami kami.”

Sato menenangkan Ny. Latuharhary. Ia berjanji malam itu juga ia akan ke Bogor. Sekembalinya dia akan mampir ke rumah. Dan memang terjadi demikian. Kira-kira jam 12.00 tengah malam dia datang dan memberi surat kepada Ny. Latuharhary untuk dibawa besoknya ke *Kempeitai* Bogor. Juga dipesannya supaya membawa buku-buku, pakaian, kasur dan lain-lain.

Keesokan harinya bersama-sama dengan Ny. Andi Tupamahu dan Ny. Siyaranamual mereka berangkat ke Bogor lalu menemui komandan *Kempeitai*. *Kempeitai* Bogor kesohor karena kekejamannya. Siapa yang dimasukkan ke situ tidak akan ke luar lagi; dia akan mati dibunuh. Ketiga ibu ini berjuang untuk menyelamatkan suami dan kawan-kawan mereka.

Semula komandan jaga sendiri mau menyampaikan surat dari Sato itu. Tetapi Ny. Latuharhary menolak dan mengatakan bahwa surat itu dari angkatan laut. Ia ingin menyampaikan sendiri surat itu kepada komandan *Kempeitai*. Mendengar nama angkatan laut, segera komandan jaga mengantarkan ketiga ibu itu ke Komandan *Kempeitai*. Sesudah membaca surat itu ia suruh ketiga ibu itu berangkat lebih dulu ke penjara nanti dia menyusul. Tetapi sesampai di penjara ibu-ibu itu ditolak oleh penjaga, seorang Indonesia. Barang-barang tidak

boleh diserahkan. Ketiga ibu itu kembali lagi ke *Kempeitai*. Bersama komandan *Kempeitai* Ny. Latuharhary mengendarai mobil menuju ke penjara. Kedua ibu yang lain menyusul dengan delman. Barang-barang yang dibawa ibu-ibu diperintahkan oleh komandan itu untuk dibawa masuk. Dia sendiri masuk ke penjara dan ketika ia keluar ia katakan kepada Ny. Latuharhary:

- "Nyonya belum bisa bertemu dengan tuan (suami). Nanti satu dua hari lagi dia akan keluar."
- + "Jangan suami saya sendiri, tuan. Ada pemuka-pemuka orang Ambon lain lagi yang ditahan".
- "Baiklah-baiklah, jangan Nyonya takut."

Dan benarlah, tiga hari kemudian para tawanan, pemuka-pemuka orang Ambon itu, dipanggil, disuruh mandi, cukur, dan boleh minta mau makan apa saja. Mereka semua terkejut. Nah, inilah saat-saat terakhir menghadapi maut. Masing-masing tertegun, masing-masing berdoa, sambil mandi cukur. Sesudah makan diperintahkan untuk naik truk. Nah inilah perjalanan terakhir, ke tempat eksekusi. Mesin truk distart, beberapa serdadu Jepang meloncat naik. Barulah para tawanan diberitahu akan dipulangkan. Yang satu memandang yang lain. Terbayang cahaya mata penuh kecurigaan. Ini tidak masuk akal. Mereka tidak percaya. Inikah cara-cara Jepang mengejutkan orang yang menghadapi maut? Sesudah truk memasuki Jakarta dan membelok ke Jl. Serang barulah kekhawatiran dan waswas berganti menjadi kegembiraan dan ratapan dari orang-orang yang sudah tua dan kurus kering itu.

Turunlah mereka di rumah keluarga Latuharhary di mana sanak keluarga sudah menunggu. Terjadi pertemuan kembali yang sangat mengharukan. Peluk-tangis tidak habis-habis. Ratapan seperti ada orang yang meninggal. Para tetangga berlari-lari datang memberi selamat dan turut mencururkan air mata.

Betapa tidak. Melihat betapa buruk keadaan para tahanan, sungguh sangat memilukan. Baru sebulan saja dalam tahanan, keadaan tubuh dan kesehatan mereka menjadi begitu buruk, akibat daripada penganiayaan berat. Piet de Quelju, seorang yang tinggi berbadan besar dan kekar kehabisan daging dan otot-ototnya. Nunu Syaranamual yang juga berbadan besar tidak berdaya lagi untuk berdiri karena dipukul sampai pincang. Ada yang tidak bisa berdiri tegak lagi, lutut-lutut gemetar. Ada yang terganggu urat syaraf. Ada pula yang cacad, seumur hidupnya. Satu-satunya, yang dengan berkat Tuhan tidak cacad, adalah Mr. Latuharhary. Tidak ada seorang di antara mereka yang menyangka, bahwa hari itu mereka akan dibebaskan. Kematian dr. Kajadu akan diikuti oleh Mr. Latuharhary, kemudian oleh yang lain-lain. Urutan mereka sudah tercatat pada sebuah daftar, begitulah ditutur mereka.

Pembebasan mereka adalah suatu karunia Tuhan, yang memakai Ibu Latuharhary dan menggerakkan hati Sato untuk berusaha membebaskan mereka. Pada sore hari di Jalan Serang no. 5 diadakan kebaktian pengucapan syukur ke hadapan hadirat Tuhan Yang Maha Kasih, yang telah melindungi makh-lukNya.

Sesudah keluar dari penjara Mr. Latuharhary dipekerjakan kembali untuk mengurus orang-orang Maluku di Jawa. Karena ia bertanggungjawab atas tindak-tanduk orang-orang Maluku, maka kalau ada orang-orang Ambon melawan Jepang, Latuharhary yang memikul kesalahan itu.

Pada akhir tahun 1944 sejumlah pemuda Maluku di tangkap antara lain Nono Tanasale, Robert Akyuwen 3). Agus Soisa, Kaihatu. Mereka dimasukkan ke dalam penjara Tanjung Priok. Konon siapa yang dijebloskan di situ tidak akan keluar hidup-hidup. Akyuwen dipukul dengan bambu hingga beberapa ruas bambu hancur. Rob tidak bisa lagi berjalan, ia merangkak. Agus Sosa dan Kaihatu mati dianiaya. Non Tanasale di-

pukul habis-habisan. Tetapi pemuda ini bertahan. Pada suatu hari ia berhasil melarikan diri dengan membawa serta uang kas penjara. Bagaimana ia bisa lolos, tak dapat dimengerti oleh penjaga-penjaga Jepang, karena penjara itu mempunyai pintu-pintu besi berlapis-lapis. Kata orang, Nono "*pake-pake*" (memakai kekuatan magi).

Akibat dari perbuatannya itu maka Jepang menangkap Mr. Latuharhary sebagai penanggungjawab orang-orang Maluku dan menjebloskannya ke dalam penjara Tanjung Priok.

"Sekali lagi saya usahakan sendiri. Saya hubungi Mr. Soebardjo, kawan seperjuangan di Malang. Bersama-sama kami pergi ke Nishizima, perwira intelijen angkatan laut, seorang kawan para pemimpin Indonesia yang bekerja sama dengan Jepang. Soebardjo dan Nishizima berusaha untuk membebaskan meester.

Pada waktu itu saya sedang mengandung. Sebelum ditangkap meester sudah pesan, kalau mau melahirkan malam hari minta bantuan dari Nishizima untuk mengantarkan ke rumah sakit, berhubung dengan jam malam. Dan memang pada waktunya, Nishizima mengantarkan saya, tengah malam, ke rumah sakit. Tanggal 12 Januari 1944 saya melahirkan putera kami Ludi. Dua hari kemudian Mr. Soebardjo dan Nishizima datang mengantarkan meester ke rumah sakit untuk menengok puteranya. Ia telah dibebaskan sesudah satu bulan meringkuk", demikian tutur Ny. Latuharhary.

Demikianlah kisah penangkapan seorang pejuang untuk kebebasan bangsanya. Untunglah dia tidak mengalami penganiayaan berat sampai cacat seperti yang dialami kawan-kawannya yang lain. Inilah pula kisah perjuangan seorang isteri yang berjuang untuk membebaskan suami dan kawan-kawannya, suatu usaha yang senantiasa didukung oleh doa.

b. Kegiatan Latuharhary dalam Menyelamatkan Orang-orang Maluku

Sebelum keluarga Latuharhary berpindah ke Jakarta, terjadi re-uni antara tokoh-tokoh MPV dan SA di Jakarta. Atas undangan MPV berkumpul di rumah dr. Tehupeory (MPV) tokoh-tokoh dr. J.B. Sitanala (SA Semarang), dr. Latumeten (SA Lawang), dr. J. Kajadu (SA Jakarta), Bote Anakotta (Sekretaris MPV), beberapa tokoh MPV lainnya dan tokoh pemuda J. de Fretes. 4) Yang diundang tetapi tidak hadir ialah Mr. J. Latuharhary, Abdul Motalib Sangaji dan Mr. Dr. Ch. Soumokil (Surabaya). Mr. Latuharhary tidak hadir oleh karena ia baru saja keluar dari tahanan dan sudah ada rencana untuk berpindah ke Jakarta. Ini merupakan suatu re-uni dari kawan-kawan lama yang telah berpisah jalan perjuangan dan sempat menimbulkan pertentangan politik di kalangan orang-orang Maluku.

Maksud re-uni ini untuk menghadapi keadaan baru yang ditimbulkan oleh larangan Jepang terhadap partai-partai politik dan organisasi lain.

Sebagaimana dikemukakan di muka Latuharhary dianggap oleh orang-orang tua ini terlalu gegabah tanpa syarat memasukan organisasi politik Maluku ke dalam organisasi persatuan Indonesia, yang dipimpin oleh Sukarno dan Sutomo. Karena hal itu menghilangkan identitas Maluku. Re-uni itu menyetujui persatuan Indonesia, tetapi berdasarkan suatu kontrak bahwa tiap-tiap daerah dijamin identitasnya.

"Politik hal ini kurang terang bagi kita, tetapi baru sekarang kita mengerti. Saya sebagai pemuda tidak setuju dengan pendapat mereka itu. Sekalipun saya tidak ucapkan. Nah, dalam hal ini Latuharhary itu feeling politiknya tepat sekali, karena dia satu-satunya pemimpin organisasi politik Maluku yang spontan terjun ke dalam pergerakan persatuan nasional tanpa syarat dan menghantar orang-

orang Maluku dalam pergerakan kebangsaan Indonesia", demikian pendapat J. de Fretes.

Tetapi dengan keadaan baru dan larangan terhadap partai-partai politik, maka MPV maupun SA selama pendudukan Jepang tidak bisa bergerak aktif dan lambat-laun lenyap.

Setiba Mr. Latuharhary di Jakarta ia bersedia bekerjasama dengan Jepang. Motivasinya sama dengan Sukarno, Hatta dan lain-lain tokoh pergerakan nasional. Ada yang bekerja sama, tetapi ada pula yang menentang fasisme Jepang dan berjuang di bawah tanah seperti Syahrir, Tan Malaka dan lain-lain.

Latuharhary disertai tugas mengurus orang-orang Maluku di seluruh Jawa. Untuk itu ia ditempatkan pada Urusan Dalam Negeri (*Naimubu*) di bawah *Gunseikanbu* sebagai Kepala Kantor Urusan Penduduk Maluku. Sedangkan sekretarisnya adalah Hadi Tayeb (sekarang Gubernur Aceh). Mereka bekerja di bawah pengawasan seorang Jepang bernama Mitzuma. Kantor itu terletak di gedung dekat kantor pusat Pertamina sekarang.

Melihat keadaan orang-orang Maluku dan Timor, terutama anak-isteri tentara KNIL, yang terlantar maka para pemuka masyarakat Maluku dan Timor membentuk suatu organisasi sosial yang disebut *Badan Penolong Ambon Timor* (BAPATI). Tujuannya untuk meringankan penderitaan orang-orang terlantar itu dan mengamankan orang-orang Maluku dan Timor yang terancam. Usaha ini sejalan dengan tugas dan tanggungjawab Mr. Latuharhary. BAPATI ini dipimpin oleh dr. J. Kajadu, Mr. J. Latuharhary, ini dengan bantuan dr. J. Kajadu. J.D. Siyaranamual, Piet A. de Queljoe, Andi Tupamahu, dan S.J. Pieter. Semuanya bekas anggota-anggota pimpinan SA. Mereka dibantu oleh pemuka-pemuka masyarakat Timor seperti Dr. Johannes. Pemimpin-pemimpin organisasi ini bekerja rapat dengan orang-orang Jepang dari *Kaigun*.

Lambat-laun organisasi ini dipakai sebagai tameng untuk kegiatan-kegiatan politik. Dan karena hal ini tercium oleh

Kempeitai, maka mereka dalam tahun 1944 ditangkap dan dipenjarakan di Bogor sebagaimana dikisahkan di muka. 5)

Juga para pemuda Ambon dan Timor mendirikan gerakan Pemuda Ambon Timor untuk turut membantu keluarga-keluarga yang terlantar itu. Gerakan sosial ini dipimpin oleh pemuda-pemuda J. de Fretes, Fred Latumeten dan Albert Latuasan. Kerjasama Ambon Timor ini merupakan lanjutan dari perjuangan bersama dalam PPPKI dahulu antara SA dan *Timorsverbond*.

Latuharhary yang sudah lama berkawan dengan de Fretes sedari Malang, menawarkan kepadanya untuk bekerja saja di kantornya. de Fretes menerima bekerja di situ di mana gerakan pemuda Maluku juga mendapat tempat bernaung. de Fretes seperti Thaib bekerja sebagai pegawai kantor tersebut. Ia duduk seruangan dengan Hadi Thaib. Kantor itu pula menjadi tempat para pemuda mengadakan rapat-rapat sehingga terlepas dari kecurigaan dan pengawasan intelijen Jepang.

Karena urusan itu dititikberatkan pada urusan Maluku, maka gerakan itu diubah menjadi Gerakan Pemuda Maluku di bawah lindungan Mr. Latuharhary. Sedangkan pemuda Timor bergerak sendirian dalam organisasi mereka.

Turut serta dalam gerakan itu Lukas Polhoupepsy, Wim Latumeten, Fred Latumeten, Rob Akyuwen dan beberapa pemuda lagi. Di situ secara langsung Latuharhary mengarahkan para pemuda Maluku ini untuk bergerak dalam gerakan kemerdekaan Indonesia. Mulai saat itu Gerakan Pemuda Maluku ini turut serta secara langsung dalam gerakan pemuda Indonesia umum. Gerakan Pemuda Maluku ini mempunyai hubungan erat dengan gerakan pemuda Indonesia lainnya yang pemimpin-pemimpinnya antara lain B.M. Diah dan Chairul Saleh. 6)

"Gerakan Pemuda Maluku ini diteruskan sampai bulan Juni 1945, ketika pemuda-pemuda berkumpul untuk membicarakan prinsip-prinsip perjuangan pemuda menge-

nai suatu proklamasi kemerdekaan dan cara mempertahankannya nanti. Maka B.M. Diah pribadi datang beritahukan saya mengenai rapat rahasia di mana saya turut sebagai pemuda Maluku, bersama Ir. Johannes dari Timor. Saya mengadakan pembicaraan dengan Latuharhary dan dia katakan: "Turut saja, memang Jepang nanti mengemukakan; itu urusan saya", demikian de Fretes.

Sementara itu para mahasiswa Maluku mendapat juga bimbingan dari Mr. Latuharhary. Pada permulaan tahun 1943, sekolah kedokteran di Jakarta dibuka kembali dengan nama *Ika Daigaku*. Inilah satu-satunya sekolah kedokteran pada waktu itu. Mahasiswa bekas NIAS Surabaya dan Geneeskundige Hoge School Jakarta turut mendaftarkan untuk sekolah baru itu. Tetapi ketika para mahasiswa asal Ambon yaitu Frans Pattiasina, A. Hukon, Wim Latumeten, Hehanussa dan Hitiahubessy datang untuk mendaftarkan, mereka ditolka. Para mahasiswa itu segera menghubungi Mr. Latuharhary. Ternyata mahasiswa lain yang berasal dari Indonesia Timur juga tidak diterima, misalnya Engelen, Mamahit dan Zus Ratulangi.

Mr. Latuharhary, Dr. Ratulangi, Dr. Johannes, Mr. Tajuddin Noor dan Ir. Pangeran Noor bersama-sama membicarakan hal ini dengan fihak *Kaigun*. Fihak *Kaigun*, yang merasa bertanggungjawab atas penduduk yang berasal dari Indonesia Timur dan Kalimantan, segera berusaha supaya para mahasiswa asal daerah itu diterima. Hasilnya para mahasiswa itu akhirnya diterima juga, sekalipun baru tiga bulan kemudian. Ada untungnya diurus *Kaigun*, karena mahasiswa-mahasiswa itu malahan mendapat uang saku dan fasilitas yang lebih baik.⁷⁾

"Setiap bulan kami dikumpulkan untuk bertukar fikiran dengan orang-orang angkatan laut antara lain dengan Nishizima, seorang yang pro kemerdekaan Indonesia. Kami selalu berkumpul di markas besar Kaigun di Gunung Sari. Kemudian hari baru kami tahu bahwa Nishi-

zima ini adalah seorang yang betul-betul berusaha supaya kemerdekaan Indonesia lekas tercapai," demikian dituturkan oleh Dr. Pattiasina.

Dalam melaksanakan tugasnya Mr. Latuharhary mengeluarkan surat edaran, yang dikirim kepada para pemuka masyarakat Maluku di seluruh Jawa, untuk mendaftarkan orang-orang Maluku yang ada di dalam kota masing-masing. Juga melalui pers diserukan supaya orang-orang Maluku mendaftarkan dirinya dan menghubungi Kantor Urusan Penduduk Maluku di Jakarta.

Di berbagai tempat masalah pendaftaran ini menimbulkan kecurigaan. Apa tujuan sebenarnya? Hal ini baru bisa diketahui kalau ada informasi dari tangan pertama, yaitu kalau dikunjungi langsung oleh Mr. Latuharhary. Jangan-jangan ini siasat dari Jepang untuk dengan mudah menangkap orang-orang Maluku. Apalagi ketika tersiar berita tentang penangkapan Mr. Latuharhary, dr. Kajadu dan kawan-kawan. Ada pula tersiar berita tentang penangkapan orang-orang Ambon di Surabaya setiap kali kota itu dibom oleh pesawat Sekutu dan disusul dengan berita pembunuhan para tawanan. Tersiar pula berita tentang pembunuhan kaum intelektual di Kalimantan antara lain seorang putera Maluku Dr. Achmad Diponegoro dan keluarga Nadab Pattiasina di Pontianak. Berita penangkapan Dr. J. Leimena sampai pula pada masyarakat Maluku di seluruh Jawa.

Sekalipun demikian toh dari kota-kota dan tempat-tempat di Jawa dikirim daftar orang-orang Maluku ke kantor yang dipimpin Mr. Latuharhary. 8) Dengan jalan ini Mr. Latuharhary dapat mengetahui bahwa ada kira-kira 30.000 orang Maluku pada waktu itu di Jawa.

Usaha ini terbatas pada kegiatan pendaftaran saja. Karena bantuan sosial sulit diperoleh, berhubung keadaan sosial-ekonomi masyarakat di Jawa pada umumnya makin lama makin

parah. Berjuta-juta rakyat kelaparan, ratusan ribu pengemis berkeliaran di mana-mana, rakyat yang telanjang menutup badannya dengan bagor. Berbagai penyakit menular merajalela. Rakyat dihinggapi pula penyakit gatal dan borok. Sedangkan obat tidak ada. Rakyat yang dikenakan kerjapaksa, yang disebut *romusha*, ditakdirkan untuk mati kelaparan atau mati diserang malaria, borok, *hongerodeem*, tipus, *tbc* dan sebagainya. Sungguh malang dan sengsara rakyat Jawa di bawah telapak kaki kaum fasis Jepang.

Jadi rakyat Maluku di berbagai kota dan tempat harus berusaha sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Ada yang mendirikan badan-badan sosial, ada yang melakukan pekerjaan apa saja untuk dapat hidup, ada yang bekerja pada pemerintahan Jepang. Pendeknya benar-benar perjuangan hidup yang sangat berat, ditambah lagi dengan dikejar oleh bayangan hantu penangkapan sewaktu-waktu.

Di Surabaya misalnya seorang perwira *Kaigun* yang bernama Sakata, dengan perantaraan Mr. Latuharhary, menghubungi Martinus Kolibonso. Atas usaha perwira ini, maka Kolibonso bisa memperoleh sebidang tanah di Wonocolo seluas 5—6 ha. Di situ dikumpulkan kira-kira 200 orang Maluku untuk mengolah tanah dan menanaminya dengan padi dan berbagai jenis tanaman bahan makanan. 9)

Untuk kesekian kalinya terbukti betapa *Kaigun* memperhatikan penduduk asal Maluku. Di samping kekejaman-kekejaman ada pula orang-orang Jepang yang berperikemanusiaan, sekalipun tidak banyak jumlahnya.

Banyak penangkapan yang ada di luar jangkauan dan kemampuan Mr. Latuharhary untuk diselesaikan. Apalagi di kota-kota yang jauh dari Jakarta di mana *Kempeitai* mempunyai kekuasaan mutlak. Untunglah bagi suku bangsa Maluku bahwa Jepang lekas bertekuk lutut. Jika tidak, ratap-tangis akan kedengaran di tiap-tiap keluarga. Karena memang pendaf-

taran itu sangat mengkhawatirkan banyak orang Maluku.

Apakah Jepang bermaksud membunuh semua orang Maluku yang ada di Jawa? Menurut J. de Freetes informasi yang mereka peroleh menunjukkan bahwa ada niat Jepang ke arah itu. Penangkapan Latuharhary dengan kawan-kawan dan para pemuda Maluku di Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogya, dan lain-lain tempat, merupakan bukti-bukti yang memperkuat informasi itu.

Akan tetapi iman orang-orang Maluku makin diperkuat justru karena penderitaan dan penindasan dan mereka yakin pada waktunya Tuhan akan menghentikan dan menghancurkan bangsa yang lalim dan kejam itu.

c. Latuharhary dan Janji Kemerdekaan

Untuk menggerakkan rakyat di Jawa, dengan perantaraan kaum nasionalis, agar membantu Jepang dalam perang *Asia Timur Raya* (ATR), maka Jepang membentuk sebuah gerakan yang disebut *Tiga A* pada tanggal 29 April 1942. Slogan Jepang *pemimpin Asia*, Jepang *pelindung Asia* dan Jepang *cahaya Asia* dikumandangkan di tengah-tengah rakyat agar rakyat percaya pada keunggulan Jepang sebagai *saudara tua*. Gerakan ini dipelopori oleh H. Shimizu dari *Sendenbu*, bagian propaganda pemerintahan militer *Gunseikanbu*. Ia dibantu oleh dua orang, Sukardjo Wirjopranoto dan Mr. R. Sjamsudin. Akan tetapi karena kedua orang nasionalis ini kurang dikenal rakyat, maka gerakan ini tidak bisa memenuhi harapan rakyat Indonesia dan juga tidak bisa memenuhi keperluan Jepang. Setahun kemudian, pada tanggal 9 Maret 1943, sebuah organisasi baru didirikan mengganti Tiga A, yaitu POESAT TENAGA RAKYAT (POETRA), dipimpin oleh Ir. Soekarno, wakil ketua Drs. Moh. Hatta dan dua anggota lainnya Ki Hajar Dewantara dan Kyai H.M. Mansur. Organisasi ini mendapat dukungan luas dalam menuju ke cita-cita *pemerintahan sendiri*. Sekalipun tu-

juan Jepang adalah lain yaitu memakai POETERA untuk menggerakkan rakyat membantu Jepang dalam peperangan.

Karena dipimpin oleh tokoh-tokoh nasional yang terkenal gigih di masa kolonialisme Belanda, dan dikenal baik oleh Mr. J. Latuharhary, maka dia berdiri di belakang empat serangkai ini dan bekerjasama dengan tokoh-tokoh nasionalis lainnya untuk mewujudkan cita-cita POETERA. Berkat kerjasama dengan pemimpin-pemimpin pergerakan ini Mr. Latuharhary sempat mengajak bekas tokoh-tokoh SA untuk turut aktif pula dalam usaha-usaha POETERA, sekalipun mereka sadar dan selalu harus awas dan waspada terhadap kecurigaan Jepang.

Rakyat yang digerakkan oleh orator Sukarno melalui radio, hanya tahu bahwa musuh rakyat adalah "Amerika kita strika" dan Inggris kita linggis". Tetapi sekaligus ditanamkan pula kesadaran nasional, bahwa *rakyat Indonesia anti kolonialisme dan imperialisme*. Dan inilah hakekat daripada perjuangan rakyat. Ini berarti anti kolonialisme dan imperialisme yang datang dari mana pun juga, apakah dari Barat atau dari Timur.

Dalam tahun 1943 Jepang mulai menderita kekalahan di Pasifik. Dalam pertempuran laut di kepulauan Solomon, angkatan laut Jepang menderita kekalahan berat, sehingga Sekutu berhasil mendarat dan menduduki berbagai pulau. Tentara Mac Arthur terus maju, sehingga mengancam Jepang di Indonesia.

Untuk menggerakkan rakyat Jawa melalui POETERA, maka Jepang membentuk tentara rakyat terdiri dari pemuda-pemuda desa yang disebut *Heiho*. Mereka dimasukkan ke dalam kesatuan tentara dan diangkut ke berbagai medan pertempuran di Asia-Timur dan Pasifik. Tenaga kerja *romusha* dikerahkan dari desa-desa untuk menjadi batalyon buruh tentara Jepang. Para pemuda rakyat dikerahkan dalam barisan *Seinendan* dan *Keibodan* (semacam Hansip) dan dilatih secara

militer, sekalipun tidak diberi senjata api, untuk dipergunakan bagi pertahanan dan keamanan wilayah. Para pelajar dikerahkan pula dalam barisan *Gakkutotal*. 10) Kaum wanita disatukan dalam organisasi *Fujinkai*.

Dalam bulan September 1943 dibentuk tentara sukarela *Pembela Tanah Air* (PETA). Di sini para opsir Indonesia dilatih. Pada masa revolusi kemerdekaan PETA ini merupakan tulang punggung TNI

Jadi kita lihat betapa rakyat di Jawa disiapkan untuk berperang. Dari segi perkembangan menuju kemerdekaan, kegiatan-kegiatan ini merupakan pula keuntungan bagi masa mendatang pada waktu bangsa Indonesia berjuang mempertahankan proklamasi.

Dengan siasat "*hopping-jumping war*" Mc Arthur panglima tertinggi Sekutu di Pasifik, berhasil mengancam Filipina dan Indonesia. Pada tanggal 22 Agustus 1943 untuk pertama kali B 29 menyerang Surabaya. Kemudian terulang berkali-kali. Sedangkan di perbatasan India dan Birma tentara Inggris dan India mendesak tentara Jepang. Desakan Sekutu ini menyebabkan Jepang harus mengambil hati rakyat Filipina, Indonesia dan Birma. Oleh karena itu dengan deklarasi PM. Tojo tanggal 1 Agustus 1943 Jepang "memberikan kemerdekaan" kepada Filipina dan Birma. Kepada Indonesia dijanjikan "pemerintahan sendiri". Deklarasi ini memperkuat janji P.M. Tojo ketika ia datang ke Indonesia dalam bulan Juli 1943.

Karena pemerintah Jepang memerlukan dukungan penuh dari para pemimpin dan rakyat Indonesia, maka pada tanggal 1 Agustus 1943 *Saiko Shikikan* (Panglima Tertinggi di Jawa) mengeluarkan pengumuman tentang akan dibentuk *Cuo Sangi In*, yaitu suatu Dewan Penasehat yang beranggotakan wakil-wakil rakyat seluruh lapisan masyarakat di Jawa. Tanggal 5 September 1943 Dewan ini dibentuk dan rapat-rapatnya diada-

kan di bekas gedung *Volksraad* di Pejambon, diketuai oleh Ir. Sukarno. Pada pembukaan sidang pertama terlihat di antara para anggota Mr. J. Latuharhary yang mewakili masyarakat Maluku.

Pada tanggal 10 Nopember 1943 Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta dan Ki Bagus Hadikusumo berangkat ke Tokyo untuk menyampaikan terima kasih atas nama 50 juta rakyat Indonesia di Jawa kepada Pemerintah Jepang, yang berkenan memberi kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk turut serta dalam pemerintahan di Jawa. Kekebalan yang mereka peroleh dari *Tenno Heika*, Kaisar Jepang, mencegah mereka dari penangkapan sewenang-wenang.

Akan tetapi *Cuo Sangi In* tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Penderitaan dan kemiskinan rakyat tidak pernah dikemukakan dan dibahas di dalam Dewan ini. Dewan ini hanya berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau memberikan pendapat atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penguasa militer. Rapat-rapat berkala sekali dalam tiga bulan tidak menghasilkan sesuatu untuk kepentingan rakyat. Rapat-rapat malahan diawasi ketat oleh petugas-petugas Jepang.

Pada akhir tahun 1943 telah nyata bagi Jepang, bahwa POETERA dan organisasi-organisasi tersebut di atas, lebih menguntungkan gerakan kemerdekaan Indonesia daripada usaha perang Jepang. Di samping itu ternyata bahwa pemuda-pemuda terpelajar lebih kuat anti Jepang daripada anti Sekutu. Kesengsaraan rakyat yang makin bertambah samasekali tidak menguntungkan Jepang. Oleh karena itu POETERA dibubarkan dan pada tanggal 1 Maret 1944 didirikan suatu badan baru, yaitu *Perhimpunan Kebaktian Rakyat* atau *Jawa-Hokokai*. Untuk menetralisasikan unsur-unsur nasional diberi kesempatan pula kepada wakil-wakil golongan Cina, Arab dan Indo-Eropa untuk menjadi anggota. Sekalipun Sukarno me-

mimpin badan ini akan tetapi diawasi secara langsung dan ketat oleh *Seiko Sikikan*. 11)

Sementara itu gerakan di bawah tanah menentang fasisme Jepang makin memuncak. Ada beberapa golongan. Golongan yang dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin; golongan Syahrir; Persatuan Mahasiswa Jakarta (terbanyak dari *Ika Daigaku*); golongan pimpinan Sukarni, Adam Malik, dan Chairul Saleh dan golongan Moh. Natsir dan Syafruddin Prawiranegara. Di samping itu ada pula kaum komunis. 12)

Golongan-golongan ini, yang menangkap berita dari luar negeri melalui radio-radio gelap, mengetahui situasi perang yang sebenarnya. Kekalahan-kekalahan Jepang selalu diputar-balikkan oleh *Sendenbu* menjadi kemenangan-kemenangan besar. Berita-berita yang disiarkan oleh golongan-golongan di bawah tanah ke dalam masyarakat menimbulkan ketidakpercayaan kepada Jepang. Mereka mengadakan juga kontak dengan pemimpin-pemimpin yang bekerjasama dengan Jepang untuk memperoleh informasi timbal balik.

Dengan kerjasama dengan Gerakan Pemuda Maluku di bawah de Fretes dan para mahasiswa dari sekolah kedokteran *Ika Dai Gakku*, seperti Frans Pattiasina, Wim Latumeten, Boetje Tahalele, Alex Hukom, Mr. Latuharhary selalu memperoleh informasi mengenai situasi peperangan dan keadaan dunia. Kegiatan-kegiatan Latuharhary, para tokoh Maluku, pemuda dan mahasiswa Maluku, menimbulkan kecurigaan pada *Kempeitai*. Kecurigaan itu bertambah meningkat dengan pendaratan mata-mata Sekutu di Maluku dengan kapal silam di bawah pimpinan seorang bintang, yaitu Julius Tahya, asal Ambon. 13)

Bertambah sulit posisi orang-orang Maluku berhubung dengan pemboman kota Ambon dan lain-lain pertahanan Jepang di Maluku dalam tahun 1944/45. Apalagi sesudah Irian Barat dan Morotai jatuh ke tangan Sekutu. Kecurigaan itu

berakhir dengan penangkapan dan pembunuhan seperti telah diterangkan di muka.

Tanggal 7 September 1944 kabinet Tojo jatuh dan digantikan dengan PM. Koiso. Pemerintahan baru ini pada tanggal 1 Maret 1945 menjanjikan "kemerdekaan Indonesia di kelak kemudian hari". Untuk itu akan dibentuk *Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia*. Diumumkan pula pengakuan Jepang atas pemakaian sang Dwi warna Merah-Putih dan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Tanggal 28 Maret 1945 Badan tersebut (*Dokuritsu Zjumbi Tjoosakai*) terbentuk dengan anggota 60 orang diketuai oleh Dr. Rajiman Wediodiningrat dan R.P. Suroso sebagai wakil-ketua. Selain Sukarno dan Hatta, Mr. Latuharhary juga menjadi anggota. Ia mewakili Maluku dan membawa dalam sidang-sidang pendirian umat Kristen. 14)

Dua kali Badan Penyelidik ini mengadakan sidang, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Dalam masa sidang pertama dipersoalkan dasar negara Indonesia merdeka yang akan didirikan. Tanggal 29 Mei secara lisan Moh. Yamin mengemukakan 5 dasar dan tanggal 31 Mei Prof. Supono mengusulkan pula 5 dasar negara, dalam pidatonya. Pada tanggal 1 Juni Ir. Sukarno mengemukakan Pancasila sebagai dasar negara, dengan menempatkan sila ke Tuhanan sebagai sila ke lima.

Dalam diskusi dan perdebatan yang berkembang dirasa perlu merumuskan buah fikiran dan pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam sidang itu. Untuk itu Ir. Sukarno mengusulkan pembentukan suatu panitia perumus. Sidang menyetujui pembentukan Panitia-9 yang terdiri atas Ketua — Ir. Sukarno, wakil ketua — Drs. Moh. Hatta, anggota-anggota: Mr. Soebardjo, Mr. Alex Andries Maramis, Mr. Muh. Yamin, Haji Agus Salim, Abikusno Tjokrosujoso, Wahid Hasyim dan Kyai Bad. Kahar Muzakkir. 15)

Perdebatan Panitia-9 ini terjadi pada tanggal 18 Juni, sewaktu dibicarakan pembukaan Konstitusi. Dua golongan berhadap-hadapan, yaitu golongan nasionalis (kebangsaan) terdiri atas Sukarno, Hatta, Yamin, Maramis dan Soebardjo dan golongan Islam terdiri atas Abikusno, Muzakir, Agus Salim dan Wahid Hasyim. Kedua golongan ini akan timbul pula dalam sidang pleno.

Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia-9 selesai merumuskan Mukadimah UUD lalu diserahkan kepada Badan Penyelidik, untuk diperdebatkan pada sidang kedua tanggal 10-16 Juli yang akan datang.

Dalam Mukadimah dirumuskan dasar negara, yaitu Pancasila, sebagaimana dibentangkan dalam *Djakarta Charter*. Sila ke-Tuhanan ditempatkan pada urutan pertama dengan rumusan: *Ke Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.* 16)

Tujuh kata terakhir akan menjadi masala prinsipil dalam masa sidang kedua yang dibuka tanggal 10 Juli. Sukarno sebagai ketua Panitia-9 menganjurkan supaya sidang mempercepat pembicaraan tentang UUD agar supaya kemerdekaan dapat diakui oleh Jepang. Lalu ia membaca Mukadimah UUD.

Perdebatan kemudian berkisar pada bentuk negara Indonesia. Beberapa anggota golongan Islam menghendaki suatu kerajaan Islam dikepalai oleh seorang raja sebagai wakil Allah atau suatu republik yang dikepalai oleh seorang imam. Golongan nasionalis menghendaki suatu republik dengan presiden sebagai kepala negara. Dalam pemungutan suara 55 anggota menyetujui bentuk *republik dengan presiden sebagai kepala*; 6 orang setuju bentuk kerajaan, 2 orang bentuk lain, 1 orang blanko. 17)

Kemudian dibentuk tiga sub-panitia yaitu (1) Sub Panitia Konstitusi yang diketuai Ir. Sukarno, beranggotakan 22 orang; (2) Sub-panitia Pertahanan, diketuai Abikusno Tjokrosuyoso, beranggotakan 22 orang dan (3) Sub-panitia Ekonomi, diketuai Drs. Moh. Hatta, beranggotakan 22 orang.

Tanggal 11 Juli sore hari Sub-pabitia Konstitusi berapat. Diskusi berkisar pada (1) bentuk negara (federal atau kesatuan), (2) sifat Konstitusi (sederhana, sementara), (3) Mukadimah.

Dalam perdebatan mengenai bentuk negara Mr. Latuharhary mengusulkan *Bondstaat*. Tetapi terserah rakyat. Ia minta supaya di dalam UUD ditentukan, bahwa hal ini akan dipersoalkan lagi, jika sudah damai.

Dalam perdebatan mengenai Mukadimah Mr. Latuharhary tidak dapat menerima *tujuh-kata* tersebut di atas pada Sila ke-Tuhanan. Karena hal ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas bagi para pemeluk agama yang bukan Islam. Hal ini bisa mengakibatkan banyak kekacauan, misalnya terhadap adat-istiadat. Karena itu ia minta supaya di dalam UUD diadakan fasal yang terang. Agus Salim mengemukakan, bahwa masalah hukum adat dan hukum Islam adalah masalah lama dan secara umum sudah diselesaikan. Pemeluk agama-agama lain tidak perlu khawatir. Keamanan mereka tidak tergantung daripada kekuasaan negara, tetapi daripada toleransi dalam tradisi Islam yang pemeluknya berjumlah 90% dari rakyat Indonesia.

Wongsonegoro dan Djajadiningrat tidak setuju dengan *tujuh-kata* itu sebab hal itu mungkin akan menimbulkan fanatisme, karena seolah-olah memaksa menjalankan syari'at bagi orang Islam.

Wahid Hasyim menolak kemungkinan paksaan karena ada prinsip musyawarah. Ia menambahkan, bahwa sebagian

orang menanggap kalimat ini terlalu tajam, tetapi sebagian lain berpendapat justeru kurang tajam.

Sukarno memperingatkan para pembicara bahwa Mukadimah ini telah disusun dengan susah payah dan ini adalah hasil musyawarah golongan Islam dan golongan kebangsaan. Menghilangkan kalimat ini (tujuh kata) tidak akan diterima oleh golongan Islam. Dan karena tidak ada lagi yang akan dikemukakan oleh para anggota, *ia menarik kesimpulan bahwa Mukadimah itu diterima.*

Lalu dibentuk suatu panitia-kerja untuk berapat tanggal 12 Juli menyusun Draft Konstitusi. Panitia itu terdiri atas ketua — Prof. Dr. Mr. Supomo, anggota-anggota Mr. Wongso-negoro, Mr. Soebardjo, Mr. Maramis, Mr. Singgih, H. Agus Salim dan Dr. Sukiman.

Tanggal 13 Juli 1945 draft itu selesai. Sidang Panitia Konstitusi menghadapi krisis. Wahid Hasyim mempergunakan Mukadimah untuk mengembangkan ide negara Islam. Dia sarankan bahwa hanya orang Islam sajalah yang bisa dipilih menjadi Presiden atau Wakil Presiden. Fatsal mengenai agama diubah menjadi "Agama Negara adalah agama Islam, dengan jaminan kemerdekaan bagi pemeluk-pemeluk lain agama untuk menjalankan agama mereka masing-masing". Dia berpendapat jika orang Islam menjadi Presiden, peraturan-peraturan akan mengandung unsur-unsur Islam dan ini akan sangat besar pengaruhnya. Jika Islam adalah agama negara, maka hal ini akan sangat penting bagi pertahanan negara. Sebab umumnya pertahanan yang berdasarkan agama akan sangat ampuh, karena menurut ajaran Islam, nyawa hanya boleh diserahkan buat ideologi agama.

Agus Salim menentang pendapat ini karena hal ini akan merongrong kompromi yang telah tercapai antara golongan nasionalis dan Islam. Kalau presiden harus seorang Islam, bagaimana dengan wakil presiden, para duta dan lain-lain?

Dan bagaimana dengan janji kita untuk melindungi agama lain?

Sukiman setuju dengan Wahid Hasyim. Djajadiningrat dan Wongsonegoro sekali lagi menentang pendapat Wahid Hasyim. Wongsonegoro sekali lagi mengemukakan kekawatirannya akan interpretasi yang memberi kemungkinan bagi negara untuk memaksa orang Islam melaksanakan hukum Islam. 18)

Latuharhary menentang pendapat Wahid Hasyim. Ia mengemukakan bahwa usul tersebut membahayakan kesatuan dan persatuan Indonesia. Daerah-daerah Kristen seperti Maluku, Minahasa dan lain-lain tidak akan bersedia menggabungkan diri pada negara Islam. 19)

Otto Iskandar Dinata mengusulkan jalan tengah, yaitu tidak menetapkan syarat pengangkatan presiden, tetapi *tujuh-kata* dalam Mukadimah itu harus diulangi dalam fasal mengenai agama.

Supomo ketua panitia-kerja mengemukakan bahwa panitia akan mengubah draft sesuai usul tersebut.

Latuharhary menganggap tidak perlu lagi untuk mengulangi pendiriannya. 20)

Rapat pleno tanggal 14 Juli tidak membawa kompromi mengenai *tujuh-kata* itu. Rapat keesokan harinya lebih hangat lagi. Sampai ada yang tumbuk meja. Toh tidak tercapai perseusuaian paham. Juga mengenai "presiden harus seorang Indonesia asli yang beragama Islam" terjadi perdebatan hangat. Selesai rapat diadakan *lobbying* antara Sukarno dan beberapa nasionalis dan Islam. Dalam pertukaran pikiran ini Latuharhary tetap mempertahankan pendiriannya. Dan Sukarno menaruh respek terhadapnya. 21)

Rapat tanggal 16 Juli adalah rapat yang benar-benar mencekam, tetapi memperlihatkan pula pengaruh Sukarno. Ia kemukakan kompromi yang telah tercapai ialah mema-

sukkan dalam salah satu fasal UUD: "Presiden Republik Indonesia harus seorang Indonesia asli yang beragama Islam" dan "negara didirikan berdasarkan ke-Tuhanan, dengan keharusan bagi pemeluk-pemeluk agama Islam untuk melaksanakan hukum Islam".

Kemudian Sukarno minta pengorbanan dari patriot-patriot seperti Latuharhary dan Maramis. Keadaan mencekam dan terharu. Tidak seorang pun puas, tetapi toh semua orang pasrah. Lalu semua anggota berdiri tanda UUD diterima. 22)

Mr. Latuharhary sekarang menghadapi suatu tantangan yang berat yaitu bagaimana meyakinkan masyarakat Maluku untuk menerima UUD itu. Apakah rakyat di Maluku bersedia menerimanya? Latuharhary ingin mengumpulkan pendapat dari para pemuka masyarakat Maluku.

Semasa rapat-rapat berjalan Latuharhary mengadakan komunikasi dengan pemuka-pemuka Maluku, Timor, Minahasa dan Kristen yang ada di Jakarta untuk menjelaskan perkembangan di dalam Badan Penyelidik.

Pada akhir Juli 1945 Mr. Latuharhary mengumpulkan pemuka-pemuka Maluku dari Jawa dan Sumatera di Jakarta. Hadir kira-kira 20 orang antara lain dari Jakarta Dr. Latumenten, Dr. J.B. Sitanala, J. Sinyaranamual, Piet de Quelju, L.R. Jans, Andi Tupamahu; dari Jawa Timur Dr. Soisa, Dr. van Joost, Dr. Siwabessy, Librek Nanlohy; dari Tegal dan Pekalongan Dr. Tupamahu dan Dr. Lisapaly; dari Yogya Bram Tahya; dari Magelang Ruhupatty dan Atus Kailola; dari Bandung Dr. Agustijn dan L. Lopulissa; dari Palembang D. Tomahu. 23)

Dalam pertemuan ini Latuharhary membentangkan masalah kemerdekaan Indonesia, hasil-hasil Badan Penyelidik antara lain Mukadimah dan UUD. Perdebatan hangat terjadi. Mereka yang berkumpul ini termasuk orang-orang rasional dan realis. Ada pula ex pejuang SA. Terutama *tujuh-kata* Mukadimah

UUD dan *syarat menjadi presiden* mendapat sorotan tajam. Hal-hal ini adalah batu sentuhan bagi persatuan Indonesia. Bagaimana pun juga timbul kekhawatiran terhadap negara yang akan didirikan nanti.

"Perjuangan Latuharhary menentang Djakarta Charter, sebenarnya ia memperjuangkan nilai-nilai kebudayaan Maluku. Ia memperjuangkan kerukunan beragama sebagai salah satu nilai yang hidup di dalam masyarakat Maluku. Ia bukan membela agama Kristen. Ia dicap pada saat-saat itu menghalangi-halangi cita-cita Islam. Yang sebenarnya ia memperjuangkan cita-cita Islam dalam peta Pancasila," demikian pendapat J. de Fretes, yang pada waktu itu tidak bisa menghadiri pertemuan tersebut karena sakit.

Sekalipun terdapat berbagai pendapat pertemuan tersebut memutuskan berdiri di belakang Latuharhary dan memberi mandat penuh kepadanya dalam menghantarkan rakyat Maluku masuk ke alam Indonesia merdeka.

BAB VI

LATU HARHARY DAN PROKLAMASI KEMERDEKAAN

a. Wakil Maluku dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan

Kekaisaran Jepang yang angkuh berguncang-guncang fondasinya. Tanggal 15 Mei 1945 kawan seperjuangannya yang sama angkuh "*The Third Reich*", Jerman, bertekuk lutut. Italia pun sudah lenyap dari peta peperangan. Ultimatum Potsdam tanggal 26 Juli 1945 mengancam menghancurkan Jepang kalau tidak segera menyerah tanpa syarat. Tentara Mac Arthur sudah menghancurkan pertahanan Jepang di Okinawa. Tentara Sekutu sudah menginjak-nginjak "tanah suci" Hirohito. Bom-bom telah dimuntahkan oleh B-29 ke atas kota-kota Jepang. Tetapi toh *banzai* tentara Jepang masih berkumandang dan lebih baik mati *harakiri* daripada menyerah.

Lalu datang pukulan yang terakhir. Tanggal 6 Agustus 1945 presiden Amerika Serikat, Truman, memutuskan untuk mengakhiri perlawanan musuhnya. Bom atom Amerika memusnahkan Hiroshima dengan isinya: manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, pepohonan dan gedung-gedung hancur luluh. Tenno Heika terkejut. Tiga hari kemudian, tanggal 9 Agustus, bom atom ke dua memusnahkan kota Nagasaki dengan isinya.

Sehari sebelum itu Rusia memaklumkan perang kepada Jepang.

Menyerahlah Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945. Hukum Illahi berlaku atas bangsa yang angkuh, yang menyebabkan penindasan, penghinaan, kemiskinan, kesengsaraan dan kematian berjuta manusia di Asia-Timur, Pasifik dan Asia-Tenggara.

Berakhirnya kekuasaan Jepang itu mempunyai akibat luar biasa besarnya bagi bangsa Indonesia. Tetapi sebelum

berakhirnya kekuasaan itu terjadi beberapa peristiwa penting yang menentukan jalannya sejarah bangsa kita.

Para pemimpin kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Hanya mereka yang bergerak di bawah tanah tahu, bahwa Jepang sudah bertekuk lutut.

Tanggal 7 Agustus 1945 Lt. Jenderal Terauchi, Panglima Tertinggi di Asia Tenggara, yang berkedudukan di Saigon, memberi izin untuk mendirikan suatu panitia meliputi seluruh Indonesia guna mengadakan persiapan menerima kekuasaan dari pemerintahan balatentara Jepang.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk dan terdiri dari wakil-wakil seluruh Indonesia. Anggota-anggota terdiri dari tokoh-tokoh nasional terkemuka. Diketuai oleh Ir. Sukarno dan wakil-ketua Drs. Moh. Hatta panitia itu beranggotakan K.R.T. Rajiman Wediodiningrat, R. Oto Iskandar Dinata, Ki Abdul Wachid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, B.K.P.A. Suryohamidjoyo, B.P.H. Purboyo, M. Sutaryo Karthadikusumo, R.P. Suroso, Prof. Mr. Dr. Supomo, dan Abdul Kadir mewakili Jawa; Dr. Moh. Amir, Mr. Teuku Moh Hassan, dan Mr. Abdul Abas mewakili Sumatera; Dr. G.S.S.J. Ratu-langi dan Andi Pangerang mewakili Sulawesi; A.A. Hamidan mewakili Kalimantan; Mr. I. Gusti Ktut Pudja, mewakili Sunda-Kecil; Mr. J. Latuharhary mewakili Maluku dan Drs. Yap Tjuan Bing mewakili golongan Cina. 1)

Sehari kemudian Terauchi mengundang Sukarno, Hatta dan Rajiman untuk datang menemuinya di Dalat, Saigon. Tanggal 9 Agustus mereka berangkat dan tiba tanggal 11, tanpa mengetahui bahwa Jepang sudah dua kali dihantam bom atom dan Rusia telah menyerbu masuk Mansyuria. Keesokan harinya jam 10.00 pagi Terauchi menerima ke tiga pemimpin itu dan memberitahukan mereka bahwa Pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pelaksanaannya terserah kepada Panitia Persiapan

Kemerdekaan. Atas pertanyaan Sukarno apakah Panitia dapat melaksanakan tugasnya sekitar tanggal 25 Agustus, Terauchi menjawab "terserah kepada tuan-tuan" 2)

Tanggal 14 Agustus ke tiga pemimpin itu tiba kembali di Jakarta. Di Lapangan terbang Kemayoran mereka diterima oleh anggota-anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan, para pemimpin lainnya dan rakyat. Disambut dengan "Indonesia Merdeka!!!", Sukarno berpidato singkat, antara lain dikatakannya:

"Kalau dahulu saya berkata, sebelum jagung *berbuah* Indonesia akan merdeka, sekarang saya dapat memastikan Indonesia akan merdeka sebelum jagung *berbunga*" 3)

Gegap gempita, tepuk tangan yang riuh, membelahi udara.

Ketika Hatta tiba di rumahnya, Syahrir telah menunggu dan memberitahukan bahwa Jepang telah menyerah. Oleh karena itu ia berpendapat supaya Sukarno sebagai pemimpin rakyat, memproklamasikan kemerdekaan atas nama rakyat Indonesia dan jangan dilakukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan, karena akan dicap "kemerdekaan buatan Jepang". Tetapi Hatta sangsi apakah Sukarno akan bersedia. Lalu ia mengajak Syahrir bersama ke Sukarno. Sukarno menolak usul Syahrir, karena sebagai ketua ia tidak berhak bertindak sendiri di luar Panitia Persiapan Kemerdekaan. 4)

Sementara itu semua anggota Panitia telah berada di Jakarta dan dipusatkan di *Hotel des Indes*. Semuanya dalam keadaan tegang karena desas-desus penyerahan Jepang yang makin santer disiarkan oleh para pemuda dan mahasiswa, yang bergerak di bawah tanah. Tetapi tidak seorang pun mendapat kepastian, baik dari Sukarno maupun dari Hatta.

Keesokan harinya Sukarno, Hatta dan Subardjo pergi mencari informasi dari para pembesar Jepang, tetapi juga tidak mendapat kepastian. Laksamana Maeda hanya mengatakan,

bahwa berita itu disiarkan oleh Sekutu. Tetapi dari Tokyo belum ada instruksi apa-apa. Ke tiga pemimpin itu pulang dengan kesimpulan, bahwa Jepang memang sudah menyerah. Lalu Hatta usulkan supaya besok tanggal 16 Agustus jam 10.00 pagi Panitia Persiapan Kemerdekaan bersidang di gedung Dewan *Sanyo Kaigi* (dulu gedung *Raad van Indie*) di Pejambon. Sukarno setuju dan Subardjo diminta mengundang para anggota.

Sore hari tanggal 15 itu dua orang pemuda, Subadio dan Subianta datang mendesak Hatta supaya Sukarno menyatakan kemerdekaan atas nama rakyat dan bukan Panitia Persiapan Kemerdekaan. Malam hari Subardjo datang menjemput Hatta dan dibawa ke rumah Sukarno, karena di sana telah berkumpul para pemuda dan sedang terjadi perdebatan sengit. Wikana dan Darwis atas nama para pemuda mendesak Sukarno supaya memproklamasikan kemerdekaan malam itu juga. Tetapi Sukarno menolak. Juga Hatta menolak desakan Wikana. Wikana mengancam, "Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman malam ini juga, akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran besok".

Bung Karno menjadi naik darah. Ia menuju ke Wikana dan berkata, "Ini batang leherki, seretlah aku ke pojok situ dan potonglah leherku malam ini juga! Kamu tidak usah menunggu sampai besok!"

Wikana terkejut dan mengendor dan berkata, "Maksud kami bukan membunuh bung, melainakn kami mau peringatkan, apabila kemerdekaan Indonesia tidak dinyatakan malam ini juga, besok rakyat akan bertindak membunuh orang-orang yang dicurigai, seperti orang-orang Ambon dan lain-lain."

Cepat Hatta menyahut, "Bagaimana saudara bisa menyalahkan seluruh masyarakat Ambon atas perbuatan jahat dari segelintir kecil orang-orang Ambon? Di mana rasa keadilan kita?" 5)

Wikana terdiam, keadaan hening, para pemuda menarik diri dan pergi.

Keesokan harinya, sewaktu orang bangun untuk makan sahur, para pemuda di bawah pimpinan Wikana, Pandu Wiguna, Sukarni, Adam Malik, Chairul Saleh dan lain-lain dengan bekerjasama dengan PETA menculik Sukarno dan Hatta dan disembunyikan di Rengasdengklok. Turut dibawa juga Ny. Fatmawati Sukarno dan bayinya, Guntur.

Lenyapnya ke dua pemimpin ini dari Jakarta menyebabkan para anggota Panitia Persiapan, yang pagi itu datang ke Pejambon untuk bersidang, menjadi gelisah. Mereka sedang diliputi ketidakpastian desas-desus penyerahan Jepang. Mengapa Sukarno dan Hatta tidak muncul? Ke sana kemari mereka mencari berita. Baru nanti tengah hari diperoleh kabar, bahwa Sukarno dan Hatta tidak ada di kota. Ke mana? Tidak ada yang tahu.

Sejak dari pagi-pagi Sudiro telah datang memberitahukan Mr. Subardjo, bahwa ke dua pemimpin itu telah tiada di tempat. Dugaan macam-macam timbul. Barulah di kantor mereka, di Jln. Prapatan Gambir no. 59, diketahui bahwa Sukarno dan Hatta diculik oleh Wikana dan para pemuda dengan kerjasama dengan beberapa orang opsir PETA. Dengan susah payah dan dengan campur tangan Nishizima dari *Kaigun*, barulah Wikana dan para pemuda diyakinkan akan kehadiran Sukarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Barulah mereka memberitahukan tempat disembunyikan ke dua tokoh itu.

Subardjo dan Sudiro disertai Yusuf Kunto, anggota PETA menuju ke Rengasdengklok. Sesudah mereka berhasil meyakinkan para penculik bahwa pernyataan proklamasi kemerdekaan dengan segera akan dilakukan oleh Sukarno-Hatta, maka pada malam hari ke dua pemimpin itu dikembalikan ke Jakarta.⁶⁾

Setiba di rumah sekitar jam 10.00 malam, Hatta minta Subardjo menelepon *Hotel des Indes* supaya disediakan ruangan untuk rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan. Tetapi karena lewat jam sepuluh tidak boleh diadakan rapat di sana sesuai peraturan, maka Subardjo menelepon Laksamana Maeda minta kesediaan meminjam rumahnya. Maeda bersedia. Suatu keuntungan besar, karena ada suatu tradisi *seishin* Jepang antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut untuk saling menghormati. Sehingga kediaman Maeda itu menjadi *de facto extra territorial*. 7)

Pada malam itu juga para anggota Panitia Persiapan diberitahukan. Semuanya bertemu di rumah Maeda di *Nassau Boulevard* no 1 (*Myakodoori*-Jln Imam Bonjol). Dengan Maeda dan Nyoshi (penterjemah) Sukarno dan Hatta pergi ke Mayor Jenderal Nishimura, Direktur Jenderal Departemen Umum *Gunseikanbu*. Dalam pembicaraan ternyata bahwa pemerintahan militer Jepang mengemukakan *status quo* sebagai alasan untuk melarang semua kegiatan Panitia Persiapan Kemerdekaan dan keinginan masyarakat memproklamasikan kemerdekaan.

Sekembali di rumah Maeda sudah berkumpul para anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan seperti Dr. Rajiman, Prof. Supomo, Dr. Ratulangi, Mr. Latuharhary, Dr. Buntaran, Iwa Kusumasumantri dan lain-lain. Subardjo dan Sudiro telah berhasil mengumpulkan mereka; pemimpin-pemimpin pemuda juga sudah hadir, B.M. Diah, Adam Malik, Chairul Saleh, Maruto, Pandu Kartawiguna, Sukarni dan lain-lain. Juga hadir Subardjo, Sudiro dan Sayuti Melik. Di ruang pertemuan ada pula sekelompok pemuda. Ada pula anggota-anggota *Cjuo Sangi In* yang ada di Jakarta. Jumlah yang hadir ada kira-kira 50 orang.

Tekad telah dibulatkan dan semua hadirin mengambil tanggungjawab untuk memproklamasikan kemerdekaan ke-

esokan harinya, tanggal 17 Agustus jam 10.00 pagi, bertempat di rumah kediaman Sukarno, Pegangsaan Timur 56. Mereka tidak memperdulikan lagi *status quo* yang dikehendaki Jepang.

Teks Proklamasi yang telah selesai disusun ditandatangani oleh Sukarno dan Hatta atas nama rakyat Indonesia.⁸⁾

Mr. Johannes Latuharhary menerima pengangkatan sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan dengan penuh tanggungjawab. Ia mewakili rakyat dan daerah Maluku. Bukan saja masyarakat Maluku di Jawa, seperti pada waktu menjadi anggota Badan Penyelidik. Tetapi sekarang ia mewakili seluruh rakyat Maluku. Ia pun telah mendapat legalisasi dan dukungan dari pemuka-pemuka Maluku pada rapat akhir Juli yang baru lalu. Juga para pemuda Maluku nasionalis berdiri di belakangnya. Tetapi juga yang berat baginya ialah menghadapi UUD yang masih mengandung batu sentuhan dan hambatan bagi memasukkan Maluku dan rakyatnya kelak ke dalam negara Republik Indonesia.

Sementara Sukarno dan Hatta terbang ke Saigon, para anggota panitia Persiapan Kemerdekaan dari berbagai daerah tiba di Jakarta. Kesempatan ini digunakan oleh Latuharhary untuk mengadakan pertukaran fikiran dengan wakil-wakil dari Sulawesi yang dipimpin oleh Dr. Ratulangi dan wakil Sunda-Kecil Mr. Ktut Pudja. Diskusi mereka berkisar pada apa yang disebut Yamin *Djakarta Charter* (Piagam Djakarta) dan syarat untuk menjadi Presiden, yang telah disetujui oleh sidang terakhir Badan Penyelidik. Dr. Ratulangi sangat tidak setuju dengan putusan itu. Kalau ini dipertahankan dikhawatirkan daerah-daerah di Indonesia Timur tidak mau menggabungkan diri ke dalam republik yang akan didirikan kelak.

Untuk mencari jalan keluar mereka menemui pimpinan *Kaigun* sebagai penguasa atas daerah Indonesia Timur. Keberatan-keberatan mereka kemukakan dan mereka minta *Kaigun* mempergunakan pengaruhnya untuk membicarakan hal ini

dengan Moh. Hatta sebagai seorang pemimpin yang berwibawa di kalangan pimpinan Islam.

Sementara itu keadaan perang telah berubah dengan cepat: Informasi yang diperoleh Latuharhary dari de Fretes dan Frans Pattiasina cs yang mempunyai hubungan luas dengan Angkatan Pemuda Indonesia dan para mahasiswa, meyakinkan bahwa Jepang telah menyerah pada tanggal 14 Agustus yang baru lalu. Informasi ini diteruskan kepada pemuka-pemuka Maluku yang ada di Jakarta. Tetapi toh mereka harus hati-hati karena masyarakat Ambon sedang diliputi "*angst psychose*" akan dibunuh oleh Jepang menurut informasi yang tersiar. Ada pula tersiar desas-desus, bahwa rakyat akan membunuh orang-orang Ambon yang dianggap setia pada Belanda. 9)

Pagi tanggal 16 Agustus Mr. J. Latuharhary berangkat ke Pejambon. Sidang Panitia Persiapan jam 10.00 pagi ini sangat penting. Tetapi sesudah jam 10.00 liwat, belum lagi muncul ketua dan wakil-ketua. Para pengatur sidang menelpon ke sana-kemari, tetapi tidak ada yang bisa memberikan keterangan di mana Sukarno dan Hatta berada. Ada yang menduga sudah ditangkap Jepang, ada yang bilang bahwa Jepang melarang sidang pagi itu berdasarkan *status quo* yang diperintahkan oleh Sekutu. Ada yang menduga hal yang bukan-bukan. Makin larut siang makin gelisah para wakil rakyat itu. Baru pada tengah hari datang kabar Sukarno dan Hatta diculik oleh pemuda dengan kerja-sama dengan opsir-opsir PETA. Ke mana dibawa, orang tidak tahu. Dengan gelisah semua kembali ke *Hotel des Indes*.

Menjelang jam 11.00 malam Latuharhary menerima telepon dari Subardjo mengundangnya untuk bersidang di rumah Laksamana Maeda. Ketika Latuharhary tiba di sana sudah ada banyak orang, anggota-anggota Panitia Persiapan, para pemimpin pemuda dan pengikut-pengikutnya. Hanya Sukarno dan

Hatta tidak kelihatan, karena pada waktu itu sedang berunding dengan Nishimura.

Sekembali kedua pemimpin itu dimulai dengan persiapan terakhir: menyusun teks proklamasi dan menandatangani. Barulah pada subuh hari hadirin beranjak pulang untuk beristirahat, dengan putusan berkumpul di rumah Sukarno keesokan harinya untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Suatu episode perjuangan yang panjang ditutup pada dini hari, tanggal 17 Agustus itu. Bagi para pejuang seperti Latuharhary dan kawan-kawannya hampir separuh umur mereka pertaruhkan jiwa-raganya untuk tiba pada detik-detik yang bersejarah yang akan ditentukan keesokan harinya.

b. Mendampingi Sukarno-Hatta Memproklamasikan Kemerdekaan

Tanggal 17 Agustus 1945 dinihari

Pemuda-pemuda bergerak ke Pegangsaan Timur, bersenjatakan bambu runcing, berbagai senjata tajam dan ada pula bersenjatakan senjata api. Halaman di rumah Sukarno diamankan dan dijaga ketat. Menjelang pagi makin banyak pemuda dan rakyat tumpah ke Pegangsaan Timur dengan membawa bendera merah-putih, slogan-slogan pembangkit semangat juang dan bersenjatakan bamburuncing dan sebagainya. Jalan-jalan menuju ke Pegangsaan Timur ditutup dan dijaga ketat.

Makin mendekati jam 10.00 makin banyak pemimpin tiba antara lain anggota-anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan. Juga terlihat opsir-opsir PETA. Lima menit sebelum jam 10.00 Hatta tiba disambut sorak-sorai. Sejenak bersalaman dengan Sukarno dan hadirin, maka Sukarno maju dengan teks proklamasi di tangannya, berdiri di depan mikrofon. Di sisi lain berdiri Fatmawati, isteri Sukarno, bagaikan lambang dan wakil kaum wanita Indonesia. Tepat di belakang mereka berdiri Mr. J. Latuharhary dengan stelan putih-putih. Jepratan

dari fotograf Ipphos mengabadikan momentum yang paling bersejarah ini.

Tepat jam 10.00 dengan suara yang gemetar terharu tetapi dengan bertekad bulat berkumandang suara bung Karno:

**PROKLAMASI KEMERDEKAAN
KAMI BANGSA INDONESIA DENGAN INI MENYATAKAN KEMERDEKAAN INDONESIA
HAL-HAL JANG MENGENAI PEMINDAHAN KEKOEASAAN DAN LAIN-LAIN, DISELENGGARAKAN DENGAN TJARA SAKSAMA DAN DALAM TEMPO JANG SESINGKAT-SINGKATNJA.**

**DJAKARTA, HARI 17 BOELAN 8 TAHUN 45
ATAS NAMA BANGSA INDONESIA**

SOEKARNO – HATTA

Bergegap-gempita, pekik "merdeka merdeka! merdeka!". Tepuk tangan dan sorak-sorai disertai lambaian ratusan merah-putih dan slogan-slogan, rakyat dan pemuda-pemudi menyambut proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.

Sang-saka-merah-putih telah siap dinaikkan. Latif, seorang opsir PETA, maju ke depan dibantu oleh Ny. Fatmawati, mengerek sang dwi-warna. Seketika sunyi senyap, kemudian bergemuruh ratusan suara gegap-gempita menyambut lambang kemerdekaan yang berkibar di ujung tiang dengan megah.

Kemudian berkumandang dari ratusan mulut "Indonesia Raya", Lagu Kebangsaan Indonesia Merdeka, ciptaan asli Wage Rudolf Supratman.

Sangat berjasa fotograf Ipphos, Alex Mendur, yang mengabadikan peristiwa yang paling bersejarah, meninggalkan suatu dokumen hidup bagi generasi sekarang dan mendatang.

Dengan banyak tegangan, susul-menyusul dengan ancaman-ancaman tiga hari terakhir ini, makin panas suasana di kalangan pemimpin-pemimpin dan para pemuda, akhirnya mereka semua mengambil tanggung-jawab atas nasib seluruh bangsa Indonesia..... *dan merdekakan bangsa Indonesia.*

Inilah titik balik dalam sejarah bangsa yang telah ditindas 350 tahun lamanya oleh imperialisme dan kapitalisme Barat dan 3½ tahun penindasan yang paling ganas oleh imperialisme, kolonialisme dan fasisme Jepang. Inilah titik lahir sejarah baru, dengan kebebasan dan harapan yang mengakhiri zaman penindasan, penghisapan, dan angkara murka.

Di depan sana berdiri seorang tokoh, seorang putera Maluku terbaik. Detik itu Johannes Latuharhary mendampingi Sukarno — Hatta turut memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia, termasuk rakyat Maluku yang dia wakili. Terharu, sorotan matanya memandang meliwati kepala-kepala lautan manusia bagaikan menembus jauh ke tanah tumpah darahnya, Maluku. Akankah rakyat itu bersedia menggabungkan daerahnya ke dalam negara yang baru diproklamasikan kemerdekaannya itu? Akankah rakyat Maluku bersedia menerima UUD yang besok akan dibicarakan dan yang masih berisi batu sentuhan itu? Sekilas kilat tergores pertanyaan itu dalam kalbunya.

Saling berpelukan, saling berjabatan tangan, saling mengucapkan selamat antara semua hadirin yang ada di beranda depan disusul dengan omong-omong mengakhiri upacara yang penting pada pagi itu.

Rakyat bergerak pulang sambil bernyanyi-nyanyi, bersorak-sorak, melambai-lambai merah-putih. "Merdeka!!! Merdeka!!! Merdeka!!!".

Dalam waktu singkat Proklamasi Kemerdekaan tersebar ke seluruh plosok Jakarta. Hari itu juga pers bekerja keras untuk menyiarkan berita proklamasi ke seluruh pulau Jawa.

Pemuda-pemuda berhasil menerobos masuk stasiun radio dan mengumandangkan proklamasi itu ke seluruh dunia.

Tanggal 18 Agustus sekitar jam 11.00 anggota-anggota Panitia Persiapan telah berkumpul di Pejambon menunggu kedatangan ketua dan wakil-ketua. Tiap-tiap anggota telah dilengkapi dengan rancangan UUD, yang telah disetujui oleh Badan Penyelidik pada tanggal 16 Juli yang baru lalu.

Pagi itu ada terjadi suatu peristiwa yang penting. Sebelum ke sidang, Hatta memanggil Ki Bagus Hadikusumo, Wachid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo dan Mr. Tengku Hassan. Hatta memberitahukan mereka tentang pembicaraan kemarin sore antaranya dengan dua orang dari *Kaigun* yaitu Nishizima (penterjemah) dan seorang opsir yang namanya tidak diingat lagi oleh Hatta. Opsir itu mengemukakan keberatan wakil-wakil Protestan dan Katolik dalam daerah kekuasaan *Kaigun* terhadap kalimat dalam Pembukaan UUD, yang berbunyi: "*ke-tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syaria't Islam bagi pemeluk-pemeluknya*".

"Mereka mengakui bahwa bagian kalimat itu tidak mengikat mereka, hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Tetapi tercantumnya ketetapan seperti itu di dalam suatu dasar yang menjadi pokok Undang-Undang Dasar berarti mengadakan *diskriminasi* terhadap mereka golongan minorita. Jika diskriminasi itu ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia," demikian disitir Hatta. 10)

Tetapi Hatta menolak pendapat itu dan mengemukakan bahwa Mr. Maramis tidak berkeberatan akan kalimat itu. Opsir itu mengemukakan bahwa *Kaigun* sungguh-sungguh ingin melihat Indonesia bersatu dan mengingatkan Hatta akan semboyan "bersatu kita teguh, dan berpecah kita jatuh".

". perkataannya itu berpengaruh juga atas pandangan saya. Tergambar di muka saya perjuangan saya

yang lebih dari 25 tahun lamanya, dengan melalui bui dan pembuangan, untuk mencapai Indonesia Merdeka besatu dan tidak terbagi-bagi. Apakah Indonesia yang baru saja dibentuk akan pecah kembali dan mungkin terjajah lagi karena sesuatu hal yang sebenarnya dapat diatasi? Kalau Indonesia pecah, pasti daerah luar Jawa dan Sumatera akan dikuasai oleh Belanda dengan menjalankan politik *divide et impera*, politik memecah dan menguasai. Setelah saya terdiam sebentar, saya katakan kepada opsir itu, bahwa esok hari dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan akan saya kemukakan masalah yang sangat penting itu. Saya minta ia menyebarkan sementara pemimpin-pemimpin Kristen yang berhati panas dan berkepala panas itu, supaya mereka jangan sampai terpengaruh oleh propaganda Belanda". 11)

Pembicaraan yang sangat serius antara ke lima tokoh Islam tersebut menghasilkan perubahan kalimat tersebut di atas menjadi "*Ke-Tuhanan Yang Maha Esa*" Mereka memang menginsyafi benar-benar akan keutuhan negara dan memeningkan nasib dan persatuan negara.

Berangkatlah Hatta menyampaikan hal ini kepada ketua, Sukarno. Ketika sidang dibuka semua anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan hadir lengkap. Sukarno mengumumkan tambahan enam anggota baru yaitu Wiranata Kusumah, Ki Hadjar Dewantoro, Mr. Kasman Singodimedjo, Sayuti Melik dan Mr. Soebardjo. Sukarni, Chairul Saleh dan Adam Malik menolak menjadi anggota, karena mereka menganggap Panitia itu buatan Jepang. 12)

Acara sidang pagi itu (1) mengesahkan UUD (2) pemilihan Presiden dan Wakil-Presiden.

Sukarno persilakan Hatta membaca Pembukaan UUD dengan mengusulkan perubahan tersebut di atas dan perubahan kalimat "Presiden harus seorang Indonesia asli, yang beragama

Islam", menjadi *"Presiden harus seorang Indonesia asli"*. Berkali-kali Hatta mengingatkan hadirin bahwa perubahan-perubahan ini penting untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Akhirnya UUD diterima dengan perubahan-perubahan tersebut di atas dan beberapa perubahan kecil serta perbaikan redaksi yang tidak lagi prinsipil. Dengan demikian berdirilah *Negara Republik Indonesia, dengan UUD 1945* (yang berlaku sekarang ini) 13)

Kemudian dengan suara bulat, atas usul Otto Iskandar Dinata, Sukarno dan Hatta dipilih sebagai Presiden dan Wakil-Presiden.

c. Peranan pada Permulaan Pemerintahan RI

Tanggal 19 Agustus Panitia Persiapan Kemerdekaan ber-sidang dan memutuskan struktur negara menurut UUD 1945 (1) untuk sementara waktu daerah Negara Indonesia dibagi dalam 8 propinsi, yang masing-masing dikepalai oleh seorang gubernur. Propinsi-propinsi tersebut ialah Jawa-Barat, Jawa-Tengah, Jawa-Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku dan Sunda-Kecil (2) daerah propinsi dibagi dalam keresidenan yang dikepalai oleh seorang residen. Gubernur dan residen dibantu oleh Komite Nasional. 14)

Hari itu juga dibentuk Kabinet pertama serta diangkat para Gubernur bagi tiap-tiap propinsi. Kemudian Pemerintah mengeluarkan "PENGUMUMAN PEMERINTAH", tanggal 19 Agustus 1945 tentang "PENGANGKATAN MENTERI DAN KEPALA DAERAH". 15)

Sebagai Gubernur diangkat untuk:

Jawa-Barat	: Sutardjo Kartohadikusumo
Jawa Tengah	: R.P. Suroso
Jawa-Timur	: R.M.T.A. Suryo
Sumatera	: Mr. Teuku Muh. Hassan

Borneo	: Ir. Pangeran Muh. Noor
Sulawesi	: Dr. G.S.S.J. Ratulangi
Maluku	: Mr. J. Latuharhary
Sunda Kecil	: Mr. I. Gusti Ketut Pudja

Juga diangkat para Residen untuk Jawa dan Madura.

Pada tanggal 20 Agustus 1945 sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan berakhir. Para anggota kembali ke daerah masing-masing. Pada tanggal 29 Agustus Panitia Persiapan Kemerdekaan secara resmi dibubarkan oleh Presiden dan dibentuk *Komite Nasional Indonesia Pusat* (KNIP) dengan kekuasaan legislatif. 16)

Dalam sidangnya, yang pertama KNIP memilih pimpinannya, yaitu Ketua Mr. Kasman Singodimedjo, Wakil-ketua I Sutardjo Kartohadikusumo, Wakil-keetua II Mr. J. Latuharhary, Wakil-ketua III Adam Malik. 17)

Perkembangan revolusi berjalan sangat cepat. Golongan-golongan yang bergerak di bawah tanah, tidak senang dengan pimpinan negara, dan para menteri dituduh "kolaborator" Jepang, kecuali Mr. Amir Syarifuddin. Para mahasiswa yang mendapat dukungan dari Syahrir dan Sukarni cs merasa tidak puas dengan kabinet presidential yang memperlihatkan gejala-gejala otoriter dan sebagai bukti dikemukakan usaha Subardjo untuk mendirikan satu saja partai politik, yaitu partai Nasional Indonesia, yang ingin dijadikan partai negara dan dibentuk dari atas. 18)

Golongan-golongan ini berusaha mengubah kabinet-presidential menjadi kabinet-parlementer yang bertanggung-jawab kepada KNIP. Badan ini harus dilengkapi dengan kekuasaan legislatif sebenarnya. Begitu besar pengaruh dan kekuatan golongan ini di bawah pimpinan St. Syahrir, sehingga pada tanggal 16 Oktober Presiden mengeluarkan dekrit memberikan kekuasaan legislatif kepada KNIP dan untuk menjalankan ke-

kuasaan sehari-hari KNIP menyerahkannya kepada sebuah Badan Pekerja.

Keesokan harinya, KNIP mengadakan sidang, dipimpin oleh Mr. J. Latuharhary. Ketua membuka rapat dengan meminta hadirin berdiri memperingati dua bulan berdirinya Republik Indonesia disusul dengan mengheningkan cipta. Kemudian ketua mengemukakan hal-hal yang berhubungan dengan Dekrit Presiden. Perdebatan yang kemudian terjadi menghasilkan keputusan 91) Badan pekerja KNIP dibentuk (2) Syahrir dan Amir Syarifuddin dipilih sebagai ketua dan wakil-ketua BP (3) Keduanya bersama-sama menyusun anggota-anggota BP. Lalu Mr. Latuharhary menyerahkan pimpinan KNIP kepada Syahrir. Syahrir dan Amir menyusun keanggotaan BP yang terdiri dari 15 orang, sebagian besar pejuang-pejuang anti Jepang. 19)

Sampai di situ peranan Latuharhary dalam lembaga tertinggi negara ini pada permulaan revolusi.

Dalam uraian berikut akan kita ikuti jejaknya: bagaimana Mr. Latuharhary, sebagai Gubernur-perjuangan, memimpin rakyat Maluku dalam pergolakan revolusi.

BAB VII

MR. J. LATUHARHARY PEMIMPIN MASYARAKAT MALUKU DALAM REVOLUSI FISIK

a. Pemerintahan Propinsi Maluku dalam Perjuangan.

Melalui Sarekat Ambon Mr. Latuharhary telah menghantar rakyat Maluku ke pintu gerbang kemerdekaan. Sekarang ia mempunyai tugas menghantar rakyat Maluku memasuki alam kemerdekaan dan tetap berada dalam alam itu. Tugas ini adalah tugas revolusi sehingga diperlukan tindakan-tindakan revolusioner pula.

Sebagai Gubernur Maluku ia terputus dari propinsi Maluku dan rakyatnya. Keadaan politik dan kesukaran perhubungan tidak memungkinkan ia berangkat ke Maluku. Daerah itu telah diduduki oleh tentara Australia yang kemudian menyerahkannya kepada Belanda. Dr. Ratulangi, Gubernur Sulawesi, berhasil kembali dengan bantuan Jepang ke Makassar. Di sana ia menyusun pemerintahan propinsi Sulawesi.

Sementara itu proklamasi kemerdekaan mendapat sambutan yang luas dan luar biasa dari rakyat. Di mana-mana didirikan badan-badan perjuangan, organisasi-organisasi pemuda dan rakyat untuk mempertahankan Republik Indonesia, yang baru saja merdeka.

Pemuda Maluku tidak ketinggalan. Tanggal 5 September 1945 di rumah Mr. Latuharhary, dibentuk Angkatan Pemuda Indonesia Ambon (API AMBON). Organisasi ini memberi bantuan besar kepada Gubernur Maluku dan pemerintahannya. Tentang pembentukan dan peranan pemuda Maluku diuraikan di bagian lain.

Sesudah proklamasi kemerdekaan dan berdirinya Republik Indonesia, Mr. Latuharhary mengirim surat kepada para pemimpin masyarakat Maluku di Jawa untuk mengadakan musyawarah di Jakarta. Pada tanggal 6 September Mr. Latu-

harhary membuka musyawarah pemuka-pemuka Maluku. Hadir dari Jakarta Mr. Latuharhary, Piet de Quelju, Dolf Jans, dr. J. Latumeten (pindahan dari Lawang), dari Bandung dr. Agustijn, Piet Matulesy (wartawan), dan J.D.M. (Mias) Supusepa, dari Pekalongan dr. Tupamahu, dari Semarang Z.W. (Tjaka) Riupassa, dari Yogya A. Tahya, dari Magelang M. Ruhupatty, dari Kediri dr. Thom Pattirajawane, dari Malang L. Nanlohy dan dr. Syurt Patupeirissa, dari Surabaya dr. Siwabessy dan Sasabone. 1)

Inilah musyawarah pertama orang-orang Maluku untuk menyambut kemerdekaan. Di dalam pertemuan itu Mr. Latuharhary membentangkan proses perjuangan sesudah rapat-rapat pemuka Maluku bulan Juli sampai pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus dan berdirinya RI dengan falsafah negara pancasila dan UUD 1945. Juga dibentangkan usah-usahnya bersama-sama Dr. Ratulangi dalam proses pembentukan UUD untuk menghapuskan "tujuh kata", yang diuraikan di muka. Kemudian dilemparkan Latuharhary ke dalam forum musyawarah itu; di mana pemuka-pemuka Maluku berdiri? Apa sikap para pemuka Maluku? Dengan berapi-api pendapat-pendapat dikemukakan. Sudahlah tiba saatnya untuk menentukan sikap. Dan musyawarah memutuskan: *mendukung proklamasi kemerdekaan dan berdiri di belakang Republik Indonesia.*

Pernyataan ini sangat penting bagi Latuharhary untuk mengerahkan rakyat Maluku yang ada di Jawa supaya turut dalam revolusi kemerdekaan. Untuk ke dua kalinya dalam kurun waktu dua bulan ia memperoleh legalisasi dari pemuka-pemuka Maluku untuk memimpin mereka dan masyarakat Maluku dalam perjuangan kemerdekaan.

Sore hari jam 5.00 para pemuka ini, dipimpin oleh Gubernur Maluku menghadap Presiden Sukarno di Pegangsaan Timur 56, untuk menyampaikan sikap mereka: *berdiri di bela-*

kang Republik Indonesia. Presiden menyambut dengan gembira sikap ini, oleh karena dengan ini Presiden memperoleh jaminan, bahwa rakyat Maluku akan berjuang mempertahankan proklamasi kemerdekaan.

Bagaimana selanjutnya bentuk partisipasi pemerintahan Maluku di Jawa? Pendaratan tentara Sekutu dalam bulan September membawa kesulitan-kesulitan besar. Pemerintah Indonesia menyatakan dengan tegas kepada panglima tentara Sekutu, bahwa Pemerintah *de facto* menguasai keadaan di Jawa. Pengumpulan tentara Jepang untuk dipulangkan dan jaminan keamanan para tawanan perang hendaklah diserahkan kepada Pemerintah RI. Tetapi Sekutu yang membawa serta tentara Belanda dan satuan administrasi Belanda yang disebut NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) datang untuk mengambil-alih pemerintahan. Ini yang ditentang pemerintah dan rakyat Indonesia.

Pendaratan tentara Sekutu disertai satuan tentara Belanda, dalam mana terdapat sejumlah tentara KNIL asal Ambon. Untuk mempengaruhi orang-orang Ambon, yang banyak menderita di zaman Jepang, disiarkan bermacam-macam propaganda dan berjenis janji yang muluk-muluk, yang berhasil memikat sebagian masyarakat Ambon di Jakarta.

Orang-orang Ambon, yang pada umumnya tidak disukai rakyat, karena dicap setia pada Belanda, mulai diancam. Mempergunakan keadaan ini NICA lebih mempertajam propandanya, bahwa orang-orang Ambon akan dibunuh rakyat. Akibatnya satuan KNIL Ambon mulai bentrok dengan rakyat. Celakanya lagi, dan ini yang diingini Belanda, dr. Muwardi, pemimpin Barisan Pelopor yang dibentuk di jaman Jepang, telah terlanjur menyatakan "perang" terhadap orang-orang Belanda, Indo dan Ambon secara umum, disiarkan melalui pamflet tanggal 13 Oktober 1945. Pers Indonesia turut me-

nyiarkan pamflet itu ke seluruh pelosok Jawa. Pers Belanda mengekspose pernyataan perang itu untuk menghidup-hidupkan kembali politik *divide et impera* agar negara yang baru diproklamasikan itu menjadi pecah-belah. Memang pernyataan "perang" ini mempunyai efek yang buruk bagi masyarakat Ambon di seluruh Jawa. Di pasar-pasar para penjual memboikot orang-orang Ambon, Manado, Timor. Mereka menolak menjual bahan makanan dan keperluan sehari-hari kepada suku-suku ini. Bepergian dengan kereta api sangat berbahaya bagi golongan-golongan ini. Bisa mengalami nasib buruk di antara jalan. Di seluruh Jawa dalam masa "siiiiaaap" ini, pemuda-pemuda dan rakyat menangkap orang-orang Ambon, Manado, Timor dan dimasukkan ke dalam kamp-kamp tahanan. Lucunya bukan saja golongan-golongan tersebut, tetapi juga isteri-isteri janda KNIL orang Jawa, turut ditawan. Mereka yang baru saja keluar dari tahanan Jepang kembali di masukkan ke kamp-kamp tahanan pemuda. 2) Di kalangan organisasi-organisasi pemuda dan pejuang Maluku, yang telah menyatakan berdiri di belakang RI, timbul keragu-raguan karena pernyataan perang tersebut.

Di Jakarta terjadi serangan dan pembunuhan terhadap orang-orang Ambon. Serdadu-serdadu KNIL makin merajalela dan melakukan teror, membalas tindakan-tindakan rakyat. Terjadi pembunuhan-pembunuhan terhadap pemuda dan rakyat.

Mr. Latuharhary dan API-AMBON sungguh-sungguh menghadapi suatu keadaan yang sangat sulit. 30.000 jiwa orang Ambon di seluruh Jawa terancam. Harus dicari jalan pemecahan untuk mencegah balas-dendam ini.

Mr. Latuharhary berunding dengan A. Tahya dan J. de Fretes. Mereka menganalisa peristiwa-peristiwa ini. Menurut Latuharhary ini permainan Sekutu, sebagaimana pada waktu pendudukan Jepang, supaya orang-orang Ambon melawan

Jepang, maka sekarang juga demikian supaya orang-orang Ambon melawan kemerdekaan dan RI. Politik ini dilancarkan bersamaan dengan pernyataan perang dr. Muwardi. Maksudnya supaya orang-orang Ambon dikucilkan dari perjuangan revolusi kemerdekaan. Kalau pemimpin-pemimpin sudah ditangkap atau dikucilkan, maka rakyat Maluku bisa terdesak dan dengan mudah berfihak pada Belanda. Ketiga orang itu berpendapat, bahwa ini bukan permainan Indonesia, sebagaimana disiarkan oleh "*de Volkskrant*" (15 Oktober 1945). Oleh karena itu rakyat Maluku sendiri harus mengambil tanggungjawab. Diputuskan bahwa Latuharhary akan menghadap Presiden dan minta supaya diberikan otoritas kepada Gubernur Maluku di dalam wilayah RI di Jawa dan Sumatera agar supaya Gubernur bisa mengerahkan rakyat Maluku untuk berpartisipasi secara aktif dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Tetapi Sukarno menolak usul ini. Kembali Latuharhary, A. Tahya dan de Fretes berunding. Tahya mendesak supaya Latuharhary terus memperjuangkannya. Kalau ini gagal API-AMBON akan mengambil tanggungjawab.

Kali ini ditempuh jalan melalui Wakil Presiden. Hatta lebih mengerti situasi para Gubernur dan keadaan masyarakat Maluku pada waktu itu. Bersama-sama, Hatta dan Latuharhary menghadap Presiden. Dalam pembicaraan itu tercapai persetujuan. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan, maka ditempuh jalan tengah. Presiden dan Wakil Presiden memutuskan memberikan otoritas pemerintahan di Jawa dan Sumatera kepada semua Gubernur dari luar wilayah Jawa, dengan kewajiban mengerahkan rakyat asal daerahnya untuk turut serta mempertahankan kemerdekaan. Bila Gubernur telah kembali ke Propinsinya, maka di Jawa dan Sumatera akan diangkat seorang pejabat. Karena Dr. Ratulangi sudah berada di Sulawesi, maka diangkat seorang pejabat. Mr. Pudje juga sudah

berada di Bali, maka diangkat Pello sebagai pejabat untuk Sunda-Kecil. Mr. Latuharhary dan Pangeran Ir. Noor masih berada di Jawa. Pemerintah mengizinkan para Gubernur dan pejabat membuka kantor pusat dan kantor pembantu di mana perlu. 3)

Pada tanggal 11 Oktober 1945 Gubernur Maluku mengeluarkan suatu seruan kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya kepada rakyat Maluku seperti berikut:

"Saudara-saudara, saat sekarang ini saat yang maha penting dalam sejarah Indonesia umumnya dan kaum Ambon khususnya. Kita ini sedang berada di tengah-tengah satu peristiwa yang akan menentukan nasib kita semuanya, yakni hidup sebagai bangsa yang merdeka atau sebagai bangsa jajahan Belanda yang hina.

Bangsa Indonesia, yang di dalamnya termasuk kaum Ambon, tanggal 17 Agustus 1945 telah memproklamkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Kini Republik Indonesia telah berdiri dengan jayanya. Ambon termasuk di dalamnya dan Ambon akan memerintah Ambon sendiri. Pada satu saat nanti kita semuanya akan kembali ke Ambon agar bersama-sama kita membangun kepulauan kita yang indah permai itu. Karena itu saya minta kepada saudara-saudara semuanya, berdirilah serentak di belakang Republik Indonesia itu. Berjuanglah bersandar bahu bersama-sama bangsa Indonesia lainnya untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara kita.

Percayalah, bahwa perjuangan ini akan membawa berkat pada kita semuanya, karena perjuangan ini sesungguhnya ialah suatu perjuangan yang suci." 4)

Seruan ini disusul dengan MAKLUMAT NO. 1, PEMERINTAH PROPINSI MALUKU, yang berbunyi sebagai berikut: 5)

KANTOR GUBERNUR MALUKU
Hal Pembentukan Kantor Gubernur
Maluku dan Kantor-kantor Perwakilannya.

MAKLUMAT NO. 1

Dengan persetujuannya P.J.M. Presiden dan Menteri Urusan Dalam Negeri, maka pada tanggal 1 Nopember 1945 diadakan Kantor Gubernur Maluku pada sementara waktu di Jakarta, van Heutzplein No. 7, dengan maksud seperti berikut:

- a. menginsyafkan penduduk bangsa Indonesia Maluku akan mempertahankan kemerdekaan Bangsa Indonesia dan Negara Indonesia;
- b. menjamin keselamatan penduduk tersebut;
- c. mengadakan persiapan berhubung dengan pulangny penduduk Maluku ke daerahnya, supaya bersama-sama membangunkannya menjadi satu daerah yang kokoh kuat dari Negara Republik Indonesia.

Untuk menjalankan maksud ini, maka di Surabaya, Yogyakarta, Bandung dan lain-lain tempat yang dianggap perlu, diadakan perwakilannya kantor tersebut.

Hendaknya supaya yang berkepentingan mencari perhubungan secepatnya.

Jakarta, 25 Nopember 1945
Gubernur Maluku,

MR. J. LATUHARHARY

Sebelum maklumat itu dikeluarkan Gubernur Maluku mengirim petugas-petugas ke seluruh kota besar di Jawa untuk mempersiapkan pembukaan kantor-kantor pembantu Gubernur Maluku. 6)

Kantor Pusat Gubernur Maluku dipimpin oleh Gubernur Mr. J. Latuharhary, Sekretaris J. de Fretes, dan para pembantunya P. de Quelju, D. Jans. Thom Pattiasina, Wim Tutupoly, Ron Akyuwen, Frans Pattiasina dan lain-lain.

Dalam bulan Desember 1945 diresmikan berdirinya Kantor-kantor Pembantu Gubernur Maluku di: 7)

1. Bandung, pimpinan L. Lopulisa dan Lambert Pelupessy.
2. Sukabumi, pimpinan E.D. Masihelo
3. Cirebon, pimpinan Leimena, B.J. Tanahatu, Wim Silooy, Tupamahu dan Lilipaly
4. Purwokerto, pimpinan I.O. Nanulaitta
5. Magelang, pimpinan M. Ruhupatty, Atus Kailola, Ely Lesilolo, Mias Nendisa
6. Semarang, pimpinan J. Bakker, I.R. Lobo, J.A. Matahelumual
7. Yogyakarta, pimpinan Alex W. Huwae, B.D. (Cois) Lilipaly, Alex Sahusilawane, Wim Tutuarima.
8. Sala, pimpinan Gijs Hahuly
9. Madiun, pimpinan Karel Pattipeilohy, S. Gaspersz
10. Kediri, pimpinan Ferry Latumeten
11. Mojokerto, pimpinan Arend Pattirajawane
12. Malang, pimpinan Librekan Nanlohy
13. Lawang, pimpinan Tentua
14. Bondowoso, pimpinan J.B. Suitella, I.A. Latuheru
15. Palembang, pimpinan Dominggus Tomahu
16. Jakarta, pimpinan Wim Tutupoly (didirikan sesudah Kantor Pusat hijrah ke Yogya)
17. Purworejo, pimpinan J. Tahalele.

Bulan Januari 1946 bersamaan dengan berpindahnya Pemerintah Pusat ke Yogyakarta, maka Kantor Pusat Gubernur Maluku dipindahkan juga ke Yogya dan berkantor di Margokridongo 2. Gubernur tetap dibantu oleh Sekretaris J. de Fretes, A. Tahya, Dolf Tutupoly, Mias Supusepa, Tanahatu, Ny. Tahya, Nn. Fransin Poetiray, Hanrissa, Nn. Schrikker, J. Hillapu, H. Tuasikal, Etty Laupatty.

Mr. Latuharhary telah menciptakan suatu iklim politis-psikologis yang menentukan. Karena masyarakat Maluku merasa secara nyata mempunyai Gubernur sendiri mempunyai pemerintah sendiri, merasa dilindungi oleh pemerintahan sendiri, dan bisa mengambil langkah-langkah untuk memobilisasi dan meningkatkan partisipasinya dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Antosiasme ini melenyapkan keragu-raguan. Organisasi-organisasi pemuda Maluku, organisasi-organisasi pejuang Maluku, dan lasykar-lasykar Maluku merasa mempunyai induk pemerintahan yang terkait erat dengan Pemerintah Pusat Republik Indonesia.

b. Dari API-AMBON ke Pemuda Indonesia Maluku (PIM)

Di zaman Jepang telah kita lihat adanya organisasi pemuda Ambon – Timor di Jakarta, yang kemudian menjelma menjadi organisasi pemuda Maluku, dipimpin oleh J. de Fretes dan bekerjasama dengan Mr. Latuharhary.

Di samping itu ada sekelompok pelajar dan mahasiswa Ambon, yang tergabung dalam VAS (*Vereniging Ambonse Studerenden*). Sekalipun tidak boleh berorganisasi lagi, tetapi mereka tetap memelihara ikatan organisasi dan secara terselubung bergerak dalam bidang olah-raga.

Jong Ambon telah menjelma menjadi "Bintang Timur" yang tetap menjadikan lapangan hijau kegiatan mereka.

Kelompok mahasiswa Maluku sekolah kedokteran yang menjadikan asrama Prapatan 10 markas mereka, mempunyai hubungan luas dengan para mahasiswa dan pemuda lainnya dan dengan pemimpin-pemimpin gerakan bawah tanah seperti Frans Pattiasina, Boetje Tahalele, Alex Hukom dan Nona Deetje Tamaela. Di antara mereka ada yang terlibat dalam penculikan Sukarno dan Hatta dan berperan dalam persiapan proklamasi kemerdekaan.

J. de Fretes, Rob Akyuwen, Wim Latumeten mempunyai hubungan erat dengan Angkatan Baru di asrama Menteng 31. Di situ digembleng kader-kader baru, calon-calon pemimpin nasional seperti Chairul Saleh, Sukarno, A.M. Hanafi, Aidit, Lukman dan lain-lain. Mereka digembleng dalam masalah-masalah politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan oleh para nasionalis terkemuka seperti Sukarno, Hatta, Yamin, Sunario, Soebardjo dan lain-lain.

J. de Fretes juga mempunyai hubungan erat dengan B.M. Diah, Adam Malik dan lain-lain pemuda. Pemuda Wim Tutupoly dan Samu-samu terjun ke dalam barisan pelopor yang dipimpin oleh Sudiro.

Pemuda-pemuda tersebut di atas memainkan peranan penting sekitar proklamasi kemerdekaan dan dalam perjuangan mempertahankan RI dan dalam memberi bantuan kepada Gubernur Latuharhary.

Dalam bulan Juni 1945 tokoh-tokoh pemuda mengadakan musyawarah. J. de Fretes mewakili pemuda Maluku. Dalam rapat itu dicetuskan :

IKRAR PEMUDA

Kami pemuda Republik Indonesia menghendaki Indonesia merdeka sekarang juga, atas kesanggupan dan kekuatan sendiri. Barangsiapa merintangai perjuangan kami adalah penghalang dan penghianat. 8)

Dengan modal ini para pemuda itu membentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API) di Menteng 31 pada tanggal 1 September 1945, sebagai suatu badan perjuangan untuk mempertahankan Republik Indonesia. Dan sebagai jawaban atas tantangan bagaimana sikap pemuda Maluku, maka Mr. Latuharhary dan J. de Fretes mengajukan konsepsi pembentukan suatu organisasi pemuda Maluku. Bertempat di rumah Mr. Latuharhary, pada tanggal 5 September 1945 dibentuk Angkatan Pemuda Indonesia Ambon (API-AMBON) dengan tujuan pokok *mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Bangsa Indonesia*.

Pengurus dibentuk, terdiri atas ketua Nono Tanasale, Wakil Ketua J. de Fretes, Sekretaris Rob Akyuwen. Anggota-anggota ini adalah J. Patty L. Polloupepsy, P. Putiray, Boetje Tahalele, Alex Hukom, F. Pattiasina, Thom Pattiasina, Wim Latumeten, F. Latumeten, Tienieke Latumeten, Lena Latumeten, A.E. Latuasan, Tjak Berhitsu, Samusamu, D. Pelupepsy, Hendriks, Bram de Lima Nona Kity Manusama, Nona Deetje Tamaela, Nona An Latuasan, Wim Tutupoly dan Ny. Willy Tutupoly. Sebagai penasehat bertindak Mr. Latuharhary, L.R. Jans, Piet de Quelju dan A. Tupamahu. API-AMBON mendirikan markasnya di Laan Wiechert (Kramat 7).

API-AMBON harus serentak berjuang di tiga front yaitu:

- a. perjuangan melawan kolonialisme Belanda;
- b. perjuangan menginsyafkan sebagian anggota-anggota sukunya sendiri yang sudah lama hidup dalam cekokan kolonialisme Belanda;
- c. perjuangan menyadarkan suku-suku bangsa Indonesia lainnya akan kesalah-fahaman terhadap suku Maluku. 9)

Menghadapi pendaratan tentara Sekutu dan diturunkan ke darat tentara KNIL Ambon, Mr. Latuharhary dan API -

AMBON berada dalam keadaan yang sulit. Apa lagi para tawanan bekas KNIL — Ambon yang baru dilepaskan dikerahkan kembali di dalam satuan tentara NICA. Hal ini mempunyai pengaruh negatif di dalam masyarakat, baik bagi suku Maluku, maupun bagi masyarakat Indonesia umumnya.

Menjelang pendaratan tentara Sekutu murid-murid sekolah di *Leonielaan* (Jatinegara) menyerahkan suatu dokumen kepada seorang yang mengangkat dirinya menjadi "panglima", yaitu Hasibuan. Dalam dokumen itu organisasi, orang-orang Ambon dituduh menyambut tentara NICA. Tercantum nama ketua Nono Tanasale dan penasehat Gubernur Latuharhary. Hasibuan minta Jaksa Agung, Mr. Gatot, agar memeriksa Latuharhary. Di kantor besar kepolisian, di hadapan Mr. Amir Syarifuddin, Hendromartono, dan Kepala Kepolisian dilakukan penyelesaian, disaksikan oleh Mr. Harmani dari Dep. Dalam Negeri, yang mengantar Latuharhary. Latuharhary menolak tuduhan itu. Ia tidak tahu-menahu tentang tercantum namanya. Ia menegaskan tekadnya dan para pengikutnya untuk membela proklamasi. Peristiwa yang berbahaya ini dapat diselesaikan. 10)

Ini suatu contoh betapa berbahaya keadaan pada waktu itu. Karena sesudah tentara KNIL mendarat terjadi teror dan pembunuhan, maka Mr. Latuharhary dan API — AMBON menemui pimpinan tentara Sekutu untuk menjelaskan situasi dan meminta agar pimpinan berusaha mencegah timbulnya teror. Tetapi siasat Belanda lebih licin. Tindakan tentara NICA tidak dapat dicegah oleh komandan tentara Sekutu. Hal ini berada pula di luar kemampuan dan jangkauan Gubernur Maluku dan API — AMBON. 11)

API — AMBON bertindak dalam keadaan yang membahayakan tiap-tiap anggota, baik yang datang dari rakyat dan para pemuda yang masih penuh kecurigaan maupun dari fihak tentara NICA. Apalagi adanya pernyataan perang yang telah

disebut di muka. API – AMBON berusaha keras menggunakan kawan-kawan yang berada dalam API umumnya dan di lain-lain badan perjuangan untuk memberi penerangan kepada rakyat dan para pemuda agar supaya salah faham dan kecurigaan dapat dihilangkan. Kerap kali mereka berada dalam keadaan terjepit, sebab sering sedang mereka memberikan penerangan-penerangan di suatu tempat, terjadi kekerasan dan penembakan oleh tentara NICA di daerah tersebut, di depan mata rakyat. API – AMBON harus bertindak tegas menyelamatkan orang-orang Ambon di berbagai bagian kota Jakarta dan sekitarnya dan mengangkut mereka ke *Laan Wiechert*. Serdadu-serdadu KNIL juga berbuat yang sama, dan membawa mereka ke Batalyon X. Ini menimbulkan permusuhan antara API – AMBON dengan tentara KNIL. Pemimpin-pemimpin API – AMBON dicari untuk dibunuh. Dalam keadaan krisis semacam itu diperlukan tindakan-tindakan yang tegas, berani, tetapi bijaksana, sehingga mengurangi kemungkinan jatuhnya korban.

Pada tanggal 8 Oktober 1945 dengan persetujuan Mr. Latuharhary API – AMBON mengeluarkan suatu seruan kepada masyarakat Maluku, yang sebagian masih dalam keraguan, sedangkan ada sebagian lagi yang terang-terangan berfihak pada Belanda. Bunyi seruan itu seperti berikut :

1. Kami orang Ambon bertanah air Indonesia;
2. Kami berjuang bersama-sama saudara-saudara lain golongan bangsa Indonesia untuk membela dan mempertahankan Republik Indonesia;
3. Kami tidak mau saudara-saudara kena ditipu muslihat Belanda, maka dari itu kami minta supaya:
 - a. jangan saudara-saudara dipakai sebagai alat Belanda;
 - b. bekas militer-militer Belanda almarhum dan juga yang sekarang bekerja dalam tentara Belanda, janganlah menghalang-halangi Kemerdekaan Indonesia;

Ingat bahwa Republik Indonesia menjamin keselamatan rakyat Indonesia pada umumnya dan golongan Ambon pada khususnya. Siapa antara saudara-saudara yang belum dapat mengerti dan turut dengan cita-cita kita Indonesia—Ambon untuk membentuk Indonesia merdeka, baiklah diam saja, asal jangan turut Belanda.

Jika Saudara-saudara tidak memperhatikan yang tersebut di atas maka Saudara-saudara sendiri membawa bahaya atas 30.000 jiwa orang Ambon di Jawa dan Madura. 12)

Untuk mengatasi kemelut yang menimpa orang-orang Ambon di Jawa Barat, maka API – AMBON mengirim Frans Pattiasina dan Boetje Tahalele ke Jawa Barat, dengan surat perintah Menteri Penerangan Mr. Amir Syarifuddin untuk (a) mengeluarkan semua orang Ambon yang ditahan di kamp-kamp tahanan; (b) memberikan penjelasan kepada pemimpin-pemimpin pemuda dan badan-badan perjuangan rakyat setempat; (c) membentuk cabang-cabang API – AMBON di mana keadaan memungkinkan.

Perjalanan ke Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon dan Purwakarta, dengan kerjasama dan pengertian dari kawan-kawan seperjuangan mahasiswa/pemuda di tempat itu yang dulu dilatih bersama di PETA, maka kedua utusan itu berhasil mengumpulkan para tahanan orang Ambon di Purwakarta. Kemudian mereka diangkut ke Yogyakarta. 13)

Keadaan di Jakarta makin memuncak, karena makin banyak tentara NICA yang didaratkan dengan persenjataan serba lengkap. Pertempuran-pertempuran makin sengit dan tidak seimbang persenjataan, sehingga banyak sekali korban rakyat yang jatuh.

Fihak musuh berusaha memecah-belah API – AMBON. Nono Tanasale, J. Patty dan L. Polhoupeussy terjebak perangkap bujukan NICA. Jiwa joangnya goyah, dan mereka condong ke fihak musuh dalam bulan Desember 1945.

Rob Akyuwen dan Boetje Tahalele sempat ditawan oleh ketua mereka yang membelot. Dalam rapat tanggal 23 Desember, Nono Tanasale, yang telah diperalat Belanda, mendesak dengan gertakan senjata, supaya API AMBON memihak saja kepada NICA. Frans Pattiasina yang menghadiri rapat itu menolak ajakan tersebut. API — AMBON pecah. Pimpinan sementara diambil-alih oleh J.den Fretes. Pemuda-pemudi republikin menyusun pengurus API — AMBON yang baru, yaitu ketua Boetje Tahalele dan Sekretaris Frans Pattiasina. Karena markas di *Laan Wiechert* telah diduduki NICA, maka untuk menjaga segala kemungkinan, markas yang baru dipusatkan di dua tempat, yaitu di asrama Sekolah Teologia Tinggi, Pegangsaan Timur, dan *van Heutzplein 7*.

Sewaktu Pemerintah Pusat berpindah ke Yogyakarta, disertai pula dengan pemerintahan Gubernur Maluku dalam bulan Januari 1946, maka beberapa anggota API — AMBON turut berpindah. Mereka yang menetap di Jakarta tetap melanjutkan perjuangan seraya bekerja sebagai petugas-petugas intelijen dari Kementerian Pertahanan dan Perdana Menteri Syahrir. Besar jasa-jasa mereka dalam mengumpulkan dan memberikan informasi-informasi berharga kepada pemerintah dan menjalankan tugas-tugas kurir antara Jakarta dan Yogyakarta.

Di luar Jakarta masyarakat Maluku menyambut proklamasi kemerdekaan dengan berbagai perasaan. Ada yang sama sekali tidak mengerti apa-apa, ada yang bingung mau berfihak ke mana, dan ada pula yang sejak semula bertekad bulat berdiri di belakang RI karena keyakinan politiknya. Berita-berita yang datang dari Jakarta mengenai kegiatan-kegiatan Mr. Lathary dan para pemimpin Maluku dan API — AMBON, kemudian disusul dengan pernyataan pemuka-pemuka Maluku se Jawa, menghembus api revolusi setempat mau tak mau

menyadarkan para pemuka dan pemuda Maluku untuk menentukan sikap dan mengambil tindakan.

Mr. Latuharhary mengirim telegram kepada pemuda Mias Supusepa di Bandung supaya membentuk Angkatan muda. Supusepa mengundang dr. Agustijn, L. Lopulissa Sr, Lambert Pelulessy, Ely Sahertian, Frits Pupella (Boetje), dan lain-lain untuk berapat tanggal 2 September 1945 di *Friessia Straat*. Hari itu juga berdiri API – AMBON Bandung, yang dipimpin oleh Ely Sahertian. Tetapi karena beberapa kali ia tidak menghadiri rapat maka dia diganti oleh Lambert Pelulessy.

Rapat mengeluarkan pernyataan mempertahankan kemerdekaan dan berdiri di belakang RI. API – AMBON mengerahkan para pemuda Maluku untuk bergabung dan berjuang mempertahankan Bandung, karena dalam bulan Oktober tentara Inggris mulai memasuki kota kembang, sehingga mulai timbul pertempuran-pertempuran.

Sementara itu banyak keluarga Ambon diselamatkan oleh API – AMBON. Akhir Nopember tentara Inggris, yang telah menduduki Bandung Utara, memerintahkan badan-badan perjuangan RI supaya mengosongkan daerah Bandung Utara. API – AMBON mengundurkan diri ke Bandung Selatan dan bermarkas di rumah Lambert Pelulessy di Tegalega. Inti kekuatan API – AMBON terdiri atas keluarga dr. Agustijn, keluarga L. Lopulissa Sr., keluarga Frits Pupella, keluarga Mias Supusepa, keluarga Hetharion, keluarga Oom Bob Pelulessy, keluarga Wattimena, Lambert Pelulessy dan pemuda-pemuda Pelulessy, Hetharion, Nanlohy, Noya, Andries, Mans Palyama, Holle, Gerrit Latumahina, Leo Lopulissa dan lain-lain. API – AMBON dikenal rakyat dari Bandung Selatan sampai ke Tasikmalaya, karena keberanian dan perlawanan mereka yang gigih menentang tentara Gurkha, Inggris dan NICA. Bulan Nopember 1945 Mr. Latuharhary dan J. de Fretes datang ke Bandung untuk mengadakan pertemuan dengan masyarakat Maluku da-

lam mana Gubernur Maluku membentangkan situasi politik dan keadaan orang-orang Ambon di Jawa pada waktu itu. Dari sini mereka lanjutkan perjalanan ke Yogyakarta. 14)

Di Bogor pemuda Ayawaila mempersatukan pemuda-pemuda Maluku dan terjun ke dalam badan-badan perjuangan rakyat. Dengan jalan ini ia banyak berjasa dalam mengamankan orang-orang Ambon.

Di Cirebon Piet Riupassa, Wim Silooy dan kawan-kawan membentuk organisasi pemuda Maluku dan menyatakan berdiri di belakang RI serta memberi bantuan penuh kepada Kantor Gubernur Maluku.

Di Purwokerto penulis mempersatukan pemuda-pemuda Maluku dan Timor dalam Angkatan Muda Indonesia Maluku (AMIM). Permulaan September AMIM mengeluarkan pernyataan berdiri di belakang RI, yang disampaikan kepada Mr. Latharhary dan pemimpin-pemimpin serta pemerintah keresidenan Purwokerto. Pernyataan ini disiarkan melalui radio. Para pemuda ini seperti Agustijn, M. Dicky, Anthony, da Costa, memberi bantuan penuh kepada penulis sebagai Kepala Kantor Pembantu Gubernur Maluku untuk memutar roda perjuangan masyarakat Maluku. Bantuan besar diberikan juga oleh orang-orang tua seperti om Siahaya, Sinanu, Kastanya dan da Costa.

Di Cilacap Lukas Sahertian, Job Warella dan Rhebok mengerahkan pemuda-pemuda Maluku untuk mempertahankan kemerdekaan.

Di Magelang didirikan Angkatan Pemuda Indonesia Maluku (APIM) dipimpin oleh M. Ruhupatty, Ely Lesilolo diangkat sebagai Kepala Kelasykaran. Mereka dibantu oleh Atus Kailola, Lambert Manusama dan Nendisa. Lasykar Maluku mengambil bagian dalam pertempuran-pertempuran di front Magelang dan Ambarawa ketika tentara Inggris menduduki daerah itu.

Di Yogya Dik Joseph, Bram Matulesy, Nona Ientje Matulesy, Karel Siwalette, Karel Wenno, Andries Latupeirissa, Alex Sahusilawanne, Filip Likumahua, Piet Ayawaila, Nona An Luhukay dan lain-lain mendirikan Angkatan Muda Indonesia Maluku (AMIM) dan turut menggempur Jepang bersama rakyat.

Di Solo Gijs Hahuly mengerahkan pemuda-pemuda Maluku dan terjun dalam badan-badan perjuangan.

Karel Pattipeilohy, Tjak Latumahina dan lain-lain mengorganisasi pemuda-pemuda Maluku di Madiun untuk turut berjuang mempertahankan RI. Di Semarang pemuda-pemuda Maluku dan Timor dikerahkan oleh John Bakker dan I.R. Lobo (asal Timor) dalam GERINDO Maluku dan terjun ke dalam perjuangan melawan tentara Inggris di Semarang.

Di Malang pemuda-pemuda Maluku diorganisasi oleh dr. Syurt Latupeirissa dan L. Nanlohy. Kemudian barisan mereka diperkuat oleh pemuda-pemuda yang mundur dari Surabaya dan Malang menjadi pusat perjuangan Maluku di Jawa Timur.

Sesudah proklamasi masyarakat Surabaya bergolak. Pemuda dan rakyat menyerang Jepang untuk merebut senjata. Sesudah rapat besar di Tambaksari, organisasi-organisasi pemuda disatukan dalam Pemuda Republik Indonesia (PRI). M. Sapy, M. Kalibonso, dan Dr. G. Siwabessy mengambil inisiatif dan membentuk PRI Maluku, dikenal pula dengan nama PRI Utara pada pertengahan bulan September 1945. Pimpinan terdiri dari M. Sapy, Moh Padang, M. Kalibonso, Sam Malessy, Jo Risakotta, Herman Pieters, Telusa, Manuputti, Seimima, Waas, Sam Malessy, Saar Sopacua dan Reny Siwabessy, Poetiray. Dr. Siwabessy dan dr. Pattiradjawane diangkat sebagai penasehat. Di samping terjun ke dalam pertempuran-pertempuran yang terjadi, mereka berusaha keras untuk mengamankan rakyat Maluku di Surabaya dan sekitar-

nya, yang dicurigai rakyat. Terutama ketika tentara Inggris mendarat dan dibuntuti oleh tentara NICA. Dalam pertempuran-pertempuran itu PRI – Maluku ditugaskan mempertahankan bagian utara Surabaya. Di situ memang terjadi pertempuran yang hebat. Para pejuang dikobarkan semangat juangnya oleh komando Bung Tomo yang berapi-api. 15)

Pertempuran yang paling hebat yang dihadapi PRI – Maluku ialah pada tanggal 28/29 Oktober 1945. Mereka bertahan sambil menggempur tentara Inggris dan Nica dan tidak mundur setapak pun. Akibatnya 18 pemuda Maluku tewas dan 17 luka-luka. Korban yang diberikan ini disiarkan oleh Gubernur Maluku dalam MAKLUMAT No. 2 yang berisi :

PROPINSI MALUKU

**PERISTIWA SURABAYA. KORBAN
PAHLAWAN-PAHLAWAN MALUKU.**
Pengumuman korban Pahlawan Maluku
pada peristiwa Surabaya.

MAKLUMAT NO. 2. 16)

Kabar resmi dari Kantor Perwakilan Gubernur Maluku di Surabaya menyatakan tentang pertempuran pada tanggal 28/29 Oktober 1945 di Surabaya, bahwa:

1. telah tewas sebagai pahlawan 18 pemuda,
2. yang luka 17 pemuda.

Dengan hati yang suci murni rakyat Indonesia Maluku mengucapkan terima kasih atas jasanya pemuda-pemuda dari daerah Maluku yang telah gugur dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia itu.

Kepada keluarga-keluarga yang berduka cita kami menyatakan turut serta dalam penderitaannya. Percayalah bahwa kurban penderitaan itu tidak akan sia-sia.

Jakarta, 5 Desember 1945

GUBERNUR MALUKU,

MR. J. LATUHARHARY

Tanggal 10 Nopember 1945 Surabaya dihujani bom-bom dari laut, udara, dan darat, karena arek-arek Suroboyo menolak ultimatum Inggris, sesudah Brigadir Jenderal Mallaby tewas dalam pertempuran. Hujan bom menewaskan beratus rakyat. Pertempuran sengit berlangsung dari jalan ke jalan. Tetapi akhirnya para pejuang mundur karena tidak tahan pemboman, penyerangan musuh dengan tank-tank dan senjata-senjata modern.

PRI — Maluku tarik diri ke Wonocolo, dan bermarkas di asrama Maluku yang di zaman Jepang didirikan oleh Kolibonso. Di situ terdapat sekitar 200 orang di antaranya sekitar 20 orang pemuda. Mereka ini memanggul senjata apa saja dan terjun ke dalam pertempuran-pertempuran. Karena desakan musuh terus-menerus dengan hebat, maka barisan rakyat mundur ke luar kota. PRI — Maluku mundur ke Mojokerto dan dari sini melanjutkan perjuangan. Dengan mereka turut keluar kota berpuluh keluarga Maluku. Sebagian menetap di Mojokerto, sebagian lagi mundur ke Malang dan di sana ditampung di asrama Maluku yang telah ada, diatur oleh L. Nanlohy, para pemuda dan ibu-ibu. 17)

Sementara itu telah berdiri organisasi Pemuda Sosialis Indonesia (PESINDO) Jawa Timur dan bermarkas di Mojokerto. Pemuda-pemuda Maluku, yang belum tergabung dalam PRI — Maluku memasuki PESINDO. Karena pertimbangan perjuangan, dalam mana rakyat minta bukti dari para pemuda

Maluku, maka perlu ditonjolkan identitas Maluku. Oleh karena itu mereka memakai nama PESINDO – MALUKU dan tidak dilebur dalam organisasi induk, tetapi merupakan kesatuan sendiri. Dengan demikian mereka dipimpin oleh pemimpin-pemimpin Maluku sendiri dan memperoleh fasilitas-fasilitas tersendiri. Moh. Padang dan Egmond Pattinama turut memimpin lasykar ini.

Pada suatu waktu masyarakat Maluku yang ada di bawah pimpinan Arend Pattirajawane, Kepala Kantor Pembantu Gubernur Maluku, PRI – Maluku dan PESINDO – MALUKU dikunjungi oleh Mr. Latuharhary, disertai Frans Pattiasina dari API – AMBON Jakarta, dalam rangka konsolidasi perjuangan Maluku dan untuk menyaksikan dengan mata kepala sendiri perjuangan rakyat Maluku di Jawa Timur. Bagi Latuharhary merupakan juga suatu reuni dengan kawan-kawan seperjuangan SA.

Pada kesempatan itu terasa dan terlihat benar-benar pengakuan masyarakat, pemuda dan lasykar Maluku atas pimpinan Mr. Latuharhary sebagai Gubernur mereka. Ke mana ia pergi, antara lain kunjungan ke Gubernur Jawa Timur, Walikota dan para pemimpin badan-badan perjuangan, dikawal ketat oleh pasukan Maluku bersenjata lengkap. Malahan dalam perjalanan pulang, disediakan kereta-api khusus bagi Gubernur Maluku dengan kawalan khusus sampai ke Yogya. 18)

PESINDO – MALUKU di bawah pimpinan Kapten Riri-hena mengharumkan nama Maluku di medan-medan pertempuran Jawa Timur. Pada suatu waktu dalam tahun 1946 mereka ditarik ke Yogyakarta untuk bertugas sebagai satuan pengawal Presiden.

Untuk mengkonsolidasikan begitu banyak organisasi pemuda di Jawa dan Sumatera, maka pada tanggal 9 – 11 Nopember 1945 diadakan Kongres Pemuda Indonesia I sesudah

proklamasi kemerdekaan. Salah satu hasil yang dicapai pada tanggal 10 Nopember ialah dileburnya tujuh Angkatan Pemuda menjadi Pemuda Sosialis Indonesia (PESINDO) dipimpin oleh Ruslan, Soepeno dan lain-lain. Organisasi ini ada di bawah pengaruh St. Syahrir dan Amir Syarifuddin.

Kongres itu diadakan dalam suasana yang panas dan semangat juang yang tinggi berhubung dengan pemboman Inggris atas Surabaya. Konggres memprotes keras pemboman itu ditujukan pada PBB dan dunia. Berbagai resolusi diambil serta disusun program kerja dan program perjuangan.

Konggres memutuskan membentuk "Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia" (BKPRI) yang meliputi 23 organisasi pemuda antara lain termasuk Angkatan Pemuda Indonesia Maluku, yang dalam kongres itu diwakili oleh Rob Akyuwen. Kongres membentuk Dewan Pimpinan Pusat yang diketuai oleh Chairul Saleh dengan wakil-wakilnya Soepardjo dan Boechari, dan Mulyono sebagai penulis. Robert Akyuwen duduk sebagai anggota mewakili Pemuda Maluku. Selanjutnya selama BKPRI ini berdiri Pemuda Maluku turut serta secara aktif di dalamnya.

Konggres itu ditutup dengan rapat raksasa di alun-alun utara pada tanggal 11 Nopember sore hari. Salah satu hasilnya ialah beratus-ribu pemuda bersenjata bambu-runcing mengalir ke front Surabaya untuk bertempur melawan tentara Inggris.

Untuk mengkonsolidasikan perjuangan Maluku, maka sesudah Gubernur berpindah ke Yogya, atas inisiatifnya dan API — AMBON Jakarta, seluruh pemuka-pemuka Maluku, semua Kepala Kantor Pembantu Gubernur Maluku, para pemimpin pemuda Maluku dan para komandan di berbagai front diundang dalam suatu musyawarah besar pada tanggal 12 — 14 Pebruari 1946, bertempat di Saidan 2, Yogyakarta.

Musyawarah ini merupakan suatu titik balik dalam hal pandangan masyarakat di Jawa dan Sumatera terhadap orang-orang Ambon. Konperensi itu merupakan pula suatu pembulatan tekad dan suatu gerakan persatuan dan kesatuan yang nyata, yang menempatkan Maluku dan rakyatnya untuk selama-lamanya dalam wadah Republik Indonesia, yang merdeka dan berdaulat dari Aceh sampai Merouke. Kecurigaan, keraguan, sikap waswas timbal balik, baik di kalangan masyarakat Indonesia umumnya, maupun di kalangan masyarakat Maluku, berubah total, karena Maluku memberi bukti nyata dalam perjuangan mempertahankan Republik Indonesia.

Dua hari sebelum musyawarah dimulai lasykar-lasykar API – AMBON dari front Bandung Selatan mengalir ke Ibu Kota revolusi, di bawah pimpinan Lambert Pelulessy dan Frits Pupella, dengan membawa serta sebuah panser, seorang tawanan Gurkha dan persenjataan lengkap, sebagai bukti perjuangan melawan Inggris. Dari front Surabaya datang lasykar PRI – Maluku di bawah pimpinan Sam Malessy, dr. Siwabessy, Moh. Padang, Kolibonso, Herman Pieters, M. Sapia dan lain-lain, lengkap dengan persenjataannya. Yang sangat menarik dari pemimpin-pemimpin Jawa Timur ini, pemuda Moh. Padang, Sam Malessy, M. Sapia yang berambut gondrong, brewok, jenggot panjang sampai ke perut, dengan *beenkap* dan *niponto* (pedang Jepang) dan pistol di pinggang. Seram amat kelihatannya, tetapi itulah suasana revolusi. Hampir semua pemuda dari front berambut gondrong. Mereka bertekad tidak mencukur rambut dan jenggotnya sebelum Indonesia merdeka seratus persen. Anggota-anggota lasykar yang lain bersenjata lengkap dengan kain berang (merah) diikat pada kepala.

Kepala-kepala Kantor Pembantu Gubernur Maluku dan para pemuda dengan pemimpin-pemimpinnya berdatangan dari seluruh Jawa dan Sumatera. Para pemuda dan pemudi AMIM Yogyakarta, ibu-ibu serta om-om sangat sibuk mengatur tem-

pat penginapan, tempat sidang, pengangkutan dan makanan para peserta konferensi.

..... Malam resepsi, tanggal 12 Pebruari 1946 Gedung Saidan 2 (bekas *clubhuis* PJG = Balai Pemuda Protestan) dihiasi dengan semarak. Intelijen siang-siang telah datang memeriksa semua sudut gedung dan mengamankan ruang resepsi, karena Presiden Sukarno akan hadir.

Sekitar jam 6.00 sore, lasykar Maluku mengadakan "*show of force*" di kota Yogyakarta. Dari Margokridonggo 2 bergerak di depan sebuah panser penuh dengan para pejuang Maluku, diikuti oleh sedan Gubernur Maluku dan isteri, di atas mobil dipasang pom-pom 12,7 mm, di samping sedan berlari-lari pasukan-pasukan bersenjata, badan berbelit pelor, kepala berikat kain berang, berambut gondrong . . . wah kelihatan seram juga! Rombongan bergerak perlahan-lahan melalui Malioboro menuju ke Saidan 2. Rakyat sepanjang jalan berdiri menonton dan menanya-nanyakan, "ada apa?", "tentara mana?" Ada yang bilang, "itu tentara Ambon!" "Kok, tentara Blanda item di sini?" sambut sementara penonton . . .

Setiba di Saidan 2, Gubernur dan isteri disambut dengan pekik . . . "merdeka!!! merdeka!!! merdeka!!! yang memekak telinga. Jalan-jalan di sekitar gedung itu telah ditutup dan dijaga ketat oleh pasukan-pasukan Maluku dan tentara pengawal Presiden.

"*Show of force*" ini ada suatu "*psychological show*" (suatu show psikologis) kepada rakyat ibu-kota revolusi dan para pejuang serta lasykar-lasykar yang ada di Yogya . . ." Ini pejuang-pejuang serta lasykar-lasykar Maluku dari front pertempuran!!! . . ." Karena rakyat minta bukti, maka sore hari itu putera-putera Maluku memberi bukti.

Menjelang jam 19.00 telah hadir para pemuka dan inteligencia Maluku seperti Ir. Putuhena (Menteri Pekerjaan Umum),

Dr. J. Leimena (sebulan kemudian diangkat menjadi Menteri Muda Kesehatan), dr. Picauly, dr. Samallo, dr. Siwabessy, dr. Pais, dr. Latupeirissa, dr. Pattirajawane, dr. M. Haulussy, dr. Agustijn, dr. G. Rehatta, Abdul Mutalib Sangaji, A. Tahya, G. Tapiheru, bekas anggota-anggota SA, Kepala-Kepala Kantor Pembantu Gubernur Maluku, J.de Fretes, Rob Akyuwen, Boetje Tahalele, Frans Pattiasina, Alex Hukom, Ds. Thom Pattiasina, Wim Tutupoly, An Latuasan, Saar Sopacua, Ny. Siwabessy-Poetiray, Kity Manusama, pemuda-pemudi dari front Surabaya, dan Bandung Selatan, Bogor, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Magelang, Yogya, Solo, Purwokerto, Purworejo, Cilacap, Madiun, Kediri, Mojokerto, Malang, Lawang, Bondowoso dan Palembang. Juga telah hadir para pemimpin pemuda lainnya, partai dan badan-badan perjuangan serta para pembesar pemerintahan Maluku, yang dengan gagah berani mempertahankan proklamasi dan membela Republik Indonesia di front depan medan pertempuran”.

Beberapa menit sebelum jam 19.00 tiba Presiden Sukarno, disambut dengan pekik ”merdeka!” dari ratusan mulut. Resepsi dibuka dengan ”Indonesia Raya”, yang dinyanyikan dengan terharu oleh ratusan hadirin.

Gubernur Maluku dalam laporannya kepada Presiden dengan singkat membentangkan perjuangan putera-putera Maluku sedari zaman pergerakan melalui zaman Jepang dan proklamasi kemerdekaan hingga saat itu.

Presiden dalam sambutannya menggembleng para hadirin dengan semangat patriotisme yang berapi-api. Hadirin menyambutnya dengan tepuk tangan riuh-rendah dan pekik ”merdeka” Presiden Sukarno menutup pidatonya dengan kata-kata yang tidak pernah akan dilupakan oleh mereka yang hadir pada malam itu kira-kira sebagai berikut :

"Saya menyatakan terima kasih sebesar-besarnya dan memberi *ere-saluut* kepada pemuda-pemuda Maluku, yang dengan gagah berani membela Republik Indonesia di semua medan pertempuran."

Gegap-gempita, riuh-rendah, sorak-sorai, tepuk tangan yang ramai, hadirin berdiri memberi ovasi kepada Presidennya, sebagai tanda terima kasih atas penghargaanannya. Sambutan Presiden itu dicetak dengan huruf-huruf besar di surat-surat kabar "*Kedaulatan Rakyat*" dan "*Nasional*" pada hari esok dan dibaca oleh ribuan rakyat. Dan inilah merupakan titik balik bagi penghapusan kecurigaan rakyat terhadap orang-orang Ambon.

Pagi jam 8.00. Yogya bermandikan sinar sang surya yang cerah. Hawa makin panas. Para peserta musyawarah telah berkumpul di ruang sidang di Saidan 2. Semangat dan suasana revolusi meliputi hadirin. Di depan gedung pasukan-pasukan rakyat bersimpang-siur. Rakyat berkelompok berdiri menonton seorang Gurkha, yang dibawa oleh pejuang-pejuang Bandung Selatan. Orang sudah banyak mendengar melalui radio dan membaca tentang tentara Gurkha. Macam apa orangnya? Nah, di sana dia berdiri, di serambi depan tempat sidang.

Ruang penuh sesak ketika Gubernur Maluku, didampingi oleh Sekretaris J.de Fretes dan pimpinan panitia, mengambil tempat. Ketua Panitia membuka sidang dengan pekik "merdeka!!!" Lalu menyampaikan selamat datang. Pimpinan kemudian diserahkan kepada Gubernur Latuharhary. Pagi itu sidang mendengar uraian dan pengarahan dari Gubernur Maluku. Sekretaris dan laporan para kepala kantor. Sore hari sidang mendengar laporan dari wakil organisasi-organisasi pemuda Maluku, yang didahului oleh laporan Robert Akyuwen mengenai Kongres Pemuda Republik Indonesia yang di dalamnya ia mewakili Pemuda Maluku. Laporan para kepala kantor dan wakil-wakil pemuda berkisar pada (a) keadaan masyarakat

Maluku setempat yang menghadapi berbagai perkembangan revolusi; (b) masalah tahanan orang Maluku di banyak tempat; (c) kegiatan dan perjuangan para pemuda; (d) keinginan para pemuda untuk bersatu dalam satu saja organisasi pusat yang kuat; (e) keinginan para pemuda untuk segera memindahkan perjuangan ke daerah Maluku.

Sidang kemudian dibagi dalam seksi-seksi untuk membicarakan masalah politik, sosial, ekonomi dan kepemudaan yang dihadapi masyarakat Maluku. Sampai subuh seksi-seksi bekerja non-stop.

Sidang keesokan harinya dimulai dengan perdebatan mengenai organisasi pemuda, dipimpin oleh J. de Fretes dan Rob Akyuwen. Pada waktu pembicaraan mengenai nama organisasi, suasana menjadi panas. API – AMBON Jakarta dan Bandung mempertahankan nama mereka. PRI – MALUKU dari Jawa Timur tidak mau melepaskan nama mereka. Dua-duanya mempunyai alasan psikologis perjuangan, karena nama mereka telah terkenal luas dalam masyarakat dan di medan pertempuran. Pemuda-pemuda dari Jawa Tengah lebih condong pada peleburan semua organisasi dalam satu saja wadah dengan satu saja nama. Perdebatan sengit terjadi, adu argumentasi yang pada waktu-waktu tertentu meledak dengan ancam-mengancam, banting-membanting pistol di meja, gertak-menggertak dengan kokang senjata. Bukan main panasnya watak orang Maluku!!! Bisa terbakar, nih!!! Seram melihat para pejuang yang gondrong, brewok dan berjenggot panjang bersitegang leher. Maklumlah suasana panas di medan pertempuran dibawa oleh pemuda-pemuda yang masih mabuk pertempuran ke dalam ruang sidang. Darah yang mendidih, lambat laun ditenangkan oleh tokoh-tokoh tua seperti Latuharhary, Dr. J. Leimena, Ir. Putuhena, Abdul Mutalib Sangaji, Bram Tahya dan lain-lain. Akhirnya rasio memperoleh kemenangan atas emosi dan lahirlah dari api perdebatan itu organisasi *Pemuda*

Indonesia Maluku (PIM), berkedudukan di Yogyakarta. Di-setujui pula Anggaran Dasarnya dengan asas tujuan: Kemauan yang luhur dari Pemuda Indonesia Maaluku untuk bersama-sama dengan lain-lain badan pergerakan mempertahankan dan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia Merdeka. 19)

Sebagai Ketua Umum terpilih J. de Fretes dengan Sekretaris Robert Akyuwen. Juga diputuskan Rob Akyuwen tetap mewakili PIM di dalam BKPRI (Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia).

Rencana kerja yang disusun di dalam musyawarah itu antara lain: (a) rencana perjuangan kantor Gubernur Maluku; (b) rencana perjuangan pemuda; (c) rencana perjuangan ke Maluku.

Beberapa resolusi diambil antara lain (a) pernyataan bahwa masyarakat Maluku berjuang mempertahankan Republik Indonesia (b) menyerukan dan mendesak kepada tentara Sekutu supaya secepat mungkin menarik diri dari dan meninggalkan Indonesia; (c) menyerukan kepada pemerintah dan badan-badan perjuangan di berbagai daerah supaya membebaskan orang-orang Maluku yang ditahan.

Musyawarah besar itu ditutup dengan malam ramah-tamah, berdendang dan menari semalam suntuk bersama masyarakat Maluku yang ada di Yogya dan para undangan.

Segera setiba kembali di tempat masing-masing Cabang-cabang PIM didirikan dan dipilih pengurusnya. Kepala-kepala Kantor menghubungi instansi pemerintah dan badan-badan perjuangan untuk melepaskan para tahanan. Gubernur Maluku mengirim juga kurir-kurir ke berbagai tempat untuk menyelesaikan masalah para tahanan. Dalam waktu kira-kira tiga bulan semua tahanan orang-orang Maluku, Manado, Timor dan lain-lain yang ditahan pada permulaan revolusi dibebaskan. Di Banyumas misalnya, penulis di Purwokerto dan L. Sahertian,

di Cilacap, sesudah berunding dengan residen Banyumas dan badan-badan perjuangan, berhasil membebaskan kira-kira 300 orang Maluku, Manado, Timor, Indo, janda-janda Jawa dan lain-lain.

Sementara itu anggota-anggota PIM terjun ke semua medan pertempuran dan di garis belakang bergandengan dengan semua organisasi pemuda dan badan-badan perjuangan lainnya untuk mempertahankan Republik Indonesia.

c. Lasykar-lasykar Maluku

Sesudah Badan Keamanan Rakyat (BKR) beralih menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada tanggal 5 Oktober 1945, maka Kementerian Pertahanan mengkonsolidasikan begitu banyak badan perjuangan dan lasykar-lasykar dalam satuan-satuan yang dapat diatur oleh pimpinan TKR.

Ada berbagai lasykar Maluku di berbagai medan pertempuran. Dengan adanya PIM maka lasykar-lasykar itu perlu pula disatukan dalam satu saja lasykar Maluku. Pimpinan PIM memutuskan untuk mengadakan konperensinya yang ke dua di Malang, antara tanggal 14 – 16 Oktober 1946.

Sekali lagi pimpinan cabang-cabang PIM dan pasukan-pasukan dari berbagai medan pertempuran menuju ke Malang. Sebuah kereta api khusus berangkat dari Yogya dengan membawa rombongan dari Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah ke Malang; di antara jalan mengambil juga rombongan dari beberapa tempat di Jawa Timur. Di dalam rombongan itu terdapat pula Gubernur Maluku dan dua orang menteri, yaitu Ir. Putuhena, Menteri PU dan Dr. J. Leimena, Menteri Muda Kesehatan.

Kedatangan rombongan disambut dengan meriah oleh masyarakat Maluku dan para pemuda-pemudi dan pejuang.

Konperensi mulai keesokan harinya dengan mengantar jenazah pahlawan Piet Latuputty yang tewas di medan Mojo-kerto ke pemakaman umum di Sukun.

Dalam sambutannya Mr. Latuharhary mengingatkan sidang perkabungan bahwa kemerdekaan menuntut korban yang besar. Diserukan supaya semua putera-puteri Maluku bersatu memberi korban yang lebih besar lagi.

Di dalam konperensi itu diambil dua keputusan yang penting: (1) Pimpinan PIM dibaharui. Dr. J. Leimena diangkat sebagai ketua umum yang baru dan J. de Fretes sebagai wakil ketua; (2) konperensi memutuskan membentuk DIVISI PATTIMURA.

DIVISI PATTIMURA yang dibentuk pada tanggal 16 Oktober 1946 itu beranggotakan kira-kira 2500 pemuda/pemudi. Susunannya seperti berikut: 20)

I. Ketua Penasehat :

Ketua	— Mr. J. Latuharhary
Wakil Ketua	— Dr. J. Leimena
Anggota	— J.M. Westplat
Anggota	— dr. Soisa
Anggota	— R Tentua

II. Pimpinan Divisi :

Komandan	— dr. Thom Pattirajawane
Wk. Komandan	— Sam Malessy
Ajudan	— R. Ririhena

III. Staf Fivisi :

Kepala Staf	— dr. Gerrit Siwabessy
Pembantu	— Robert Akyuwen
	Moh. Padang
	Frits Pupella
	Egmon Pattinama
	Herman Pieters
	Wim Hukom.

Komandan dan Staf bermarkas di Malang.

IV. 3 Resimen Divisi :

Resimen I Jawa Timur, markas Malang:

Komandan	— Kolibonso
Wk. Komandan	— J. Pelamonia
Ajudan	— Pasanea

Resimen II Jawa Tengah, markas Magelang:

Komandan	— Thom Sahusilawane
Wk. Komandan	— R.M. Sahetappy (untuk Yogya)
Ajudan	— D.F. Sabtu

Resimen III Jawa Barat, markas Cirebon:

Komandan	— Jusuf Diponegoro
Wk. Komandan	— M. Huleselan
Ajudan	— P.J. Riupassa.

Putusan ini disampaikan kepada Presiden dan Kabinet. Divisi Pattimura dimasukkan dalam organ TKR. Bersama-sama dengan lasykar-lasykar lain Divisi Pattimura dan para komandannya diresmikan oleh Presiden dalam suatu upacara di halaman depan Istana Kepresidenan di Yogyakarta. Dr. Thom Pattirajawane disahkan sebagai komandan Divisi dengan pangkat Jenderal Mayor.

Dengan jalan ini perjuangan bersenjata dapat dikendalikan dan dikoordinasikan oleh Tentara Republik Indonesia (TRI — sejak 25 Januari 1946) dan dapat diperoleh fasilitas, bantuan persenjataan dan perbelanjaan dari Kementerian Pertahanan. Sedangkan pemuda/pemudi dalam PIM yang berjuang di garis belakang bergerak aktif dalam kegiatan-kegiatan politik, sosial ekonomi dan kebudayaan.

Di semua front satuan-satuan Pattimura dengan tangguh, bahu-membahu dengan lain-lain lasykar dan TRI, berjuang mempertahankan kemerdekaan.

Ketika Belanda dalam bulan Juli 1947 melancarkan agresi militer I, banyak kota di daerah operasi Pattimura jatuh/ ke tangan musuh, seperti Priangan Timur, Cirebon dan Malang. Anggota-anggota Divisi Pattimura mengundurkan diri ke gunung-gunung; ada yang tewas dan ada yang tertangkap. Komandan Divisi dan Kepala Staf terjepit di kota Malang. Mayor Herman Pieters dan Letnan Satu Domingus Nanlohy berhasil memasuki kota dan membawa keluar Kepala Staf, Dr. Siwabessy.

Daerah Kepanjen di Jawa Timur selanjutnya menjadi daerah pertahanan Resimen I, daerah Magelang, Ambarawa dan Kebumen daerah operasi Resimen II dan daerah Priangan Timur daerah operasi Resimen III. Sebagian lagi mengundurkan diri ke Yogyakarta.

Karena kesatuan-kesatuan bercerai-berai, maka diadakan reorganisasi dalam bulan Oktober 1947. Divisi Pattimura diperkecil, dijadikan RESIMEN TULUKABESSY dan bermarkas di Gondolayu 2, Yogyakarta. Susunan organisasi seperti berikut:

Komandan Resimen	: Letnan Kolonel F.M. Pupella
Kepala Staf	: Mayor Wim Hukom
Bagian I	: Mayor Herman Pieters
Bagian II/IV	: Mayor J.M. Westplat
Bagian III	: Mayor J. Matulessy
Ajudan	: Kapten Mans Palyama.

Resimen dibagi 3 Batalyon:

Batalyon I,	bermarkas di Magelang Dan Yon Kapten Lasamahu
Batalyon II,	bermarkas di Blitar dan Yon Kapten Egmon Pattinama
Batalyon III,	bermarkas di Yogya Dan Yon dirangkap oleh komandan Resimen

Anggota Staf :

1. Mayor J.B. Westplat
2. R. Gasperz
3. Ajudan Bagian I, Kapten D. Nanlohy
4. Kapten Ririmase
5. Kapten D. Tomahu
6. Kapten A. Sahetappy
7. Letnan I M.Q. Maruahey
8. Letnan I D. Kippuw.

Resimen ini tergabung dalam Lasykar Sebrang, yang terdiri atas Resimen Tulukabessy, Lasykar KRIS, Lasykar Sunda Kecil dan Lasykar Kalimantan.

Sesudah pecahnya peristiwa pengkhianatan PKI bulan September 1948, (pemberontakan Madiun), maka P.M. Moh. Hatta mengumumkan rasionalisasi dalam tubuh angkatan bersenjata. Lasykar dan satuan-satuan bersenjata yang berfihak kepada PKI dibubarkan. Para opsir TNI, jadi juga dalam tubuh Resimen Tulukabessy, diturunkan satu pangkat, hal mana menimbulkan ketidakpuasan dan keresahan di tengah-tengah pertempuran penghancuran PKI.

Resimen Tulukabessy mengalami rasionalisasi dan reorganisasi. Mr. Latuharhary ditugaskan oleh Menteri Pertahanan untuk menyusun kembali personalia Resimen. Letnan Kolonel Pupella diganti oleh Mayor Lambert Pelupessy. Para opsir diturunkan pangkat satu tingkat. Mayor F.M. Pupella diperbantukan pada Kolonel A.H. Nasution, kemudian diperbantukan pada Kantor Gubernur Maluku.

Dua bulan kemudian Belanda melancarkan agresi militer ke II. Mayor Pelupessy memimpin anakbuahnya keluar kota dan bergerilya. Satuan Pattimura yang ada di Jawa Timur dan Magelang juga bergerilya. Mayor Lambert Pelupessy menyusun kembali kesatuannya menjadi Batalyon Pattimura. Ba-

talyon ini bergerilya sampai Yogya diserahkan kembali. Lalu kesatuan ini dimasukkan ke dalam TNI.

Batalyon Pattimura ini dalam tahun 1950 yang pertamanya mendarat di pulau Buru untuk menghancurkan apa yang disebut "RMS".

.....
Lasykar Maluku yang lain adalah PESINDO-MALUKU. Kesatuan bersenjata ini bukan saja bertempur di medan, tetapi dipergunakan juga oleh pemerintah/komando TRI setempat untuk mengamankan masyarakat dari gangguan kesatuan-kesatuan liar dan turut menstabilkan pemerintahan.

Ketika timbul peristiwa Juli 1946, yaitu penculikan PM St. Syahrir dan usaha *coup* oleh Persatuan Perjuangan di bawah pimpinan Tan Malaka, maka Menteri Pertahanan, Mr. Amir Syarifuddin, memerintahkan PESINDO-MALUKU untuk bergerak ke Madiun dan Solo untuk membersihkan daerah itu dari pengikut-pengikut PP.

Karena keadaan menjadi gawat, maka tentara pengawal Presiden diganti dengan PESINDO-MALUKU. Kapten Riri-hena dan anakbuahnya, yang berkekuatan satu kompi, ditempatkan di benteng "Victoria", berhadapan dengan Istana Kepresidenan. Mereka bertanggungjawab atas keselamatan Presiden Sukarno dan keluarganya sedangkan keselamatan Wakil Presiden dan keluarganya diserahkan kepada Kepolisian Negara.

Kepercayaan Presiden kepada putera-putera Maluku ini mempunyai efek psikologis di dalam masyarakat, yaitu menghilangkan kecurigaan terhadap orang-orang Maluku. Efeknya keluar menetralsir propaganda Belanda di dalam KNIL dan masyarakat di daerah Maluku, bahwa orang Jawa menganggap orang-orang Maluku bukan orang Indonesia penuh.

Bukan saja keamanan Presiden menjadi tanggungjawab mereka, tetapi keamanan ibu-kota juga menjadi salah satu tu-

gas mereka. Karena Yogyakarta pada waktu itu merupakan basis dan markas kesatuan-kesatuan bersenjata, maka tiap kali terjadi keributan, tembak menembak antara kesatuan dan kelompok-kelompok liar. Maka anak-anak buah Ririhena ini sering dipakai untuk menengahi dan memberesi perselisihan senjata dan pertempuran-pertempuran yang terjadi.

PESINDO-MALUKU bertugas sebagai tentara pengawal sampai timbul "peristiwa pemberontakan Madiun. Karena secara umum organisasi Pesindo dan Mr. Amir Syarifuddin berfihak pada PKI, maka barisan pengawal tersebut dibubarkan, sekalipun PESINDO-MALUKU tidak tersangkut dalam pemberontakan itu.

Salah satu program PIM ialah berusaha memindahkan perjuangan dari Jawa ke Maluku. Atas kerjasama Mr. J. Latharhary dan Kementerian Pertahanan, Bahagian Penyelidik Militer Khusus (PMC), maka dibuat suatu rencana ekspedisi ke Maluku. Pemuda-pemuda PIM dari Yogya dan Magelang dipersiapkan dan dilatih. Mereka berangkat dari Tegal tanggal 3 Maret 1946 pada malam hari dengan dua buah kapal motor kayu, yang dibuat di zaman Jepang. Perjalanan ke Maluku ada di bawah pimpinan TRI-Angkatan Laut.

Kapal motor *Sindoro*, dikemudikan oleh Letnan Ibrahim, membawa para pemuda Andries Latupeirissa, Salem, A. Hetharia, Noya, Pattinasarany, Lilipaly, Papilaya, Yusuf, Subianto dan pemuda Anna Luhukay. *Km. Sumeru* dengan nakhoda Letnan Mulyadi (di kemudian hari menjadi Panglima ALRI) membawa Bram (Oetje) Matulesy, J. Tahalia, M. Manuputty, Martin Abbas, J. Hattu, J. Polnaya, B. Tapilatu, j. Lisapaly dan Sahureka.

Dengan susah payah kapal-kapal tua itu mengarungi laut dan berhasil menembus penjagaan Belanda. Berhasil mereka tiba di beberapa tempat seperti di pulau Ambalau, Negeri Lima, Seith, Kaitetu, Wakal (semuanya di pulau Ambon).

Di negeri-negeri ini mereka berhasil menancapkan merah putih dan membangun masyarakat dari tidurnya, karena mereka membawa berita kemerdekaan bangsa. Tetapi rombongan yang ke Ambon tertangkap, juga yang mencoba mendarat di Piru (Seram), yaitu Bram Matulesy dan An Lahukay (ayah An pada waktu itu bekerja sebagai guru di Piru).

Rombongan yang mendarat di Namlea (Buru) berhasil mengerahkan rakyat untuk mengangkat senjata pada tanggal 8 April 1946. Mereka berhasil merebut Namlea dan beberapa pos penjagaan polisi di sekitar kota. Tetapi Belanda yang mengetahui serangan ini mengirim tentara dari Ambon. Dalam pertempuran yang terjadi ada beberapa pejuang yang tewas, beberapa meloloskan diri dan yang lain ditangkap. Di penjara di Ambon sebagian besar anggota ekspedisi itu bersatu kembali. Sampai Linggajati ditandatangani barulah mereka dibebaskan. Mereka kembali ke Jawa kecuali Bram Matulesy (kenakan Mr. Latuharhary), An Luhukay dan John Hattu, 21) Dengan jalan ini Mr. Latuharhary, Kementerian Pertahanan dan TRI—Angkatan Laut dapat mengetahui hasil ekspedisi tersebut dan situasi politik di Maluku.

d. Latuharhary dalam Pergolakan Politik

Badan Pekerja KNIP di bawah pimpinan Sutan Syahrir pada tanggal 30 Oktober 1945 mengirim surat kepada Pemerintah dan mengusulkan pembentukan partai-partai dengan syarat memperkuat perjuangan, mempertahankan kemerdekaan serta keamanan masyarakat. Sebagai respon maka Pemerintah mengeluarkan "Maklumat Pemerintah" tanggal 3 Nopember 1945, ditanda-tangani oleh Wakil Presiden Moh. Hatta. Maklumat itu memberikan kesempatan untuk mendirikan partai-partai politik.

Maksudnya agar partai-partai itu sudah dibentuk sebelum diadakan pemilihan untuk membentuk Majelis Permusyawar-

ratan Rakyat, sebagai pengganti KNIP. Pemilihan itu direncanakan Januari 1946.

Dalam waktu dua bulan saja sudah berdiri kira-kira 200 partai di Jawa dan Sumatera. Partai-partai yang besar antara lain PNI, Masyumi, PSII, Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, PKI, Partai Rakyat Jelata (kemudian disebut Murba) dan partai-partai kecil seperti Parkindo dan Partai Katholik.

Mr. Latuharhary memasuki PNI, sedangkan dua orang putera Maluku terkemuka Dr. J. Leimena dan Ir. Putuhena turut mendirikan dan memimpin Parkindo. Tokoh Latuharhary sebagai seorang politikus hanya bergerak di kalangan atas dan tidak memiliki fanatisme partai untuk misalnya meng-PNI-kan para pemuka dan cendekiawan Maluku. Nyatanya tidak banyak tokoh-tokoh Maluku pada waktu itu yang masuk PNI. Latuharhary tidak menonjol sebagai pemimpin massa rakyat. Tetapi di kalangan pimpinan ia turut menentukan kebijaksanaan politik PNI dan kebijaksanaan politik kenegaraan.

Ketika pada permulaan Desember 1948 PNI menentang politik perundingan antara PM Hatta dan Belanda, maka sayap kanan keluar dari PNI dan mendirikan PIR (Partai Rakyat Indonesia) di bawah pimpinan Mr. Wongsonegoro, wakil ketua Mr. Tadjudin Noor, sekretaris Kadarman Reksonotoprodjo, bendahara Pangeran Purboyo. Anggota-anggota terkemuka yang lain ialah Mr. J. Latuharhary, Prof. Johannes, Mr. Wahab, T. Pello, Dr. Soenario Kolopaking dan Sewaka Suwardi.

Pejuang-pejuang Maluku lebih menitikberatkan perjuangan pada bidang kepemudaan dan kelasyakaran daripada bidang politik. Kekurangan ini dilihat oleh Alexander Jacob Patty, pendiri Sarekat Ambon, yang kembali ke tanah air dari Australia dalam bulan Maret 1946 dan menetap di Yogya. Patty adalah salah seorang pemimpin gerakan kemerdekaan Indonesia yang berhasil mempengaruhi buruh pelabuhan Australia

yang menyokong kemerdekaan Indonesia dan memboikot kapal-kapal Belanda yang mau berangkat ke Indonesia.

Patty tidak senang melihat kurangnya tokoh-tokoh Maluku bergerak dalam bidang politik. Sebaliknya jumlah mereka yang kecil itu akan hilang lenyap dalam partai-partai besar. Identitas Maluku akan tenggelam. Patty bercita-cita mendirikan sebuah partai untuk rakyat Maluku, ide mana direstui oleh Mr. Latuharhary. Lalu Patty mengundang pemuka-pemuka, cendekiawan Maluku dan bekas tokoh-tokoh Sarekat Ambon dalam suatu musyawarah di Saidan 2, Yogya, pada tanggal 14–15 Mei 1946. Di dalam musyawarah itu barulah pertama kali kebanyakan orang Maluku, terutama generasi muda, berkenalan dengan seorang genius asal Maluku. Kecerdasan otak, penguasaan bidang politik, hukum internasional, sejarah dan beberapa bahasa asing dengan baik, mempesona hadirin, yang terdiri dari dokter-dokter, para akademisi dan lain-lain cendekiawan. Patty seorang yang sungguh-sungguh *belezen* (kutu buku). Dalam salah satu pertemuan Dr. Latumeten, seorang ahli penyakit syaraf, mengomentari: "Di kalangan Maluku tidak ada dua seperti Alexander Jacob Patty. *Of hij is een genie of hij is gek* (Dia seorang genius atau dia gila)".

Tanggal 15 Mei 1946, masyarakat Maluku dalam alam yang bebas, untuk pertama kali dalam sejarah kemerdekaan bangsa, memperingati di Yogyakarta "Hari Pecahnya Perang Pattimura" (1817), yang selanjutnya diperingati setiap tahun tanggal 15 Mei di Maluku dan hampir di semua kota besar di Indonesia. Dan justru pada hari itu musyawarah melahirkan Partai Indonesia Maluku (PARPIM), dipimpin oleh A.J. Patty, dengan Sekretaris dr. G. Siwabessy, (kemudian diganti oleh J.D. Siyaranamual). Tokoh-tokoh yang menjadi anggota antara lain ialah dr. L. Samallo, A. Tahya, Ir. M. Putuhena, A.W.M. Huwae, dr. Pattirajawane, dr. Picauly, Moh Padang, J.D. Siyaranamual, M. Ruhupatty, I.O. Nanulaitta, Gijs Hahu-

ly, Ny. A. Tahya, Nn Mien Matulessy, Leo Matulessy, J. Halattu, Mias Supusepa, B.D. Lilipaly, Gijs Hahuly, S. Gaspers, Karel Pattipeilohy, ds Thom Pattiasina dan lain-lain.

Tujuan dari partai ini ialah mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan UUD 1945, seraya mempertahankan Maluku tetap dalam RI.

PARPIM menjadi wadah politik untuk menampung dan menyalurkan aspirasi politik rakyat Maluku dalam kaitan dengan pemerintah Propinsi Maluku yang dipimpin oleh Gubernur Maluku Latuharhary. Di berbagai tempat didirikan cabang-cabang.

Pemimpin-pemimpin partai besar pada mulanya tidak dapat menerima adanya partai kedaerahan lagi di tengah alam merdeka ini. Tetapi argumentasi Patty adalah "identitas Maluku penting sekali sebagai imbalan untuk menghadapi politik *divide et empera* Belanda. Apalagi daerah Maluku sudah dijajah kembali oleh Belanda".

Persatuan Perjuangan yang meliputi lebih dari 100 partai dan organisasi, menentang politik perundingan PM Syahrir. PP menuntut berunding dengan Belanda atas dasar pengakuan kemerdekaan Indonesia seratus persen.

Coup d'etat Tan Malaka cs. dalam bulan Juli 1946 yang gagal, menempatkan Patty dan PARPIM dalam keadaan yang sulit. A.J. Patty dimasukkan dalam "Kabinet" Tan Malaka sebagai "Menteri Sosial". Tetapi Patty mengeluarkan pernyataan bahwa pengangkatan itu di luar pengetahuannya. Hanya Patty dan K.H. Dewantara yang dicantumkan sebagai "Menteri PPK", luput dari penangkapan Pemerintah.

Sejak Sutan Syahrir memulai perundingan dengan Belanda, yang akhirnya menghasilkan persetujuan Linggarjati, Mr. Latuharhary diturutsertakan dalam berbagai komisi. Di sini ia berkesempatan memperjuangkan kepentingan daerah Seberang dan rakyatnya.

Menjelang sidang umum KNIP di Malang untuk mengesahkan persetujuan Linggarjati, dengan dekrit Presiden tanggal 29 Desember 1946, anggota KNIP yang berjumlah 200 orang diperbesar menjadi 514 orang. Maluku yang semulanya mempunyai 4 orang anggota, yaitu Mr. J. Latuharhary, dr. Latumeten, L.R. Jans dan Lukas Polhaupessy, atas perundingan Mr. Latuharhary, PARPIM dan PIM, ditetapkan anggota-anggota wakil Maluku (fraksi Maluku) yang baru yaitu J. de Fretes (ketua), A.J. Patty, J.D. Siyaranamual, Moh. Padang dan dr. Samallo. 22)

Tanggal 2 Maret 1947 anggota-anggota KNIP baru di-sumpah. Keesokan harinya Badan Pekerja baru dibentuk J.D. Siyaranamual mewakili Maluku dalam badan ini. 23) Tanggal 5 Maret Persetujuan Linggarjati diterima oleh KNIP, sesudah perdebatan yang sengit, lalu tanggal 25 Maret 1947 ditandatangani oleh Pemerintah RI dan Pemerintah Belanda.

Salah satu akibat daripada persetujuan tersebut akan dibentuk Negara Indonesia Serikat. Ini berarti bahwa struktur negara kesatuan RI harus diubah pula. Di dalam perundingan dengan Belanda selanjutnya, maka Pemerintah RI didesak untuk menghapuskan alat-alat revolusinya yaitu jabatan para Gubernur Daerah Seberang.

Presiden kemudian mengeluarkan *Penetapan Pemerintah* tanggal 8 Juli 1947, ditandatangani oleh Presiden dan Menteri Dalam Negeri Wondoamiseno, yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang : bahwa pasal 12 persetujuan itu (Linggarjati) pula, Pemerintah Belanda dan Pemerintah RI akan mengusahakan, supaya terwujudnya NIS dan Persekutuan Belanda Indonesia itu telah akan selesai sebelum tanggal 1 Januari 1949;

Memutuskan : menghapuskan jabatan gubernur propinsi-propinsi Kalimantan, Sulawesi Maluku dan Sunda Kecil. 24)

Putusan ini meniupkan protes keras di kalangan badan-badan perjuangan, organisasi pemuda dan lasykar-lasykar Seberang yaitu, PIM, Divisi Pattimura, PARPIM, KRIS (Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi), IPK (Ikatan Perjuangan Kalimantan) dan GRISK (Gerakan Rakyat Indonesia Sunda Kecil). Sekalipun wakil-wakil mereka dalam KNIP sudah menerima persetujuan Linggajati.

Tetapi belum lagi masyarakat daerah Seberang di Jawa dan Sumatera dapat mengambil tindakan-tindakan penyelamatan alat-alat revolusi, yang bagi mereka sangat vital itu, Belanda telah melancarkan agresi militer I atau perang kolonial pada tanggal 20 Juli 1947, disebabkan jalan buntu dalam perundingan pelaksanaan persetujuan Linggajati.

Dengan agresi ini persetujuan itu dianggap tidak berlaku lagi oleh badan-badan perjuangan dan alat-alat revolusi. Kantor-kantor Gubernur masih tetap dianggap pusat pengendalian politik pemerintahan masing-masing propinsi, sekalipun secara resmi Penetapan Pemerintah tersebut di atas tidak dicabut.

Sekalipun Kantor-kantor Pembantu Gubernur Maluku di berbagai daerah tidak bisa berfungsi lagi, karena banyak kota direbut oleh Belanda, tetapi kantor pusatnya di Margo-kridonggo masih tetap berfungsi sebagai alat perjuangan dan menampung orang-orang dan petugas-petugasnya yang mundur dari daerah pendudukan.

Di antara periode *cease-fire* dan perundingan-perundingan yang dilakukan di bawah pengawasan Komisi Tiga Negara (*Committee of Good Offices*), yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan, Mr. Latuharhary dan Dr. J. Leimena sebagai anggota delegasi mengemukakan suatu masalah kemanusiaan,

yaitu masalah "*gezinshereniging*" atau menyatukan kembali anak-isteri orang-orang Maluku dengan suami/ayah mereka. Sejak zaman Jepang mereka ini hidup terpisah. Panitia dibentuk, diketuai oleh Kolonel Hidayat berkedudukan di Jakarta dan Mr. Latuharhary mewakilinya di Yogyakarta. Panitia ini, dibantu oleh Kantor-Kantor Gubernur yang masih ada, berhasil mempersatukan kembali beberapa ratus keluarga.

Untuk melaksanakan Persetujuan Renville, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada tanggal 17 dan 19 Januari 1948, Pemerintah RI membentuk delegasi, yang diketuai oleh Mr. Moh Roem, Wakil ketua Mr. Ali Sastroamidjojo, anggota-anggota Mr. J. Latuharhary, Dr. Tjoa Sek Ien, Mr. Nasrun, Prof. Mr. Dr. Supomo, dan Prof. Mr. Sunario Kolopaking. Tim militer diketuai oleh Dr. J. Leimena dan beranggotakan Kolonel Simatupang, Kolonel Hidayat dan Kolonel Simbolon. Sekretariat dipimpin Letkol Sutarto dan Mayor Harjono. Ketua, wakil-ketua dan anggota-anggota delegasi mempunyai kedudukan menteri.

Tugas delegasi digariskan oleh Wakil-Presiden untuk melaksanakan Persetujuan Renville dan mengadakan persetujuan dan perjanjian dengan Pemerintah Belanda dengan berpedoman pada instruksi Presiden. 25)

Sementara itu ke dalam kalangan Seberang, Mr. Latuharhary mengambil inisiatif membentuk suatu badan perjuangan, pengganti lembaga kegubernuran yang telah dihapus, yaitu "*College Seberang*" yang diketuainya. Latuharhary mewakili badan-badan perjuangan Maluku. Anggota-anggota lainnya ialah A.S. Pello (GRISK), Kindangan (KRIS), dan G.M. Ibrahim (IPK). 26) Sedangkan pasukan-pasukan bersenjata dari daerah-daerah itu bersatu dalam *Lasykar Seberang*.

Dalam kekalutan politik yang ditimbulkan oleh pemberontakan PKI, maka pada tanggal 15 September 1948 *College Seberang* menyampaikan kepada Presiden dan Pemerintah se-

buah resolusi, yang antara lain menyatakan sikap berdiri di belakang Pemerintah. Badan tersebut menyetujui agar Kabinet Presidential sekarang ini dipertahankan terus sampai keadaan memungkinkan untuk membentuk suatu kabinet parlementer. *College Seberang* mengajukan pendapat bahwa Pemerintah wajib memberikan jaminan kepada perjuangan Seberang dan jaminan bahwa Pemerintah Republik dalam tindakannya tidak akan mengabaikan pendirian badan itu, seperti tertera di bawah ini :

- (1) Memegang teguh kepada RI; (2) Pemerintah Republik adalah pelopor dalam perjuangan seluruh rakyat seberang; (3) Tetap dipertahankannya dasar-dasar perjuangan seperti tertera dalam proklamasi kemerdekaan tanah air; (4) Hasrat untuk turut serta dengan Negara RI dalam perjuangan kemerdekaan ini.

Sebelum itu oleh *College Seberang* diajukan pula permohonan kepada Pemerintah RI, supaya Pemerintah mengadakan hubungan langsung dengan daerah Seberang dan juga supaya Pemerintah memberikan tempat dalam organisasi pemerintahan kepada badan-badan tersebut (yang tergabung dalam *College Seberang*) yang sesuai dengan pendirian di atas tadi. 27)

Sementara Pemerintah mengalami kesulitan-kesulitan politik di dalam negeri, pemerintah Belanda melaksanakan rencananya berdasarkan perjanjian Linggajati. Van Mook, melalui konferensi Malino dan Den Passar, membentuk Negara Indonesia Timur (NIT) pada tanggal 24 Desember 1946.

Dalam hubungan Pemerintah RI dan NIT, Mr. J. Latuharhary memperjuangkan agar Pemerintah RI mengakui NIT. Tanggal 19 Januari 1948 bekas Gubernur Maluku, Mr. J. Latuharhary ditugaskan untuk menyampaikan pengakuan resmi

Pemerintah RI terhadap NIT. Mr. Latuharhary berangkat ke Jakarta dan dalam suatu upacara singkat menyampaikan pengakuan itu kepada PM NIT Anak Agung Gde Agung dan Menteri J. Tahya.

Pada tanggal 22 Januari 1948 Pemerintah RI mengeluarkan maklumat resmi:

"Pemerintah Republik Indonesia menyatakan pengakuannya terhadap NIT sebagai Negara Bagian dalam Negara Indonesia Serikat yang berdaulat dan demokratis." 28)

NIT menjawab dengan mengirim suatu "*good-will mission*" ke Yogyakarta yang tiba pada tanggal 18 Pebruari 1948. Missi ini dipimpin oleh A. Mononutu. Atas undangan Mr. Latuharhary Mononutu mengadakan pertemuan dengan masyarakat Maluku di Saidan 2. Perhatian sangat besar karena masyarakat Maluku ingin mendengar berita-berita dan keadaan sebenarnya di tanah tumpah darahnya. Apalagi diketahui bahwa Mononutu bermukim di Ternate.

Di dalam pertemuan itu, yang dihadiri juga oleh penulis, 29) Mononutu membentangkan suatu masalah yang sangat peka, yaitu dikemukakannya bahwa masyarakat di Maluku Utara tidak senang untuk bersatu dengan Maluku Selatan yang dikuasai oleh orang-orang Ambon. Ditambahkannya bahwa rakyat Maluku Utara lebih suka menggabungkan daerahnya dengan Minahasa. Suara ini kedengaran memecah-belah, seperti suara Belanda, suara yang keluar dari mulut seorang nasionalis, nota bene! Kontan ia diserang dari segala fihak, tetapi yang paling sengit oleh A.J. Patty, yang hampir setengah jam lamanya memberi kuliah politik, tatanegara dan etnologi kepada Mononutu dan hadirin.

Mr. Latuharhary terpaksa secara diplomatis mengakhiri pertemuan yang berakhir kurang sedap itu.

"*Good-will mission*" itu dibalas oleh "*good-will mission*" RI di bawah pimpinan Mr. Sartono (PNI), wakil-ketua Mr. Tambunan (Parkindo), Warsito, sekretaris I, I.O. Nanulaitta (PIM-BKPRI) sekretaris II, 30) Latjuba (Masyumi), I.R. Lobo (GRISK), Subadio (PSI), Adam Malik (Antara), Djuffri (Partai Katholik).

Missi yang berangkat tanggal 14 Desember 1948 itu kandas di Jakarta oleh karena tanggal 19 Desember Belanda menyerang Republik Indonesia.

Dalam agresi militer ke II ini. Presiden Sukarno, Wakil Presiden/PM Hatta, Syahrir, Haji Agus Salim dan lain-lain ditangkap dan diasingkan ke Bangka. Anggota-anggota kabinet lainnya juga ditangkap dan dimasukkan ke dalam tahanan di Yogya. Juga Mr. Latuharhary turut ditangkap dan ditahan. Kemudian ia dibebaskan untuk turut dalam delegasi RI di bawah pimpinan Mr. Rum untuk berunding dengan Belanda.

Atas putusan Dewan Keamanan Belanda dan RI berunding lagi di bawah pengawasan UNCI (*United Nations Commission for Indonesia*). Tanggal 7 Mei 1949 tercapai persetujuan "Roem-Royen" yang memulihkan pemerintahan RI. Pada tanggal 6 Juli 1949 Yogya dikembalikan. Presiden, Wakil Presiden dan para menteri kembali lagi mengatur pemerintahan.

Bulan-bulan berikut terjadi pergolakan politik yang amat cepat. Konperensi antar Indonesia, antara RI dan BFO (*Byzonder Federal Overleg* = Musyawarah negara-negara federal ciptaan Belanda) mencapai persetujuan pokok mengenai pembentukan Republik Indonesia Serikat, Dewan Perwakilan, Senat dan pengakuan kedaulatan. Kemudian RI, BFO dan Belanda bertemu dalam *Konperensi Meja Bundar* di Den Haag, yang menghasilkan berdirinya RIS, Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. DPR memilih Sukarno dan Hatta sebagai Presiden

dan Wakil Presiden RIS. Tanggal 27 Desember 1949 ditandatangani pengakuan kedaulatan dan penyerahan kekuasaan kepada Republik Indonesia Serikat. Berakhirlah masa penjajahan Belanda atas Indonesia, kecuali Irian Barat.

BAB VIII

GUBERNUR MALUKU YANG PERTAMA

a. Pergolakan di Maluku sampai Tahun 1950

Segera sesudah Jepang menyerah tentara Australia menduduki kota Ambon, yang dua per tiga bagian telah rata dengan tanah dibom oleh B-29 Sekutu. Pemerintahan kemudian diserahkan kepada NICA.

Proklamasi kemerdekaan sayup-sayup terdengar di Maluku. Pengamat-pengamat politik di Ambon akhirnya mengetahui juga tentang proklamasi dan revolusi di Jawa. Beberapa organisasi pemuda timbul, tetapi kurang berhasil karena pemimpin-pemimpinnya kurang berpengalaman dan masyarakat yang baru saja keluar dari kesulitan-kesulitan tidak mudah diajak untuk memulai sesuatu gerakan kemerdekaan.

Beberapa pemuda mendirikan *Barisan Pembela Indonesia* (BPI) dalam bulan Nopember 1945, dipimpin oleh M.Q. Maruapey. Akan tetapi organisasi ini berhasil dilumpuhkan oleh Belanda. Maruapey menyingkir ke Yogya, sedangkan BPI menjelma menjadi *Pasukan Terpedam* dan bergerak di bawah tanah. Dalam tahun 1950 mereka membantu APRIS dalam penumpasan "RMS".

Persatuan Pemuda Indonesia (PPI) di bawah pimpinan Wim Reawaru (dibunuh "rms") dan Musa Wairui mempersatukan pemuda-pemuda pro kemerdekaan. Organisasi ini bertahan agak lama.

Pemuda Republik Indonesia Maluku (PRIMA) didirikan dalam bulan Maret 1946 di Ori/Pelau (pulau Haruku) dipimpin Abdul Kadir Tuakia, Abdul Manaf Latukonsina, Achmad Hussain Tuasikal. Tetapi karena organisasi ini bertindak nekad dengan kekerasan tanpa perhitungan antara lain pelemparan granat dalam pasar malam pada tanggal 30 April 1946, maka

PRIMA hanya hidup satu bulan karena dilumpuhkan dan pemimpin-pemimpinnya ditangkap. 1)

Organisasi nasional yang lebih teratur dan lebih berhasil dalam perjuangan politik adalah *Partai Indonesia Merdeka* (PIM), yang didirikan di Ambon pada tanggal 17 Agustus 1946 oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional, bekas anggota Sarekat Ambon, Ina Tuni dan PARINDRA, dipimpin oleh pengambil inisiatif E.U. Pupella (Boetje). Tokoh-tokoh terkemuka ialah Wim Reawaru, Tjokro, Bahmid, Wim Lokollo, Karel Pieter, Wairisal, Manuhutu dan lain-lain. PIM mempunyai tujuan tegas: Indonesia Merdeka. "MASA" adalah media PIM yang merupakan komunikasi dengan rakyat.

Dalam *Dewan Maluku Selatan (Zuid Molukken Raad)* 1946–1948, dipilih melalui pemilihan bertingkat, E.U. Pupella, WIM Reawaru, Tjokro, Wairisal, Wim Lokollo, Karel Pieter dan Bahmid. Sedangkan Dr. Sitanala (bekas PI) diangkat. Mereka ini pula yang terpilih dalam periode 1948–1950. Malahan di pulau dan kota Ambon PIM memperoleh kemenangan besar. A. Wairisal dan J. Manuhutu diangkat menjadi anggota "*gecommitteerden*" (Dewan Harian).

Pada waktu pembentukan NIT di Den Pasar, yang mewakili Maluku Selatan ialah dr. P. Tahitoe, R.J. Metekohy, Han Boen Hiong, E.U. Pupella dan J. Tahya. Wakil Maluku Utara ialah Iskandar Moh. Djabir Syah dan Zainal Abidin Alting. Di dalam konperensi itu dibentuk pula parlemen sementara. Yang mewakili Maluku ialah E.U. Pupella, J. Tahya, dr. D.P. Tahitoe, Iskandar Moh Djabir Sjah dan Zainal Abidin Alting. Yang diangkat Han Boeng Liong dan R.J. Metekohy; keduanya berdomisili di Ambon.

Pada tanggal 11 Maret 1947 Dewan Maluku Selatan memutuskan untuk memasukkan daerah Maluku Selatan ke dalam NIT.

PIM yang memperoleh kemenangan besar dalam pemilihan 1948, berhasil menggolkan usul yang menjadi putusan Dewan (28 Mei 1949) yaitu sesudah lagu kebangsaan Belanda "Wilhelmus", harus diperdengarkan pula "Indonesia Raya".

Di samping PIM ada pula *Gabungan Sembilan Serangkai* antara lain *Regentenbond* menjadi anggotanya, dan *Gerakan Demokrat Maluku Selatan*, dipimpin oleh Ir. Manusama; suatu partai elite cendekiawan yang tidak mendapat dukungan rakyat. Ada pula *Persatuan Timur Besar* (PTB) didirikan di luar Maluku, yang ingin menjadikan Minahasa propinsi ke-12 dan Maluku propinsi ke-13 dari Kerajaan Belanda. Ketiga organisasi itu adalah lawan PIM dan menghendaki "gemenebest" dengan Belanda.

Tetapi perjuangan kekuatan nasional di seluruh Indonesia, termasuk perjuangan masyarakat Maluku di luar daerahnya, berhasil mengakhiri kolonialisme Belanda dan berdirilah Republik Indonesia tahun 1945 dan RIS tahun 1949. Berdasarkan kemangan itu maka pada tanggal 27 Desember 1949, di bawah pimpinan Kepala Daerah Maluku Selatan, J. Manuhutu, bertempat di Batugajah, triwarna diturunkan dan dikibarkan dwiwarna sangsaka Merah-Putih. Demikian pula di Maluku Utara dan Tenggara sangsaka berkibar dengan megah.

Keadaan di kota Ambon mulai menjadi tegang dan mulai terjadi bentrokan-bentrokan antara kelompok-kelompok nasional yang militan melawan kelompok-kelompok reaksioner, termasuk anggota-anggota KNIL. Keadaan makin memburuk ketika satu kompi baret hijau dan merah, anak buah algojo Westerling, mendarat di Ambon dalam bulan Januari 1950. Mulailah terjadi pembunuhan-pembunuhan yang menggelisahkan rakyat dan pemerintah. Baik dari fihak NIT, seperti Menteri Dalam Negeri, maupun dari fihak RIS seperti Ir. Putuhena dan Mayor Saleh Lahade, maupun dari fihak KNIL seperti

Kapten J. Tahya dan beberapa perwira Belanda, dikirim ke Ambon tetapi keadaan hanya dapat diredakan secara temporer saja.

Suhu politik makin panas ketika Mr. Dr. Soumokil melarikan diri dari Makassar dan datang ke Ambon pertengahan April 1950. Disokong oleh tentara baret dan KNIL serta kaum reaksioner, terjadi suatu perubahan status kenegaraan yang bertentangan dengan UUD RIS dan kemauan sebagian besar rakyat Maluku.

Dalam keadaan ancaman akan dibunuh oleh tentara baret dan KNIL, yang bersenjatakan klewang, pistol, karabijn, LE, granat, pisau-komando dan lain-lain, bertempat di gedung Dewan Maluku Selatan di Batugajah, Ambon, pada tanggal 25 April 1950, J. Manuhutu dan A. Wairisal dipaksa "memproklamasikan "Republik Maluku Selatan" dan "republik" itu dinyatakan keluar dari NIT dan RIS. Sekalipun keduanya berkali-kali menolak tetapi Soumokil dan Manusama, disokong oleh teriakan dan ancaman anggota KNIL dan baret yang ganas untuk dibunuh, maka kedua orang itu terpaksa menyerah lalu ditunjuk oleh Soumokil menjadi "presiden" dan "perdana menteri" 2)

Suasana proklamasi ini disaksikan oleh penulis dengan mata kepala sendiri. Betapa kaum militer mabuk kekuasaan!!! Manusama dan Soumokil sebagai akademisi, orang-orang terpelajar, *autor intelektualis* dari proklamasi itu *tidak berani mengambil tanggungjawab* menjabat "presiden" dan "perdana menteri", tetapi menyodorkannya kepada orang lain.

Sebagian rakyat kota Ambon menolak dan menentang proklamasi itu. Tetapi sebagian lain menyambutnya dengan entusias. Mereka ini yang setiap malam berkumpul di sekitar radio-umum di Batugajah untuk mendengar propaganda siaran radio "rms" antara lain "ancaman penjajahan Jawa", "ancaman pengislaman orang-orang Kristen" dan sebagainya. Tetapi

entosisme mereka makin pudar ketika ternyata tentara "rms" mulai melancarkan kekejaman-kekejaman dan mulai merampas makanan rakyat. Persediaan bahan makanan bagi rakyat sudah sangat tipis, karena kebakaran besar dalam bulan Pebruari memusnahkan bahan-bahan makanan di sebagian besar toko-toko distribusi. Dan sesudah proklamasi tersebut di atas bahan makanan makin sulit diperoleh. Yang masih ada di toko-toko disita untuk keperluan tentara "rms".

Kebun-kebun rakyat, terutama kepunyaan orang-orang Buton, yang ditanami ketela, ubi, pisang, sayur-mayur dan lain-lain diserbu rakyat kota setiap hari. Istilah berjuang yang mula-mula dipergunakan orang untuk menunjang proklamasi berubah artinya menjadi "berjuang mencari makanan". Terutama ketika Angkatan Laut APRIS/APRI mulai mengadakan blokade, maka kelaparan lebih lagi menimpa rakyat. Kantor-kantor macet, karena para pegawai setiap pagi keluar kota pergi "berjuang". Uang tidak berharga lagi. Gaji dibayar dengan potongan uang *Javase Bank*, yang sudah tidak laku lagi. Pakai-an barang dan perhiasan dibarter dengan makanan. Sampai-sampai pedagang-pedagang Cina pun, yang biasanya mempunyai persediaan makanan, harus turut berlomba "berjuang".

Dengan pendaratan APRIS/APRI di berbagai tempat di Buru, Seram dan Ambon, makin ganas tindakan-tindakan baret, yang tidak dapat dikendalikan oleh Soumokil dan Manusa. Pembunuhan dan penganiayaan yang ganas terjadi terutama terhadap golongan merah-putih (nasionalis).

Akhirnya yang berjuang mempertahankan "rms" hanya tinggal tentara bekas KNIL, baret dan sukarelawan. Bagian rakyat penyokong "rms" telah kehilangan semangat dan kehilangan vitalitas fisik untuk mempertahankan cita-cita "rms".

Bagaimana pendapat Mr. J. Latuharhary tentang "rms" itu? Pada tanggal 28 April 1950 ia mengeluarkan pernyataan

sebagai bekas Gubernur Maluku RI antara lain sebagai berikut: 3)

"Di dalam suasana politik di Indonesia sekarang ini, terlebih-lebih di Indonesia Timur, dimana faham unitaris sangat bertentangan dengan faham federalis, di sanalah kita menghadapi kegoncangan-kegoncangan di kalangan kaum reaksioner. Hal ini dapat dimengerti, berhubungan dengan perkembangan politik yang luar-biasa sesudahnya penyerahan kedaulatan kepada RIS, apalagi kalau kita mengingat bahwa sesuatu penerangan yang jelas tentang perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia tidak atau kurang diberikan di Indonesia Timur, sehingga mereka itu dengan mendadak harus menghadapi peristiwa-peristiwa politik yang baru.

Akan tetapi bahwa peristiwa di Ambon itu harus terjadi adalah suatu kejadian yang sama sekali tidak diduga semula. Peristiwa Ambon ini sangat saya sesalkan. Saya anggap hal ini sebagai sesuatu tindakan yang tidak bertanggungjawab, yang bodoh dan memalukan.

Saya yakin bahwa rakyat di Maluku Selatan pada umumnya dan di Ambon khususnya samasekali tidak menyetujui dan tidak berdiri dibelakang proklamasi itu, oleh karena bertentangan dengan semangat rakyat yang sudah berpuluh-puluh tahun ditujukan kepada kemerdekaan seluruh bangsa Indonesia.

.....
Federalisme hanya dipakai sebagai kedok semata-mata untuk menyembunyikan suatu perasaan yang terdapat dikalangan reaksioner ialah ketakutan akan penjajahan orang Jawa yang tidak beralasan samasekali.
.....

Sisa-sisanya kolonial ini tidak boleh dipertahankan, melainkan harus kita basmi dengan akar-akarnya, bukan dengan jalan federalisme, akan tetapi dengan jalan pembangunan besar-besaran. Dan saya yakin bahwa perasaan yang demikian ini selekas mungkin juga akan lenyap, sehingga tidak ada lagi perasaan Ambon atau Jawa, melainkan perasaan Indonesia semata-mata."

Reaksi Pemerintah RIS ialah segera membentuk suatu misi pencari penyelesaian pada tanggal 17 April 1950, jadi dua hari sesudah proklamasi itu disiarkan. Misi tersebut terdiri dari putera-putera Indonesia asal Maluku, yaitu Dr. J. Leimena sebagai Ketua dan anggota-anggota Ir. Putuhena, M. Pe-laupessy dan dr. Rehatta. Misi itu tiba dengan Korvet "Hang Tuah" di Ambon, tetapi Soumokil menolak menerima mereka. Penolakan itu menjauhkan pemecahan persoalan itu secara damai.

Sementara itu para pejuang kemerdekaan asal Maluku di Jawa menolak dan mencela tindakan-tindakan yang tidak bertanggungjawab dari Soumokil cs. Tetapi ada pula di antara masyarakat Maluku di Jakarta, Surabaya dan Bandung yang menunjuk simpati terhadap alasan-alasan "rms".

Sesudah misi Leimena tidak berhasil Pemerintah mencari jalan lain. Kepala Staf Angkatan Perang (KASAP) RIS, Kolonel Simatupang, mengutus Kapten Haryono (pahlawan revolusi) menemui J. de Fretes, Ketua Umum PIM, untuk mencari jalan pemecahan. Dua jalan yang dikemukakan oleh Kapten itu. (1) Pemerintah mempunyai pendapat perundingan tidak dapat lagi diteruskan. (2) Jadi alternatifnya sekarang hanya dengan kekerasan. Tetapi sebelum diambil tindakan KSAP ingin mendengar pendapat tokoh-tokoh masyarakat Maluku.

Mr. Latuharhary dan pimpinan PIM merasa tidak senang karena mereka tidak diajak turut dalam persiapan misi Leimena. Untuk menghindarkan salah faham de Fretes menghu-

bungi Le Matulesy, karena PIM Cabang Semarang untuk mempersiapkan konperensi Maluku. PIM Semarang mengundang kira-kira 20 orang pemuka. Pada tanggal 12 dan 13 Juni 1950 Konperensi Maluku diadakan di Semarang, yang dipimpin oleh de Fretes dan Kolibonso, dihadiri oleh Mr. J. Latuharhary, Dr. J. Leimena, Ir. Putuhena, E.U. Pupella, J.D. Siyaranamual, M. Kolibonso, A.J. Patty, L. Nanlohy, A. Tahya, dr. Soisa, dr. Lisapaly, Chris Siyauta dan dari Lasykar Pattimura dan lain-lain.

Di dalam konperensi itu terjadi suatu perdebatan yang untuk antara Mr. J. Latuharhary dan Dr. Leimena mengenai kebijaksanaan missi Leimena. Latuharhary sebagai Gubernur Maluku dalam proklamasi dan perjuangan kemerdekaan tidak diturutsertakan oleh Pemerintah Pusat dalam missi Leimena. Karena Pemerintah Pusat tunduk pada KMB, maka alat-alat revolusi dan perlengkapan perjuangannya dibubarkan sedangkan negara kesatuan belum lagi tercapai. Jika Latuharhary berangkat, sekalipun bukan sebagai Gubernur, maka ia akan turun ke darat dengan segala konsekuensi untuk menemui Soumokil cs. Leimena sebagai perorangan bisa turun ke darat, tetapi sebagai Menteri RIS wakil Pemerintah Pusat, ia tidak bisa mengambil risiko itu. Jadi dia tidak bisa mengizinkan M. Pelaupessy anggota Senat, Ir. Putuhena PM Pemerintahan Darurat NIT dan dr. Rehatta dokter di Surabaya untuk turun ke darat. Jadi gagallah missi itu.

Pengiriman Ir. Putuhena dan Mayor Saleh Lahade beberapa bulan yang lalu ke Maluku tanpa diminta pertimbangan dan diturutsertakan Latuharhary, ditambah lagi kegagalan missi Leimena, merupakan pukulan bagi Latuharhary. Ia merasa dikesampingkan oleh Pemerintah Pusat, justru pada saat-saat yang ia rasa sangat diperlukan kehadirannya. 4)

Konperensi mengambil putusan-putusan penting 5) antara lain diputuskan, jika jalan damai tidak berhasil, maka

hendaklah kekerasan dipergunakan secara bijaksana dengan diturutsertakan opsir-opsir putera Maluku dan satuan-satuan Maluku.

Utusan dibentuk di bawah pimpinan Mr. Je. Latuharhary dan Dr. Leimena untuk menyampaikan putusan-putusan konferensi kepada Pemerintah. Juga dibentuk suatu misi persaudaraan rakyat Maluku, terdiri dari pendeta Siahaya (Surabaya), Sapulete (Makassar), J. Ferdinandus (Jakarta), R.J. Tanasale (bekas opsir KNIL) dan Atus Kailola (Magelang) ketua misi, untuk berangkat ke Ambon. Ambon bersedia menerima mereka akan tetapi karena tidak dapat di-charter pesawat terbang netral, maka misi itu tidak sampai di Maluku. Kemudian usaha dr. Rehatta dan Dr. Leimena untuk menghubungi mereka di Ambon juga gagal.

Sementara itu ekspedisi APRIS, di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang disertai dengan para opsir asal Maluku seperti Kapten J. Muskita otak operasi di Ambon, Mayor Herman Pieters, Kapten Leo Lopulissa, Mayor Lambert Pelupessy dengan Batalyon Pattimura dan lain-lain lagi turut menumpas "rms".

Sekalipun harus diakui kualitas pertempuran tentara dan sukarelawan "rms" tinggi dan korban yang cukup besar di pihak APRIS/APRI, akan tetapi karena tidak ada dukungan rakyat, maka runtuhlah "republik" itu yang didirikan atas landasan yang rapuh.

Pergolakan di Maluku ini membahayakan persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia. Lagi pula Maluku adalah front terdepan dalam perjuangan merebut Irian Barat. Untuk itu maka Pemerintah dengan SK Presiden tanggal 6 April 1950 membentuk suatu delegasi diketuai Mr. J. Latuharhary. Delegasi ini beberapa kali pulang balik Jakarta-Belanda untuk berunding. Dari situ sempat juga ia ke Irian Barat untuk me-

ninjau situasi di sana. Tetapi perjuangan memasukkan Irian Barat ke dalam RI akan memakan tiga belas tahun lamanya.

Untuk waktu empat tahun, sedari akhir 1950, Mr. J. Latuharhary akan memusatkan perhatiannya pada pemulihan dan pembangunan kembali Maluku dan rakyatnya.

b. Menyusun Pemerintahan

Tanggal 17 Agustus 1950 kaum unitaris yang dipelopori oleh Presiden Sukarno berhasil menyenyapkan negara federasi RIS dan berdirilah kembali negara kesatuan Republik Indonesia. Berhubung dengan itu maka menurut UUDS 1950, seluruh Maluku dijadikan propinsi dan perlu diangkat seorang gubernur.

Sebelumnya untuk mengatur kembali pemerintahan di daerah Maluku Selatan Pemerintah telah mengangkat dr. Rehatta sebagai Kepala Daerah dengan pusat kegiatannya di Namlea dan Piru.

Proses pengangkatan Mr. J. Latuharhary sebagai Gubernur Maluku tidak semudah seperti disangka orang. Karena tokoh-tokoh Maluku seperti Dr. Je. Leimena, Ir. Putuhena, dr. Rehatta dan kawan-kawan seperjuangan SA seperti J.D. Siyaranamual dan P de Queljoe, tidak menyetujui pencalonan Mr. J. Latuharhary. Karena pertentangan ini E.U. Pupella, anggota parlemen turut campur tangan. Dia berpendapat bahwa Mr. J. Latuharhary adalah Gubernur Maluku dalam negara RI dan dengan terbentuk kembali negara kesatuan RI, Latuharharylah yang harus melanjutkan jabatan itu. Pupella menghadap Menteri Dalam Negeri Mr. Asaat. Tetapi Siyaranamual dan de Queljoe memotong usahanya. Malahan Siyaranamual berkata, "Kau Pupella yang harus jadi gubernur". Tetapi Pupella menjawab bahwa ia tidak dilahirkan untuk menjadi gubernur.

Untuk mendapat dukungan Pupella mengadakan rapat dengan masyarakat Maluku di Makassar yang dihadiri pula oleh wakil-wakil dari Surabaya Moh. Padang dan Atamimi. Rapat memutuskan mencalonkan Latuharhary. Kemudian Pupella bersama-sama Latuharharu ke Parlemen, bertemu dengan pimpinan PIR dan mendapat dukungan. Bersama Moh Padang Pupella ke Menteri Dalam Negeri dan Perdana Menteri, Moh Natsir. Putusan yang mereka peroleh Latuharhary diterima. 6)

J. de Fretes kemukakan, bahwa Latuharhary adalah calon PIM. Tetapi tokoh-tokoh tersebut di atas tidak setuju. Ketika ia dipanggil menghadap Presiden Sukarno, dia diberitahukan bahwa pemuka-pemuka Maluku tersebut di atas tidak setuju pencalonan Latuharhary. Atas nama PIM de Fretes tegaskan pencalonan Latuharhary berdasarkan deklarasi kemerdekaan dan Sukarno berkata: "Yah, akan saya pertimbangkan". 7)

Pengangkatan Mr. Latuharhary sebagai Gubernur Maluku dianggap oleh masyarakat Maluku, khususnya para pejuang yang ada di Jawa, sesuatu yang wajar, karena perjuangannya menghantar masyarakat Maluku ke pintu gerbang kemerdekaan kemudian memimpinnnya sebagai gubernurnya masuk ke alam kemerdekaan.

Tanggal 12 Desember 1950 di pelabuhan Ambon Beberapa kapal perang dan sekoci-sekoci pendaratan sedang berlabuh kapal-kapal KPM pengangkut tentara dan makanan untuk rakyat membuang jangkar agak jauh dari dermaga. Sebuah kapal KPM merapat di dermaga. Turun dari kapal Gubernur Maluku yang pertama Mr. J. Latuharhary. Sesudah sebelas tahun baru Tuhan Yang Maha Kuasa mengizinkan-nya menginjak kembali tanah tumpah darahnya. Terharu, dipanjatkan doa kepada PenciptaNYA yang selama ini menghantarnya dalam perjuangan untuk membebaskan bangsanya.

Puji syukur ia panjatkan kepada Allah yang senantiasa melindunginya. Berdirilah ia di situ terpaku, dikelilingi oleh rombongan dan para penjemputnya. Tidak ada orkes suling, tidak ada tari-tarian penyambut seorang pembesar.

Yang dilihatnya hanya para pengungsi yang berdesakan di gudang-gudang. Manusia-manusia kurus kering, penuh penderitaan disebabkan kelaparan.

Keluar dari dermaga ia membuang pandangan di sekitarnya. Alangkah bedanya kota Ambon sebelas tahun yang lalu dengan Ambon yang dilihatnya reruntuhan puing-puing gedung bekas-bekas kebakaran yang masih berdiri penuh dengan lobang-lobang tembusan peluru tanda betapa hebat pertempuran yang terjadi di kota Ambon

Baru pada tanggal 3 Nopember yang lalu kota itu direbut APRI. Sembilan puluh persen dari kota itu rata dengan tanah. Sepanjang mata memandang tidak lain daripada puing dan reruntuhan. Di sini tenda, di sana tenda, di mana-mana tenda penampungan para pengungsi dan bahan makanan serta obat-obatan yang mengalir dari Pemerintah Pusat. Kendaraan-kendaraan angkatan perang mondar-mandir kesana-kemari, tentara berpatroli berjaga-jaga, karena keamanan belum terjamin. Tentara "rms" masih berkeliaran di gunung-gunung dan sesekali menyusup masuk kota bercampur baur dengan para pengungsi.

Rakyat kota Ambon telah kehilangan harta bendanya, rumah dan isinya, hanya tinggal pakaian di badannya dan di bungkusan yang sempat dibawa sewaktu menyingkir ke gunung-gunung dan hutan-hutan. Rakyat berada benar-benar dalam kesulitan spiritual dan material. Belum lagi sembuh dari luka-luka perang dunia yang dahsyat, sudah ditimpa lagi oleh bencana "rms" dengan segala eksensya.

Tugas yang berat menanti Gubernur Maluku dan para pembantunya. *Tugas pokoknya* ialah menanam kepercayaan pada rakyat akan harga dirinya sebagai rakyat yang merdeka jadi *mengubah secara total mental kolonial menjadi manusia merdeka*. Manusia Indonesia yang mempunyai negara sendiri, mempunyai pemerintah sendiri, gubernur sendiri, angkatan perang sendiri. Untuk itu harus dikikis habis apa yang ditanamkan oleh Belanda selama ratusan tahun, dibersihkan jiwa masyarakat dari propaganda "rms". Mengubah mentalitas ketergantungan pada orang Belanda dan mentalitas mengagungkan orang kulit putih menjadi manusia-manusia Indonesia yang bercita-cita tinggi, berinisiatif dan penuh dinamika dan kegairahan hidup untuk membangun dirinya sendiri, membangun masyarakatnya sendiri, dibimbing oleh pemerintahnya sendiri, penuh keyakinan akan nilai-nilai keagamaan untuk mencapai kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah. Membangun suatu masyarakat baru berlandaskan filsafah negara Pancasila.

Betapa berat tugas yang dihadapi Gubernur Maluku, Mr. J. Latuharhary!!! Gubernur Maluku memulai tugasnya di sebuah kamar di hotel Batugajah (sekarang hotel Anggrek). Hotel itu luput dari penghancuran, tetapi penuh dengan lubang-lubang peluru dan granat. Di kompleks ini memang terjadi pertempuran yang hebat sekali. 8)

Gubernur harus memulai *menyusun pemerintahan* dari permulaan sekali. Sebagai seorang perintis kemerdekaan dan seorang ahli hukum-adat, Latuharhary insyaf benar-benar bahwa ia bukan saja seorang Kepala Daerah, wakil Pemerintah Pusat dan seorang administrator, tetapi juga kepala adat di daerah Maluku. Ia mulai membangun suatu pemerintahan yang baru samasekali berdasarkan UUDS 1950 negara kesatuan RI dan berlandaskan filsafah Pancasila. Tindakannya yang pertama-tama ialah menjalin hubungan kerja yang erat dengan

APRI. Dalam hal ini ia mendapat *support* yang besar dari Kolonel Kawilarang dan stafnya serta perwira-perwira asal Maluku. Sebagai seorang perintis kemerdekaan dan pejuang kemerdekaan pimpinan APRI mempunyai respek terhadapnya. Kerjasama yang baik dengan Overste Sukowati. Panglima Daerah Militer Maluku Irian Barat, berhasil mengatasi berbagai masalah yang pelik.

Pada fase permulaan Gubernur dibantu oleh suatu staf tenaga muda dari Pemuda Indonesia Maluku (PIM) yang datang bersamanya yaitu WIM Tutupoly, E. Lesilolo dan tiga orang mahasiswa kedokteran yang telah datang lebih dahulu yaitu Frans Pattiasina, Boetje Tahalele dan Alex Hukom, pejuang-pejuang API-AMBON Jakarta. (sekarang ketiganya dokter). Di samping itu ia membawa juga seorang pejuang SA, yaitu J.F. Kailola (Oom Atus) dari Magelang, bekas anggota pimpinan Kantor Pembantu Gubernur Maluku. Bulan-bulan pertama tahun 1951 datang tenaga-tenaga republiken dari Jawa dan Makassar. Disayangkan bahwa kader-kader pejuang, yang telah dibentuk semasa revolusi fisik tidak bisa dikerahkan untuk segera dipulangkan ke Maluku. Salah satu sebab ialah karena tenaga-tenaga itu diperlukan oleh berbagai instansi dalam zaman peralihan itu, di mana terdapat pertentangan yang kuat antara *non* (republikein) dan *co* (kaum federalis pro Belanda) sehingga tiap-tiap tenaga republikein sangat diperlukan. Lagi pula kota Ambon yang telah menjadi puing tidak bisa menyediakan fasilitas perumahan bagi tenaga-tenaga yang ingin didatangkan secara besar-besaran.

Untuk segera memutarakan roda pemerintahan Gubernur Maluku membentuk staf pembantunya, terdiri dari: 9)

1. Frans Pattiasina, residen-koordinator pemerintahan
2. Mr. CH. Soplanit, Sekretaris Propinsi Maluku (didatangkan dari Makassar)

3. H. Pattirajawane, Kepala Bagian Otonomi dan Desentralisasi (ODES) (Tenaga Pamong Praja di Ambon)
4. Adjid Latukonsina, Kepala Bagian Pemerintahan Umum (tenaga Pamong Praja di Ambon)
5. Wim Tutupoly, Kepala Bagian Politik (Pegawai Tinggi Dep. Dalam Negeri)
6. J.D. Supusepa, Kepala Bagian Umum (bekas pegawai Kantor Gubernur Maluku Pusat, Yogyakarta)
7. J.F. Kailola, Pembantu Umum Gubernur Maluku
8. E. Lesilolo, Pembantu Khusus Gubernur Maluku (pegawai Sekretaris Parlemen RIS/RI).

Dalam pengangkatan pegawai-pegawai untuk mengisi formasi di kantor Gubernur, Gubernur mengangkat pula bekas-bekas pejuang SA. Selanjutnya terpaksa dipakai pegawai-pegawai dari masa pemerintahan yang lampau. Diperlukan waktu yang cukup panjang untuk membimbing mereka memiliki kesadaran nasional sesuai cita-cita proklamasi kemerdekaan.

Suatu hambatan psikologis perlu dilenyapkan yaitu nama "Maluku Selatan". Propinsi Maluku dibagi dalam tiga Kabupaten, yaitu Maluku-Utara, Maluku Tengah dan Maluku Tenggara. Daerah Maluku Selatan dipecah menjadi dua kabupaten terakhir ini. Perangkat-perangkat pemerintahan untuk ketiga daerah ini dibentuk dan diangkat pejabat-pejabatnya.

Penyusunan aparat Pemerintahan Daerah Maluku memakan waktu kurang lebih tiga tahun, dalam mana penempatan tenaga trampil merupakan faktor penting. Gubernur mendapat bantuan penuh dari kawan seperjuangannya, Gubernur Jawa Tengah, Boediono, yang kemudian ditempatkan di Dep. Dalam Negeri. 10)

Dalam tahun 1951 jawatan-jawatan vertikal telah berhasil dibentuk. Gubernur memberi prioritas bagi pengangkatan putera-putera asal Maluku yang berjiwa republikain untuk

mengepalai jawatan-jawatan dan kantor-kantor. Mereka diangkat dari tenaga-tenaga yang didatangkan dari luar Maluku atau yang berada di daerah.

Kepolisian perlu direorganisasi. Untuk itu bersama-sama dengan Gubernur, datang pula Komisaris Besar R. Agus Basuki. Tugasnya tidak ringan dalam memberi isi dan jiwa nasional kepada anggota kepolisian yang sangat kuat dipengaruhi oleh pemerintahan kolonial dan yang terkena pula pengaruh "rms".

Pada permulaan pemerintahannya suatu persoalan yang pelik di Maluku Utara perlu diselesaikan. APRIS yang mendarat di Ternate sebagian besar terdiri dari putera-putera asal Manado. Atas tuduhan kaki tangan Belanda dan "rms" Sultan Ternate Djabir Syah, ditawan oleh mereka lalu dibawa ke Makassar. Pada zaman NIT dia adalah residen Maluku Utara. Timbul keresahan dalam masyarakat swapraja yaitu kesultanan Ternate, Tidore dan Bacan, khususnya masyarakat Ternate yang kehilangan induknya. Untuk mengatur pemerintahan di Maluku Utara, Gubernur Maluku mengangkat Sultan Tidore, Zainal Abidin Syah, menjadi Residen/Kepala Daerah Tingkat II Maluku Utara. Kemudian melalui Departemen Dalam Negeri Sultan Ternate itu dibebaskan dan diangkat menjadi Residen diperbantukan pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta. Kebijakan Gubernur ini menimbulkan kelegaan di kalangan rakyat Maluku Utara. 11)

Yang maha penting pada permulaan pemerintahannya ini ialah menghantar rakyat Maluku ke alam kemerdekaan, ke alam persatuan dan kesatuan nasional, lepas dari tekanan-tekanan dan tuduhan-tuduhan psikologis, sehingga dapatlah mereka disiapkan mentalnya untuk menempuh hidup yang baru, yaitu lepas dari alam kolonial dengan segala akibatnya, memasuki alam kemerdekaan dan menjadi dewasa di dalamnya untuk membangun daerahnya.

c. Membangun Masyarakat Maluku

Pembangunan mental masyarakat berlandaskan Pancasila adalah tugas pokok Gubernur Maluku dan pemerintahannya.

Beradanya anggota APRI di tengah-tengah masyarakat di negeri-negeri, terutama di Ambon, Lease dan Seram, secara langsung mempunyai nilai penting bagi perkembangan rasa persatuan dan kesatuan. Di dalam operasi militer di Maluku berbagai suku bangsa turut serta. Ada pasukan dari Aceh, Palembang, Sunda, Jawa, Madura, Makassar, Manado dan lain-lain. Mereka langsung berkenalan dengan kepulauan Maluku dan rakyatnya. Saling berkenalan ini dan hidup mereka di tengah-tengah masyarakat negeri, membuka mata rakyat bahwa mereka ini bukan "setan jahanam" seperti yang dipropagandakan oleh "rms". Secara langsung tumbuh rasa persatuan dan kesatuan nasional yang positif. Karena ada pergaulan itu timbul juga perkawinan dengan gadis-gadis negeri. Bahwa ada pula timbul hal-hal yang negatif seperti tindakan-tindakan Batalyon 3 Mei, sangat dicela oleh rakyat. Perkembangan tersebut membantu Gubernur dan Pemerintahannya dalam bimbingan kepada rakyat.

Dalam pembangunan mental *pendidikan* memainkan peranan yang vital. Oleh karena itu sejak masyarakat Ambon turun dari gunung dan pertempuran mereda, maka atas saran F. Pattiasina dan Boetje Tahalele, penulis mengambil inisiatif mengumpulkan semua guru yang sudah berada kembali di kota, dalam suatu rapat bertempat di beranda depan gedung Batugajah (Markas Kodam Pattimura sekarang) pada permulaan bulan Desember 1950. Sekalipun para guru semuanya dalam keadaan fisik yang lemah, tidak mempunyai apa-apa lagi kecuali pakaian lekat di badan, kaki pun telanjang atau bersandal atau bakiak dan harus melindungi diri dari angin dan

panas dalam rumah-rumah darurat, akan tetapi rasa tanggung-jawab yang besar membangkitkan kegairahan lagi untuk memulai pendidikan bagi anak-anak. Kehancuran kota Ambon menghimbau mereka untuk segera membangun kembali kota itu dengan manusianya. Untunglah sebagian besar gedung-gedung sekolah tidak hancur atau terbakar, hanya penuh dengan lobang-lobang peluru dan hancurnya kaca-kaca. Sebagian sekolah-sekolah itu dipakai oleh kaum pengungsi. Tetapi hal itu dapat diatasi dalam waktu yang singkat.

Penulis kemukakan dalam rapat itu supaya mengubah secara total sistem persekolahan dan mental pendidikan. Sekolah-sekolah yang berbahasa Belanda segera harus diubah dan dipakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Isi pendidikan yang masih kolonial harus diarahkan ke pendidikan nasional.

Untuk memulihkan bidang pendidikan dibentuk Badan Pekerja Pembangunan Pendidikan, yang dipimpin oleh tenaga-tenaga nasional seperti ketua L. Tamaela (adik dr. Tamaela dari SA0, Sekretaris I.O. Nanulaita, anggota-anggota Nn. A. Tapiheroe dan Tjokro. (dari Balai Pendidikan Nasional). Dalam waktu singkat kantor pendidikan mulai berputer dan sekolah-sekolah pun mulai dibuka. Dan inilah jawatan yang pertama-tama dibangun sebelum Gubernur Maluku tiba di Ambon.

Atas usul Gubernur pada permulaan tahun 1951 L. Tamaela dan H.A. Risakotta dipanggil oleh Dep. PPK. Sekembalinya L. Tamaela telah diangkat menjadi Inspektur Pendidikan Sekolah Rakyat/Koordinator PPK Daerah Maluku dan H.A. Risakotta diangkat sebagai kepala SMA Ambon (di zaman NIT adalah AMS). Tamaela diberi wewenang untuk mengatur pendidikan di seluruh Maluku. Dengan ini maka Badan Pekerja Pembangunan Pendidikan dibubarkan dan mulailah diatur pengangkatan para penilik/penilik kepala, kepala sekolah SR

maupun lanjutan seperti SMP, SMA, SGA dan sebagainya. Jawatan Pendidikan Masyarakat membuka kantornya di bawah pimpinan Tjokro dan I.O. Nanulaitta.

Berdasarkan petunjuk-petunjuk dari Gubernur dan dari Dep. PKK diimplementasikan kurikulum nasional yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana dilaksanakan di lain-lain daerah RI. Dengan ini mulailah *diletakkan dasar-dasar bagi suatu perombakan mental masyarakat Maluku*, yang lebih dari 300 tahun lamanya hidup dan dididik dalam alam kolonialisme. Dan dengan ini pula ide dan cita-cita "rms" diperangi dan dicegah merembet masuk ke dalam alam generasi muda.

Untuk menunjang perkembangan ini penulis, dengan diresmikan oleh Gubernur Maluku dan Inspektur SR/Koordinator PPK, mengambil inisiatif membentuk PGRI Cabang Ambon yang diketuai olehnya. Disusul dengan konperensi PGRI seluruh Maluku dalam bulan Nopember 1951. Penulis dipilih sebagai Komisaris PGRI Daerah Maluku dengan wakil komisaris M. Ruhupatty.

Dengan ini maka salah satu alat revolusi kemerdekaan dimasukkan ke dalam masyarakat Maluku dalam rangka pembentukan sikap mental para pendidik dan guru-guru untuk melaksanakan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, sebagaimana diidam-idamkan oleh Mr. J. Latuharhary, waktu ia, atas nama rakyat Maluku, turut menyusun Mukadimah dan UUD 1945.

Pendidikan masyarakat lebih ditujukan pada pemberantasan buta huruf yang terdapat di kalangan penduduk Islam, yang selama penjajahan pendidikannya hampir tidak mendapat perhatian, baik dari pihak pemerintah kolonial maupun dari pihak rakyat sendiri. Kalau buta huruf di negeri-negeri Kristen hampir tidak ada, maka di negeri-negeri Islam hampir 99% rakyat buta huruf dan anak-anak tidak disekolahkan. Dengan gerakan pemerataan pendidikan, baik Inspeksi SR, maupun

Pendidikan Masyarakat dan PGRI melancarkan usaha-usaha untuk memperluas dan memperbanyak sekolah-sekolah rakyat sebagai fundasi perkembangan pendidikan selanjutnya.

Dalam pengembangan *bidang seni-budaya* Gubernur memberi petunjuk untuk menggali nilai-nilai kebudayaan asli rakyat Maluku, sebagaimana ia cita-citakan dan usahakan sewaktu ia menjadi ketua SA.

Bidang tersebut ditangani oleh Inspeksi Kebudayaan Departemen PPK di bawah koordinasi Tamaela. Di samping itu ormas-ormas kesenian dari berbagai daerah muncul di berbagai tempat yang meramaikan perkembangan seni-budaya dalam taman Bhinneka Tunggal Ika.

Pembangunan fisik generasi muda pada waktu itu dibimbing oleh Inspeksi Pendidikan Jasmani, yang bertanggung-jawab atas pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah-sekolah. Bersama Inspeksi Pendidikan Masyarakat Bagian Pemuda dan Olah-Raga bimbingan diberikan kepada perkumpulan-perkumpulan olahraga yang bertaburan di berbagai pulau.

Hasil-hasil yang diperoleh dalam berbagai pertandingan nasional seperti pada PASI dan PON menunjukkan, bahwa prestasi dan mutu olahragawan Maluku berada setingkat dengan olahragawan di Jawa.

Perhatian yang menonjol terhadap *pembangunan sosial* terlihat dalam tindakan Gubernur Maluku dalam membangun kembali ibu-kota propinsi Maluku, Ambon. Dalam kekalutan membenahi kota Ambon pernah direncanakan untuk memindahkan ibukota ke Seram, karena ibukota memerlukan suatu "*achterland*" (lingkungan produktif yang menunjang perkembangan ibukota). Tetapi sementara itu kota yang hancur itu harus dibangun.

Untuk menampung para pengungsi yang kehilangan rumahnya, didirikan rumah-rumah darurat di beberapa tempat di tepi sungai.

Pembangunan kota tertumbuk pada masalah tanah, Sebagian besar tanah di dalam kota dimiliki perorangan. Malahan beberapa orang turunan Arab memiliki tanah-tanah yang luas. Mereka ini tidak mau atau segan melepaskan hak mereka atas tanah-tanah itu, sekalipun pemerintah bersedia membelinya. Di zaman NIT seorang perancang tatakota, Ir. Fliers, telah membuat suatu rencana pembangunan kota Ambon. Tetapi rencana itu tidak dapat dijalankan karena seorang turunan Arab yang di zaman Belanda dikenal sebagai "*kapitein der Arabieren*", tidak mau menyerahkan tanahnya.

Gubernur Latuharhary memakai rencana tersebut untuk membangun kota Ambon. Keadaan dipermudah karena rumah-rumah dan gedung-gedung telah menjadi puing. Jadi tinggal digilas dan diratakan tanahnya.

Basalama cs, turunan Arab, menentang dengan keras. Tetapi Latuharhary sebagai ahli hukum mempergunakan hak pemerintah untuk menguasai tanah guna kepentingan umum. Basalama cs memprotes dan memakai Mr. Iskaq Tjokrohadi-surjo di Jakarta sebagai advokat. Surat pembelaan kliennya dikirim kepada Gubernur, yang menjawab kawan seperjuangannya itu, "Apakah Saudara mau menyampingkan suatu kepentingan nasional hanya untuk kepentingan semacam itu?"¹²⁾ Basalamah tetap membangkang.

Tetapi pembangunan harus berjalan. Gubernur menempuh jalan antara lain kalau sebidang tanah itu cukup besar, maka sebagian diambil dan didirikan rumah pemerintah, sedangkan di bagian lain didirikan oleh pemerintah sebuah rumah untuk pemilik. Jadi ada pertukaran tanah dengan rumah. Tanah-tanah yang kelebihan diambil oleh pemerintah dengan janji akan dibayar kemudian. Dengan jalan ini sekalipun dengan banyak protes, mulai dibangun kota Ambon sekarang ini.

"Ini suatu tindakan yang berani. Dan jasa Latuharhary tidak boleh dilupakan. Jika tidak diambil tindakan pada waktu itu, maka kota Ambon tidak akan mempunyai wajah seperti sekarang ini", kata Pupella.

Suatu masalah *sosial-budaya* yang rumit yang harus dibereskan oleh pemerintah Latuharhary ialah meluluskan permohonan rakyat Ternate agar Sultan Ternate dipulangkan hanya untuk beberapa hari saja.

Dalam tahun 1952 epidemi menyerang cengkih rakyat. Pada saat yang sama timbul epidemi babi hutan yang merusak kebun-kebun rakyat. Menurut kepercayaan rakyat, kalau Sultan berada di tengah-tengah mereka, maka dalam suatu upacara percikan air dari kendi yang dikerjakan oleh sultan sendiri di sekitar tanaman dan pohon-pohon cengkih, epidemi itu akan lenyap. 13)

Berhubung dengan itu warga-warga kedaton mengajukan permohonan kepada Gubernur agar berusaha memulangkan Sultan Ternate untuk beberapa hari saja. Permohonan itu disokong oleh pemangku-pemangku adat dari kraton Tidore dan Bacan. Tetapi partai PNI dan Masyumi di Maluku Utara menentang maksud rakyat Ternate itu. Rakyat ke tiga swapraja tersebut di atas mengancam ke dua partai itu. Ranting-ranting di berbagai tempat dipaksakan untuk dibubarkan.

Gubernur Maluku mengirim Kepala Bagian Politik disertai wakil-wakil Muspida ke Maluku Utara untuk membereskan hal itu. Sesudah bermusawarah PNI dan Masyumi bersedia menarik penolakan mereka. Atas usul Gubernur Departemen Dalam Negeri mengizinkan Sultan Ternate pulang untuk beberapa hari.

Penerimaan yang luar biasa menandakan luapan kerinduan pada Sultan mereka. Jalan-jalan yang dilalui sultan dihampari dengan kain putih sampai ke kraton. Upacara percikan air yang dilakukan sultan mengembalikan ketenangan

di kalangan masyarakat. Ini suatu contoh bimbingan yang diberikan oleh Gubernur Maluku sebagai Kepala Adat.

Pembangunan bidang spiritual dialaskan pada kerukunan beragama yang sudah berakar dalam masyarakat yang terdapat dalam persekutuan dan persaudaraan lembaga *pela*. Oleh karena itu kepada ke tiga agama yang ada di Maluku yaitu Protestan, Katholik dan Islam diberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan ajarannya dan memberi bimbingan kepada umatnya masing-masing dalam konstelasi kenegaraan yang baru, yaitu konstelasi kemerdekaan yang berlandaskan Pancasila.

Dengan para alim-ulama Islam dan Protestan disepakati untuk memperbaiki mesjid Djame di Ambon dan membantu gereja pusat Gereja Protestan Maluku. Dengan rencana pembangunan gereja tersebut Gubernur menemui Presiden Sukarno. Presiden menyokong rencana ini dan negara menyediakan biaya. Dengan usaha rakyat Kristen dibantu sepenuhnya oleh umat Islam, maka pada tanggal 8 Mei 1954 Presiden berkenan meresmikan gedung ibadah itu. Sekaligus Presiden meremukkan propaganda kosong "rms" bahwa negara RIS/RI adalah negara Islam, yang hendak mengislamkan orang-orang Kristen.

Rencana perbaikan mesjid ditentang oleh tokoh-tokoh Masyumi yang menuduh Gubernur menggunakan rencana itu sebagai siasat politik menghadapi pemilihan umum yang akan datang. Sampai ia meninggalkan Maluku rencana itu tidak dapat dilaksanakan.

Dalam bimbingan yang Gubernur berikan untuk mengembangkan bidang mental spiritual ia mendapat bantuan pemikiran-pemikiran yang rasional positif dan sangat berharga dari bekas pembantunya di Jakarta dan yang ia kirim ke Maluku dalam tahun 1946, yaitu Ds. Thom Pattiasina. Sekalipun dalam keadaan sakit Ds. Pattiasina berhasil membimbing GPM untuk mengadakan pembaharuan-pembaharuan dalam

gereja sesuai dengan posisi gereja yang bebas dalam negara merdeka. GPM yang meliputi juga gereja-gereja di Irian Barat harus mengatur aktivitasnya sejalan dengan politik negara untuk memasukkan daerah itu ke dalam RI.

Kebijaksanaan terhadap gereja Katholik berjalan lamban oleh karena pengaruh asing masih kuat disebabkan para alim ulama gereja itu hampir semuanya orang Eropa.

Dengan dibentuknya Kantor Agama, maka bimbingan kepada ke tiga agama itu dapat ditangani dengan mantap.

Pembangunan ekonomi yang menjadi tulang punggung pembangunan rakyat harus ditata dari awal. Mengubah tata-ekonomi kolonial ke tata-ekonomi nasional memakan waktu yang sangat lama. Terutama di Maluku, dalam mana rakyat telah diasingkan oleh pemerintah kolonial selama beratur tahun dari aktivitas perdagangan, pelayaran, perindustrian dan perkebunan (*onderming*). Di dalam masyarakat bumiputra tidak ada golongan menengah yang bermodal untuk turut dalam proses perkembangan ekonomi. Semua modal dikuasai oleh orang-orang asing seperti Cina, Arab dan Belanda. Dalam bidang pelayaran seluruh Indonesia masih tergantung dari perusahaan Belanda KPM. Perdagangan antar pulau dikuasai oleh Cina dan Arab. Produksi cengkih dan kopra, hasil hutan dan hasil laut dan sebagainya dikuasai oleh golongan tersebut di atas.

Bagaimana memecahkan soal itu merupakan suatu usaha yang sangat berat bagi pemerintahan propinsi, apalagi belum bisa diharapkan bantuan modal dari pusat, disebabkan pada waktu pengakuan kedaulatan RIS menerima beban hutang yang dibuat pemerintah kolonial. Kas negara kosong. Anggaran negara sebagian besar dipergunakan oleh angkatan perang untuk mengamankan daerah-daerah seperti di Jawa Barat DII—TII. Makassar peristiwa Andi Azis, peristiwa "rms"

dan lain-lain. Sedangkan Maluku selalu dikatakan Belanda "*een verliespost*" (daerah kering dan merugi) bagi kas pemerintah Hindia Belanda.

Dari tahun 1945 – 1950 praktis tidak ada perubahan dalam perekonomian Maluku. Peristiwa "rms" menambah kekacauan bidang keuangan di Maluku. Inilah keadaan yang dihadapi pemerintahan Latuharhary, yang harus ditata mulai dari awal lagi.

Suatu *crash-program* ekonomi disusun oleh konperensi para bupati dan camat se Maluku dengan Inspeksi-inspeksi yang bersangkutan dalam tahun 1952, dengan bantuan Departemen Perdagangan yang mengirim ahli-ahlinya antara lain J. de Fretes. *Crash-program* setebal tiga jilid menjadi pedoman pembangunan ekonomi. 14).

Dalam *bidang pertanian* dengan bantuan Inspeksi Pertanian Maluku, yang dipimpin oleh F. Tahalele, diadakan percobaan membuka persawahan di Kairatu, Seram dalam rangka *selfsupporting* beras. Saya usaha ini terhenti dengan pindahnya Inspektur tersebut dan berakhirnya pemerintahan Latuharhary.

Inspeksi *Perindustrian* mulai perusahaan batu bata dan kapur di Latuhalat (pulau Ambon) yang bisa memenuhi keperluan rakyat dan pemerintah antara lain dipergunakan untuk membangun gereja pusat.

Inspeksi Perikanan dan Kehutanan berusaha menggali *hasil laut* dan *hutan* baik untuk keperluan rakyat maupun untuk diekspor.

Atas saran Gubernur Maluku dimulai dengan *penghijauan* bukit-bukit yang gundul penuh ilalang di sekitar Manggadua (Ambon). Atas kerjasama Inspeksi Kehutanan dengan PPK ratusan murid sekolah mendaki bukit-bukit itu dan ditanami dengan cengkih (1952). Tetapi sangat disayangkan bahwa

pemeliharaan tidak ada. Akar-akar alang-alang dan kebakaran akhirnya memusnahkan usaha yang baik itu.

Untuk melepaskan petani cengkih dari ijon, lintah darat, tengkulak dan penentuan harga cengkih sewenang-wenang oleh para pedagang, maka Gubernur membentuk *Yayasan Cengkih Maluku* dalam bulan Oktober 1952, diketuai oleh Kepala Bagian Politik, W. Tutupoly. Modal diperoleh dari BRI yang memberi kredit terus menerus (*doorlopend credit*) sampai Rp. 5 juta. Dengan persetujuan Pemerintah Pusat cq. Departemen Perdagangan Yayasan menetapkan harga dasar cengkih per kg serta Yayasan mendapat hak monopoli untuk menjual cengkih ke luar daerah. Dengan demikian rakyat terangsang untuk menjual hasilnya kepada Yayasan Cengkih Maluku yang mempunyai petugas-petugas tersebar sampai di wilayah kecamatan.

Sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah cq. Gubernur Maluku pada waktunya Yayasan tersebut akan mengalihkan tugas, peranan dan dananya kepada pusat koperasi cengkih di Maluku, yang sementara diproses pembentukannya oleh Inspeksi Koperasi Propinsi Maluku.

Tetapi Yayasan ini mendapat tantangan keras dari sebagian pedagang cengkih, yang merasa dikebiri usahanya. Nama petani cengkih dibawa-bawa mereka dalam reaksi itu serta dipolitikkan dengan mempergunakan anggota-anggota tertentu di Dewan Maluku. Tengah untuk melancarkan aksi menentang kebijaksanaan Gubernur itu. Mereka menuduh bahwa kebijaksanaan itu sama saja dengan politik VOC.

Kontra-aksi datang dari Front Pemuda Indonesia Propinsi Maluku yang mendukung *policy* cengkih itu karena berorientasi pada kepentingan rakyat petani cengkih. Di tengah-tengah suara pro dan kontra Yayasan berjalan terus dan lambat-laun mendapat kepercayaan rakyat. Peningkatan

usaha Yayasan itu sampai mencapai usaha pembukaan kebun-kebun bibit.

Tetapi dengan kepindahan Gubernur Latuharhary dan ketua Yayasan, maka Yayasan mengalami kemunduran karena rongrongan dari dalam, *mis-management* dan korupsi dan dari luar hantaman oleh para pedagang dan kaum politisi yang mempunyai *vested interest*. Akhirnya Yayasan itu hancur.¹⁵⁾

Usaha yang lain ialah pembentukan *Yayasan Mutiara Maluku*. Kepala bagian Politik yang pada waktu itu menjabat Sekretaris Propinsi Maluku menggantikan Soolanit, SH (yang bersangkutan diangkat menjadi anggota DPRS fraksi PIR) secara *ex-officio* diangkat menjadi presiden komisar. Tujuannya untuk melepaskan rakyat penyelam mutiara dari kemiskinan, pekerjaan berat tetapi pendapatan yang sangat sedikit. Menurut penyelidikan Dinas Kesehatan banyak di antara penyelam di hari tuanya mengalami penyakit kebutaan dan penyakit paru-paru. Sebagai penyelam kesehatan mereka tidak dihiraukan oleh pengusaha-pengusaha mutiara di Dobo yaitu orang-orang Cina. Sarana dan alat-alat penyelam yang tidak memadai, makanan yang kurang bergizi, mengakibatkan berbagai penyakit. Gubernur memerintahkan kepada Kepala Bagian Politik untuk menangani masalah ini. Dengan kerja sama antara pihak pemerintah, kepolisian dan tentara, diadakan pengawasan terhadap pengusaha-pengusaha Cina itu dan karena mereka melanggar peraturan maka mereka dipindahkan ke Tual. Yayasan bisa berusaha lebih lancar. Akan tetapi dengan keberangkatan Mr. Latuharhary dan W. Tutupoly dari Maluku, maka Yayasan itu mengalami nasib yang sama dengan Yayasan Cengkih. ¹⁶⁾

d. Membina Bidang Politik

Untuk menghancurkan "rms" seluruh Maluku di tempatkan di bawah keadaan darurat perang atau SOB (*Staat van*

Oorlog en Beleg). Dengan demikian para komandan angkatan perang mempunyai kekuasaan besar. Karena Mr. Latuharhary seorang pejuang perintis kemerdekaan yang berwibawa, maka ia disegani dan fihak militer menaruh respek terhadapnya. Dari fihaknya sendiri ia menjalin kerjasama yang erat dengan Komandan, Overste Sukowati, dan para perwira stafnya. Pada tanggal 30 Juli 1952 SOB dihapus di seluruh Indonesia. Bagi Ambon, Lense dan Seram berlaku keadaan perang SO (*Staat van Oorlog*).

Dalam mencari jalan menyelesaikan masalah "rms" di gunung-gunung di Seram, Gubernur Maluku menginstruksikan Kepala Bagian Politik dan stafnya untuk melancarkan sistem pendekatan bapak (Gubernur) dan anak (mereka yang ada di hutan). Pendekatan ini membuahkan penyerahan lebih dari seratus orang "rms" di bawah "overste" Corputty (1952). Tetapi karena terjadi insiden penembakan "overste" tersebut maka lenyaplah kepercayaan mereka yang masih ada di hutan pada pemerintah. Terhentilah sistem pendekatan itu.

Pada masa itu di Maluku memang masih sering terjadi keanehan. Di samping fihak-fihak yang ingin agar SO dihapuskan, ada juga yang tetap menghendaki agar SO justru dipertahankan di Daerah Maluku dalam tahun 1954 koran-koran di ibukota menyiarkan berita bahwa tentara "rms" mendarat di Ambon. Gubernur Maluku kebingungan karena di Ambon tidak ada apa-apa. "Ini sudah keterlaluan", katanya.

Berita yang menghebohkan ini menyebabkan Menteri Pertahanan sendiri, Mr. Iwa Kusumasumantri, terbang ke Ambon. Wakil Departemen Dalam Negeri, Gubernur Boediono, dan residen Rachmat dari Biro Politik, dikirim ke Ambon untuk meninjau keadaan. Ternyata tidak ada apa-apa. Sekembali di Jakarta kepada pers mereka katakan: "*Er is geen schot gelost*" (Tidak ada satu tembakan pun yang dilepaskan).

Gubernur memberi ketegasannya mengenai hal itu sebagai Berikut: 17)

”
Sebab dengan pengalaman selama 4 tahun di Maluku selaku Gubernur Kepala Daerah, kami tak dapat melepaskan diri kami dari kesan ini, bahwa ada sesuatu aliran yang selalu mau menggambarkan seolah-olah daerah Maluku adalah daerah yang belum aman daripada kekacauan RMS. Mereka berbuat demikian oleh karena Staat van Oorlog (SO) yang masih dipertahankan di Ambon dan Seram, adalah suatu keadaan yang menguntungkan bagi mereka.

Keadaan SO itu diadakan hanya sebagai suatu jalan untuk mengembalikan keadaan aman. Jika keadaan aman itu telah dikembalikan, atau jika suatu keadaan menuju keadaan yang aman, maka SO perlu dicabut selekas mungkin. Jika tidak, maka adanya SO atas sesuatu daerah yang aman atau atas suatu daerah di masa keadaan menuju ke keamanan, menimbulkan suatu akibat yang justru karena adanya SO bertentangan dengan apa yang diharapkan.

Oleh karena itu maka adalah sangat perlu, jika SO di Ambon dan Seram dicabut secepat-cepatnya dan kami percaya bahwa tidak perlu lagi ragu-ragu terhadap keadaan politik di Maluku pada umumnya.”

Sesudah keadaan menjadi tenteram dalam tahun 1951, *partai-partai* dan *organisasi-organisasi* yang berpusat di Jakarta, mulai memasuki Maluku dan mendirikan cabang-cabang dan ranting-ranting. Pimpinan di Maluku biasanya berkedudukan di ibukota Ambon, sehingga di sini timbul dalam waktu singkat kegiatan-kegiatan politik yang meyakinkan rakyat akan

demokrasi yang dijalankan oleh negara RI berlandaskan Pancasila.

Dalam waktu singkat terbentuk PNI, PIR, Masyumi, PSI, Parkindo. Kemudian menyusul PRN, Partai Buruh, Partai Katholik, PSII, Murba dan PARINDRA. Juga *organisasi wanita* dibentuk. Ada yang tergabung dalam partai seperti Wanita Demokrat (PNI), Wanita PIR, dan ada juga yang independen seperti Perwari.

Di kalangan *pemuda*, eksponen Pemuda Indonesia Maluku (PIM) yaitu penulis dan E. Lesilolo mengambil inisiatif membentuk Front Pemuda Indonesia (FPI) Propinsi Maluku, yang dipimpin oleh E. Lesilolo. Seksi politik dipimpin oleh I.O. Nanulaitta. Tergabung dalam FPI organisasi pemuda lokal seperti Persatuan Pemuda Kristen Maluku (PPKM), Gerakan Pemuda Indonesia (GERPI), Front Pemuda Nusa Ina dan lain-lain. FPI mempunyai tujuan pokok ialah memberikan partisipasi positif dan aktif kepada kebijaksanaan Gubernur dalam membina serta mengembangkan jiwa dan semangat Proklamasi 1945 berlandaskan Pancasila di kalangan masyarakat Maluku untuk menetralkan pengaruh-pengaruh anti RI yang dipropagandakan oleh kaum kolonial dan "rms".

Dan karena pimpinan FPI ini ada di dalam tangan eksponen 45, maka dapatlah dikembangkan di dalam kalangan organisasi-organisasi pemuda lokal itu jiwa persatuan dan kesatuan yang revolusioner, patriotik dan pengorbanan untuk membangun rakyat dan daerah Maluku dalam satu saja negara, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. 18)

Dengan terbentuknya parpol-parpol dan ormas-ormas tersebut di atas dengan pimpinan eksponen-eksponen Angkatan 45, maka rakyat Maluku, khususnya angkatan muda, memperoleh pendidikan politik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga terbentuk kader-kader baru yang berjiwa Panca-

sila, siap untuk secara positif membangun Maluku dan mengambil bagian dalam perjuangan memasukkan Irian Barat ke dalam Republik Indonesia, karena justru Maluku merupakan front terdepan dalam perjuangan ini.

Parpol-parpol dan ormas-ormas memberi kesempatan bagi Gubernur Maluku untuk menjalankan pemerintahan secara demokratis antara lain dengan membentuk DPRD Sementara Maluku Tengah dan Maluku Utara, sedangkan bagi Maluku Tenggara sedang dalam proses penggarapan. Demikian pula DPRDS tingkat I Maluku menunggu putusan Pemerintah Pusat.

Parpol dan ormas merupakan pula penangkal politik untuk menangkis politik yang dilancarkan oleh Belanda dan "rms" di negari Belanda. Seperti terjadi demonstrasi "rms" menentang Delegasi Indonesia, dipimpin Mr. Soenario dalam perundingan dengan Belanda untuk menghapus Uni Indonesia-Nederland. Demonstrasi yang terjadi pertengahan Juli 1954 itu menimbulkan reaksi keras dari parpol dan ormas di Ambon.

Pada tanggal 9 Juli 1954 19 parpol dan ormas, yaitu PNI, PIR, Masyumi, Parkindo, PRN, PARINDRA, PSII, PSI, Partai Buruh, Partai Katholik, Wanita Demokrat, Wanita PIR, Latu-Putih Maluku Tengah, PPDMT Tenggara, Permai, SAIT, Front Pemuda Indonesia Promal, Perwari dan Pemuda Demokrat Indonesia, mengirim telegram kepada Ketua Delegasi RI seperti berikut : 19)

Ketua delegasi ri mr sunario d/a perwakilan ri di den haag mencela dan menentang sekeras-kerasnya sikap para demonstran pula surat manusama kepada drees ttk gerakan rms bukan suatu gerakan rakyat maluku tetapi adalah siasat aliran-aliran asing tertentu yang mempergunakan dr soumokil cs sebagai kaki tangannya untuk mengacau-

kan kemerdekaan negara kita ri tdk rms tidak pernah dan sekarangpun tidak mempunyai pengaruh di kalangan rakyat maluku tdk mendesak delegasi bersikap tegas terhadap penghapusan uni dan pengembalian ulang pengembalian irian barat ke dalam wilayah ri titik seluruh rakyat maluku berdiri tetap di belakang delegasi ri yang dipimpin oleh mr sunario tdk mendoakan kepada jmk agar kepada delegasi ri dikaruniakan kebijaksanaan yang sebesar-besarnya agar tercapai cita-cita seluruh bangsa indonesia tdk

Untuk menggalang kesatuan aksi dibentuk "Panitia Aksi Menentang Demonstrasi Manusama cs di Belanda", yang terdiri dari wakil-wakil parpol dan ormas tersebut di atas. Pada tanggal 18 Juli 1954 diadakan rapat raksasa di lapangan "Merdeka". Dalam rapat itu diambil resolusi yang isinya antara lain menyetujui penghapusan UNI dan pengembalian Irian Barat ke pangkuan RI; menyokong perjuangan Delegasi RI; menentang sangat gerakan Manusama cs; dan mendesak Pemerintah RI supaya bersikap tegas. Resolusi itu dikirim antara lain kepada Presiden, Kabinet, Delegasi RI, DPR RI, Gubernur Maluku, Komandan Resimen Infanteri 25 dan pers.

Perkembangan tersebut membuktikan *keberhasilan Gubernur* dalam *pembinaan bidang politik* di Maluku. Sekaligus membuktikan bahwa rakyat Maluku berjiwa proklamasi kemerdekaan dan bukan pendukung apa yang disebut "rms".

Kenyataan ini disaksikan sendiri oleh Presiden Sukarno, ketika ia berkunjung ke Maluku dalam bulan Mei 1954. Di mana-mana di pulau Ambon, Namlea (Buru), Geser (Seram), seluruh rakyat, dari negeri dan kampung terpencil sekali pun, datang menyambutnya dengan semangat persatuan dan kesatuan bersumber pada jiwa kemerdekaan yang dicetuskan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Jiwa ini ditegaskan oleh Presiden atas pertanyaan pers, apakah ia merasa bahwa rakyat di Maluku berperasaan "rms", maka Presiden Sukarno menjawab dengan tegas bahwa rakyat tidak berperasaan "rms", kecuali mungkin satu-dua orang di sana-sini.

Kerukunan beragama dan toleransi yang merupakan akar khas dari masyarakat Maluku, juga selalu diperjuangkan oleh Mr. Latuharhary selaku Gubernur. Menjelang Pemilihan Umum tahun 1955, ada usaha sementara oknum untuk memperuncing perselisihan, juga karena faham keagamaan. Dalam hal ini Gubernur Latuharhary bertindak tegas, namun bijaksana. Beliau selalu berusaha untuk kerukunan umat beragama.

Pemerintah dan rakyat selalu berusaha untuk membangun, membentuk, mengembangkan dan memelihara jiwa persatuan dan kesatuan berdasarkan Pancasila.

Bagaimana Gubernur Maluku menghadapi masalah militer Maluku (KNIL) yang mau pulang ke Maluku? Dalam tahun 1951 pemerintah telah mencoba memulangkan mereka sebagai rakyat biasa. Untuk maksud ini Gubernur terbang ke Jakarta untuk membicarakannya dengan pemerintah. Atas pertanyaan pemerintah apakah Gubernur bersedia menerima mereka, Gubernur menjawab bahwa ia telah berbicara dengan Komandan TNI, yaitu Overste Warouw. Keduanya mencapai persetujuan untuk menerima mereka, sekalipun keadaan belum aman sama sekali. Ke duanya berpendapat bahwa jika mereka itu pulang ke negerinya, dengan pimpinan pemerintah yang sewajarnya mereka tidak akan mengacaukan keadaan, apalagi kalau mereka itu pulang sebagai rakyat biasa tanpa beruniform dan bersenjata.

Atas permintaan pemerintah Gubernur Maluku mengadakan pertemuan dengan pemimpin-pemimpin militer Maluku itu. Dan telah tercapai kesepakatan bahwa mereka akan pu-

lang untuk turut bersama membangun rakyat dan propinsi Maluku.

Sekembali ke Maluku Gubernur dan fihak TNI mengadakan persiapan seperlunya. Tetapi ternyata bahwa siasat dan propaganda Belanda lebih kuat, sedangkan dalam waktu peralihan itu pemerintah ragu-ragu dan tidak tegas, lagi pula kurang sekali penerangan dari fihak Indonesia kepada mereka tentang keadaan negara pada waktu itu. Maka terjadilah eksodus secara besar-besaran dari keluarga militer Maluku itu ke negeri Belanda. 21)

Apa terjadi dengan tentara "rms" Itu pula menjadi suatu tanggungjawab Gubernur Maluku. Sesudah mereka ditawan beberapa bulan, maka siapa yang sudah memasuki masa pensiun, dikembalikan ke dalam masyarakat dengan hak pensiun. Yang masih bisa dipergunakan dalam TNI dimasukkan ke dalam Batalyon 330 Divisi Siliwangi di Bandung. Di bawah pimpinan Panglima Divisi Siliwangi, Kolonel Kawilarang, maka ini diberi tugas untuk mengamankan Jawa Barat dari DI dan TII. Dengan demikian diselesaikan masalah yang pelik itu.

Menurut penilaian Gubernur Maluku mereka itu tertipu oleh orang-orang yang menyebut dirinya pemimpin-pemimpin intelektual "rms". "RMS" itu sendiri bukan suatu gerakan rakyat, sehingga ketika bekas tentara "rms" itu dialihkan ke dalam TNI, mereka menunjukkan ketaatan pada negara dengan penuh tanggungjawab, malahan mempertaruhkan jiwa-raganya untuk mengamankan negara dan bangsa Indonesia.

Untuk mengkomunikasikan semua kegiatan pemerintah propinsi Maluku kepada Rakyat, Jawatan Penerangan di bawah pimpinan D. Tahitu SH memainkan peran yang penting.

e. Meninggalkan Maluku.

Di dalam politik parlementer kekuasaan partai-partai besar menentukan kedudukan kabinet dan jabatan-jabatan

kunci, seperti jabatan Gubernur. Perkembangan politik pada waktu itu menentukan juga kedudukan Gubernur Latuharhary.

Di dalam kabinet Ali Sastroamidjojo yang I (Juli 1953 – Juli 1955) duduk 3 orang pimpinan PIR yang memegang kementrian-kementrian penting. Mr. Wongsonegoro menjadi Wakil PM I, Prof. Mr. Dr. Hazairin Menteri Dalam Negeri dan Prof. Ir. Roosseno Menteri Pekerjaan Umum. Tetapi pada tanggal 23 Oktober 1954 ke tiga menteri ini mengundurkan diri dari kabinet. 22)

Posisi Gubernur Maluku menjadi goncang, karena ia kehilangan *backing* dalam kabinet. Di daerah sendiri timbul aksi dari partai PNI, yang dipimpin oleh Kasim Soulissa, dan Masyumi yang telah kehilangan Wakil-ketuanya, A. Soulissa, untuk menggantikan Mr. J. Latuharhary. Di dalam suatu konferensi PNI, utusan dari Maluku mengusulkan penarikan Mr. Latuharhary. E. Pupella dalam suatu pertemuan dengan pimpinan PNI Sidik dan Mr. Ali Sastroamidjojo mengemukakan bahwa belum waktunya untuk menarik Latuharhary. Mr. Ali Sastroamidjojo mengemukakan akan diangkat seorang PNI asal Jawa sebagai penggantinya. 23)

Pada akhir 1954 kabinet mengambil keputusan untuk menarik kembali Mr. J. Latuharhary dan memperbantuannya pada Menteri Dalam Negeri. Tetapi bukan orang PNI atau Masyumi, melainkan orang PSI yaitu Djosan, Residen pada pemerintahan Propinsi Maluku, diangkat menjadi Gubernur Maluku yang ke 2.

Mohammad Padang, eks Gubernur Maluku (1959–1966), mengemukakan pendapatnya mengenai pemerintahan Latuharhary sebagai berikut :

”Latuharhary meletakkan dasar-dasar pemerintahan, menginsyafkan rakyat Maluku, bahwa tidak ada jalan lain kecuali mengikuti proklamasi RI. Perjuangan itu

tidak gampang. "RMS" masih ada pada taraf kekuasaan yang kuat. Tenaga-tenaga pejuang Maluku belum sempat semuanya ke Aombon. Sehingga Latuharhary terpaksa dengan tenaga-tenaga joang ada di sana menyusun pemerintahan. Ini tidak gampang. Kita harus mengakui bahwa beliaulah yang meletakkan dasar-dasar pertama. Jangan bicara tentang pembangunan fisik. Sampai waktu saya menjadi Gubernur, kita hanya bicara tentang pembangunan mental. Latuharhary meletakkan dasar dan saya melanjutkannya".

Bagi Mr. J. Latuharhary berakhir sudah suatu perjuangan yang panjang, penuh suka dan duka, penuh pengorbanan, untuk menghantarkan rakyat Maluku masuk ke alam kemerdekaan dan meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan Maluku dan rakyatnya dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ia telah merealisasikan mottonya:

Karena pohon sagu itu telah memberikan darah penghidupan itu akan menyuburkan pohon satu itu.

Latuharhary mencintai rakyat Maluku, rakyat Maluku mencintainya. Tetapi masa berpisah telah tiba!

"Selamat tinggal rakyatku yang ku cintai!
Amaaattttoooo!!!! Amaaattttoooo!!!

BAB IX

JOHANNES LATU HARHARY SEBAGAI SUAMI DAN AYAH

a. Antara Cinta dan Tanggung jawab

Gaya hidup Mr. J. Latuharhary adalah gaya hidup seorang cendekiawan yang wajar dan sederhana. Berasal dari suatu keluarga yang sederhana, berkembang dari masa sekolah rendah sampai masa mahasiswa di negeri Belanda, ia hidup jauh dari kemewahan. Di muka telah kita mengikuti bagaimana kehidupannya pada masa sekolah dan masa mahasiswa itu.

Di balik itu terpancar suatu kepribadian yang kuat, dengan harga diri yang tinggi dan ketajaman berpikir seorang sarjana hukum dan politikus. Pribadinya dalam pergaulan menyenangkan, mudah mendapat kawan karena gampang menangkap kalbu sesama dan mudah dimengerti orang. Di dalam organisasi dan pemerintahan berwibawa, berprinsip yang kuat, tetapi fleksibel dalam menilai pendapat orang yang berlainan prinsip dengannya.

Berhadapan dengan rakyat biasa ia menciptakan suasana untuk berdialog dengan memakai bahasa rakyat guna mengetahui isi hati rakyat. Ini terlihat dalam ia menangani masalah hak tanah rakyat di Jawa Timur sebagai advokat pembela rakyat. Lebih-lebih lagi ia sebagai gubernur memerlukan mendengar rakyat dalam perjalanan dinasnyanya. Apalagi rakyat Maluku yang berdiam di pulau-pulau yang sudah begitu lama hidup dalam alam penjajahan dan jauh daripada kemajuan.

Di antara kawan dan lawannya ada yang berpendapat ia seorang yang lamban. Penilaian ini mungkin pada saat-saat tertentu di mana diharapkan kegiatan semaksimal mungkin dari seorang pemimpin, maka *meester* dinilai kurang gesit menangani masalah yang dihadapi. Mungkin juga ia memberi

kepercayaan penuh kepada para pembantunya untuk menonjol dalam berbagai kegiatan pelaksanaan, yang menurut pendapat orang seharusnya Latuharhary-lah sebagai pemimpin lebih menonjol dan lebih giat bekerja.

Sebaliknya menurut penilaian para pembantunya yang terdekat, itulah gaya seorang pemimpin yang berhasil mengatur sistem kerja yang memberi tanggungjawab besar kepada bawahannya. Pembagian kerja dan tanggungjawab itu perlu untuk menghadapi dan memecahkan berbagai soal yang memerlukan seorang pemikir yang berwibawa dan tim kerja sebagai pelaksana.

Mr. Latuharhary tidak akan berhasil menghantar rakyat Maluku masuk ke alam kemerdekaan dan mendewasakan rakyat Maluku dalam alam kemerdekaan itu apabila dia tidak memiliki sifat-sifat seorang pemimpin, pemikir dan pekerja. Ia adalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan.

Itu pula terbayang dalam ia membimbing dan membina keluarganya. Dia harus membagi dirinya antara cinta dan tanggungjawab terhadap anak isterinya dengan cinta dan kewajiban terhadap nusa dan bangsa, khususnya terhadap suku bangsanya sendiri. Betapa besar korban yang harus ia berikan pada permulaan perjuangannya. Ia harus melepaskan kariernya sebagai Hakim Ketua Pengadilan Tinggi, suatu kedudukan yang menjamin kesenangan hidup bagi keluarganya, yang menjamin fasilitas hidup yang lebih baik, yang cukup memberi kegairahan hidup bagi anak-isterinya, bagi ayahnya dan sanak saudaranya. Itu semua ia lepaskan demi kepentingan perjuangan melawan kolonialisme guna kemerdekaan bangsanya.

Sebagai suami yang jauh lebih tua dari isterinya ia selalu membimbing isterinya menjadi dewasa. Yang ditanamkan ialah berfikir dan berusaha secara berdikari dan terlepas dari ketergantungan pada orang lain. Ibu Yet Latuharhary merasa bim-

bingan itu sangat bermanfaat pada waktu suaminya sudah tidak ada. Sebagai seorang ibu yang harus mengurus anak-anaknya, di antaranya empat orang yang masih di bawah umur, ia harus berusaha sendiri untuk menghidupkan anak-anaknya.

Sebagai ayah Mr. Latuharhary membina anak-anaknya ke arah berdikari juga. Di samping sebagai pelajar anak-anak perempuan dibimbingnya dalam salah satu ketrampilan sebagai bekal untuk berdiri sendiri atau berusaha sendiri misalnya dalam bidang musik menguasai tehnik permainan piano.

Kepada isteri dan puteri-puterinya yang tertua ia menanamkan cinta pada kebudayaan, terutama pada kebudayaan daerah Maluku. Ia membimbing mereka untuk menggali dan menciptakan kreasi-kreasi baru dalam bidang seni tari dan seni musik. Dan memang ibu Latuharhary dan puterinya Mansje terkenal dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan Maluku. Mansje sebagai isteri duta besar di Jerman Barat, Mayor Jendral J. Muskita, giat sekali dalam memperkenalkan kebudayaan Indonesia, termasuk kebudayaan Maluku, di Jerman Barat. Baru-baru ini pada permulaan Mei 1982, dalam wawancara dengan BBC siaran bahasa Indonesia, isteri duta besar kita itu mengakui bahwa cinta kepada kebudayaan Indonesia itu terutama diperolehnya dari almarhum ayahnya.

Suami isteri Latuharhary menciptakan suasana yang akrab dan tentram di dalam rumahtangga mereka dan keserasian antara cinta dan kewajiban terhadap nusa dan bangsa dan cinta dan kewajiban terhadap anak-anak mereka.

Keakraban keluarga itu dipelihara oleh Mr. Latuharhary, sebagai kepala keluarga, di waktu-waktu jam makan. Senantiasa keluarga Latuharhary berusaha supaya waktu jam makan, orang tua dan anak-anak duduk berkeliling meja untuk makan bersama. Pada kesempatan semacam ini, terlepas dari kesibukan-kesibukan tugas, bapak rumah tangga sempat berdialog

dengan anak isteri secara santai untuk mendengar kegiatan anak-anaknya, kemajuan mereka di sekolah, apa hobi dan kesenangan mereka, kawan-kawan mereka dan sebagainya. Ini suatu kebiasaan yang telah menjadi salah satu unsur keteraturan hidup berkeluarga.

Sewaktu di Ambon, dalam usaha mengatur waktu bagi keluarganya, maka di pantai Nusaniwe-Latuhalat yaitu di "Namalatu", berhadapan dengan Laut Banda, didirikan sebuah rumah peristirahatan yang serasi dengan keadaan alam dan tingkat hidup rakyat di negeri Nusaniwe dan Latuhalat (pulau Ambon). Ke sinilah setiap hari Minggu, sehabis kebaktian gereja, Mr. Latuharhary bersama anak isterinya pergi beristirahat, berenang-renang di air laut yang sejuk, bersih dan jernih. Sementara anak-anak mengumpulkan batukarang, kulit kerang (*bia*) atau bermain-main di pantai berpasir putih bersih.

Apa yang diusahakan pada tahun limapuluhan itu, sekarang dijadikan tempat rekreasi dan obyek pariwisata yang menarik.

"Nani seorang suami yang baik. Ia menanam "zelfstandigheid", percaya pada diri sendiri dan berdiri diatas kaki sendiri, pada anak-anaknya. Sayang bahwa ketiga puterinya yang tertua tidak sempat melanjutkan studi mereka, karena setamat SMA mereka dipinang lalu kawin. Terhadap keluarga dari ke dua belah fihak pergaulannya akrab dan menyenangkan", begitulah ibu Yet mengenangkan", begitulah ibu Yet mengenangkan suaminya yang ia cintai.

Bapak L. Lopulissa Sr (83 th) ketika diwawancarai menurut:

"Nani adalah seorang manusia yang penuh keyakinan, "vol overtuiging van hart en ziel". Dia dan Leimena "geestelijk een gebleven" (secara rohaniah adalah satu). Nani memang tegas, tetapi selalu dengan maksud baik.

Dalam memilih menantu ia paling keras (streng). Saya ingat pada Mansje dan Joost (Mayjen Muskita). Perkawinan ke dua anak itu ia serahkan urusannya kepada saya.

Tidak pernah ia ceriterakan sesuatu yang buruk tentang para pembantunya kepada orang lain. Dia terlalu jujur dan terlalu cepat percaya pada orang lain."

Petunjuk-petunjuk hidup dalam hubungannya dengan Penciptanya dan antaranya dengan sesama manusianya, ditimbanya dari dalam Alkitab. Dr. Pattiasina, sebagai pembantunya, sering bila ia datang pada malam hari, di waktu mana seisi rumah telah beristirahat, menemukan Mr. Latuharhary sedang tekun membaca Alkitab untuk mendengar pesan Allah kepada hambaNya. Dan baginya adalah petunjuk-petunjuk penting untuk memimpin rakyatnya menurut kehendak Tuhan. Keyakinan kepercayaan pada Yesus Kristus, Juru Selamatnya, disalurkan pula kepada anak-isterinya, sehingga tercipta suasana Kekristenan yang intim antara orang tua dan anak-anak.

Tetapi dalam bidang politik pada prinsipnya ia tidak menyetujui agama dicampurkan dengan politik.

Dalam bidang gerejani ia selalu menaruh perhatian besar bagi perkembangan agama dan kegiatan-kegiatan rohaniiah. Sebagai Gubernur Maluku ia memperjuangkan dibangunnya gereja pusat Gereja Protestan Maluku, yang pada tanggal 6 September 1952 diletakkan olehnya batu pertama.

Pada tahun-tahun terakhir dari hidupnya ia berbakti kepada Tuhan dalam ladang-NYA sebagai anggota Majelis Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat di gereja "Paulus", Taman Surapati, Jakarta.

Demikianlah kehidupan seorang ayah dan seorang suami yang harus membagi cintanya dan kewajibannya antara keluarga dan negara.

b. Selamat Tinggal Anak-isteriku dan Bangsaaku

Waktu berputar terus, usia memakan ketahanan fisik manusia. Perjuangan yang berat sedari masa muda mulai merongrong kesehatan Mr. Latuharhary.

Diperbantukannya di Departemen Dalam Negeri tanpa tugas tertentu, tanggungjawab dan wewenang yang seimbang dengan jabatannya semula sebagai gubernur, rupanya menimbulkan tekanan-tekanan psikologis. Timbul perasaan diri terpojok, yang bagi seorang pejuang sangat tidak enak rasanya.

Pada tahun terakhir dalam hidup Mr. Latuharhary penulis sering berkunjung ke rumahnya di Jln. Cimahi 21, dalam rangka meminta petunjuk-petunjuk bagi penulisan sebuah buku. Sering penulis menemukan Mr. Latuharhary duduk sendirian dan kelihatan melamun. Penulis masih ingat dalam pembicaraan dengan oom Bram Tahia (iparnya) pada waktu itu, dikemukakan oleh oom Bram, bahwa Mr. Latuharhary merasa tertekan di Departemen. Ia merasa tidak senang, karena tidak diberi tanggungjawab yang wajar. Dan inilah yang menimbulkan pikiran, sehingga ia sering termenung.

Sehari sebelum Mr. Latuharhary jatuh sakit, penulis datang ke rumahnya, untuk mengambil naskah buku tersebut di atas yang sudah dikoreksi olehnya. Itulah kali terakhir penulis bertemu dengan almarhum. Beberapa hari sebelumnya Mr. Latuharhary baru saja kembali dari perjalanan ke Riau mewakili Menteri Dalam Negeri. Hari Jum'at tanggal 6 Nopember 1959 ia sedang bersiap-siap untuk pergi ke rapat Majelis Gereja "Paulus". Pada waktu ia sedang tunduk untuk mengikat sepatunya, tiba-tiba ia jatuh pingsang. Isteri dan anak-anaknya yang berada di rumah menjadi panik. Dokter yang ditilpon ketika tiba mendapatkan Mr. Latuharhary sudah tidak sadar. Segera ia diangkut ke rumah sakit Cipto. Tetapi selama dua hari di rumah sakit keadaannya *in comma*. Kawan-kawan dan

kaum-keluarganya berdatangan untuk menjenguknya antara lain Moh. Padang. Ia sangat terkejut melihat Latuharhary ditempatkan di barak rakyat di bagian belakang.

"Seorang tokoh nasional, pejuang yang jujur, pengabdikan pada negara dan bangsa, pada saat-saat terakhir ditempatkan di barak rakyat, seolah-olah tidak ada tempat yang lebih baik dan lebih layak; sungguh sedih!" demikian tutur Moh. Padang.

Tanggal 8 Nopember 1959, Mr. Latuharhary menghembus nafas yang penghabisan. Ia dipanggil Allah Yang Maha Kuasa, tanpa sadar lagi. Tanpa meninggalkan sesuatu pesan kepada isteri dan anak-anak, tanpa berpamitan lagi. Sungguh sedih!

Jenazahnya dibaringkan di rumah kediamannya. Banyak orang yang mendengar berita kematiannya melalui RRI terkejut, karena beberapa hari yang lalu baru saling bertemu. Mereka datang melawat ke rumah duka antara lain bung Hatta dan isteri, ibu Fatmawati, para menteri dan isteri, kawan-kawan seperjuangan, masyarakat Maluku, eks anggota SA, para pejuang angkatan 45 asal Maluku dan lain-lain. Presiden tidak sempat datang karena berada di luar kota.

Selain tanggal 9 Nopember hari itu akan diadakan upacara pemakaman kenegaraan. Sedari pagi orang telah sibuk di rumah duka. Berpuluh karangan bunga bertaburan di halaman dan rumah. Ada dari Presiden Sukarno, dari Pemerintah, dari DPR, dari berbagai instansi sipil dan militer, dari partai-partai, dari kawan, handai tolan dan kaum kerabat. Semuanya merasa sedih kehilangan seorang teman seperjuangan, seorang bapak, seorang pemimpin yang baik.

Di kantor ruang kerjanya berbaring almarhum dalam peti, berpakaian setelan *cream* gading, ditunggu oleh putera-puterinya dan sanak saudaranya. Ibu Yet Latuharhary berkebaya

hitam duduk di kamar tamu yang telah dikosongkan, diapit oleh Ibu Fatmawati dan Ibu Leimena. Di sekelilingnya duduk ibu-ibu lainnya. Semuanya membisu, semuanya turut berduka. Di lain-lain kamar, di halaman belakang dan depan, di jalan duduk atau berdiri beratus orang yang datang untuk memberi penghormatan terakhir kepada almarhum.

Sekitar jam 9.30 seorang pendeta memimpin upacara kebaktian dalam mana doa dinaikkan bagi keselamatan arwah almarhum.

Selesai kebaktian yang pendek ini seorang wakil dari Departemen Dalam Negeri membaca riwayat hidup almarhum. Kemudian hadirin dipersilakan memberi penghormatan terakhir. Berdesak-desakan tetapi teratur, masing-masing dengan perasaan turut berduka, orang-orang bergerak berjalan mengitari peti mayat. Begitu selesai dan peti hendak ditutup terdengar jeritan dan isak tangisan anak-anaknya. Ibu Yet membungkuk dan memberi ciuman terakhir kepada sang suami yang tercinta, diikuti oleh anak-anaknya.

Peti jenazah yang ditutupi sang-saka Merah - Putih kemudian diusung, lalu rombongan bergerak perlahan-lahan menuju gereja "Paulus" tidak jauh dari rumah duka.

Gereja telah penuh dengan jemaat. Rombongan para pendeta dan Majelis Gereja menyambut usungan peti jenazah diantarkan ke depan dan dibaringkan di situ. Pendeta menaikkan mimbar dan upacara kebaktian terakhir bagi almarhum Mr. J. Latuharhary, anggota Majelis Gereja tersebut. Begitu terkesan dan terharu isi khotbah pendeta sehingga banyak orang cucurkan airmata, mengenangkan kebaikan almarhum. Lagu-lagu rohaniyah dan doa menutup kebaktian itu.

Kembali peti jenazah diusung menuju ke mobil-jenazah. Begitu usungan peti berada di luar terdengar komando
. tembaaak !!! dan berdentumlah salvo dari pasukan penghormatan ke empat angkatan, yang sejak

dari pagi telah berderet di depan gereja, diiringi oleh genderang yang bertalu-talu.

Sesudah segala sesuatu diatur dan siap, bergeraklah mobil-jenazah didahului oleh *voorrijders* dan pasukan penghormatan, diikuti oleh iring-iringan mobil yang panjangnya sekitar 2 km, menuju ke Taman Pahlawan Kalibata.

Di depan gerbang Kalibata disambut dengan salvo, lalu didahului oleh Inspektur Upacara, Dr. J. Leimena, mewakili Presiden dan Pemerintah, rombongan bergerak menuju ke liang lahat.

Upacara Kenegaraan dilangsungkan. Inspektur Upacara membaca riwayat hidup almarhum Mr. Johannes Latuharhary, kemudian disusul dengan sambutan Pemerintah, ditutup dengan ucapan terima kasih Negara Republik Indonesia dan Bangsa Indonesia kepada seorang puteranya yang terbaik.

Diiringi oleh salvo penghormatan terakhir dan bunya trompet yang memilukan disertai bunyi genderang yang mengharukan, peti jenazah diturunkan ke liang lahat. Pendeta bergerak maju dan menaikkan doa bagi arwah almarhum agar diberi tempat di sisi Tuhan seraya diberi kekuatan iman bagi anak-isteri dan kaum keluarga yang ditinggalkannya.

Sesudah liang lahat ditutup dan ditimbun tanah dan perletakan karangan bunga yang didahului oleh Inspektur Upacara, maka pendeta A. Tahya (oom Bram) atas nama keluarga Latuharhary—Pattirajawane menyampaikan terima kasih sebesar-bwsarnya kepada Presiden dan Pemerintah yang telah memutuskan memberi tempat peristirahatan terakhir kepada almarhum Mr. Johannes Latuharhary di Taman Pahlawan Kalibata. Suatu penghargaan yang tak akan dilupakan oleh seluruh keluarga dan anak cucu almarhum.

Demikianlah saat-saat terakhir dari Mr. J. Latuharhary, seorang abdi negara dan bangsa.

"Selamat tinggal bangsaku !!!!!!!!"

"Selamat tinggal isteri dan anak-anakku !!!!!"

Dia telah pergi tetapi semangat dan jiwa juangnya tetap membara di dada putera-puteri Indonesia untuk berjuang terus membangun negara dan bangsa Indonesia yang ia cintai.

Kehilangan suami begitu tiba-tiba, tanpa sesuatu pesan merupakan suatu pukulan berat bagi Ibu Yet dan anak-anak. Almarhum meninggalkan keluarga tanpa harta kekayaan apa pun. Rumah pun tidak dimiliki keluarganya. Rumah yang mereka diami adalah rumah sewaan. Hanya ada sebuah mobil dinas, mobil gubernur yang dibawanya dari Maluku, yang boleh dibelinya secara menyicil. Suatu perjuangan berat menantikan ibu Yet, karena ia harus menghidupkan dan menyejahterakan anak-anaknya. Dengan bantuan kawan-kawan antara lain Pak Gatot Soebroto, ibu Yet bisa berusaha sendiri untuk mempertahankan hidup keluarganya. Kemudian atas tawaran kawan-kawan ia berangkat ke Kairo untuk mengurus wisma Indonesia di sana. Beberapa tahun lamanya ia tinggal di Mesir. Kesempatan ini memungkinkannya untuk memelihara dan menyejahterakan anak-anaknya.

Sepanjang hidupnya almarhum suaminya tidak memikirkan untuk mengumpulkan kekayaan. Tentang hal ini Moh. Padang, eks Gubernur Maluku (1959 – 1966), penerus perjuangan almarhum Latuharhary, mengatakan :

"Yang saya betul-betul merasa bangga, ia seorang pejuang yang miskin. Kalau ada orang yang bicara tentang kekayaannya itu omong kosong. Latuharhary sama miskinnya dengan oom Patty dan oom Nunu Siyaranamual. Orang boleh bertentangan politik dengan Latuharhary, tetapi mengenai perjuangannya, kejujurannya dan pengabdianya kepada tanah air, jarang kita temukan bandingannya. Seorang pejuang yang miskin yang pada saat-saat

terakhir hidupnya, tidak bisa membayar biaya rumah sakit di St. Carolus atau di Cikini, melainkan diletakkan begitu saja di barak rakyat dalam keadaan in comma. Tragis, sedih!”

Negara dan bangsa Indonesia tidak lupa akan jasa-jasa almarhum. Ia diberi tempat beristirahat di Taman Pahlawan Kalibata. Pada tanggal 17 Agustus 1960 ia dianugerahkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia *Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Tingkat III* atas jasa-jasanya yang luar biasa terhadap nusa dan bangsa.

Tanggal 20 Mei 1961 ia dianugerahkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia *Tanda Kehormatan Satyalantjana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan*.

Pada tanggal 19 April 1982 Dewan Harian Nasional Badan Penggerak Pembina Potensi Angkatan 45 menganugerahkan kepada almarhum dan empat gubernur Seberang yang pertama *Piagam Penghargaan* (lihat appendix).

Dalam tahun 1966 Pemerintah memberi nama "Johannes Latuharhary" kepada sebuah kapal barang (10.000 ton), yang peluncurannya diadakan di Gdansk-Polandia oleh isteri almarhum. Kapal itu kemudian ditahbiskan di Ambon.

Dalam tahun 1972 Pemerintah DKI Jakarta Raya memperingati jasa-jasa almarhum dengan memberi nama "Jln. Latuharhary SH" kepada Jln. Krakatau – Jln. Merak di daerah Menteng. Dalam 1976 sebuah jembatan baru di Jln. H. Rasuna Said – Kuningan, Jakarta, diresmikan dan diberi nama "Jembatan Latuharhary".

Pemerintah Kotamadya Ambon memperingati jasa-jasa Latuharhary, baru pada tahun 1978, jauh terlambat, dengan mengubah nama Jln. Kemakmuran menjadi Jln. Johannes Latuharhary.

Sebuah "Yayasan Mr. J. Latuharhary" di Ambon bergerak dalam bidang persuratkabaran dan menerbitkan mingguan "Sinar Harapan" edisi Maluku Yayasan ini didirikan kira-kira tahun 1965.

Berbahagialah Ibu Yet Latuharhary yang memiliki seorang suami dan ayah, seorang patriot bangsa. Kiranya ia menjadi suri tauladan bagi kita yang masih hidup dan bagi generasi muda sekarang ini dan yang akan datang untuk melestarikan perjuangan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Appendix I

PIAGAM
TANDA KEHORMATAN
PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA
MENGANUGERAHKAN
TANDA KEHORMATAN BINTANG MAHAPUTERA
TINGKAT III
KEPADA
MR. J. LATUHARHARY
ATAS DJASANJA JANG LUAR BIASA TERHADAP NUSA
DAN BANGSA

Djakarta, 17 Agustus 1960
Presiden/Panglima Tertinggi
Angkatan Perang Republik Indonesia

ttd.

Soekarno

Appendix II

**PIAGAM
TANDA KEHORMATAN
PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA
MENGANUGERAHKAN
TANDA KEHORMATAN SATYALENTJANA
PERINGATAN PERDJOANGAN KEMERDEKAAN
KEPADA
MR. J. LATUHARHARY (almarhum)
EX GUBERNUR DIPERBANTUKAN PADA DEPARTEMEN
DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH**

**Djakarta, 20 Mei 1961
A/n. Presiden/Panglima Tertinggi
Angkatan Perang Republik Indonesia
Pd. Presiden**

ttd.

Djuanda

Appendix III

Djakarta, 22 – 8 – 2605

Saja, Ir. Soekarno, Pemimpin Besar Bangsa Indonesia,

I. Mengangkat sebagai wakil diseloeroeh daerah :

- a. Sumatra
- b. Borneo
- c. Selebes
- d. Sunda Ketjil
- e. Maloekoe

bertoeroet :

- a. tn. Mr. Teukoe Hasan
- b. tn. Ir. Pangeran Mohd. Noor
- c. tn. Dr. G.S.S.J. Ratu Langie
- d. tn. Mr. I Goesti Ketoet Poedja
- e. tn. Mr. J. Latuharhary

II. Mewajibkan beliau serta memberikannja koeasa oentoek menjelenggarakan segala kepoetoesan jang diambil dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan dan oentoek mewoedjoedkan tjita2 jang lain, jang telah dilahirkan dalam sidang terseboet.

Pemimpin Besar Bangsa Indonesia

Tertanda

SOEKARNO

(Dikutip dari brosur Dewan Harian Nasional Angkatan 45).

Appendix IV

DEWAN HARIAN NASIONAL BADAN PENGGERAK PEMBINAAN POTENSI ANGKATAN- 45

SETELAH MENELITI dengan secermat-cermatnya, serta mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh, maka untuk memupuk jiwa dan semangat patriotisme demi kepentingan persatuan dan kesatuan nasional oleh Dewan Harian Nasional Badan Penggerak Pembina Potensi Angkatan '45 menganugerahkan

PIAGAM PENGHARGAAN

KEPADA : a. Mr. Teukoe Mohamad Hasan
b. Ir. Pangeran Mohd. Noor
c. Dr. G.S.S.J. Ratu Langie
d. Mr. I Goesti Ktoet Poedja
e. Mr. J. Latuharhary

Atas jasa-jasanya sebagai pejuang kemerdekaan, yang telah menunaikan tugasnya dengan baik menyampaikan kepada rakyat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku; semua Keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945.

Piagam Penghargaan ini dimaksudkan juga sebagai tanda terima kasih segenap rakyat dan keluarga besar Angkatan 45.

Jakarta, 19 April 1982

KETUA UMUM

**Tertanda
(SURONO)**

(Dikutip dari brosur Dewan Harian Nasional Angkatan 45)

APPENDIX V

KELUARGA MR. J. LATU HARHARY DAN YET PATTIRADJAWANE

No.	N a m a	Tempat kelahiran	Tanggal kelahiran	Pendidikan terakhir	Kawin dengan
1.	Mansje	Surabaya	15-6-1932	SMA	Mayjen J. Muskita, Duta Besar di Jer- man Barat
2.	Wiesje	Mojokerto	7-5-1933	SMA	J. Tamaela
3.	Audy	Malang	15-1-1935	SMA	B. Amanupunyo
4.	Ludwig (Ludy)	Jakarta	12-1-1945	University of Chibu (Japan)	Tokiko Shimazaki
5.	Tity	Yogyakarta	8-12-1946	SKKA	Achmad Djuaris
6.	Mona	Jakarta	5-10-	SMA	Drs. A. Pattipei- luhu
7.	Johny	Ambon	24-11-1953	Fak. Hukum UI (2 th.)	Anggy Sanjoto.

CATATAN

BAB I

- 1) Brugmans, hal. 116-117
- 2) *Ibid.*, hal. 183
- 3) Wawancara dengan Edu Latuharhary
- 4) Burgmans, hal. 176-177
- 5) Wawancara dengan Ny. Latuharhary
- 6) Keterangan tertulis Henk Risakotta
- 7) Brugmans, hal. 322-323
- 8) *Ibid.*, hal. 305-312.

BAB II

- 1) Keterangan tertulis Ibu B. Wenno
- 2) Wawancara dengan Edu Latuharhary
- 3) Brugmans, hal. 279-282
- 4) Mr. Soebardjo, hal. 46, 92, 154.
- 5) Wawancara dengan Ny. Latuharhary.
- 6) A. TH. Manusama, "*Beknopte Geschiedenis*"
- 7) Drs. M. Sunyata, biografi "Prof. Dr. W.Z. Johannes" hal. 77-88 lamp. I.
- 8) A. TH. Manusama, "*Beknopte Geschiedenis*", hal. 5. Istilah nasional di sini berarti nasional suku/daerah.
- 9) Bahasa Belanda menjadi matapelajaran di kedua sekolah itu untuk memungkinkan para pelajar menempuh ujian masuk sekolah lanjutan di Jawa.
- 10) Sekolah-sekolah itu disebut "*Ambonsche School*" yang didirikan khusus untuk menampung anak-anak militer ketiga golongan tersebut. Tanggal 2-2-1879 didirikan "*Ambonsche School*" yang pertama di Magelang.
- 11) Tahun 1883 Mr. van Deventer bekerja di Ambon sebagai grifir. Ia kenal masyarakat Maluku dengan baik.
- 12) f = *gulden*, uang Belanda. f 0,50 = lima puluh sen.

- 13) Permainan rakyat ini dimainkan oleh tua dan muda yang duduk dalam sebuah lingkaran, berpegang pada seutas tali atau benang. Pada tali itu dijalkan sebetuk cincin, yang berpindah dari tangan ke tangan sambil para pemain nyanyikan lagu tersebut di atas. Bila saat diperintahkan untuk berhenti menyanyi sedangkan cincin itu terdapat pada salah seorang pemain, maka dia akan dihukum.
- 14) Keterangan Edu Latuharhary.
- 15) Subardjo, "Otobiografi", hal. 117-118.
- 16) Wawancara dengan Mr. Soenario. Ia datang ke Nederland tahun 1924 untuk melengkapi studinya, karena sudah memperoleh gelar Mr. pada "*Rechts Hoge School*" di Batavia. Ia tinggal di Nederland sampai tahun 1926. Tahun 1925-1926 menjadi Sekr. II PI.
- 17) Wawancara dengan Mr. Sunario.
- 18) Soebardjo, hal. 188. Mr. Subardjo kembali ke Indonesia tahun 1934.
- 19) Wawancara dengan Edu Latuharhary.

BAB III

- 1) I.O. Nanulaitta, "Timbulnya Militerisme Ambon", hal. 111.
- 2) Sekolah jenis ini tidak terdapat di Maluku.
- 3) Blumberger, hal. 46.
- 4) *Ibid.*, hal. 46.
- 5) *Nederlandsch Indische Artsenschool* didirikan dalam tahun 1913 sebagai afiliasi dari STOVIA (Brugmans, hal. 347).
- 6) Berarti maju terus, pantang mundur.
- 7) Blumberger, hal. 46-47.
- 8) Leirissa, hal. 58-59.
- 9) Bahan-bahan mengenai SVJA dari dokumentasi Persatuan Olahraga Meluku (POM), Jakarta.

- 10) Panitia buku: Mengenang Dr. J. Leimena "Kewargaan Negara yang bertanggung jawab", hal. 6-7. Dr. J. Leimena (Oom Jo) adalah seorang putera Indonesia yang besar yang berkali-kali menjadi menteri/wakil perdana menteri/pejabat Presiden.
Dr. Rehatta adalah seorang yang harum namanya di lapangan hijau dan seorang dokter terkenal di Surabaya.
- 11) Mr. J. Latuharhary, "Azab Sengsara". hal. 34.
- 12) "Mena Moeria", Desember 1922.
- 13) *Ibid.*
- 14) *Ibid.*
- 15) Perserikatan Pegawai Pengadilan Bumiputra.
- 16) "Mena Moeria", Desember 1922.
- 17) A.M. Sangaji, seorang perintis kemerdekaan, terkenal sebagai seorang anggota pimpinan Sarekat Islam. Di zaman revolusi kemerdekaan menjadi salah seorang pemimpin Masyumi. Ia ditembak mati oleh gerombolan pemuda liar di rumah isterinya di Jetis, Yogya, dalam bulan Maret atau April 1949 (clash ke II). Masyarakat Maluku di Yogya pada waktu itu merasa terpukul sekali dan marah. Para pejuang dalam lasjkar "Pattimura" mengejar para pembunuh itu. Jalan di ujung Utara Jetis diberi nama Jalan A.M. Sangaji untuk memperingati Jasa-jasanya bagi negara dan bangsa.
- 18) "Mena Moeria", Maret-April 1923.
- 19) Dalam tahun 1924 didirikan di Surabaya NV Handels Landbouw-en Industrie Vereeniging "Nusa Ina" oleh J.F. Tuwanakotta, J.J. Sillooy, Ch. Wattimena, J.B. Pattinaya, M. Manuhua, F. Hengst dan A. Salhuteru. "Nusa Ina" di Ambon adalah cabangnya (Mr. Latuharhary, "Azab Sengsara", hal. 32).
- 20) Kerchman, hal 500.

- 21) Tromp. hal. 286
- 22) Latuharhary, "Azab Sengsara", hal. 39.
- 23) "Mena Moeria", Desember 1922.
- 24) Latuharhary, "Azab Sengsara", hal. 39
- 25) *Ibid.*, hal. 55, Lihat juga Leirissa, hal. 67-68.
- 26) "Soeara Ambon", Agustus 1924; Leirissa, *loc.cit.*, hal. 68.
- 27) *Ibid.*, hal. 69, Blumberger, hal. 47, 48.
- 28) *Ibid.*, hal. 70
- 29) "Soeara Ambon", 20-10-1924; Leirissa, *loc.cit.*, hal. 71.
- 30) "Soeara Ambon", Januari 1925. Leirissa, *loc.cit.*, hal. 86.
- 31) *Ibid.*, Oktober 1924. Leirissa, *loc.cit.*, hal. 73.
- 32) *Ibid.*, Januari 1925. Leirissa, *loc.cit.*, hal. 72.

BAB IV

- 1) Wawancara dengan E.U. Pupella. "Tertarik pada motto ini, diucapkan oleh Meester dalam suatu rapat di Makassar, yang beta hadiri, maka beta masuk menjadi anggota SA", demikian Pupella. Kalau orang Maluku bicara tentang "Meester" maka yang dimaksudkan Mr. J. Latuharhary, karena dialah putera Maluku yang pertama-tama meraih gelar itu dan terkenal dalam perjuangan menuju kemerdekaan bangsa.
- 2) "Mena Moeria", 22 Desember 1922.
- 3) Wawancara dengan Ny. Latuharhary dan Edu Latuharhary.
- 4) Wawancara dengan Edu Latuharhary.
- 5) Pringgogidigdo, hal. 71, 88, 89.
- 6) Blumberger, hal 302.
- 7) "Haloean", Agustus 1929. Leirissa Loc cit hal. 76
- 8) Blumberger, hal 302.
- 9) Blumberger, hal 302.
- 10) Blumberger, hal 303.

- 11) Mr. J. Latuharhary, "Azab Sengsara", hal 38. Blumberger, hal. 302.
- 12) Blumberger, hal 302.
- 13) "Halocan", 1930. Leirissa loc. cit., hal. 80.
- 14) A. Tahija yang dikenal dengan panggilan Oom Bram, adalah ipar Mr. J. Latuharhary. Ia kawin dengan Tante Putih, kakak perempuan dari Ny. Latuharhary Ia meninggalkan Ambon menuju Yogya. Di sini ia mendirikan asrama yang menampung pelajar-pelajar Maluku. Di asrama Bintaran Tengah 2, Oom Bram berhasil membuka mata para pelajar Maluku akan perjuangan nasional. Penulis pun yang kerap kali berlibur di Yogya, turut mengecap pengaruh dari pada para penghuni asrama ini. Dalam revolusi fisik asrama ini merupakan salah satu pusat kegiatan PIM, Lasykar Pesindo Maluku. Oom Bram kerja rapat sekali dengan Ki Hajar Dewantara.
- 15) Leirissa, hal. 88
- 16) "Sinar Maloekoe", September 1928. Leirissa, *loc. cit.*, hal. 88
- 17) *Ibid.*, April 1920 . Leirissa. *loc. cit.*, hal 81
- 19) Blumberger, hal 303; Leirissa, hal. 82.
- 20) Wawancara dengan Ny. Latuharhary.
- 21) Blumberger, hal 304.
- 22) Pada waktu itu dr. Sitanala, ahli penyakit kusta (leproloog) bekerja di Semarang. Dokter ini adalah bekas sekretaris PI di negeri Belanda. Kemungkinan mosi tersebut diambil atas desakannya, melihat betapa merana orang-sakit kusta di Ambon.
- 23) Blumberger, hal. 304.
- 24) Mr. J. Latuharhary, "Azab Sengsara", hal. 37.
- 25) "Sinar Maloekoe", Juni 1931. Leirissa, *loc. cit.*, hal. 82/83.

- 26) Leirissa, hal. 83. *Ibid.*, Januari 1932. Leirissa, *loc. cit.*, hal. 84.
- 27) *Ibid.*, hal. 84.
- 28) Nanulaitta, "Ir. Haji Juanda", hal. 36.
- 29) "Sinar Maloekoe", Desember 1932. Leirissa, *loc. cit.*, hal. 92.
- 30) Wawancara dengan Edu Latuharhary.
- 31) Keterangan Ny. Latuharhary.
- 32) Dr. L. Tamaela mempunyai dua orang puteri, dr. Deetje Tamaela dan Dien Tamaela. Dien meninggal dalam usia masih remaja. Persahabatannya dengan penyair Chairil Anwar dikenangkan dan diabadikan oleh pemuda itu dalam sajaknya "Beta Pattirajawane".
- 33) Keterangan Ny. Latuharhary.
- 34) Wawancara dengan Edu Latuharhary. Keterangan tertulis Nn. Bets Wenno.
- 35) Wawancara dengan Edu Latuharhary dan de Fretes. Keterangan tertulis Henk A. Risakotta.
- 36) Edu Latuharhary, "Hubungan mereka di negeri Belanda dituturkan oleh Andi Tupamahu kepada saya".
- 37) Keterangan Nn. B. Wenno.
- 38) Keterangan Ny. Latuharhary.
- 39) *Ibid.*
- 40) Wawancara dengan E.U. Pupella.
- 41) Slamet Mulyana, jilid I, hal. 216. Pluvier, hal. 65.
- 42) Latuharhary, "Azab Sengsara", hal 36. Bahasa Indonesia yang dipakai disempurnakan oleh penulis.
- 43) Wawancara dengan E.U. Pupella.
- 44) Dokumentasi Ny. Latuharhary.
- 45) Nanulaitta, "Ir. Haji Juanda", hal 60-61.
- 46) Pringgodigdo, hal 93.
- 47) Siwabessy, "Upuleru", hal 14 - 15.
- 48) Dokumentasi POM Maluku.

- 49) Keterangan Ny. Latuharhary.
- 50) Wawancara dengan Pupella, Lembaga pendidikan Nasional ini berjalan sampai tahun 1966, lalu di hentikan karena kesulitan biaya.
- 51) Wawancara dengan Pupella.
- 52) "Ambon Baroe", 24 Februari 1940.
- 53) *Ibid.*, 4 Mei 1940.
- 54) *Ibid.*
- 55) *Ibid.*

BAB V

- 1) Kisah penangkapan Mr. J. Latuharhary berdasarkan wawancara dengan Ny. Latuharhary.
- 2) Mr. Sudjono, seorang tamatan Leiden, sejak tahun 1931 bekerja di Tokyo di sekolah Bahasa Asing. Dia turut serta mendarat dengan tentara Jepang di Jawa dan mempunyai kedudukan penting dalam pemerintahan. Dia bekas anggota PI dan dikenal oleh Mr. Latuharhary.
- 3) Nono Tanasale dan Robert Akyuwen akan memainkan peranan dalam API-AMBON pada waktu revolusi 1945.
- 4) Wawancara dengan J. de Fretes. Pada waktu itu ketua organisasi pemuda Ambon-Timor.
- 5) Ceramah Dr. F. Pattiasina di Gedung Joang Menteng 31, Jakarta, 7 September 1978.
- 6) Wawancara dengan J. de Fretes.
- 7) Wawancara dengan dr. F. Pattiasina.
- 8) Penulis ditunjuk oleh Mr. Latuharhary untuk mendaftarkan orang-orang Maluku di daerah Purwokerto.
- 9) Wawancara dengan Kolibonso.
- 10) Penulis sebagai guru pendidikan jasmani di SMP laki-laki Purwokerto turut menggembleng para pelajar, anggota *Gakutotai* Purwokerto, yang kemudian ternyata berman-

faat bagi mereka yang tergabung dalam Tentara Pelajar dan IMAM dalam perang kemerdekaan.

- 11) Kahin, hal 100. Soebardjo, hal 263–264.
- 12) Kahin, hal 111–114. Adam Malik, hal 24 – 34.
- 13) Wawancara dengan de Fretes. Julius Tahya seorang ex-opsir KNIL, ajudan Jenderal Spoor, Kepala perwakilan NIT di Jakarta. Sesudah kemerdekaan bergerak di lapangan perminyakan. Ia diangkat menjadi general manager Caltex–Pacifik di Indonesia
- 14) Lihat Soebardjo hal 277/278.
- 15) Soebardjo, hal 280.
- 16) Yamin, Naskah I' sidang 11 Juli 1945. Boland hal 24. Beberapa minggu kemudian Mukadimah ini disebut oleh Muh. Yamin : *Djakarta Charter*.
- 17) Boland, hal 27–28. Keanggotaan telah ditambah dengan 6 orang. Yamin, Naskah I, hal. 145, 184.
- 18) Yamin, Naskah I, hal 261–262. Boland. hal 30.
- 19) Wawancara dengan J. de Fretes dan dr. Pattiasina.
- 20) Boland, hal 30.
- 21) Menurut dr. Pattiasina diceriterakan oleh Mr. Latularhari kepadanya beberapa minggu sebelum ia wafat.
- 22) Yamin, Naskah I. Boland, hal 31–32.
- 23) Wawancara dengan J. de Fretes, dr. Pattiasina dan M Ruhupatty.

BAB VI

- 1) Hatta, Sekitar Proklamasi, hal 60–61. Kahin, hal 127.
- 2) Hatta, hal 19.
- 3) *Ibid*.
- 4) *Ibid.*, hal 25–27.
- 5) *Ibid.*, hal 28–31. Subardjo, hal 305–310.
- 6) Subardjo, hal 310–323. Yasni, Bung Hatta menjawab, hal 134–135.

- 7) Subardjo, hal 323.
- 8) *Ibid.*, hal 336–339. Hatta, hal 48–53.
- 9) Ucapan Wikana dimuka membenarkan kekhawatiran masyarakat Maluku.
- 10) Hatta, Sekitar Proklamasi, hal 57.
- 11) *Ibid.*, hal 58–59.
- 12) (*ibid.*, hal 61.
- 13) Yamin, Naskah I.
- 14) Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 hal 48, Kol. 2.
- 15) Mengenai susunan Kabinet, lihat "Pengumuman Pemerintah", 19 Agustus 45.
- 16) Kahin, hal 139.
- 17) Nasution, jilid I, Proklamasi, hal 235–236. Soebardjo, hal 238.
- 18) Kahin, hal 151.
- 19) *Ibid.*, hal 152–153.

BAB VII.

- 1) Wawancara dengan m. Ruhupatty dan Mias Supusepa.
- 2) Di Keresidenan Banyumas penulis harus turut menyelesaikan dan mengeluarkan para tahanan kira-kira 300 orang Ambon, Manado, Timor dan Jawa, tua muda dan anak-anak, dari kamp tahanan pemuda.
- 3) Wawancara dengan J. de Fretes.
- 4) Subardjo, *op.cit.*, hal 381–382.
- 5) Berita Republik Indonesia, Tahun I No. 1, hal 7 kolom 4.
- 6) Datang ke Purwokerto Wim Tutupoly dan Rob Akyuwen memberi tugas kepada penulis untuk membuka dan mengespalai Kantor Pembantu Gubernur Maluku di Purwokerto. Tanggal 5 Desember 1945 kantor tersebut diresmikan oleh Residen Banyumas, Mr. Isqak Tjokrohadisurjo, teman seperjuangan Mr. Latuharhary.

- 7) Dokumentasi penulis, wawancara dengan de Fretes, Ruhupatty dan Supusepa.
- 8) Dari uraian dr. Pattiasina di Gedung Joang, Menteng Raya 31, Jakarta 7 September 1978, "Peranan API-AMBON".
- 9) *Ibid.*
- 10) Nasution, jilid ke 2, hal 238.
- 11) Wawancara dengan dr. Pattiasina.
- 12) Teu Lususina, "Ambon Selajang Pandang" I. *op.cit.*, hal 16.
- 13) dr. Pattiasina, ceramah.
- 14) Wawancara dengan Mias Supusepa.
- 15) Wawancara dengan Moh. Padang dan Kolibonso. Lihat selanjutnya "Upuluru" dan Leirissa.
- 16) Berita Republik Indonesia Tahun I, no. 1, halaman 7 kolom 4.
- 17) Wawancara dengan Moh. Padang.
- 19) Soepardo, hal 73.
- 20) Catatan J. Westplat, dan "Mengenal dari dekat Komando Daerah Militer XV/Pattimura", hal 16-17.
- 21) "Mengenal dari dekat", hal 22-24. Leirissa, hal. 116-124.
- 22) Wawancara dengan de Fretes dan Moh. Padang. Kahin, hal 201, wakil Maluku 5 orang.
- 23) Kahin, hal 205.
- 24) Nasution, jilid 6, "Perang Gerilya Semester I", hal 374.
- 25) *Ibid.*, jilid 7, "Periode Renville", hal 11.
- 26) *Ibid.*, jilid 8, "Pe
- 26) *Ibid.*, jilid 8, "Pemberontakan PKI, hal 107.
- 27) *Ibid.*, hal 108.
- 28) *Ibid.*, jilid 6, hal 33.
- 29) Penulis turut bergerilya di kaki Gunung Slamet dengan Tentara Pelajar. Pada akhir tahun 1947 ia ke Yogyakarta.

Permulaan 1948 ia dipilih menjadi ketua PIM Cabang Yogyakarta.

- 30) Keanggotaan penulis ini atas usul PIM dan atas persetujuan Mr. Latuharhary.

BAB VIII

- 1) Lihat "Mengenal dari dekat Komando Daerah Militer XV/Pattimura".
- 2) Kesaksian E.U. Pupella dalam pengadilan di Yogya "Manuhutu dan Wairisal adalah termasuk orang-orang yang berpendirian kuat untuk mempertahankan negara kesatuan", J.A. Puar, *op. cit.*, hal 185.
- 3) J.A. Puar, *op. cit.*, hal 34–35.
- 4) Wawancara dengan J. de Fretes dan Kolibonso.
- 5) Lihat selanjutnya J.A. Puar, hal 65.
- 6) Wawancara dengan E.U. Pupella.
- 7) Wawancara dengan J. de Fretes.
- 8) Penulis mengalami pertempuran ini, karena ia dan keluarga berlindung di trowongan perlindungan Jepang di bawah bukit tepat di belakang hotel itu.
- 9) Keterangan tertulis E. Lesilolo.
- 10) Keterangan tertulis Wim Tutupoly.
- 11) *Ibid.*
- 12) Wawancara dengan Pupella.
- 13) Upacara percikan air dilakukan oleh fihak kedaton Ternate dalam tahun 1981 untuk menghentikan semburan lahar gunung berapi Gamalamo.
- 14) Keterangan tertulis Wim Tutupoly.
- 15) Keterangan tertulis Wim Tutupoly dan Ely Lesilolo.
- 16) Keterangan tertulis Wim Tutupoly.
- 17) Kutipan dari "Laporan" Gubernur Maluku kepada Menteri Dalam Negeri berhubungan dengan peristiwa 20 Mei 1954. Dokumentasi E. Lesilolo.

- 18) Keterangan tertulis E. Lesilolo.
- 19) Dokumentasi E. Lesilolo.
- 20) A. Souliissa pernah terlibat dalam pemerintahan "rms".
Ia adalah sekretaris Jenderal Dep. Dalam Negeri "rms".
- 21) Saran-saran Mr. Latuharhary kepada pemerintah dalam
rangka pengembalian orang-orang Maluku dari negeri
Belanda ke tanah airnya. Jakarta, 28 Nopember 1955.
Kokumentasi Ny. Latuharhary.
- 22) Herbert Feith, hal 238.
- 23) Wawancara dengan E.U. Pupella.

BIBLIOGRAFI

Antara, *Almanak Pers 1977*

Blumberger, Petrus J. TH., *De Nationalistische Beweging in Ned Indie*, H.D. Tjeenk Willink & Zoon NV 1931, Haarlem.

Boland B.J., *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, The Hague – Martinus Nyhoff, 1971.

Brackman, Arnold C. *Indonesian Communism, a history*, Frederick A. Praeger, New York, 1963.

Brugmans, I.J. Dr., *Geschiedenis van het Onderwijs in Batavia Brugmans, I.J. Dr.*,

Brugmans, I.J. Dr., *Geschiedenis van het Onderwijs in Nederland Indie*, J.B. Wolters, Gorningen Batavia 1938.

Departemen P & K, Dirjen Kebudayaan—Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, *Pemikiran Biografi, Kepahlawanan dan Kesejarah* (suatu kumpulan prasarana pada berbagai lokakarya) 1980–1981.

Ency Nederlands Indie, S – 5de deel 1927, *Sarikat Ambon*.

Feith, Herbert, *The Decline of Constitutional Democracy*, Cornell University Press, Ithaca, New York 1962.

Gani Ruslan A. Dr., *Resapkan dan Amalkan Pantjasila*, BP Prapantja, Djakarta (th?).

Gonggrijp, G. Prof. *Schets Eener Economische Geschiedenis van Ned Indie*, De Erven, F.Boh–NV, Haarlem 1949.

Goudoever, W.A. van, *Denpasar bouwte een huis*, RVD–Batavia C–Februari 1947.

Hatta, Moh. Dr., *Kumpulan Karangan*, Balai Buku Indonesia Jakarta, Amsterdam, Surabaya 1953.

– *Lampau dan datang*, 27–11–1956, Jambatan, Jakarta.

– *Sekitar Proklamasi*, Tintamas, Jakarta, 1969.

- Harjito, *Risalah Pergerakan Pemuda*, 1952.
- Yamin Moh. Prof. Mr., *Naskah Persiapan UUD 1945*, Jilid I, Yayasan Prapantja, Djakarta 1959.
- Yasni, Z. Dr., *Bung Hatta Menjawab*, wawancara dengan Dr. M. Hatta, Gunung Agung 1979.
- Kaam Ben van, *Ambon door de eewen*, uitgeverij In der Toren 1977.
- Kahin, George Mc Turnan, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca, New York 1959.
- Katoppo Aristedes (editor), *80 Tahun Bung Karno*, Sinar Harapan, Jakarta 1981.
- Kerchman J.W.M., *25 Jaren Decentralisati in Ned-Indie, 1915-1930*, Semarang, Juli 1930.
- Latuihamallo, P.D. Prof' Dr. cs (Panitia Buku kenangan Dr. J. Leimena), *Kewarganegaraan Yang Bertanggung Jawab, Mengenang Dr. J. Leimena*, BPK Gunung Mulia, Jakarta 1980.
- Latuharhary, J. Mr., *Azab Sengsara Kepoelaoean Maloekoe*, Pengurus Sarekat Ambon Tjabang Makassar, Makassar Mei 1932.
- Leirissa, Z., *Maluku dalam perjuangan Nasional Indonesia*, Lembaga Sejarah Fakultas Sastra Univ. Indonesia, 1975;
- Malik Adam, *Riwayat Proklamasi 17 Agustus 1945*, Widjaja, Djakarta 1962.
- Manusama, A, TH., *Beknopte Geschiedenis van de Vereeninging "Ambonsche Studiefonds"*, 1909-1917, Visser & Co 1917.
- Matulessy, D.SH., *Pattimura-Pattimura Muda Bangkit, memenuhi tuntutan sejarah*, Yayasan Christina Martha Tiahalu, Jakarta 1979.

- Meutia Farida Swasono, (penyunting), *Bung Hatta, Pribadinya dalam kenangan*, Penerbit Sinar Harapan & Universitas Indonesia 1980.
- Mook, H.J. van Dr., *Indonesia, Nederland en de Wereld*. De Brug—Opbouw, Batavia 1949.
- Nanulaita, I.O., — *Timbulnya Militerisme Ambon*, Bhratara, Jakarta 1966.
-, *Kapitan Pattimura*, Dep. P & K Ditjen Kebudayaan, Proyek Biografi Pahlawan Nasional, 1979.
-, *Ir. Haji Juanda Kartawijaya*, Dep. P & K Ditjen Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta 1980.
- Nasution, A.H. Dr., *Sekitar Perang Kemerdekaan*, Jilid 1 s/d 10.
- Overdijkink G.W. Dr., *Het Indonesische Probleem*, Martinus Nyhoff, 's Gravenhage 1946.
- Pluvier, J.M. Dr., *Overzicht van de Ontwikkeling der Nationalistische Beweging in Indonesie in de jaren 1930—1942*, W. van Hoeve, 's Gravenhage 1953.
- Pringgodigdo, A.K. Mr', *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Pustaka Rakyat 1950.
- Puar, Jusuf A., *Peristiwa Republik Maluku Selatan*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta 1956.
- Rosihan, Anwar (editor), *Mengenang Syahrir*, Gramedia, Jakarta 1956.
- Sejarah Militer Daerah Militer XV/Pattimura, *Mengenal dari dekat Komando Daerah Militer XV/Pattimura*, Ambon 1974.
- Shiller, Arthur A., *The Formation of Federal Indonesia 1945—1949*. W. van Hoeve LTD/The Hague, Bandung 1955.
- Simatupang, T.B. Jenderal, *Pemerintah, Masyarakat, Angkatan Perang*, Indira, 1960.

-, *Pelopor dalam Perang, Pelopor dalam Damai*, Yayasan Pustaka Militer, 1954.
- Siwabessy, G.A. Dr., *Upuleru*, Gunung Agung, Jakarta, MCML XXXIX.
- Slametjajana, *Nasionalisme sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia*, Jilid I, Balai Pustaka, Jakarta 1968.
- Subardjo Djojoadisurjo, *Kesadaran Nasional* – sebuah otobiografi, Gunung Agung, Jakarta, MCMLXXVIII.
- Soekarno Ir., *Indonesia Menggugat*, S.K. Seno, Jakarta 1951.
- Suyata Drs., *Biografi Prof. Dr. Z. Johannes*, Dep. P dan K, Jakarta 1979/1980.
- Supardo, *Pergerakan Pemuda Indonesia*, Kementerian PPK, Djakarta 1951.
- Suratmin Drs., *Dr. Sutomo*, Dep P & K, Ditjen Kebudayaan, Proyek Biografi Pahlawan Nasional, Jakarta 1976.
- Teu Lusulina, *Ambon I Selajang Pandang*, Jakarta 1950.
-, *Ambon II – Kembali Ke Pangkuan Ibu*, Jakarta 1951, (Teu Lusulina nama samaran Piet de Quelju).

HARIAN DAN MAJALAH

1. Mena Moeria, Semarang 1922 – 1923
2. Soeara Ambon, Ambon 1924 – 1933
3. Ambon Baru, Ambon 1938 – 1941
4. Merdeka, Jakarta 1945 – 1955.

DAFTAR WAWANCARA

1. Jakarta, tanggal 20, 28 Juni 1981 dan 26 Oktober 1981, *Ny. Latuharhary*, isteri almarhum.
2. Jakarta, tanggal 12 Agustus 1981, *Bapak Lopulissa L.J.*, 83 tahun, eks Kepala Kantor Pembantu Gubernur Maluku 1945 – 1947 di Bandung dan sekitarnya; eks Kepala Eksplotasi DKA Jawa Tengah, Anggota Kehormatan Badan Pembina Divisi Siliwangi. Pemegang Lencana Kemerdekaan dan Lencana Pembangunan.
3. Jakarta, tanggal 12 Agustus 1981, *M. Kolobonso*, eks Pejuang PRI Maluku Surabaya 1945. Anggota Pimpinan Divisi Pattimura 1946.
4. Jakarta, tanggal 12 Agustus 1981, *Mohammad Padang*, eks pejuang PRI Maluku Surabaya 1945. Anggota Pimpinan Divisi Pattimura 1946. Eks Gubernur Maluku yang ketiga. Eks anggota KNIP, Parlemen RIS dan RI.
5. Jakarta, tanggal 29 September 1981, *Dr. F. Pattiasina*, Pejuang angkatan 45, anggota pimpinan API-AMBON Jakarta. Eks Koordinator Pemerintahan Daerah Maluku sewaktu Mr. J. Latuharhary menjadi Gubernur Maluku (1950).
6. Jakarta, tanggal 30 September 1981, *Mr. Sunaryo*, eks mahasiswa di Universitas Leiden. Eks Menteri Luar Negeri Negari RI.
7. Jakarta, tanggal 27 Oktober 1981, *J.D. de Fretes*, Angkatan 45, eks ketua API-AMBON Jakarta. Eks Sekretaris, Kantor Gubernur Maluku 1945-1948. Eks diplomat, terakhir Duta Besar Luar Biasa di Kerajaan Nepal.
8. Jakarta, tanggal 27 Oktober 1981, *Edu Latuharhary*, 67 tahun, adik Mr. J. Latuharhary.
9. Ambon, 19 Nopember 1981, *H.A. Risakotta, MA*, peju-

ang pada masa revolusi di Surabaya. Pimpinan perjuangan di Saparua dan Tiouw. Eks Kepala SMA Ambon. Kepala Perpustakaan Negeri Dep. P dan K.

10. Ambon, tanggal 20, 21 Nopember 1981, *M. Ruhupatty*, 70 tahun. Eks kepala Kantor Pembantu Gubernur Maluku di Magelang. Pimpinan perjuangan di Saparua dan Tiouw (1949 — 1950) dalam Persatuan Rakayat Indonesia (PRI) dan Lotomena, Bersama dengan Risakotta menjadi korban penganiayaan "RMS" dan ditawan. Eks Kepala Pendidikan Masyarakat Propinsi Maluku.
11. Ambon, tanggal 22 Nopember 1981, *E.U. Pupella*, 70 tahun, eks Komisaris SA di Ambon, eks pemimpin partai Indonesia Merdeka (PIM) di Ambon. Angkatan parlemen NIT, RIS, RI.
12. Ambon, tanggal 23 Nopember 1981, *Frans Manuhutu*, 79 tahun, ketua SPS Daerah Maluku dan Irian Barat. Eks pegawai Dep. Penerangan sewaktu Latuharhary menjadi Gubernur.
13. Ambon, 23 Nopember 1981, *Mias Supuseppa*, 75 tahun, eks staf pimpinan API—AMBON di Bandung dan sekitarnya. Eks pegawai Kantor Gubernur Maluku di Yogyakarta. Eks Kepala Rumah Tangga Pemerintahan Daerah Maluku semasa Gubernur Latuharhary.

KETERANGAN TERTULIS/DOKUMENTASI

1. Riwayat Hidup almarhum Mr' J. Latuharhary, dokumentasi *Ny. H. Latuharhary*, dll. dokumentasi.
2. Sambutan *Ibu Latuharhary-Pattirajawane* pada Hari Peringatan Ulang Tahun ke 81 almarhum Mr. J. Latuharhary, tanggal 6 Juli 1961 di gedung Juang Jln. Abdul Rachman, Jakarta.
3. Keterangan tertulis (Ambon 17 Nopember 1981) dan dokumentasi *E. Lesilolo*, 62 tahun. Eks kepala Kelasykaran Maluku di Magelang, wakil ketua PIM Cabang Magelang, Pegawai Kantor Pembantu Gubernur Maluku di Magelang, Eks pegawai Kantor Gubernur Maluku.
4. Ceramah *Dr. F. Pattiasina*, Jakarta 7 September 1978 di Gdeung Juang Menteng 31, "Peranan API-AMBON".
5. Beberapa catatan mengenai perjuangan API-AMBON dan pemerintahan Gubernur Latuharhary oleh *Wim Tutupoly*, angkatan 45. Eks kepala Kantor Pembantu Gubernur Maluku di Jakarta. Eks pegawai Tinggi Pemerintahan Daerah Maluku di bawah pimpinan Gubernur Latuharhary.
6. Catatan *Z. Riupassa* (Tjaka) teman seperjuangan Latuharhary di Semarang dan *Mias Supusepa*.
7. Keterangan tertulis *H.A. Risakotta, MA*, Ambon 1-10-1981. Kepala SMA Ambon semasa Gubernur Latuharhary. Eks Kepala Perpustakaan Negara Ambon.
8. Keterangan tertulis *Nn. B. Wenno*, 79 tahun, kawan keluarga Latuharhary di Yogya dan Ambon (27-8-'81)
9. Keterangan tertulis *M. Oerip Kasansengari*, Surabaya 12 April 1976. Kawan Mr. Latuharhary di Malang.
10. Dokumentasi Persatuan Olahraga Maluku (POM), Jakarta, Pimpinan *Brigjen (purn) J.M. Pattiasina* mengenai perkumpulan "Jong Ambon".

Perpustakaan
Jember